



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN MASTERPLAN *SMART CITY*
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap adalah Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera, maka Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana pembangunan yang terarah, mandiri, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan *Smart City* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam Masterplan *Smart City*;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, digunakan sebagai panduan penyusunan Masterplan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan komponen lain yang relevan dengan perencanaan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Masterplan *Smart City* Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN MASTERPLAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap 2023-2026.
8. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
9. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

10. Masterplan *Smart City* adalah dokumen perencanaan mutisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kabupaten Cilacap yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Cilacap *Smart City*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan pengembangan Masterplan *Smart City* Daerah secara terpadu.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Pengembangan Masterplan *Smart City* Daerah;
 - b. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Living* dan *Smart Environment*;
 - c. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City*; dan
 - d. mendorong proses pengembangan *Smart City* Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 3

Masterplan *Smart City* Daerah memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyalarsan program perangkat daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Daerah.

Pasal 4

- (1) Masterplan *Smart City* mengacu pada prioritas kebijakan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah menuju Cilacap Kota Cerdas;
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*; dan
- c. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 6

- (1) Sistematika Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Buku 1 Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Daerah;
 - b. Buku 2 Masterplan *Smart City*;
 - c. Buku 3 *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Daerah; dan
 - d. Buku 4 *Quick Win Smart City* Daerah.
- (2) Rincian atau penjabaran sistematika Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan *Smart City* Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart City* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN MASTERPLAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari lingkungan provinsi Jawa Tengah, sebagai daerah yang paling luas di Jawa Tengah dengan Kota Cilacap sebagai Ibu Kotanya. Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat di sebelah Utara. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dinamis yang disertai perkembangan pembangunan pada berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kabupaten Cilacap terletak di antara 108⁰⁴-30⁰ - 109⁰³⁰30⁰ garis Bujur Timur dan 7⁰³⁰ - 7⁰⁴⁵20⁰ garis Lintang Selatan. Sebagai Kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 225.360,840 Ha atau sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memiliki 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 Kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang memiliki populasi terbesar di Jawa Tengah dengan penduduk berjumlah lebih dari 3 juta jiwa.

Secara geografis, Wilayah Cilacap terbagi menjadi dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut sedangkan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur sekitar 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.

Kabupaten Cilacap dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah meliputi pertanian, perikanan, dan tambang. Selain itu, Kabupaten Cilacap dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup baik seperti jaringan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah di dalamnya. Lebih jauh lagi, Kabupaten Cilacap memiliki beberapa objek wisata yang menarik seperti Pantai Teluk Penyu, Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara dengan pengamanan tingkat tinggi, serta berbagai situs bersejarah dan budaya lainnya.

Dalam sektor ekonomi, Kabupaten Cilacap memiliki beragam sektor yang berkontribusi, di antaranya pertanian, perikanan, industri, dan jasa. Perkembangan industri di Cilacap juga diwakili oleh adanya Kilang Minyak Balongan yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Secara keseluruhan, Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi serta pariwisata ditambah dengan lokasi yang strategis dan infrastruktur yang semakin berkembang. Dengan demikian, Kabupaten Cilacap sudah memiliki modal awal untuk menerapkan dan mengembangkan *Smart City*.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan pembangunan *Smart City*, sebuah Kabupaten/Kota perlu memiliki rancangan atau perencanaan yang komprehensif. Oleh karena itu, untuk mendukung proses pelaksanaan *Smart City*, Kabupaten Cilacap melakukan penyusunan buku Analisis Strategi *Smart City*. Penyusunan buku tersebut dimaksudkan sebagai panduan dasar dan instrumen pendukung bagi pemerintah daerah, tim penggerak dan pendamping, serta pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, *monitoring* hingga evaluasi pengembangan Kabupaten Cilacap berdasarkan konsep *Smart City*.

Penyusunan Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Cilacap merupakan langkah awal dalam membangun *Smart City* serta membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (*governance*) dan tata kelola (manajemen) pengembangan *Smart City* sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga, konsep *Smart City* dapat terlaksana secara maksimal baik sebagai solusi atas permasalahan maupun sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Cilacap.

Adapun tujuan utama disusunnya buku Analisis Strategis *Smart City* di antaranya sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen Analisis Strategis sebagai salah satu Master Plan *Smart City* Kabupaten Cilacap yang komprehensif dan aplikatif;
2. Tersedianya hasil analisis terhadap visi pembangunan daerah yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap serta keterkaitannya dengan dimensi *Smart City* untuk mewujudkan kesesuaian arah pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan *Smart City*;
3. Tersedianya hasil pengkajian kondisi dan perkembangan eksternal yang terjadi di Kabupaten Cilacap yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan peraturan hukum;
4. Tersedianya pengamatan terkait kesiapan Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan *Smart City* terhadap elemen utama kesiapan daerah, yaitu potensi alam, struktur daerah, infrastruktur, suprastruktur, dan budaya;
5. Tersedianya strategi pembangunan *Smart City* yang mencakup identifikasi kesenjangan beserta perumusan strategi pada *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) untuk menerapkan konsep *Smart City*;
6. Mewujudkan visi dan misi beserta sasaran pembangunan *Smart City* sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap.

BAB 2. ANALISIS MASA DEPAN

2.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah merupakan bentuk pemahaman mendalam terhadap tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah dalam memajukan dan membangun daerah tersebut ke arah yang lebih baik. Visi pembangunan daerah menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan proyek yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Secara umum, visi pembangunan daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahunan. Melalui analisis mendalam terhadap visi pembangunan daerah dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pencapaian visi tersebut. Analisis ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, program pembangunan yang efektif, dan upaya kolaboratif yang berkesinambungan dalam mewujudkan visi pembangunan yang diinginkan..

2.1.1. Visi Pembangunan Daerah dalam RPD

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cilacap belum menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisikan visi pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis visi dalam pembangunan daerah, penting untuk mencermati terhadap faktor penting dalam penyusunan visi daerah. Dalam penyusunan buku Master Plan *Smart City* didasarkan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan pengganti RPJMD. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 bahwa perencanaan daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan lain sebagainya ditetapkan dalam RPD sebelum tersusunnya RPJMD.

Dokumen RPD yang tidak memiliki visi dan misi pembangunan daerah digantikan melalui analisis terhadap harapan masa depan, permasalahan dan isu strategis, dan tujuan serta sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap. Analisis-analisis tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan yang melandasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, ide-ide dan inovasi yang dihasilkan dapat dijadikan pilar dalam perumusan dan penyusunan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan RPD tahun 2023-2026 yang merupakan RPD penjabaran dari periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, Kabupaten Cilacap memiliki visi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

“CILACAP YANG BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Sebagai visi pembangunan daerah dengan rentang waktu selama 20 tahun (2005-2025), Pemerintah Kabupaten Cilacap berkeinginan untuk mewujudkan amanat masyarakat dengan mengacu pada tujuan otonomi daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, visi pembangunan daerah tersebut juga mengacu pada visi dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, visi pembangunan daerah harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Untuk memahami Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap, dijelaskan pengertian secara rinci di bawah ini.

Cilacap Berbudaya: Masyarakat Kabupaten Cilacap diharapkan mampu untuk menjunjung tinggi nilai luhur budaya dan norma agama dalam perilaku sehari-hari. Kemudian dalam menjalani kehidupan berdampingan, masyarakat Kabupaten Cilacap diharapkan mampu untuk menciptakan kerukunan antar

umat beragama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap dituntut untuk dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berwibawa, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berjalan beriringan dengan penegakan supremasi hukum. Lebih jauh lagi, Kabupaten Cilacap mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan.

Cilacap Sejahtera: Dalam rangka mencapai kesejahteraan, Kabupaten Cilacap bercita-cita untuk memiliki stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan harapan selanjutnya untuk membangun perekonomian kerakyatan yang bertumpu pada potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dari segi infrastruktur yang diharapkan mampu berpedoman pada desain tata ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lebih jauh lagi, masyarakat Kabupaten Cilacap mampu untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi daerah sehingga memiliki daya saing dalam mendukung proses pembangunan.

Untuk merealisasikan visi jangka pembangunan jangka panjang Kabupaten Cilacap, maka diwujudkan melalui sembilan misi daerah, di antaranya sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai luhur serta kerukunan antar umat beragama ditandai dengan hubungan antar masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.**

Sebagai upaya dalam menjunjung tinggi budaya beserta nilai-nilainya, dapat direalisasikan melalui peningkatan budaya disiplin, budaya tertib hukum dan budaya hidup yang baik pada setiap individu dalam masyarakat, budaya disiplin dan tingginya etos kerja aparatur pemerintah daerah, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Budaya juga dapat diartikan dengan cara memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Cilacap yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan taat aturan hukum, memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama, mengembangkan semangat kekeluargaan, menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Cilacap.

2. **Menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.**

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, maka dilakukan perbaikan pada struktur kelembagaan untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat dan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada sistem anggaran yang akuntabel dan transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan guna mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan meningkatkan volume perputaran keuangan daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.

3. **Penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.**

Realisasi misi tersebut dapat dilakukan melalui pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum, tidak diskriminatif, berkeadilan dan berkesetaraan gender, memperhatikan upaya pemenuhan hak-hak anak dan memihak pada rakyat kecil merupakan wujud nyata penegakan supremasi hukum. Lebih jauh lagi, perlu dilakukan peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum, pemenuhan kebutuhan sarana utama serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum, mengoptimalkan program pemberantasan dan pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. **Menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah.**

Dalam menjaga stabilitas politik, upaya yang dapat dicapai adalah dengan menyeimbangkan peran dan keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan ditujukan agar para pemodal

tertarik untuk menanamkan investasi di Kabupaten Cilacap, sehingga perekonomian daerah menjadi lebih dinamis.

5. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing.

Upaya dalam peningkatan peran pemerintah melalui pengembangan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta pengembangan sentra-sentra industri yang berdasarkan demokrasi ekonomi agar produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

6. Meningkatkan kualitas ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian alam.

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki sasaran untuk mewujudkan usaha dengan memaksimalkan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada keseimbangan ekosistem dan pelestarian sumber daya alam melalui penerapan teknologi. Terlebih peran masyarakat dalam pembangunan merupakan pemegang kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

7. Membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan.

Dalam melakukan pembangunan daerah, maka dibutuhkan infrastruktur berupa *hard infrastructure* yang mencakup fasilitas-fasilitas fisik, maupun *soft infrastructure* berupa aturan-aturan sebagai produk hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang pembangunan. Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas baik berupa fasilitas fisik maupun produk hukum secara memadai, menjadi tuntutan yang harus dipenuhi guna menjamin terlaksananya proses pembangunan. Pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak harus semuanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Pembiayaan bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak lain, ataupun swadaya masyarakat.

8. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang yang menunjang kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan.

Wilayah yang dibangun dengan mempertimbangkan tata ruang yang ada secara baik dan benar akan menjamin terjadinya sinergi yang positif antar ruang yang ada, antar masyarakat, antar sumber daya ekonomi, dan aspek polusi yang ditimbulkan. Sebaliknya, akan terjadi sinergi yang negatif jika pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan tata ruang yang ada.

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan daerah bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, maupun dalam pembiayaannya. Perencanaan terpusat yang bersifat *top-down* akan menjauhkan masyarakat dari realitas kebutuhannya. Perencanaan yang *bottom-up* akan mendekatkan masyarakat dengan kebutuhan yang ada, masyarakat merasa memiliki perencanaan tersebut, kemudian merasa bertanggung jawab sehingga akan terjadi *check and balance* secara langsung dari segenap masyarakat yang terlibat, akibatnya kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan dan perencanaan yang ada dapat segera diketahui.

2.1.2. Pemetaan Visi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RPD

Melalui permasalahan dan isu strategis yang terdapat pada Kabupaten Cilacap serta visi pembangunan jangka panjang daerah, maka dilakukan pemetaan terhadap misi dan sasaran yang tertuang dalam Bab V RPD tahun 2023-2026. Dengan demikian misi dan sasaran tersebut dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam membangun *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan pemetaan misi dan sasaran RPD yang diklasifikasikan berdasarkan enam dimensi *Smart City*.

Tabel 1. Pemetaan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dengan Dimensi Smart City

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Berkaitan dengan Misi 2 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government”	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	✓					
					Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	✓					
					IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	✓		✓			
				Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	✓					
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	✓					
				Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	✓					
					Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	✓					
					Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	✓					
				Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	✓					

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
				kelitbangan dalam pembangunan							
2	Berkaitan dengan Misi 3 “Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”	Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah	Angka kriminalitas	Menurunnya gangguan keamanan di wilayah	Kasus konflik sosial					✓	
					Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten					✓	
3	Berkaitan dengan Misi 4 “Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional”; dan Misi 1 “Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga”	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah					✓	
					Rata rata Lama Sekolah					✓	
				Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup				✓	✓	
				Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender					✓	
				Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan			✓			
					Tingkat Pengangguran Terbuka			✓			
4	Berkaitan dengan Misi 4 “Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas dan tanpa migas) ; inflasi	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB		✓	✓			

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
	potensi lokal dan regional”	Kekuatan Lokal		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB		✓	✓			
				Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	Nilai investasi			✓			
				Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB			✓			
				Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		✓	✓			
5	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan				✓		
				Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		✓		✓		
				Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)				✓		✓

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
				Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan			✓	✓		
			Indek Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia						✓
			Vc Rasio	Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan				✓		
6	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri					✓	
7	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Penurunan Gas Rumah Kaca	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						✓

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
8	Berkaitan dengan Misi 3 “Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”	Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana						✓

*Dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sudah tidak berlaku dan digantikan dengan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing, 2023

Kesesuaian antara tujuan dan sasaran daerah dengan Smart City menunjukkan sejauh mana tujuan tersebut menggambarkan komitmen untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sudah mengakomodasi aspek-aspek yang terkait dengan konsep Smart City. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan penekanan pada peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas dengan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, dan kualitas layanan publik, baik melalui penggunaan teknologi maupun pengembangan sistem pelayanan yang efisien. Sehingga mampu mendorong pengembangan layanan publik yang terintegrasi, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Kemudian Kabupaten Cilacap juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan literasi digital, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan solusi inovatif. Hal tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang cerdas dan partisipatif dalam penggunaan teknologi. Selain itu, mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, mempromosikan inklusi digital bagi semua lapisan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui platform digital.

Lebih jauh lagi, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor kunci. Harapannya mampu untuk mengakomodasi upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik melalui teknologi digital, memperbaiki kualitas lingkungan melalui pengelolaan cerdas sumber daya, memperkuat infrastruktur transportasi yang terintegrasi, dan mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga meninjau peningkatan dan pembanguna terhadap perekonomian, wajah kota beserta pariwisatanya, serta keberlanjutan lingkungan melalui pembangunan Smart City.

2.1.3. Analisis Perilaku Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Analisis perilaku harapan masyarakat dan pemangku kebijakan melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan, aspirasi, dan harapan yang diungkapkan oleh masyarakat terkait pembangunan daerah. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik. Selain itu memungkinkan pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku harapan yang akan diwujudkan melalui pembangunan Smart City.

Secara umum, masyarakat Kabupaten Cilacap mengharapkan kemajuan daerah dalam setiap aspeknya. Dalam dimensi Smart Governance, masyarakat memiliki kebutuhan tinggi terhadap perbaikan tata kelola tradisional menjadi optimalisasi teknologi. Seperti pelayanan publik berupa administrasi yang lebih mudah, cepat, dan murah serta peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu juga perubahan yang diharapkan terjadi pada birokrasi yang lebih efisien serta pengambilan keputusan yang dapat mengakomodasi semua pihak.

Kabupaten Cilacap belum menemukan potensi-potensi yang bisa dijadikan daya saing daerah. Oleh karena itu, diharapkan mampu memiliki inovasi untuk membangun pariwisata Kabupaten Cilacap. Selain itu juga dapat memasarkan ekosistem bisnis daerah seperti produk-produk lokal unggulan Kabupaten Cilacap. Terakhir, harapannya dapat mewujudkan wajah kota dengan citra yang positif sehingga Kabupaten Cilacap mampu dikenal hingga bersaing dalam skala regional, nasional, dan internasional.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Cilacap diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah melalui industri dan transaksi hingga mampu membuat masyarakat menjadi sejahtera. Salah satu harapan masyarakat adalah mewujudkan industri yang berdaya saing sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Kemudian optimalisasi pada transaksi digital dan memiliki kemudahan dalam layanan permodalan.

Dalam menjalani kehidupan, Kabupaten Cilacap berharap untuk mendapatkan kelayakan taraf hidup masyarakat. Salah satunya melalui kelayakan pola hidup dengan tata ruang harmoni, kelayakan kualitas kesehatan dengan tersedianya makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, sarana prasarana olahraga, serta kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang maupun barang. Sementara dari sisi interaksi masyarakat, Kabupaten Cilacap diharapkan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui pengembangan komunitas masyarakat, mewujudkan ekosistem belajar yang positif, dan menciptakan sistem keamanan yang kuat.

Kemudian lingkungan adalah aspek penting lainnya dalam berkehidupan. Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan adanya lingkungan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan program proteksi lingkungan, mewujudkan tata kelola persampahan yang efektif, serta menciptakan energi baru terbarukan sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. Analisis Perilaku Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Dimensi Smart City	Analisis Perilaku Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah
Smart Governance	Pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan murah
	Birokrasi tidak rumit sehingga tidak harus melalui perantara
	Adanya peningkatan terhadap kualitas kebijakan
	Penyampaian aspirasi lebih mudah dan cepat ditanggapi
	Integrasi data dari berbagai aplikasi
Smart Branding	Kemudahan akses pada pusat perbelanjaan dengan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan instagram-able
	Eksplorasi tempat wisata dengan mudah
	Peningkatan, pengembangan, dan penataan objek-objek wisata
	Penyelenggaraan event-event kesenian skala nasional
Smart Economy	Adanya peningkatan pendapatan daerah terutama dari sektor pariwisata
	Kemudahan dalam akses layanan permodalan atau lembaga keuangan
	Transformasi pembayaran non-tunai
	Pengembangan kawasan industri sebagai kegiatan usaha industri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
	Penyediaan marketplace dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk berbisnis secara online
Smart Living	Puskesmas ramah anak, rumah ibadah ramah anak, dan sekolah ramah anak
	Peningkatan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB)
	Kecukupan gizi terutama bagi balita

	Terdapat sekolah siaga kependudukan
Smart Society	Peningkatan kelancaran lalu lintas, menurunnya angka kecelakaan, dan kerugian akibat kecelakaan
	Tidak adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Interaksi masyarakat yang harmoni
	Kesadaran masyarakat terhadap belajar atau pendidikan
Smart Environment	Penggunaan material limbah industri sebagai pengganti material konstruksi jalan
	Penggunaan platform moda sosio dalam mengadakan kontrol terhadap kebijakan pemerintah
	Pengembangan kelompok masyarakat dalam mengelola sampah
	Digital ekosistem tata kelola sampah

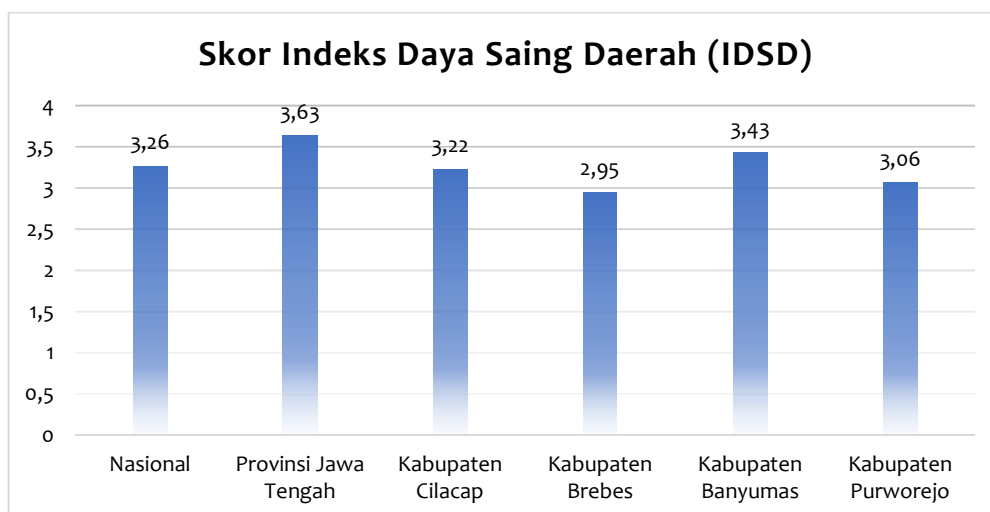
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

2.1.4. Analisis Daya Saing Daerah

Analisis daya saing daerah melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang perlu diatasi. Melalui analisis daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap beserta pemangku kepentingan lainnya dapat memahami posisi dan potensi Kabupaten Cilacap dalam bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Analisis ini akan membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain seperti Banyumas, Kebumen, dan Purworejo. Dalam konteks daya saing daerah, Kabupaten Cilacap memiliki keunggulan infrastruktur yang signifikan dengan adanya Pelabuhan Cilacap, yang merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Fasilitas ini memfasilitasi perdagangan dan distribusi barang, memberikan Cilacap keunggulan dalam akses logistik dibandingkan kabupaten tetangga. Selain itu, Kabupaten Cilacap adalah rumah bagi beberapa industri besar, termasuk Pertamina yang memiliki pabrik pengolahan minyak di Kabupaten Cilacap. Keberadaan industri-industri ini berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal dan mendorong lapangan kerja. Sementara kabupaten tetangga mungkin memiliki basis ekonomi yang lebih beragam, keberadaan industri besar di Kabupaten Cilacap memberikan keunggulan dalam hal penciptaan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

Kabupaten Cilacap juga memiliki beberapa destinasi wisata seperti Pantai Teluk Penydu dan Benteng Pendem. Meskipun kabupaten tetangga seperti Banyumas dan Kebumen juga memiliki destinasi wisata, Kabupaten Cilacap menawarkan variasi yang unik dalam hal wisata pantai dan sejarah. Sementara dalam hal potensi sumber daya alam, Kabupaten Cilacap memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Hal ini membedakan Kabupaten Cilacap dari kabupaten tetangga dan memberikannya keuntungan dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam.



Gambar 1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tetangga Tahun 2022

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022

Lebih jauh, berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2022, Kabupaten Cilacap berhasil mencetak angka 3,22 dalam skala maksimal 5 (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022). Meskipun prestasi ini memperlihatkan progres positif, masih terdapat ruang untuk peningkatan mengingat angka ini masih berada di bawah rata-rata daya saing nasional yang berada pada 3,26 dan rata-rata capaian daya saing Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 3,63.

Dalam konteks lokal, posisi Kabupaten Cilacap relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten tetangga. Secara spesifik, capaian Kabupaten Cilacap hanya berada di bawah Kabupaten Banyumas yang mencetak angka 3,43, namun berhasil mengungguli Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo dengan capaian masing-masing sebesar 3,05 dan 3,06. Setelah dilakukan analisis lebih dalam, diketahui bahwa capaian Kabupaten Cilacap yang belum mencapai puncaknya ini disebabkan oleh kontribusi yang kurang maksimal dari beberapa pilar. Salah satu di antaranya adalah pilar pasar produk dan kapabilitas inovasi yang hanya mencapai angka di bawah 2. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor jasa di Kabupaten Cilacap masih memiliki ruang peningkatan yang signifikan, termasuk melalui pengembangan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan, kemampuan, permasalahan, dan kapasitas daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa capaian positif yang menandakan potensi yang ada di Kabupaten Cilacap. Misalnya, ukuran pasar yang berhasil mencapai angka maksimal 5 menunjukkan bahwa potensi ekonomi di wilayah ini cukup besar. Selain itu, pilar kesehatan dan institusi yang mendapatkan nilai di atas 4 juga memberi gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan lembaga pemerintahan yang efektif di Kabupaten Cilacap. Ini adalah indikasi bahwa kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap terhadap pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, didukung oleh infrastruktur kesehatan dan lembaga pemerintahan yang solid.

2.1.5. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Seluruh Stakeholder yang Ada

Analisis kelembagaan dan pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan seluruh stakeholder yang ada melibatkan penilaian terhadap struktur, peran, fungsi, dan kinerja kelembagaan dan pemerintahan daerah dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Melalui analisis kelembagaan dan pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan seluruh stakeholder, Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja dan mengakomodasi kepentingan stakeholder yang beragam. Analisis ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan, program, dan inisiatif yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi stakeholder, serta memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pembangunan daerah.

Transformasi menjadi sebuah Smart City merupakan usaha yang melibatkan banyak pihak dan bukan hanya tanggung jawab satu entitas. Di Kabupaten Cilacap, ini berarti sebuah kolaborasi antara institusi pemerintah dan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi ini ditujukan untuk mengatasi tantangan yang melintasi berbagai sektor, suatu konsep yang dikenal sebagai *Cross Cutting*. Dalam konsep ini, pemerintah perlu bekerja sama, mendasarkan tindakannya pada strategi dan prioritas yang ditentukan bersama, dengan tujuan untuk menangani berbagai isu penting dan mempercepat pencapaian visi serta misi daerah melalui pemanfaatan teknologi dalam kerangka Smart City.

Kolaborasi antar-sektoral ini melibatkan koordinasi antara berbagai entitas pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang mendukung transformasi menjadi smart city. Melalui kerja sama ini, berbagai rintangan yang mungkin muncul dalam proses implementasi dapat ditangani dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, kerja sama ini juga mendukung partisipasi dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor bisnis, institusi pendidikan, dan lainnya. Umpan balik dan saran dari berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi menjadi smart city ini benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Kebijakan yang kokoh dan mengikat juga sangat penting untuk memastikan kerja sama ini berlangsung dengan konsistensi dan berkelanjutan, memastikan setiap entitas berkontribusi aktif dalam membantu Kabupaten Cilacap bertransformasi menjadi daerah yang cerdas. Jadi, kerja sama ini memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam konteks yang paling relevan dan menguntungkan bagi masyarakat Cilacap.

Sebagai contoh, pengembangan Smart City Kabupaten Cilacap akan mengimplementasikan program pendidikan digital untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sehingga, memungkinkan untuk melibatkan crosscutting antara beberapa dinas dan stakeholder, seperti:

- Dinas Pendidikan sebagai dinas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan implementasi program pendidikan di Kabupaten Cilacap.
- Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam memberikan dukungan teknologi dan infrastruktur, seperti akses internet dan platform belajar online.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan laboratorium komputer atau ruang belajar digital di sekolah.

- Dinas Kesehatan berkontribusi dalam memastikan kebijakan kesehatan dan keselamatan diimplementasikan dalam penggunaan teknologi pendidikan.
- Dinas Sosial membantu memastikan bahwa program ini dapat diakses oleh keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat yang rentan.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu dalam verifikasi data siswa dan memastikan semua siswa terdaftar.
- Perusahaan swasta dan NGO berkontribusi sebagai penyedia solusi teknologi pendidikan oleh sektor swasta dan organisasi nirlaba dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan platform dan materi belajar online.

Dalam konteks ini, crosscutting merujuk pada pendekatan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan bekerja sama dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan yang sama. Ini penting dalam program smart city karena banyak isu dan tantangan di kota modern memerlukan solusi yang melibatkan berbagai sektor dan departemen.

2.2. Analisis Kondisi Eksternal

Sebuah dokumen perencanaan yang ideal memerlukan tinjauan pada aspek internal dan eksternal yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah dimasa depan. Aspek eksternal dalam subbab ini akan dibahas dengan detail pada setiap *trend* pembangunan untuk memberikan gambaran hal di luar kontrol dari Diskominfo maupun pemerintah Kabupaten Cilacap yang nantinya perlu diantisipasi. Aspek di luar kontrol tersebut dapat menjadi hal positif yang mendorong pembangunan namun juga dapat menjadi hal negatif apabila pemerintah tidak dapat mengelolanya dengan baik. Analisis kondisi eksternal dalam bab ini dikategorikan dalam enam sub pembahasan yaitu: analisis *trend* pembangunan politik, analisis *trend* pembangunan ekonomi, analisis *trend* pembangunan sosial, analisis *trend* pembangunan teknologi, analisis *trend* pembangunan lingkungan dan analisis *trend* pembangunan legal/hukum.

2.2.1. Analisis Trend Perkembangan Politik

Politik merupakan salah satu aspek dengan pengaruh yang besar dalam dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk Kabupaten Cilacap. Dalam pelaksanaan *Smart City*, perlu adanya analisis terkait kondisi politik yang berkembang di Kabupaten Cilacap. Selain itu, perkembangan politik juga berpengaruh dalam implementasi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Berbagai kepentingan politik dapat memengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Sehingga, analisis terhadap perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap dinamika politik agar pengembangan *Smart City* dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat perubahan-perubahan kondisi politik.

Tabel 3. Daftar Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2023

Bupati	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati
H. Probo Yulastoro, S.Sos., M.M., M.Si.	2002	2007	H. Tohirin Bahri, B.A.
	2007	2009	H. Tatto Suwanto Pamuji
H. Tatto Suwanto	2009	2011	Pelaksana Tugas

Bupati	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati
Pamuji	2011	2012	-
	2012	2017	H. Akhmad Edi Susanto, S.T.
	2017	2022	Syamsul Auliya Rachman, S.STP., M.Si.
Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si	2022	Petahana	Penjabat Sementara Bupati

Sumber: Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2023

Kondisi perpolitikan di Kabupaten Cilacap cenderung statis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepala daerah yang menjabat lebih dari satu periode sejak tahun 2002. Kecenderungan ini dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Jika dilihat dari sisi positifnya, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap cenderung berkelanjutan dan tidak berubah-ubah. Sehingga, dapat tercipta kestabilan dalam kepemimpinan daerah dan dapat menghindari ketidakpastian yang terkait dengan pergantian kepala daerah secara teratur. Lebih jauh lagi, terdapat kesempatan untuk menerapkan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan. Sehingga, dapat mendukung program-program yang sedang berjalan dan memperkuat rencana jangka panjang untuk pembangunan dan perkembangan daerah.

Perpolitikan yang cenderung statis juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Hal tersebut di antaranya akan adanya kecenderungan dalam berpikir dan melakukan pendekatan dengan cara yang sama. Sehingga, terjadinya kemungkinan kurang terbuka terhadap ide-ide dan gagasan baru yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah. Selain itu, kepala daerah yang menjabat lebih dari satu periode akan berdampak negatif dalam mengurangi pihak oposisi untuk terlibat dalam politik atau mengabaikan mekanisme *checks and balances*. Kemudian hal tersebut akan mengarah negatif pada prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.

2.2.2. Analisis Trend Perkembangan Ekonomi

Trend Ekonomi Nasional

Trend ekonomi global dapat mempengaruhi *trend* ekonomi nasional maupun daerah. Dengan kata lain, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap yang maksimal diperlukan pemahaman tentang kerangka ekonomi regional, nasional dan global.

Kabupaten Cilacap menempatkan ekonomi dalam kerangka kebijakan utama dengan mempertimbangkan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal (RPD, 2023). Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2021, perekonomian Indonesia mencapai Rp 16.970,8 triliun dan PDB atas dasar harga konstan dilaporkan mencapai Rp 11.118,9 triliun. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi adalah pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial yaitu sebesar 10,46 persen. Sedangkan pada sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 24,04 persen sebagai pertumbuhan tertinggi. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen (YoY). Kondisi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,07 persen (YoY). Inflasi pada tahun 2021 dilaporkan oleh Bank Indonesia mencapai level 1,87 persen yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 1,68 persen.

Perekonomian global pada tahun 2021 mencapai 5,5 persen, dan perekonomian Indonesia mencapai 3,69 persen membaik dari tahun sebelumnya.

Trend Ekonomi Jawa Tengah

Status perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 3,32 persen (yoy). Kondisi ekonomi ini meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya yang dulu mengalami kontraksi 2,65 persen (yoy). Hal ini terjadi karena, pandemi COVID-19 telah meninggalkan dampak terhadap menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi. Pada tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah meningkat dibandingkan tahun 2020, dicirikan dengan berkurangnya jumlah pengangguran terbuka dari 1.214.342 jiwa (2020) menjadi 1.128.223 jiwa (2021).

Dilaporkan pula bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020 dari 101,49 menjadi 103,18. Peningkatan dianalisis karena naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP). Hortikultura dan Perikanan telah mendukung peningkatan ini.

Dalam dokumen RPD 2023, dilaporkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) selama lima tahun terakhir berfluktuasi antara 5,09 % hingga 5,55%. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Cilacap sebesar 5,55%, selanjutnya turun menjadi 5,09 % (2016) meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,33% dan di tahun 2019 menjadi 5,22%.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap mengalami penurunan /kontraksi sebesar -1,35 persen hal ini karena adanya pandemi Covid-19 dan adaptasi global. Namun demikian di tahun 2021 kondisi perekonomian di Kabupaten Cilacap semakin membaik dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,39 persen (lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,32 persen). Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila tingkat inflasi di daerah tinggi, karena peningkatan pendapatan masyarakat dirasakan lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Secara umum, tingkat inflasi di Kabupaten Cilacap relatif stabil, pada tahun 2019 sebesar 2,19% dan menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,71% kemudian naik lagi pada tahun 2021 menjadi 1,88%.

Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) Cilacap atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, sektor pertanian perikanan dan kehutanan menempati urutan pertama dalam kontribusinya. Sektor tersebut hampir mencapai 30 persen kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Cilacap. Urutan selanjutnya adalah industri pengolahan dan disusul oleh perdagangan besar, eceran dan sepeda motor yang masing-masing memberikan kontribusi kurang lebih 16 – 17 persen selama 2018 – 2022. Selama kurun waktu yang sama pola yang ditunjukkan dalam masing-masing sektor kontribusinya tetap sama, dimana Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tetap unggul. Sektor yang paling rendah kontribusinya adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Tabel berikut ini memberikan gambaran detail PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah).

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilacap Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022

Kategori (Category)	Lapangan Usaha (Industry)	Tahun (Year)				
		2018	2019	2020	2021*	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.960,45	6.304,27	6.633,23	6.820,73	7.390,02
B	Pertambangan dan Penggalian	1.213,77	1.269,25	1.299,99	1.369,12	1.321,38
C	Industri Pengolahan	3.028,69	3.286,11	3.289,33	3.552,55	3.931,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	6,95	7,05	7,41	7,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,73	8,19	8,81	9,41	9,66
F	Konstruksi	1.473,12	1.558,78	1.561,73	1.740,83	1.894,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.006,74	3.269,78	3.139,23	3.388,30	3.675,47
H	Transportasi dan Pergudangan	736,96	802,58	590,36	628,89	1.097,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	386,05	427,80	405,06	437,51	522,30
J	Informasi dan Komunikasi	556,57	628,69	701,40	744,06	763,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	587,83	618,39	631,07	672,13	734,15
L	Real Estate	312,48	332,04	332,02	342,57	363,86
M,N	Jasa Perusahaan	79,32	90,18	85,74	89,60	98,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	706,96	735,09	732,62	720,39	756,45
P	Jasa Pendidikan	1.315,59	1.457,26	1.480,56	1.497,09	1.534,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268,84	293,63	320,32	323,72	335,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	458,19	510,47	475,86	483,55	559,71
	Produk Domestik Regional Bruto	20.069,80	21.599,48	21.694,38	22.827,89	24.996,48

Catatan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilacap Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022

Kategori (Category)	Lapangan Usaha (Industry)	Tahun (Year)				
		2018	2019	2020	2021*	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.118,61	4.259,48	4.389,95	4.433,51	4.604,68
B	Pertambangan dan Penggalian	765,99	790,94	793,91	825,80	774,02
C	Industri Pengolahan	1.966,57	2.109,46	2.068,49	2.162,88	2.264,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	5,43	5,55	5,86	6,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	7,13	7,29	7,70	7,79
F	Konstruksi	1.012,81	1.066,57	1.064,51	1.145,23	1.165,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.430,27	2.579,71	2.455,38	2.604,99	2.711,05
H	Transportasi dan Pergudangan	626,65	670,73	477,71	492,24	810,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,43	339,82	318,75	338,01	387,68
J	Informasi dan Komunikasi	578,67	642,84	716,46	759,43	777,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	406,49	420,08	429,24	435,23	437,22
L	Real Estate	258,80	271,35	270,17	275,92	288,22
M,N	Jasa Perusahaan	57,51	63,51	59,11	60,93	64,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	491,85	504,08	496,67	493,08	501,29
P	Jasa Pendidikan	838,81	902,91	897,46	897,86	913,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,37	210,08	223,92	224,20	229,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	365,36	402,73	371,30	373,61	415,40
Produk Domestik Regional Bruto		14.438,15	15.246,87	15.045,88	15.536,48	16.359,11

Catatan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

2.2.3. Analisis Trend Perkembangan Sosial

Dalam kerangka nasional, Indeks Pembangunan Manusia memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/ daerah. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan sosial. 4 aspek dalam IPM yaitu, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berdasarkan data BPS Cilacap tahun 2022, selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022), total IPM Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan sejumlah 1,04, dari 69,95 ke 70,99. Peningkatan tersebut juga tercermin pada semua aspek pengukuran IPM di Kabupaten Cilacap.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2022

Komponen IPM/HDI Component	IPM Cilacap/HDI of Cilacap		
	2020	2021	2022
IPM/HDI	69.95	70.42	70.99
Angka Harapan Hidup (th)/Life Expectancy at Birth	73.73	73.90	74.07
Harapan Lama Sekolah (th)/Expected Years of Schooling	12.50	12.63	12.66
Rata-rata Lama Sekolah (th)/Mean Years of Schooling	6.97	7.09	7.18
Pengeluaran per Kapita/Per Capita Expenditure (Rp. 000)	10440.00	10534.00	10904.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, 2023

Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah IPM Indonesia yaitu 72,91 dan Provinsi Jawa Tengah dengan IPM 72,79. Secara khusus, Kabupaten Cilacap menduduki urutan ke 22 dari total 26 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Artinya, Kabupaten Cilacap masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan IPM daerah mereka. Cara untuk meningkatkan IPM adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk baik secara individu maupun sosial, khususnya fokus pada peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan masyarakat dalam sektor Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Masyarakat, serta Keadilan Gender pada perempuan dan Anak.

Kependudukan

Berdasarkan catatan BPS Kabupaten Cilacap tahun 2023, secara umum di tahun 2022, populasi penduduk Kabupaten Cilacap berjumlah 1.988.622 jiwa, terdiri atas 1.002.672 jiwa penduduk laki-laki dan 985.950 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut naik 1,28% dari tahun 2021. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2022 mencapai 930 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Cilacap Selatan dengan kepadatan penduduk 9.214 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Kampung laut 109 jiwa/km². Melihat *gap* kepadatan penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa potensi setiap kecamatan dalam pengembangan kota cerdas berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan tantangan penyediaan infrastruktur juga akan berbeda pada wilayah dengan kepadatan yang berbeda. Sebagai contoh, pemenuhan infrastruktur dasar, kebutuhan ruang, dll.

Untuk mendukung pengembangan kota cerdas, salah satu potensinya yaitu memiliki generasi yang melek informasi digital. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, usia penduduk Indonesia dibagi dalam 6 kelompok berbeda, yaitu: (i) *Baby Boomer* (1946-1964), (ii) *Generasi X* (1965-1980), (iii) *Generasi Y/Millennial* (1981-1996), (iv) *Generasi Z* (1997-2012), dan (v) *Generasi Post Z/Alpha* 2012 ke atas. Generasi yang dianggap mampu beradaptasi dengan teknologi digital dengan baik yaitu *Generasi Y/Millennial*. Sedangkan yang terlahir dengan kemampuan bawaan teknologi digital adalah *Generasi Z* dan *Alpha*. Sementara itu, data sebaran usia penduduk di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Sebaran generasi pada penduduk Kabupaten Cilacap dengan penyesuaian terhadap data BPS tahun 2022

Kelompok Generasi	Kelompok Usia (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sikap adaptasi terhadap teknologi
<i>Baby Boomers</i>	>60	128.919	133.816	262.735	rendah
Generasi X	45-59	187.870	197.512	385.382	sedang
Generasi Y	25-44	304.848	296.819	601.667	Tinggi
Generasi Z	10-24	235.035	218.882	453.917	Sangat tinggi
Generasi Alpha	0-9	146.000	138.921	284.921	Sangat tinggi

Sumber: Olah data penulis melalui Cilacap Dalam Angka 2023, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dominasi penduduk Kabupaten Cilacap saat ini yaitu oleh Generasi Y, kemudian disusul dengan jumlah Generasi Z dan Alpha. Sedangkan jumlah Generasi *Baby Boomers* dan Generasi X masih di bawah jumlah Generasi Z dan Alpha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi adaptasi penduduk Kabupaten Cilacap terhadap teknologi cukup tinggi.

Sektor Pendidikan

Pada sektor pendidikan formal di Kabupaten Cilacap, berdasar data pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud, pada tahun 2022 terdapat 1.034 Sekolah Dasar (SD), 197 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 42 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 67 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebar di 24 Kecamatan. Dari perbandingan antar data tersebut, ada selisih jumlah kebutuhan sekolah lanjutan (SMP-SMA-SMK) dibandingkan dengan jumlah Sekolah Dasar. Meskipun begitu, data ini belum masuk ke jumlah kelas dan rombongan belajar yang tersedia pada setiap jenjang.

Sementara pada sektor pendidikan non-formal dan informal, terdapat beberapa Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap. SKB ini bergerak di bidang

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C)
- Pendidikan Keaksaraan (Keaksaraan Fungsional/KF)
- Kursus Ketrampilan (Pendidikan Kecakapan Hidup/*Life Skills*)
- Kelompok Berlatih Olahraga (KBO)
- Pendidikan Perempuan
- Pembinaan Generasi Muda

Selain memiliki 2 kampus utama SKB di Cilacap Utara dan Jeruklegi, SKB juga diselenggarakan pada tingkat kecamatan. SKB berperan untuk pendidikan formal, khususnya bagi generasi yang diharapkan membawa perubahan pada pembangunan digital. Di Kabupaten Cilacap masih tampak di antara rentang usia 30-49 tahun ada penduduk yang belum melek huruf. Sehingga ada potensi angka ini menghambat pengembangan kota cerdas meskipun persentasenya kecil.

Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Cilacap 2021 dan 2022

Kelompok Umur	Tahun	
	2021	2022
15-19	100	100
20-24	100	100
25-29	100	100
30-34	100	96,35
35-39	99,72	97,45
40-44	98,71	97,47
45-49	98,3	99,28
50+	90,54	88,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, 2023

Indikasi kesiapan kota cerdas dari sudut pandang SDM dapat dilihat juga dari tingkat partisipasi sekolah. Dari tabel di bawah, di tahun 2022 tampak bahwa hampir semua anak mengenyam pendidikan formal pada rentang usia sekolah dasar dan menengah (7-15 tahun). Sedangkan pada sekolah lanjutan atas (16-18) angka partisipasi sekolah belum maksimal, masih ada 32,34% penduduk yang tidak bersekolah lagi. Sementara yang tampaknya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (19-24) baru mencapai angka 22,96%. Kondisi ini dirasa perlu pembenahan lebih lanjut.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang masih sekolah usia 7-24 tahun di Kabupaten Cilacap

Kelompok Umur	2022		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Laki-Laki			
7-12	0,00	100	0,00
13-15	0,99	97,68	1,33
16-18	0,00	61,32	38,68
19-24	0,00	21,46	78,54
7-24	0,15	68,25	31,60
Perempuan			
7-12	0,05	99,95	0,00
13-15	0,00	100	0,00
16-18	0,00	75,72	24,28
19-24	0,99	24,44	74,57
7-24	0,35	70,47	29,17
Laki-Laki + Perempuan			
7-12	0,02	99,98	0,00
13-15	0,49	98,85	0,66
16-18	0,00	67,66	32,34
19-24	0,50	22,96	76,54
7-24	0,25	69,32	30,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, 2023

Tabel 10. Perguruan Sekolah Kejuruan di Kabupaten Cilacap tahun 2022 yang Memiliki Jurusan Berpotensi untuk Mendukung Pengembangan Teknologi Digital

Nama Sekolah	Negeri/ Swasta	Jurusan
SMK YPIA CIMANGGU	Swasta	Multi Media
SMK YPE SAMPANG	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK YPE KROYA	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK YOS SUDARSO JERUKLEGI	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK WIJAYA KUSUMA CILACAP	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK TARBIYATUL ISLAM KAWUNGANTEN	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK TAMTAMA KROYA	Swasta	Multimedia
SMK TAMTAMA 2 SIDAREJA	Swasta	Teknik Audio Video
SMK TAMTAMA 1 SIDAREJA	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK SRI MUKTI CILACAP	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK NEGERI 1 WANAREJA	Negeri	Multimedia
SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN	Negeri	Multimedia Animasi
SMK NEGERI 1 CILACAP	Negeri	Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia
SMK NEGERI 1 BINANGUN	Negeri	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK MUHAMMADIYAH SAMPANG	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK MUHAMMADIYAH MAJENANG	Swasta	Rekayasa Perangkat Lunak Multimedia
SMK MIGAS MUHAMMADIYAH CILACAP	Swasta	Multi Media
SMK MA'ARIF 1 KROYA	Swasta	Teknik Audio Video
SMK MANGGALA TAMA BINANGUN	Swasta	Multimedia
SMK KOMPUTAMA PESAHANGAN	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK KOMPUTAMA MAJENANG	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan Animasi
SMK KOMPUTAMA JERUKLEGI	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK KARYA MANDIRI NUSAWUNGU	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK ISLAM AR ROYYANNA KAWUNGANTEN	Swasta	Multimedia
SMK FATAHILLAH CIPARI	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK FARMASI MAJENANG	Swasta	Rekayasa Perangkat Lunak
SMK Dr. SOETOMO CILACAP	Swasta	Multimedia
SMK DIPONEGORO MAJENANG	Swasta	Multimedia
SMK DIPONEGORO CIPARI	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan
SMK AMIRUL MUMININ SIDAREJA	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia
SMK ALMA ATA MAJENANG	Swasta	Multi Media
SMK 18 LPPM RI SIDAREJA	Swasta	Teknik Komputer dan Jaringan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, 2023

Pada jenjang Perguruan Tinggi, dari data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah pada tahun 2018 dan data lapangan tahun 2023, ditemukan 12 Perguruan Tinggi. Di

antaranya 1 merupakan Universitas, 3 Akademi, dan 8 Sekolah Tinggi dengan berbagai bidang ilmu.

Tabel 11. Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap tahun 2023

No	Jenis Perguruan Tinggi	Nama Perguruan Tinggi
1	Universitas	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
2	Akademi	Akademi Kebidanan Dulang Mas
3		Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap
4		Akademi Maritim Nusantara Cilacap
5	Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap
6		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
7		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas
8		Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darussalam Cilacap
9		Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang
10		Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang
11		Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Cilacap
12		Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang

Sumber . LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah, 2018 dan observasi penulis, 2023

Sektor Kesehatan

Peningkatan status kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia pada aspek lainnya, seperti misalnya aspek pendidikan dan tenaga kerja. Untuk dapat menunjang peningkatan status kesehatan yang signifikan diperlukan adanya sarana kesehatan yang memadai. Pada tahun 2022 di Kabupaten Cilacap terdapat 12 Rumah Sakit yang terletak di 8 kecamatan, 38 Puskesmas dan 73 Puskesmas pembantu yang terletak di seluruh kecamatan pada Kabupaten Cilacap.

Sebagai kota pesisir dan kota industri, muncul permasalahan khas pada kesehatan masyarakat yaitu persentase penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kondisi ini seyogyanya perlu dilihat lebih serius karena secara jangka panjang dapat mempengaruhi SDM yang dibutuhkan untuk perkembangan wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap menduduki urutan ke 20 setelah di tahun 2022, yaitu sebesar 11,02 persen dengan jumlah sekitar 190,96 ribu jiwa. Angka ini masih sedikit lebih besar dari rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Tengah di angkat 10,93%.

Tabel 12. Perkembangan kesejahteraan masyarakat Cilacap tahun 2020-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	351.735,00	198,60	11,46
2021	363.367,00	201,71	11,67
2022	384.955,00	190,96	11.02

Sumber. Cilacap dalam Angka 2023

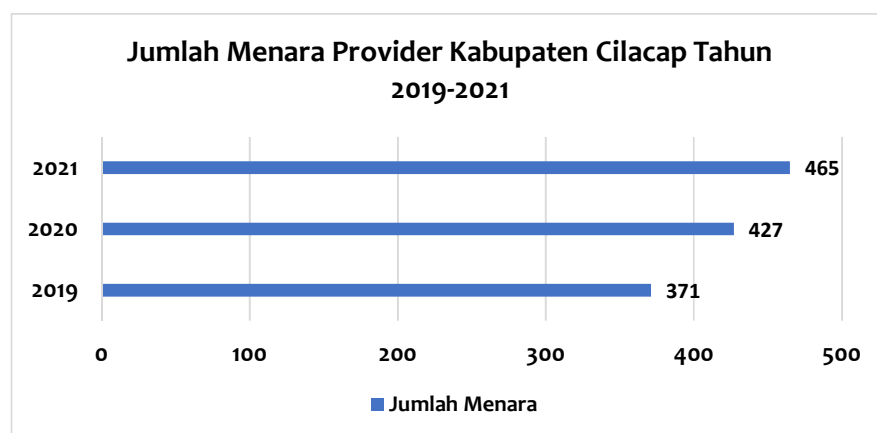
Dari data tersebut tampak bahwa tidak banyak perubahan persentase kemiskinan dari tahun 2020-2022, bahkan cenderung terjadi peningkatan di tahun 2021. Tentu saja data ini harus dibandingkan Kembali terhadap data sebelum terjadinya pandemic Covid-19 yang secara global menyebabkan perekonomian jatuh, menurunnya kesempatan kerja, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, dan secara langsung berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Asumsi tersebut diperkuat dengan menurunnya persentase kemiskinan pada tahun 2022 yang diduga berhubungan erat dengan era kenormalan baru, yaitu mulai kembalinya aktivitas masyarakat perlahan seperti semula.

Keadilan Gender pada Perempuan dan Anak

Melihat Kembali ke tabel 8, yaitu perbandingan angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-24 tahun antara laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa presentase perempuan yang masih bersekolah hingga usia 24 tahun justru lebih tinggi daripada laki-laki. Meskipun selisih jumlahnya tidak terlalu signifikan, artinya kabupaten Cilacap tidak membuka peluang dalam batasan Pendidikan bagi perempuan. Selain pendidikan, Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan reproduksi khususnya pada perempuan dengan mengkampanyekan program-program Keluarga Berencana, demi mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

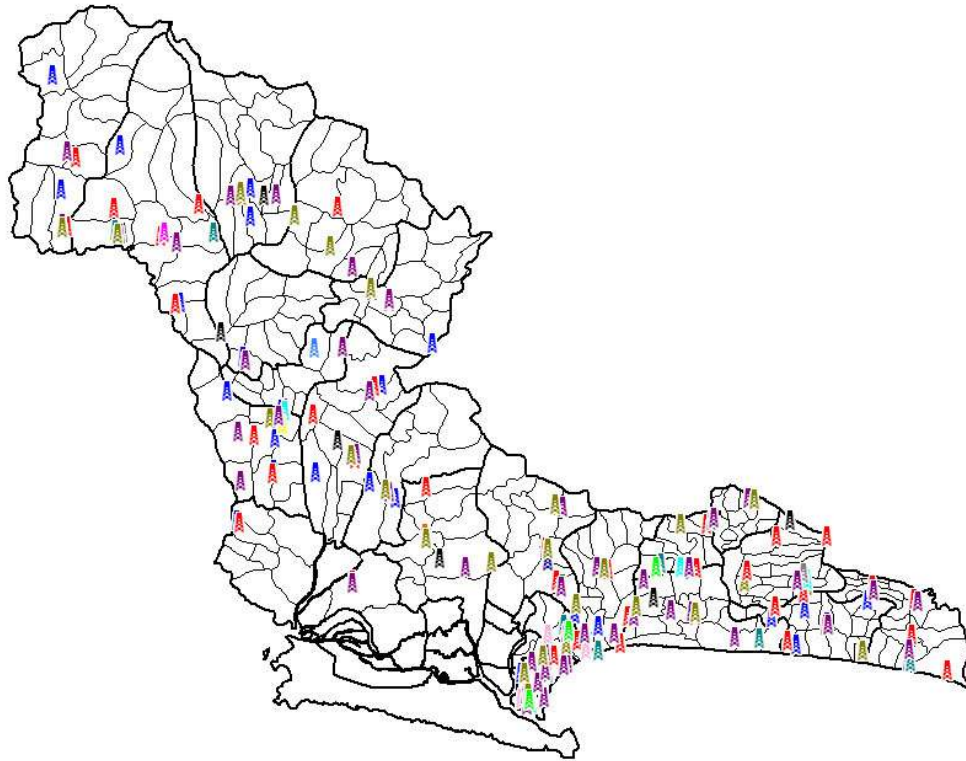
2.2.4. Analisis Trend Perkembangan Teknologi

Salah satu penanda adanya perkembangan teknologi yaitu ketersediaan Menara *Provider* dan Menara *BTS (Base Transceiver Station)* di setiap daerah. Dari data Diskominfo Kabupaten Cilacap, dari tahun 2019 ke 2021, terdapat penambahan secara signifikan Menara *provider* di Kabupaten Cilacap, naik sejumlah 94 dari 371 ke 465.



Gambar 2. Data jumlah Menara *Provider* di Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2021

Sumber. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, 2022



Gambar 3. Sebaran BTS di Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Sumber. Diskominfo Cilacap, 2022

Penambahan menara BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Cilacap dapat berdampak signifikan terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan pemerintah, terutama dalam konteks pengembangan Smart City. Menara BTS dapat memperluas cakupan dan kecepatan internet, yang akan memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan digital dan informasi online. Ini dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi warga yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan jaringan yang lebih baik, pemerintah dapat menyediakan layanan digital yang lebih efisien dan efektif, seperti pengajuan permohonan online, pembayaran pajak, dan akses ke data publik. Ini tidak hanya akan membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses, tetapi juga akan mempercepat proses dan mengurangi birokrasi.

Menara BTS akan memfasilitasi implementasi berbagai teknologi dan aplikasi Smart City, seperti sensor IoT (*Internet of Things*) untuk pengawasan lingkungan, manajemen lalu lintas *real-time*, dan sistem peringatan dini untuk bencana alam. Ini akan membantu pemerintah lokal untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Kemudian jaringan yang lebih baik dapat mendukung inisiatif pendidikan dan pelatihan digital, membantu meningkatkan keterampilan digital masyarakat dan mempersiapkannya untuk ekonomi digital masa depan.

2.2.5. Analisis Trend Perkembangan Lingkungan

Trend Pembangunan Lingkungan Nasional

Secara global, lingkungan alam mengalami dinamika yang terus berubah sepanjang waktu. Aktivitas manusia di atas muka bumi telah memberikan dampak pada tekanan terhadap ekosistem baik darat, laut maupun udara. Bumi dieksplorasi untuk menyuplai kebutuhan manusia baik ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan. Isu lingkungan global dapat menjadi faktor penekan dalam transaksi ekonomi di dunia (DPR.go.id, 2023). Tak dapat dihindari, kegiatan manusia di seluruh dunia telah memberikan dampak lingkungan hidup. Beberapa masalah lingkungan hidup yang saat ini masih dihadapi oleh dunia adalah: pemanasan global atau meningkatnya suhu rata-rata bumi, adanya penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca dan kejadian hujan asam.

Pemerintah Indonesia telah mengatur sumber daya alam dan penggunaannya untuk dapat dimanfaatkan tanpa meninggalkan dampak lingkungan yang tinggi. Usaha ini terus dilakukan meskipun masih terdapat kekurangan. Fungsi pemerintah di antaranya adalah untuk mengatur dan mengembangkan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia juga mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan kembali sumber daya alam dan sumber daya genetika, pemerintah juga mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum dalam pemanfaatan sumber daya buatan, termasuk genetika. Selain itu pemerintah harus mengendalikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, serta pemerintah dapat mengupayakan pendanaan bagi pelestarian lingkungan hidup dengan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Muharuddin, 2019).

Berdasarkan data dari WALHI aktivitas industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam dapat berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida. Selain itu, industri ekstraktif dapat memperparah peningkatan pemanasan global sehingga dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat. Lebih lanjut, data IPBES 2018 menerangkan bahwa setiap tahunnya seluas 680 ribu hektar hutan Indonesia hilang, yang mana merupakan terbesar di region Asia Tenggara. Lebih parang, data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK menunjukkan bahwa dari 105 sungai, 101 sungai diantaranya tercemar sedang hingga berat.

Trend Pembangunan Lingkungan Kab. Cilacap

Untuk *trend* pembangunan Lingkungan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan/hutan. Pada tahun 2017, pengukuran IKLH mengalami peningkatan dari 68,06 persen menjadi 71,93 pada tahun 2021.

Pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 76,3 persen sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 80,09 persen. Untuk Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuasi tiap tahunnya, misalnya pada tahun 2017 adalah 48 persen, lalu turun menjadi 47,71 persen pada tahun 2018, lalu kembali naik menjadi 49,39 persen pada tahun 2021. Berbeda dengan IKTL atau Indeks Kualitas Tutupan Lahan, terus mengalami kenaikan pada tiap tahunnya yaitu dari 77 di tahun 2017 menjadi 82,72 di tahun 2021.

Selain melihat IKLH, kondisi lain yang bisa diamati dan dijadikan indikator pembangunan lingkungan Kabupaten Cilacap adalah pengelolaan sampah. Berdasarkan dokumen RPD kondisi volume sampah semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan usaha. Aspek yang dilihat adalah persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA. Upaya pengangkutan sampah pada tahun 2017 - 2020 relatif mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Persentase pengangkutan sampah mencapai 45,44 persen yang kondisi ini meningkat menjadi 65,05 persen di tahun 2021. Sedangkan, pengurangan sampah di perkotaan juga mengalami fluktuasi. Persentase pengurangan sampah perkotaan tercatat 8,40 persen pada tahun 2017, naik menjadi 13,50 persen di tahun 2021. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya upaya perbaikan dengan implementasi 3 R (*reuse, reduce and recycling*) di perkotaan.

Tabel 13. Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	8,40	9,14	9,26	12,6	13,50
2.	Persentase pengangkutan sampah	%	45,44	47,79	45,88	62,4	65,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 2022

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2023 Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan di Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Kabupaten Cilacap dalam upaya konservasi lingkungan. Selain itu, saat ada pengaduan dari masyarakat tentang kasus lingkungan hidup tercatat 100% kasus pengaduan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tertangani dengan baik.

Saat ini pengelolaan limbah di Kabupaten Cilacap terutama B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) mencapai 16,3 persen. Target perusahaan yang teridentifikasi di Kab. Cilacap yang seharusnya memiliki ijin pengelolaan limbah B3 adalah 1.003 perusahaan.

Dari sisi pendidikan lingkungan, *trend* yang ada di Kab Cilacap menunjukkan adanya upaya perbaikan. Terdapat tiga metode dalam Pendidikan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Cilacap diantaranya dengan Sekolah Adiwiyata (pendidikan mulai usia dini), mendorong tumbuhnya kelompok peduli lingkungan dan jumlah rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R. Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan mengalami peningkatan sejak Tahun 2017 yang hanya berjumlah 26 kelompok menjadi 132 kelompok pada Tahun 2021, sekolah adiwiyata mengalami peningkatan, dari 47,22 persen pada tahun 2017 menjadi 68,3 persen pada tahun 2021, sedangkan jumlah RT yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021.

Isu lain yang penting ditampilkan adalah upaya pemerintah Kab. Cilacap dalam pengurang gas rumah kaca. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca untuk tahun 2020-2030, Kab. Cilacap menargetkan penurunan emisi sebesar 20,8 persen pada tahun 2030 atau setara dengan 16.664,6 Gg dari total emisi sebesar 80.199,47 Gg. Sedangkan, *baseline* emisi di

Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 adalah sebesar 35.066,72 Gg . Berdasarkan laporan, dari 5 sub sektor penghasil emisi gas rumah kaca, sektor energi merupakan penyumbang terbesar. Pada tahun 2020 sektor ini menyumbang kontribusi sebesar 91 persen (31.642,92 Gg). Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membuat Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, ini menunjukkan komitmen Cilacap dalam mendukung ,Pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim dunia. Pemerintah RI menyatakan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia sebagai bagian dari komitmen pada *Conference of the Parties* (COP). Oleh karena itu, RAD Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Cilacap, difokuskan untuk berkontribusi pada Kebijakan Prioritas nasional sebagaimana yang tertuang dalam NDC dimana mencakup sektor air, pertanian dan kesehatan.

2.2.6. Analisis Trend Perkembangan Law/Legal

Sebuah kebijakan merupakan dasar dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, program, pekerjaan, atau cara-cara bertindak yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dalam implementasi kegiatan tersebut. Dalam pengembangan *Smart City*, peraturan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah dapat menjadi dasar dan pendukung dalam pelaksanaannya. Dengan adanya regulasi hukum yang menaungi, maka akan tercipta tata pemerintahan yang baik. Terdapat beberapa regulasi hukum yang melandasi pelaksanaan *Smart City* di Indonesia, di antaranya:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Lebih jauh lagi, untuk merincikan standar dan indikator bagi Kabupaten/Kota sebagai bentuk kelayakan dalam mengadopsi *Smart City*, pada tahun 2020 ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang merujuk langsung dari *International Standard Organization* (ISO). Terdapat dua SNI ISO, yaitu SNI ISO 37120:2018 tentang Pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup, serta SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas. Melalui peraturan dan SNI tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *Smart City* dengan baik dan terarah.

Secara umum, perkembangan produk hukum di Kabupaten Cilacap dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal tersebut dapat mengindikasikan pemenuhan kebutuhan bagi daerah dan masyarakat. Meskipun memiliki kuantitas yang banyak dalam mengeluarkan regulasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap harus memperhatikan kualitas pada

produk hukum yang dikeluarkan. Peningkatan kualitas hukum dapat dilakukan dengan cara pelibatan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan serta pengkajian teknokratik secara rinci. Dengan perkembangan produk hukum yang ada, diharapkan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Cilacap mampu berjalan searah dengan rencana pembangunan daerah dan mampu memenuhi kebutuhan serta mengatasi permasalahan daerah dan masyarakat di dalamnya.

Tabel 14. Perkembangan Produk Hukum Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2023

Jenis Produk Hukum	Jumlah per Tahun			
	2020	2021	2022	2023*
Peraturan Daerah	7	8	11	5
Peraturan Bupati	120	131	102	5
Keputusan Bupati	-	-	-	-
Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	-
Jumlah	127	139	113	10
Total	389			

(*angka sementara)

Sumber: JDIH Kabupaten Cilacap, 2023

BAB 3. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

3.1. Aspek Kondisi Alam (*Nature*)

Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif tentang kesiapan daerah, diperlukan identifikasi kondisi alam. Dalam hal ini kondisi alam akan dibahas dalam cakupan letak dan batas wilayah; topografi dan hidrologi; dan pemanfaatan lahan.

3.1.1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Cilacap terletak di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kabupaten terluas dan terletak pada di posisi barat daya Provinsi Jawa Tengah. Terletak diantara 7°30' dan 7°45'20" Lintang selatan dan antara 108°4'30" dan 109°30'30" Bujur Timur. Luas Kabupaten Cilacap adalah 6,48 persen dari luas seluruh Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Cilacap terdapat 24 Kecamatan dan 284 desa. Secara geografis sebagian besar wilayah Cilacap berada di Pulau Jawa, namun terdapat Pulau Nusakambangan yang berada di bagian selatan Cilacap dengan luas 115,00 Km² yang terpisah dari Pulau Jawa (BPS, 2021).

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Cilacap memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Banyumas; Selatan - Samudera Indonesia; Barat - Provinsi Jawa Barat; Timur - Kabupaten Kebumen. Gambar 3 di bawah ini adalah peta Kabupaten Cilacap.



Gambar 4. Peta Kabupaten Cilacap

Sumber: BPS.go.id (2023)

3.1.2. Topografi, Hidrologi dan Iklim

Sebagaimana iklim di Indonesia, Cilacap memiliki iklim tropis dengan dua musim hujan dan musim kering. Posisi Cilacap unik karena terdapat sebagian kawasan yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan memanjang hingga di tengah Pulau Jawa. Hal ini membuat topografi dari Kabupaten Cilacap cukup lengkap, dari daerah pantai, daerah aliran sungai, perbukitan dan dataran.

Sepanjang tahun 2022, curah hujan terbesar terjadi di Bulan November yang tercatat 799,60 mm, sementara hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Desember sebanyak 31 hari. Suhu minimum sepanjang tahun 2022 terjadi pada bulan Juli (21,60°C) dan suhu maksimum terjadi pada Bulan April sebesar 34,00°C. Rata-rata suhu udara pada tahun 2022 sekitar 26,47-28,31°C.

3.1.3. Pemanfaatan Lahan

Dalam penyusunan Master Plan Smart City diperlukan pemahaman tentang penggunaan lahan sebagai kondisi awal. Keberadaan lahan yang luas dan masih produktif dapat mendukung pengembangan Smart City. Untuk Kabupaten Cilacap bentuk penggunaan lahan sangat bervariasi namun masih didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah. Tabel di bawah ini memberikan detail penjelasan luasan penggunaan lahan berdasarkan data BPS.

Tabel 15. Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2022

Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		Luas
	Satu kali	Dua kali	>2kali	Ditanami lainnya	Tidak Ditanami	
Lahan Pertanian Sawah						
a. Irigasi	2.251	39.317	3.666	33	-	45,267
b. Tadah Hujan	5.641	14.674	43	-	-	20.358
c. Pasang Surut	536	82	-	-	-	618
d. Rawa Lebak	284	-	-	-	-	284
Jumlah Lahan Pertanian Sawah	8.712	54.073	3.709	33	-	66.527
Lahan Pertanian Bukan Sawah						
a. Tegal/Kebun						40.335
b. Ladang/Huma						962
c. Perkebunan						12.667
d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat						7.623
e. Padang Penggembalaan/ Padang Rumput						--
f. Hutan Negara						30.208
g. Sementara tidak diusahakan						136

Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun Ditanami Padi	Tidak Ditanami Padi	Luas
h. Lainnya (Tambah/Kolam, Empang, Hutan Negara dll)			12.205
Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah			104.136
Lahan Bukan Pertanian			43.186
Luas Total			213.849

Sumber: BPS, 2021 dan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap

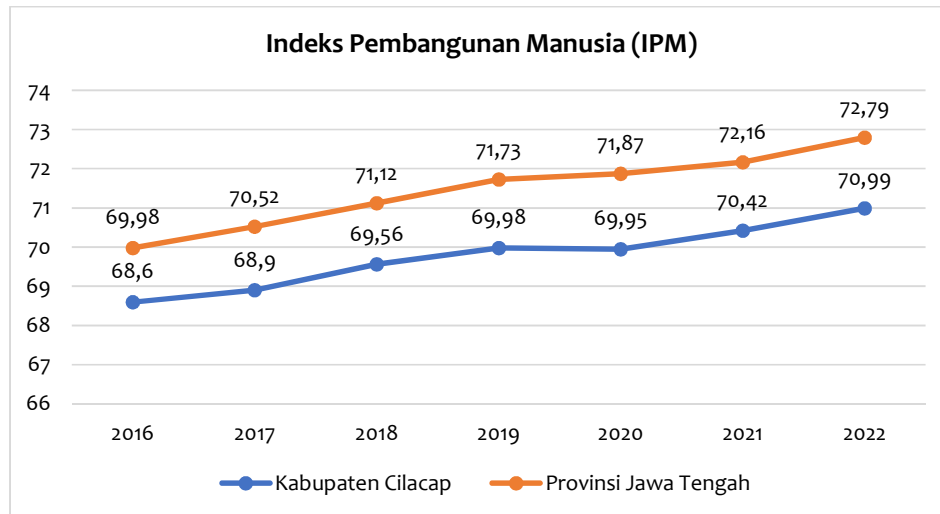
Penggunaan lahan di Kabupaten Cilacap dibagi menjadi tiga yaitu lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Untuk lahan pertanian sawah klasifikasi yang digunakan adalah sawah irigasi sebesar 45.267 ha, lahan tadah hujan sebesar 20.358 ha, lahan pasang surut sebesar 618 ha, sawah rawa lebak seluas 284 ha, sehingga total jumlah lahan pertanian sawah adalah 66.527 ha. Sedangkan untuk lahan pertanian bukan sawah, tegal sebanyak 40.335 ha, ladang/huma seluas 962 ha, perkebunan seluas 12.667 ha, ditanami pohon atau hutan rakyat seluas 7.623, padang penggembalaan atau padang rumput tidak ada, hutan negara seluas 30.208, sementara tidak diusahakan seluas 136 ha, lainnya seperti tambak/kolam, empang, hutan negara seluas 104.186 ha. Kemudian untuk lahan bukan pertanian seluas 43.186 ha. Oleh karena itu total dari luasan Kabupaten Cilacap adalah 213.849 ha yang keseluruhannya terbagi dalam kategori di atas.

3.2. Aspek Struktur

Dalam mengimplementasikan *Smart City*, perlu adanya analisis terkait aspek struktur yang meliputi kondisi sumber daya manusia, sumber daya pemerintahan, serta keuangan dan anggaran daerah di Kabupaten Cilacap. Kapasitas masyarakat secara umum, pegawai pemerintahan, serta keuangan dapat menentukan sejauh mana kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan *Smart City*. Selain itu juga dapat diketahui potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih mendalam.

3.2.1. Sumber Daya Manusia

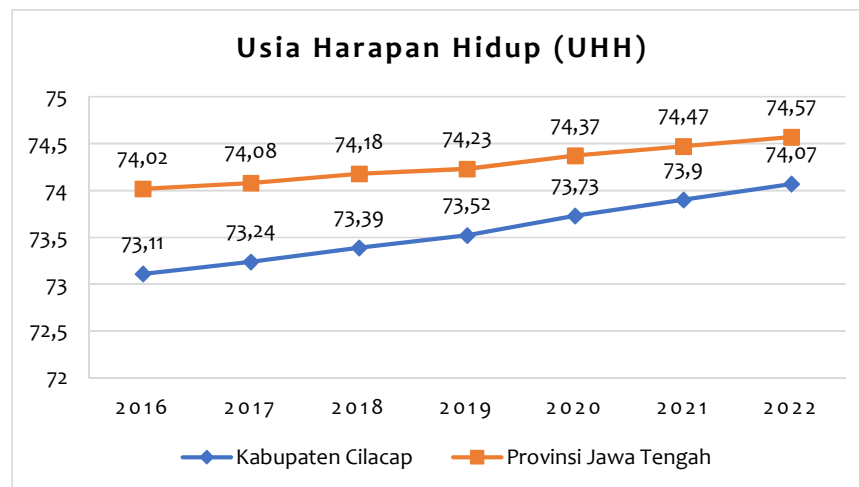
Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya manusia yang paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator makro dalam mengukur tingkat capaian kinerja pembangunan manusia. Melalui IPM menentukan level pembangunan suatu daerah hingga secara nasional. IPM juga dapat memberikan pengukuran secara komprehensif tentang kemajuan pembangunan suatu negara. Lebih jauh lagi IPM memberikan panduan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan manusia yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Selain itu IPM juga dapat mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap pencapaian pembangunan.



Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

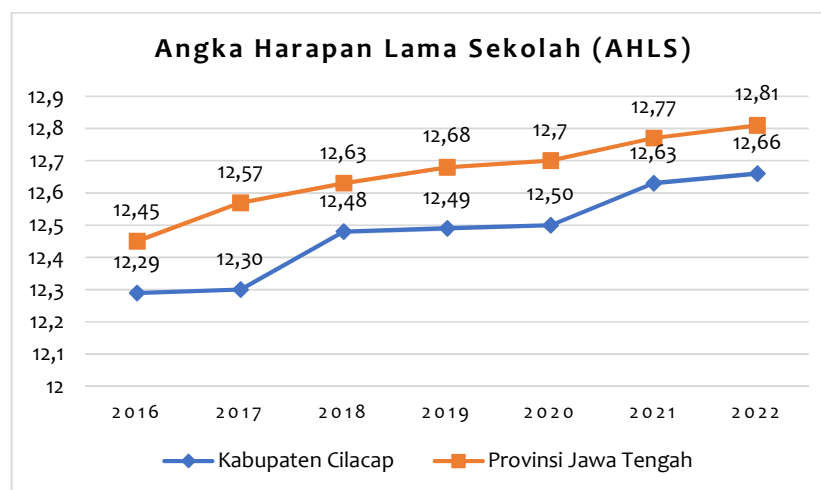
Angka IPM Kabupaten Cilacap cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Cilacap mencapai angka 70,99 meningkat sebanyak 2,39 dari tahun 2016 sebanyak 68,60. Peningkatan angka IPM dipengaruhi oleh aspek pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Meskipun menunjukkan tren yang meningkat, IPM Kabupaten Cilacap masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan dari segi ekonomi.



Gambar 6. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

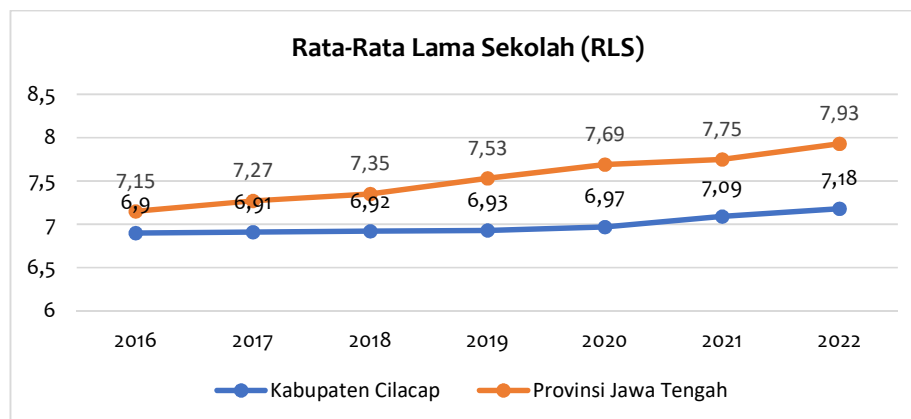
Salah satu komponen yang berpengaruh dalam IPM adalah derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan angka Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka UHH bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan derajat kesehatan. Di Kabupaten Cilacap, angka UHH terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, angka UHH berada di angka 73,11 kemudian meningkat di tahun 2022 hingga 74,07. Pada kenyataannya, peningkatan tersebut belum mampu melewati angka UHH Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2022, terdapat selisih yang sangat tipis yaitu sebanyak 0,50 antara UHH Kabupaten Cilacap senilai 74,07 dan Provinsi Jawa tengah senilai 74,57. Sementara jika dibandingkan dengan angka UHH nasional, Kabupaten Cilacap selalu berada di atas angka rata-rata nasional seperti pada tahun 2022 capaian UHH nasional sebanyak 71,85.



Gambar 7. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

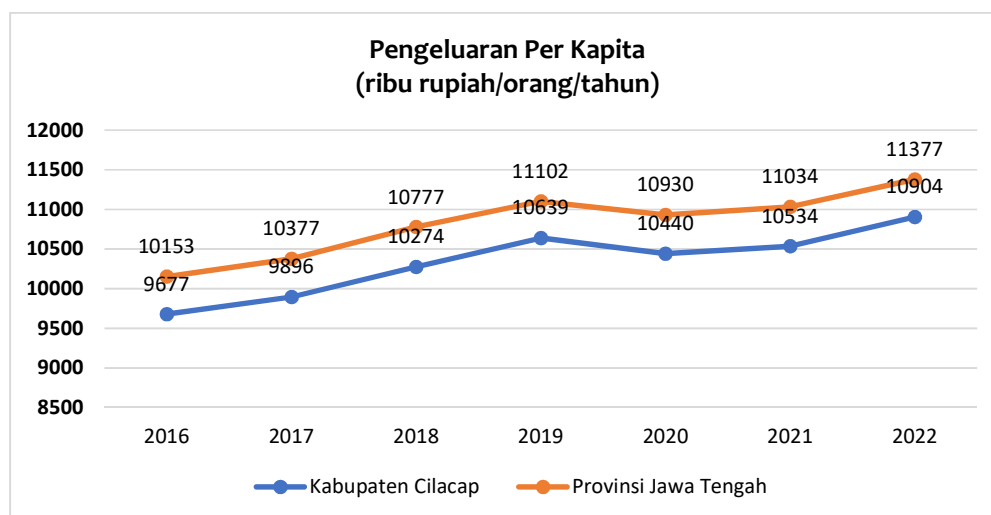
Selain UHH, angka IPM juga dipengaruhi oleh Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). Dalam aspek pendidikan, *instrument* pengukuran yang digunakan adalah AHLS. Di Kabupaten Cilacap, AHLS cenderung meningkat meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu sebanyak 12,66 pada tahun 2020 yang meningkat dari tahun 2016 sebanyak 12,29. Artinya, hanya mengalami peningkatan senilai 0,28. Meskipun demikian, pada tahun 2022 AHLS Kabupaten Cilacap hampir menyeimbangi AHLS Provinsi Jawa Tengah dengan selisih 0,15.



Gambar 8. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Komponen pendukung lainnya dalam IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berkaitan dengan aspek pendidikan. RLS digunakan untuk mengukur jumlah tahun yang digunakan penduduk berumur 25 tahun dalam menempuh pendidikan formalnya. Sama seperti AHLS, semakin tinggi angka RLS maka menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dari sebuah negara/daerah akan semakin baik. Di Kabupaten Cilacap, angka RLS mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2016 hingga 2022, hanya terjadi peningkatan sebesar 0,28. Selisih antara RLS Kabupaten Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah semakin besar dari tahun ke tahun mulai dari 0,25 pada tahun 2016 hingga menjadi 0,75 di tahun 2022.

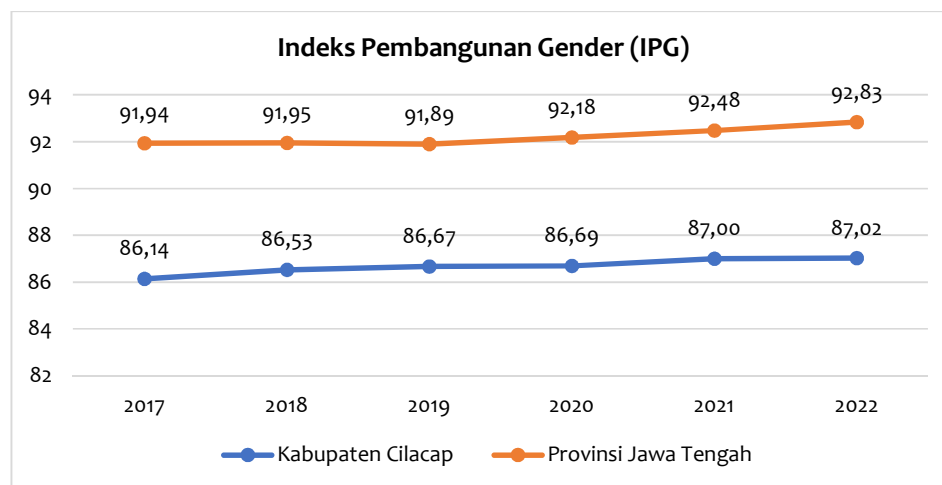


Gambar 9. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

Komponen terakhir yang memengaruhi angka IPM adalah pengeluaran per kapita. Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Sejak tahun 2016 hingga 2019 terjadi tren yang meningkat hingga 10.639 ribu rupiah, namun terjadi penurunan di tahun selanjutnya menjadi 10.440 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat hingga mencapai 10.904 ribu rupiah di tahun 2022. Angka tersebut masih terbilang kurang maksimal dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen, pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap terhitung lebih tinggi. Di tahun 2022, pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar 10.277 ribu rupiah dan Kabupaten Kebumen 9.282 ribu rupiah.

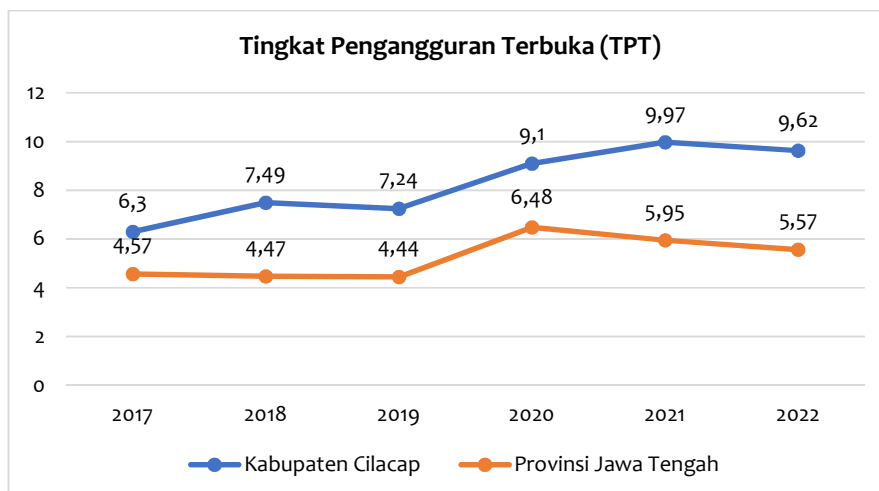
Lebih jauh lagi, analisis terhadap kesiapan sumber daya manusia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam IPG, dapat ditinjau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mengetahui ketimpangan gender yang diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Artinya, semakin dekat dengan nilai 100, maka ketimpangan gender akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. IPG berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan sumbangan ekonomi rumah tangga dari laki-laki dan perempuan.



Gambar 10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

Nilai IPG di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2017, nilai IPG Kabupaten Cilacap berada pada angka 86,14 kemudian mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan hingga mencapai 87,02 di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kabupaten Cilacap masih memiliki selisih yang cukup banyak yaitu sebesar 5,81. Hal tersebut berarti terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Cilacap.



Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kemudian dari sisi ketenagakerjaan juga memiliki kontribusi terhadap analisis kesiapan sumber daya manusia. Dalam hal ini, dapat ditinjau dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Cilacap menunjukkan angka dengan fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021, angka TPT mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 9,97%. Peningkatan pada TPT berarti terdapat banyak masyarakat yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada permintaan barang dan jasa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap menjadi melambat dan mengurangi potensi pertumbuhan masa depan. Selain itu, tingginya TPT mengakibatkan penurunan standar hidup, kemiskinan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penurunan pendapatan dan kemiskinan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat mobilitas sosial.

Kemampuan masyarakat Kabupaten Cilacap dalam menerima dan menerapkan *Smart City* terlihat cukup baik sebagai modal untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap. Analisis kualitas SDM di Kabupaten Cilacap diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Analisis Kualitas SDM Daerah Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/kreatif di daerah	289	✓		
2	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	Belum Tersedia			✓
3	Adanya digital startup di daerah	Tersedia		✓	
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	Tersedia	✓		

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	23 PNS	✓		
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	1.020		✓	
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	189		✓	
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	0	✓		
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	1	✓		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

Berdasarkan analisis kualitas sumber daya manusia daerah di atas, Kabupaten Cilacap memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup baik. Untuk mengembangkan *Smart City*, masyarakat dituntut berpartisipasi dan berkontribusi dalam prosesnya. Oleh karena itu, kapasitas yang baik dari masyarakat menjadi penopang dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Cilacap. *Smart City* erat kaitannya dengan teknologi, namun di Kabupaten Cilacap belum ada komunitas yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak TIK. Namun, memiliki start up yang bergerak di bidang digital teknologi, di antaranya PT. Nocola IoT Solution dan Inovis. Di sisi lain, Kabupaten Cilacap sudah memiliki banyak komunitas minat bakat dan kreatif. Tercatat total 289 komunitas dengan rincian 216 komunitas seni dan 73 komunitas ekonomi kreatif.

Selain itu, Kabupaten Cilacap memiliki 12 Perguruan Tinggi yang berarti terdapat kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Pemerintah daerah juga turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap melalui pemberian beasiswa kepada 23 PNS. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap menganggarkan beasiswa untuk 11 PNS, akan tetapi pendaftar melewati target anggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kemauan yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Cilacap untuk terus belajar. Terakhir, tingkat kriminalitas di Kabupaten Cilacap dinilai sedang dan baik. Hal tersebut berarti Kabupaten Cilacap masih terdapat kriminalitas akan tetapi dapat dikondisikan dengan baik.

3.2.2. Sumber Daya Pemerintahan

Sebagai kabupaten di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya pemerintahan yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS memiliki tanggung jawab yang beragam di berbagai tingkatan dan lembaga pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi hingga staf administratif. Sumber daya manusia ini mencakup aparatur sipil negara yang terampil dan berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, pengelolaan program dan kebijakan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sumber daya pemerintahan merupakan penggerak utama dalam mengimplementasikan dan mengembangkan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Pegawai pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan tata kelola pemerintah dengan kualitas profesionalisme yang baik. Dalam hal kepegawaian, Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya pemerintahan sebanyak 14.126 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki kekuatan yang cukup baik dari segi kuantitas sumber daya pemerintahan untuk mewujudkan *Smart City*.

Tabel 17. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cilacap Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2023

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Sekolah Dasar	21
2	SLTP	91
3	SLTA	557
4	SLTA Kejuruan	194
5	SLTA Keguruan	14
6	Diploma I	15
7	Diploma II	206
8	Diploma III/Sarjana Muda	1.990
9	Diploma IV	99
10	S-1/Sarjana	10.197
11	S-2	742
Total		14.126

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, 2023

Kekuatan dari sumber daya pemerintah merupakan salah satu basis untuk mewujudkan implementasi *Smart City*. Berdasarkan klasifikasi pendidikan formal, sumber daya pemerintah di Kabupaten Cilacap sangat beragam mulai dari sekolah dasar hingga S-2. ASN di Kabupaten Cilacap didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana dengan jumlah 10.197 pegawai dan Diploma III sebanyak 1.990 pegawai. Dengan latar belakang pendidikan yang tersebut, artinya sumber daya pemerintahan di Kabupaten Cilacap sudah memiliki pandangan yang terbuka akan pentingnya pendidikan untuk menunjang keberlangsungan tata kelola pemerintahan.

Tabel 18. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cilacap Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Golongan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	IV/d	3	1	4
	IV/c	39	22	61
	IV/b	497	590	1087
	IV/a	650	722	1372
III	III/d	648	1032	1680
	III/c	528	792	1320
	III/b	432	551	983
	III/a	618	842	1460
II	II/d	203	418	621
	II/c	254	319	573
	II/b	89	18	107
	II/a	58	8	66
I	I/d	23	0	23

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I/c	8	0	8
I/b	0	0	0
I/a	0	0	0
Jumlah	5556	8569	14125

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, 2023

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sumber daya pemerintah di Kabupaten Cilacap tidak hanya diduduki oleh laki-laki, akan tetapi juga ada keterwakilan dari perempuan. Secara keseluruhan, ASN di Kabupaten Cilacap didominasi oleh perempuan sekitar 61% dari total keseluruhan pegawai atau sebanyak 8.569 pegawai perempuan. Sementara komposisi ASN laki-laki sekitar 39% atau sebanyak 5.556 pegawai laki-laki. Dominasi perempuan di lingkungan pemerintahan ini menunjukkan kondisi yang positif terhadap keterbukaan dan pemerataan dalam pembangunan gender.

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, Kabupaten Cilacap memiliki kinerja dengan predikat baik. Kualitas kinerja tersebut dibuktikan dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Penilaian SAKIP dijadikan sebagai instrumen dalam untuk mengukur dan memantau kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini SAKIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Kabupaten Cilacap mendapatkan predikat BB dalam penilaian SAKIP. Jika dikonversikan ke dalam angka, predikat BB setara dengan 70-80. Sumber daya pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mampu menghasilkan kinerja dengan kualitas yang baik. Untuk pengelolaan tata pemerintahan ke depannya, Kabupaten Cilacap berupaya untuk melakukan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan pencapaian hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, akan terwujud pula pengembangan *Smart City* yang baik karena sudah memiliki basis yang kuat dalam tata kelola serta sumber daya yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, Kabupaten Cilacap mendapat predikat A pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) selamat dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan 2021. IPP merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kabupaten Cilacap sudah mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara luas. Pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah sudah mudah dalam keterjangkauan dan aksesibilitasnya. Selain itu juga masyarakat dilayani dengan baik dalam hal kecepatan pelayanan, responsivitas, kejelasan informasi, serta kemudahan proses administrasi dalam mengakses memperoleh layanan publik. Kemudian layanan tersebut sudah berfokus pada efisiensi dan efektivitas yaitu waktu penyelesaian yang efisien, serta hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan layanan publik tersebut. Melalui IPP tersebut, sumber daya pemerintah Kabupaten Cilacap membuktikan kesiapannya sebagai pengelola untuk mengembangkan *Smart City*.

Di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah belum dilaksanakannya sistem merit sebagai bentuk

perwujudan pengelolaan ASN dan kematangan kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah. Selain itu juga belum optimal pelaksanaan pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikarenakan sifatnya yang masih spasial. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan bisa mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, tata kelola di Kabupaten Cilacap mampu menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan komunikatif serta mampu mendukung jalan pembangunan *Smart City*.

Kesiapan Kabupaten Cilacap dari sisi sumber daya pemerintahan berada pada kategori siap untuk mengimplementasikan *Smart City*. Kesiapan tersebut dapat dibuktikan melalui data-data terkait analisis kesiapan sumber daya pemerintahan pada tabel di bawah ini. Terdapat beberapa komponen kesiapan sumber daya pemerintah yang sudah diinterpretasikan dengan predikat baik di antaranya pegawai dengan jenjang pendidikan S-2 ke atas dengan jumlah 741 orang atau 5,24% dari total keseluruhan pegawai. Kemudian pegawai yang diklasifikasikan berdasarkan usia, komposisinya sudah cukup proporsional yaitu pegawai yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 3.444 orang atau sekitar 30,46%, usia 40-50 tahun sebanyak 3.165 orang atau 22,41%, dan usia 25-40 sebanyak 6.322 orang atau sekitar 44,74%. Komposisi tersebut cukup ideal karena didominasi oleh pegawai dengan usia produktif sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan atau tren terkini terutama dalam hal teknologi. Namun, sumber daya pemerintahan di Kabupaten Cilacap perlu menambah pegawai yang memiliki latar belakang ilmu komputer dan teknik informasi atau meningkatkan *skill* dan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan terkait sistem informasi. Hal tersebut didasarkan oleh jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer masih sedikit yaitu sekitar 151 orang atau 1,07% dari total pegawai.

Kesiapan sumber daya pemerintah bukan hanya dilihat dari sisi pegawainya saja, akan tetapi juga dari kelengkapan infrastruktur sebagai pendukung dalam mengimplementasikan *Smart City*. Salah satunya seperti ketersediaan unit komputer yaitu PC dan laptop terhadap jumlah pegawai, yaitu sebanyak 7.492 unit atau sekitar 53%. Meskipun sudah melebihi 50%, namun jumlah unit komputer dapat ditambahkan lagi untuk memaksimalkan pengembangan *Smart City* melalui teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya terdapat dua sistem informasi yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan E-File. Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel berupa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Bansus Online (BA'SO), serta sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel (*Financial Management Information System* atau FMIS). Selain itu juga sudah tersedianya beberapa sistem yang interoperabel lainnya seperti *monitoring* dan evaluasi pembangunan, pengelolaan kepegawaian daerah, sistem informasi pelayanan publik.

Tabel 19. Analisis Kesiapan Sumber Daya Pemerintah di Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	5,24%	✓		
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	151 orang		✓	
3	Jumlah relawan TIK di daerah	3	✓		
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	53%		✓	
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	30,46%	✓		
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	22,41%		✓	
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	44,74%	✓		
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	2		✓	
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	100%	✓		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	100%	✓		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	100%	✓		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Tersedia		✓	
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Belum Tersedia			✓
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel	Belum Tersedia		✓	
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Belum Tersedia			✓
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel	Tersedia	✓		

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

3.2.3. Keuangan dan Anggaran

Dalam mengimplementasikan *Smart City*, sebuah kota harus memiliki kesiapan dari segi keuangan daerahnya untuk mendukung terselenggaranya program-program melalui peningkatan infrastruktur maupun pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan dalam tata kelola pemerintahan dapat menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu tiga tahun, kapasitas keuangan daerah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari 3,2 triliun di tahun 2021 menjadi 3,4 triliun di tahun 2023. Dari total pendapatan daerah, Kabupaten Cilacap hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 653.354.304.152 di tahun 2021, 674.684.476.044 tahun 2022, dan 757.742.921.019 di tahun 2023. Persentase nilai PAD Kabupaten Cilacap terhadap total pendapatan daerah hanya sebanyak 21,93%. Sisa pendapatan lainnya merupakan hasil pendapatan transfer sebanyak 77,38% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebanyak 0,68%. Proporsi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD masih terhitung sangat kecil.

PAD Kabupaten Cilacap yang relatif sedikit, menandakan ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat membuat Kabupaten Cilacap lebih rentan terhadap fluktuasi kebijakan nasional atau perubahan dalam alokasi anggaran. PAD yang rendah juga dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti potensi pembangunan ekonomi daerah yang terbatas. Kemungkinan terbatasnya sumber daya alam, keterbatasan dalam sektor ekonomi yang berkembang, atau kurangnya investasi dan pengembangan usaha dapat menyebabkan pendapatan yang rendah. Selain itu juga dapat diakibatkan oleh rendahnya efisiensi pengelolaan aset daerah, pengumpulan pajak yang kurang optimal, atau kebijakan pengeluaran yang tidak tepat. Ketidakmampuan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan dapat berdampak negatif pada kemampuan Kabupaten Cilacap untuk memberikan layanan publik yang memadai dan membiayai pembangunan daerah.

Kabupaten Cilacap perlu untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Salah satu langkah yang dapat dilakukan di antaranya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan investasi dan kemitraan publik-privat, dan pengelolaan Aset Daerah yang Efektif. Selain itu juga dapat dilakukan pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas SDM, serta promosi dan peningkatan kualitas pariwisata. Dengan demikian, PAD Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bergantung banyak dari dana transfer. Sehingga, dapat menunjang dapat mendukung pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap.

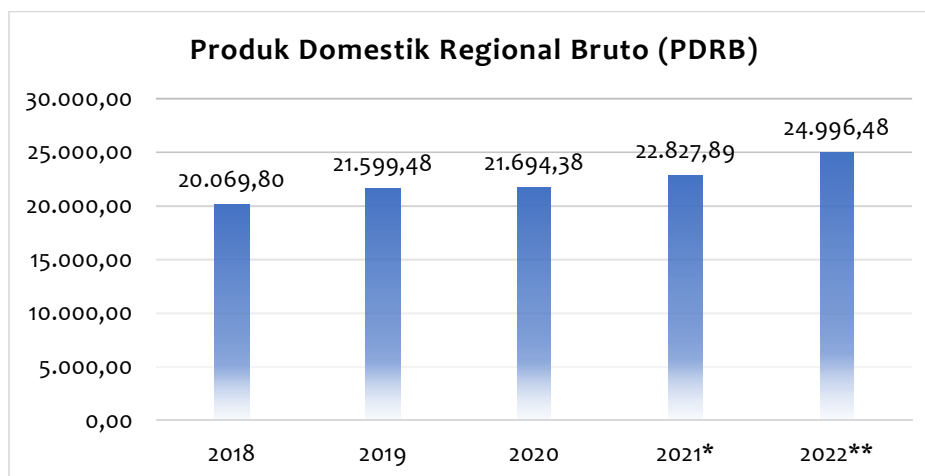
Tabel 20. Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

NO	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
4.1	Pendapatan Asli Daerah	653.354.304.152	674.684.476.044	757.742.921.019
4.1.1	Pajak Daerah	222.995.000.000	264.900.375.000	291.146.059.979

NO	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
4.1.2	Retribusi Daerah	24.035.058.851	23.296.617.915	27.436.619.990
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.168.547.761	57.359.621.915	57.822.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	351.155.697.540	329.127.861.214	381.338.241.050
4.2	Pendapatan Transfer	2.396.749.680.086	2.567.837.060.179	2.673.561.608.000
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.123.857.438.908	2.307.420.406.096	2.409.279.608.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	272.892.241.178	260.416.654.083	264.282.000.000
4.3	Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	182.950.293.200	29.000.000	23.625.631.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.821.961.800	29.000.000	23.625.631.000
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	174.128.331.400	-	-
Jumlah		3.233.054.277.438	3.271.521.536.223	3.454.930.160.019

Sumber: Kabupaten Cilacap Dalam Angka, 2023

Selain pendapatan daerah, kesiapan keuangan dan anggaran dalam mengimplementasikan *Smart City* juga dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di kabupaten Cilacap, dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2018-2022 terjadi peningkatan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari 20.069,80 menjadi 24.996,48. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan wilayah secara keseluruhan.



Gambar 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, pendapatan daerah Kabupaten Cilacap didominasi oleh lima sektor dengan kontribusi terbanyak dari sektor-sektor lainnya. Kontribusi paling tinggi dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menghasilkan sebanyak 7.390,02 atau hampir mencapai 30% dari total PDRB secara keseluruhan. Kontribusi terbanyak lainnya diperoleh dari sektor Industri Pengolahan sebanyak 15%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14%, sektor Konstruksi 7,5%, dan Jasa Pendidikan 6,1%. Sementara kontribusi dari lapangan usaha lainnya hanya menghasilkan kurang dari 5% dari total PDRB.

Tabel 21. Sektor Lapangan Usaha yang Mendominasi Kontribusi PDRB ADHB terhadap PAD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.960,45	6.304,27	6.633,23	6.820,73	7.390,02
2	Industri Pengolahan	3.028,69	3.286,11	3.289,33	3.552,55	3.931,62
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.006,74	3.269,78	3.139,23	3.388,30	3.675,47
4	Konstruksi	1.473,12	1.558,78	1.561,73	1.740,83	1.894,95
5	Jasa Pendidikan	1.315,59	1.457,26	1.480,56	1.497,09	1.534,56
Produk Domestik Regional Bruto		20.069,80	21.599,48	21.694,38	22.827,89	24.996,48

Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Berdasarkan data di atas, Kontribusi PDRB ADHB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Cilacap yang didominasi oleh beberapa sektor lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dominasi ini dapat terjadi karena sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang kuat dalam menghasilkan nilai tambah dan lapangan kerja. Dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Cilacap merupakan sektor yang cukup kuat dalam mendukung dan menunjang perekonomian daerah.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Cilacap diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mengembangkan strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor lain, mengurangi hambatan investasi, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan diversifikasi ekonomi sehingga dapat menciptakan ketahanan ekonomi daerah. Selain itu juga sebagai upaya dalam mengurangi risiko atas ketergantungan pada sektor usaha tertentu.

Tabel 22. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	21,93%		✓	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	185.663.674.098	✓		
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	40,08%		✓	
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	12,7%		✓	
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	Inisiasi Data		✓	
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2023	Inisiasi Data		✓	
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart City</i> di daerah	6		✓	
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Inisiasi Data	✓		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	3		✓	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing, 2023

Berdasarkan data kapasitas keuangan daerah Kabupaten Cilacap, menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk implementasi dan pengembangan *Smart City* belum cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari PAD Kabupaten Cilacap yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2023, persentase belanja pegawai yang masih tinggi, yaitu senilai 40% dari total belanja daerah. Sementara untuk belanja modal Pemerintah Kabupaten Cilacap hanya menghabiskan sekitar 13% dari total belanja daerah. Terdapat ketimpangan yang sangat jauh antara proporsi belanja modal dan belanja daerah. Sedangkan untuk mengembangkan *Smart City*, dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam melakukan pembangunan.

Berkaitan dengan keuangan dan anggaran, Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melakukan optimalisasi untuk meningkatkan dan menguatkan sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan *Smart City*. Salah satunya dengan membuka peluang investasi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Selain itu, dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif lainnya.

3.3. Aspek Infrastruktur

Aspek infrastruktur dalam master plan *Smart City* ini dipahami dalam tiga hal yaitu infrastruktur fisik, infrastruktur digital dan demografi dan kondisi sosial.

3.3.1. Infrastruktur Fisik

Jaringan Jalan

Pada tahun 2018, jaringan jalan di Kabupaten Cilacap dilayani dengan total 1.526,618 km, yang terdiri atas 173,549 km jalan status Nasional, 83,876 km jalan Provinsi dan 1.269,202 km jalan kabupaten/kota. Selain jalan tersebut, terdapat pula ruas jalan yang belum memiliki status di Kabupaten Cilacap (Dinas PUPR Kab Cilacap, 2022). Dalam dokumen RPD dituliskan bahwa persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya, kinerja jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan selalu mengalami kenaikan. Dilaporkan bahwa pada tahun 2021, status jalan Kabupaten berada pada kondisi baik yaitu mencapai 67,24 persen atau dalam km adalah sepanjang 853.413 km Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada 66,42 persen atau 842,998 km.

Dilaporkan dalam dokumen RPD bahwa panjang jalan di Kabupaten Cilacap cukup bervariasi. Pada tahun 2020 untuk jalan dengan lebar lebih dari 5 meter terdapat 63,482 km atau 5 persen dari total panjang Kabupaten Cilacap 1.268,202 km. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penambahan sebesar 139 km (10,95%).

Dalam aspek jaringan jalan, Kabupaten Cilacap diuntungkan dengan ditetapkannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Hal ini membuat Kabupaten Cilacap dilintasi oleh Jalan Tol Ruas Bandung-Tasikmalaya-Cilacap, ruas Cilacap-Pejagan, dan ruas Cilacap-Yogyakarta (NYIA). Ketiga tol ini dapat memberikan peluang besar bagi Cilacap untuk mengembangkan wilayahnya. Selain jalan tol, kawasan pesisir selatan Kabupaten Cilacap juga dilintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), jalur ini menghubungkan Jawa Timur hingga Banten. Kab. Cilacap dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat arus barang jasa dan pengetahuan, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab Cilacap.

Jembatan

Sesuai topografinya Kabupaten Cilacap membutuhkan banyak jembatan untuk memfasilitasi arus lalu lintas darat. Dilaporkan bahwa kondisi jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan kondisinya. Kinerja jembatan dalam kondisi baik kurang lebih 1.861,34 meter atau 42,62 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan 83,5 persen pada tahun 2021 menjadi 5.384,89 meter dari total 790 unit jembatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Sarana dan Prasarana Jalan

Untuk kelancaran lalu lintas darat, diperlukan adanya sarana dan prasarana jalan yang baik demi menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Sarana dan prasarana kebinamargaan selama 4 tahun sejak 2017 – 2021 dilaporkan mengalami perbaikan. Pada tahun 2017 - 2021, presentasi jalan kabupaten yang terpasang LPJU meterisasi terus mengalami peningkatan, dari 26,35 persen menjadi 50,93 persen. Persentase jalan raya terbangun LPJU meterisasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 mencapai 15,5 persen menjadi 24 persen pada tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 31,32 persen pada tahun 2021. Persentase titik PJU abonemen termeterisasi selama 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan, dari tahun 2017 mencapai 0,02 persen menjadi 19,98 persen pada tahun 2020. Demikian pula fasilitas umum terbangun

penerangan terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2017 mencapai 0,03 persen menjadi 8,8 persen di tahun 2021. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 – 2021.

Tabel 23. Kondisi Sarana Prasarana Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	80	91	95	95	95
2	Jalan Kabupaten yang terpasang LPJU Meterisasi	%	26,35	37,18	45,18	48,40	50,93
3	Jalan Raya terbangun LPJU Meterisasi	%	14,22	15,5	24	28,20	31,32
4	Titik PJU Abunemen Termeterisasi	%	0,02	5,86	13,53	16,86	19,98
5	Fasilitas Umum Terbangun Penerangan	%	0,03	5,50	5,86	8,78	8,8

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kabupaten Cilacap, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi sarana prasarana jalan di Kabupaten Cilacap relatif meningkat. Hal ini dibuktikan dari naiknya persentase capaian kinerja beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kondisi sarana jalan di Kabupaten Cilacap. Capaian ini sangat penting sebagai modal Kabupaten Cilacap untuk mengembangkan *Smart City* karena ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi baik akan menciptakan kondisi kota yang kondusif dan pada akhirnya memudahkan aktivitas masyarakat. tanpa adanya infrastruktur jalan yang baik, maka sebuah kota tidak akan mampu menghadirkan pelayanan, kemudahan, dan kesejahteraan bagi masyarakat penghuninya.

Sumber Daya Air

Sumber Daya Air menjadi infrastruktur penting dalam upaya menjadikan *Smart City* berhasil. Kabupaten Cilacap menunjukan rasio panjang saluran pembuang dalam kondisi baik hanya 11,97 persen pada tahun 2021. Terdapat perubahan data saluran Pembuang yang semula hanya dihitung saluran pembuang dalam kota saja yang jumlahnya tidak ada 100 Saluran pembuang, menjadi lebih dari 967 saluran pembuangan se Kabupaten Cilacap berdasarkan SK Bupati Cilacap Nomor : 614/537/18 Tahun 2017 tentang Saluran Pembuang. Data terbaru menunjukkan persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 83 persen dan menjadi 88,36 persen pada tahun 2021 dengan rincian kewenangan Kabupaten yaitu 44,01 persen, Provinsi sebesar 3,52 persen dan Pusat sebesar 38,81 persen. Kemudian, persentase jaringan irigasi kabupaten yang berfungsi baik pada Tahun 2017 hingga tahun 2021 tercapai 100 persen. Sementara itu rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan pada tahun 2017 mencapai 0,034 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,111 persen.

Air Minum dan Sanitasi

Pada tahun 2021 (tahun terakhir data di RPD) terdapat 87,84 persen dari total populasi jiwa yang telah mengakses air minum yang layak. Hal ini berarti masih ada 13 persen populasi yang masih belum dapat mengakses air minum yang layak. Pada tahun yang sama, 82,1 persen populasi di Kabupaten Cilacap dapat mengakses jamban yang layak, sisanya belum dapat mengakses. Di Kabupaten Cilacap, pada tahun 2021, tersedia sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam). Genangan juga tidak lebih dari dua kali setahun pada tahun 2017 mencapai 67,6 persen dan naik menjadi 87,60 persen.

Hal yang masih menjadi catatan adalah sanitasi jamban yang belum mampu memenuhi 100 persen kebutuhan masyarakat. Tercatat masih perlunya perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai.

Penataan Ruang

Pada tahun 2018-2021 terdapat 5 persen ruang terbuka hijau (RTH) mengalami perubahan peruntukkan. Kendati ini lebih baik dari tahun sebelumnya, namun perubahan 5 persen tetap berarti tinggi. RPD mencatat bahwa ketaatan penggunaan ruang sesuai RTRW menunjukkan peningkatan sebesar 25 persen menjadi 90 persen pada tahun 2021. Jumlah rekomendasi teknis ijin pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 150 ijin menjadi 1.597 ijin pada tahun 2019 namun mengalami penurunan menjadi 1.107 pada tahun 2021. Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB yang terealisasi tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai 5 persen dan mengalami peningkatan mencapai 15 persen pada tahun 2021. Persentase bangunan/publik dalam kondisi baik yang terealisasi 40 persen pada tahun 2018 dan tahun 2021 mencapai 60 persen.

Tabel 24. Kondisi Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ruang publik perkotaan yang berubah peruntukannya	%	10	5	5	5	5
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	65	67	84	84,48	90
3	Tenaga terampil terdidik/terbina	%	7,51	10,59	12,12	13,97	13,97
4	Jumlah rekomendasi teknis ijin pemanfaatan ruang yang sesuai	Ijin	150	250	1.597	1.044	1.107
5	Bangunan Gedung non perumahan yang memiliki IMB	%	n.a	5	5	10	15
6	Bangunan pemerintah/publik dalam kondisi baik	%	n.a	40	50	53,75	60

Sumber: Dinas PUPR Kab. Cilacap, 2022

Aspek infrastruktur sangat penting diperhatikan dalam rangka pengembangan Smart City di Kabupaten Cilacap. Adanya jaringan dan sarana prasarana jalan memadai, sumber daya air yang

cukup, air minum dan sanitasi yang memadai, jembatan yang berfungsi dengan baik. Serta penataan ruang yang tepat adalah faktor krusial dalam menentukan kesiapan sebuah kota untuk menjadi *Smart City* dari aspek infrastrukturnya. Dari seluruh faktor dalam aspek infrastruktur, kondisi di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik meskipun ada beberapa yang masih perlu menjadi catatan dan harus segera dievaluasi dalam rangka menyongsong pengembangan *Smart City*.

Tabel 25 Analisis Kapasitas Infrastruktur Fisik Daerah

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	67%	✓		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	51,536 km	✓		
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	Inisiasi Data	✓		
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	32,10%	✓		
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Tersedia	✓		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Tersedia		✓	
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Inisiasi Data		✓	
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	13 rumah sakit, 38 puskesmas, 89 klinik		✓	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

3.3.2. Infrastruktur Digital

Guna mengetahui tingkat kesiapan daerah terhadap infrastruktur *Smart City*, diperlukan analisis tentang ketersediaan dan kondisi infrastruktur digital yang terdiri atas: aplikasi, jaringan internet, dan pelayanan publik secara *online*. Penggunaan teknologi menjadi penting untuk dianalisis dalam rangka untuk mengetahui kondisi baik-sedang-buruk. Tabel di bawah ini menunjukkan interpretasi kondisi komponen infrastruktur digital di Kabupaten Cilacap. Penilaian yang dilakukan dalam FGD dengan OPD dalam penyusunan Master Plan *Smart City* di Kabupaten Cilacap diperoleh informasi bahwa tidak ada komponen yang berada pada kondisi buruk, sebagian besar kondisi baik, lalu disusul kondisi sedang.

Komponen yang berada pada kondisi baik adalah persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3 G yang mencapai lebih dari 90%; persentase rumah tangga yang terlayani listrik yaitu 98%; jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam) jarang terjadi; dan jumlah sekolah yang telah memiliki akses internet telah lebih dari 98%. Sedangkan komponen infrastruktur digital dengan kondisi sedang adalah jaringan *broadband access* untuk masyarakat, jumlah lokasi *wireless* publik di 30 lokasi yang dirasa masih kurang dan perlu ditambahkan; dan jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/*online*, faktanya ada 4 RSUD yang sudah terlayani 100%, namun penggunaan *online* hanya pada pendaftaran, pelayanan bentuk lain belum dimaksimalkan.

Tabel 26. Analisis Kapasitas Infrastruktur Digital Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Sekitar 90% tercover	✓		
2	Tersedianya jaringan <i>broadband access</i> untuk masyarakat	Tersedia		✓	
3	Jumlah lokasi <i>wireless</i> untuk publik	Tersedia di 30 Lokasi		✓	
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	98%	✓		
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	jarang	✓		
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	98%	✓		
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/ <i>online</i>	4		✓	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

3.3.3. Infrastruktur Sosial Daerah

Demografi

Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.980.912 jiwa (BPS, 2021), terdiri atas 1.002.019 jiwa penduduk laki-laki dan 978.893 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Cilacap tumbuh sebesar 1,17 persen. Pertumbuhan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat 1,05 persen. Rasio gender atau jenis kelamin adalah 102,36.

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 930 jiwa/km². Kepadatan ini cukup beragam untuk tiap kecamatan. Secara umum, kecamatan di wilayah timur dan di sekitar kota Cilacap mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kecamatan bagian Barat. Tercatat, kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Cilacap Selatan yaitu sebesar 9.214 jiwa/km², kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Kampung Laut sebesar 109 jiwa/km².

Tabel 27. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Distribusi Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap 2022

No.	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (Population)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021 (Annual Population Growth Rate percent. 2020-2021)
1.	Dayeuhluhur	49.086	-0.01
2.	Wanareja	107.057	0.80
3.	Majenang	142.456	0.86
4.	Cimanggu	104.261	0.92
5.	Karangpucung	80.473	0.99
6.	Cipari	68.047	1.69

No.	Kecamatan (Subdistrict)	Penduduk (Population)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021 (Annual Population Growth Rate percent. 2020-2021)
7.	Sidareja	63.320	1.27
8.	Kedungreja	90.470	1.64
9.	Patimuan	50.365	1.01
10.	Gandrungmangu	112.065	1.68
11.	Bantarsari	76.723	1.65
12.	Kawunganten	86.562	1.49
13.	Kampung Laut	15.972	1.65
14.	Jeruklegi	79.735	2.27
15.	Kesugihan	137.451	1.78
16.	Adipala	97.057	1.85
17.	Maos	46.888	0.86
18.	Sampang	44.396	1.27
19.	Kroya	117.277	1.41
20.	Binangun	71.037	1.94
21.	Nusawungu	88.743	1.95
22.	Cilacap Selatan	83.938	-0.01
23.	Cilacap Tengah	90.663	0.15
24.	Cilacap Utara	84.580	1.34
Cilacap		1.988.622	1.28

Sumber: Cilacap Dalam Angka BPS, 2023

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 (pertengahan) mencapai 872.454 jiwa. Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 65,65 persen. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62 persen. Pada bulan Agustus 2022 jumlah penduduk yang bekerja adalah 788.513 orang. Dari sektor yang ada, dilaporkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja yaitu 42,95 persen. Sayangnya, sektor pertanian hanya menyerap 27,83 persen pekerja atau sekitar 219.436 orang.

Untuk jenis pekerjaan, pada bulan Agustus 2022 proporsi terbesar pekerja didominasi oleh bekerja atau berusaha sendiri (swasta) sebesar 212.919 orang. Kemudian, pekerja dibantu buruh tetap atau buruh bayaran kurang lebih 18.474 orang. Artinya banyak usaha di Cilacap merupakan usaha kecil yang tidak memiliki karyawan/ buruh.

Tabel 28. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022

Kegiatan Utama (Main Activity)	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah (Total)
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	
I. Angkatan Kerja / Economically Active	540.777	331.677	872.454
1. Bekerja / Working	491.144	297.369	788.513
2. Pengangguran Terbuka / Unemployment	49.633	34.308	83.941
II. Bukan Angkatan Kerja / Economically Inactive	122.407	334.003	456.410
1. Sekolah / Attending School	42.319	32.282	74.601
2. Mengurus Rumah Tangga / House Keeping	24.478	273.201	297.679
3. Lainnya / Others	55.610	28.520	84.130
Jumlah / Total	663.184	665.680	1.328.864

Catatan: Dihitung berdasarkan angka proyeksi penduduk SUPA 2015

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

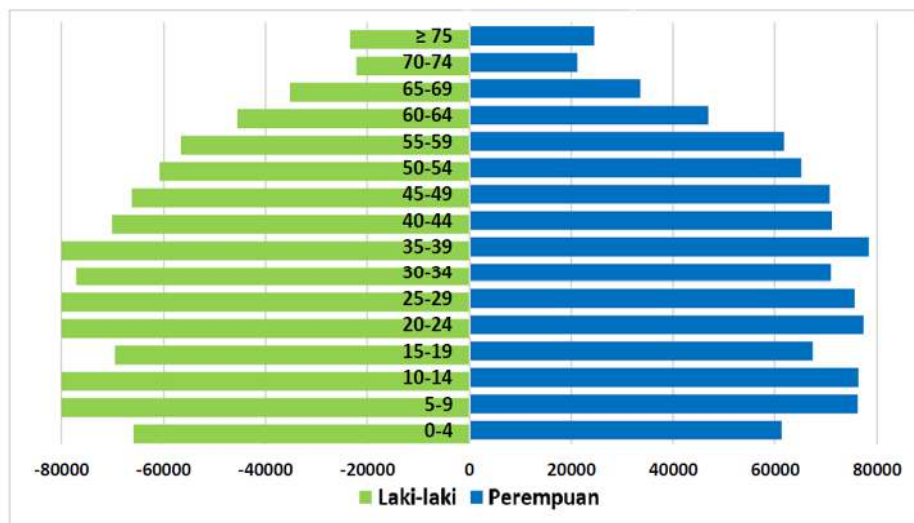
Tabel 29. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022

Lapangan Pekerjaan (Main Fieldwork)	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah (Total)
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	
Pertanian (Agriculture)	151.963	67.473	219.436
Manufaktur (Manufacture)	165.034	65.355	230.389
Jasa-Jasa (Services)	174.147	164.541	338.698
Jumlah / Total	491.144	297.369	788.513

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap perlu untuk dianalisis guna mengetahui aspek manusia dalam perkembangan dan pelaksana program *Smart City*. Analisis kelompok umur perlu dilihat sebagai bagian penting dari informasi. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2021 (15–64 tahun) sebesar 1.377.834 jiwa atau 69,56 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 159.911 jiwa atau 8,07 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 443.167 jiwa atau 22,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,56 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap.

Gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap menunjukkan struktur kependudukan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,56 persen. Kondisi ini berarti akan ada bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk. Bonus demografi biasanya dicirikan dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Secara teori, perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Dalam pembangunan *Smart City*, bonus demografi sangat menguntungkan karena tersedia *labour*/tenaga kerja yang banyak untuk lebih produktif. Kendati demikian, perlu disediakan lapangan pekerjaan yang dipersiapkan untuk penduduk usia produktif ini.



Gambar 13. Struktur Demografi Kabupaten Cilacap

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cilacap, 2023

Kondisi Sosial

Pendidikan

Salah satu kondisi sosial yang penting untuk mendukung terwujudnya visi *Smart City* adalah pendidikan penduduk. Dengan melihat Angka Partisipasi Murni (APM), kita dapat mengetahui seberapa besar penduduk bersekolah. Pada tahun 2022, nilai APM Kabupaten Cilacap SD/MI adalah 99,98 persen yang artinya sebesar itu penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu pada jenjang SD atau sederajat. Untuk jenjang SMP/MTs, penduduk berusia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu adalah 85,44 persen. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/Ma berada pada APM 62,05 persen yang berusia 16-18 tahun telah bersekolah tepat waktu. Sebenarnya kondisi ini relatif baik namun masih bisa ditingkatkan terutama untuk SMP dan SMA.

Tabel 30. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Cilacap, 2021 dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI	99,43	99,98	103,66	102,20
SMP/MTs	85,04	85,44	95,82	91,97
SMA/SMK/MA	63,12	62,05	91,50	91,40

Catatan: -

Sumber: BPS, Survei Ekonomi Nasional (Susenas), 2023

Angka melek huruf di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan data BPS Cilacap Dalam Angka (2023) diperoleh data bahwa ada penurunan persentase penduduk Usia 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut kelompok umur. Pada usia 15-24 tahun sama 100 persen, namun pada penduduk usia 15-44 turun dari 99,72 menjadi 98,55, dan diatas 45 tahun turun dari 92,18 persen di tahun 2021 menjadi 91,05 persen di tahun 2022.

Apabila dilihat dari gender (jenis kelamin), sebanyak 73,94 persen laki laki pada usia 7-24 tahun masih melanjutkan sekolah, sedangkan untuk perempuan hanya 71,74 persen yang masih sekolah pada usia yang sama. Meskipun selisihnya hanya 2 persen saja, namun hal ini menunjukkan bahwa laki-laki di Cilacap lebih baik akses pendidikannya daripada perempuan dengan agregat selisih yang tipis.

Kesehatan

Program *Smart City* haruslah mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat, dimana programnya untuk mendukung pencapaian kesehatan masyarakat yang tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia dapat tercapai. Guna meningkatkan status kesehatan diperlukan sarana kesehatan yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2022, terdapat 12 Rumah Sakit yang terletak di 8 kecamatan, 38 Puskesmas dan 73 Puskesmas pembantu yang terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Apabila dilihat dari data BPS Cilacap Dalam Angka (2023), penyakit tertinggi yang diderita masyarakat Kabupaten Cilacap adalah ISPA sebanyak 51.580 jiwa pada tahun 2022. Setelah itu diikuti dengan penyakit *Myalgia*, *Hipertensi esensial*, *Nasofaringitis Akut*, DM II (*Non-insulin-dependent diabetes mellitus*), *Febris tanpa sebab yang jelas*, *Cephalgia/sakit kepala*, *Gastritis-unspecified*, *Dyspepsia*, dan *Dermatitis kontak alergika (unspecified cause)*. ISPA yang cukup besar jumlah penderitanya ini juga diakibatkan oleh tingginya konsumsi terhadap rokok dan polusi udara.

Tabel 31. Jumlah Penderita dari 10 Kesakitan Terbesar Puskemas di Kabupaten Cilacap, 2022

No.	Nama Penyakit	Jumlah
1.	ISPA	51.580
2.	<i>Myalgia</i>	24.436
3.	<i>Hipertensi Esensial</i>	21.636

No.	Nama Penyakit	Jumlah
4.	Nasofaringitis Akut (Common Cold)	17.308
5.	DM II (Non-Insulin – Dependent Diabetes Melitus)	15.216
6.	Febris Tanpa Sebab yang Jelas	13.916
7.	Cephalgia / Headache / Sakit Kepala	12.832
8.	Gastritis, unspecified	12.236
9.	Dyspepsia	12.056
10.	Dematitis Kontak Alergika, Unspecified Cause	6.128

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2023

Kejadian Bencana

Pada tahun 2022 dilaporkan bahwa terjadi 70 kejadian bencana banjir, 93 kejadian tanah longsor, 87 kejadian angin kencang atau puting beliung, dan 4 kali gelombang pasang. Sedangkan tsunami dan banjir bandang tidak terjadi pada tahun 2022 meskipun Cilacap berpotensi terjadi tsunami karena posisinya berada di tepi Samudera Hindia yang memiliki rekahan lempeng tektonik. Pada Bencana Banjir yang terjadi, sebanyak 67.531 orang terdampak dan mengungsi. Sedangkan saat kejadian tanah longsor sebanyak 1.113 orang terdampak dan mengungsi. Angin kencang yang terjadi di Cilacap pada tahun 2022 telah membuat 1.787 orang terdampak dan mengungsi.

Kejahatan dan Kriminalitas

Kondusifitas daerah di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017- 2021 secara umum menunjukkan situasi kondusif, dengan ditunjukkan tidak adanya kasus kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) dan tidak adanya konflik sosial. Selain itu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak ditemui kasus konflik agama. Namun berdasarkan data Dalam Angka Kab Cilacap tahun 2023, terdapat 189 kasus kejahatan yang dilaporkan, dan rasio risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk adalah 10,8. Rasio ini turun dari tahun 2020 18,23, tahun 2021 15,73. Nampaknya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kejadian kejahatan dan kriminalitas di Kabupaten Cilacap.

Tabel 32. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Risiko Penduduk Terjadi

No.	Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Dayeuhluhur	6	7	4	12,20	14,26	8,09
2.	Wanareja	12	11	6	11,45	10,42	5,62
3.	Majenang	14	9	8	10,11	6,41	5,62
4.	Cimanggu	1	4	1	0,96	3,9	0,94
5.	Karangpucung	8	4	1	9,99	5,06	1,22
6.	Cipari	7	5	4	10,67	7,57	5,96
7.	Sidareja	9	6	6	14,45	9,69	9,46
8.	Kedungreja	5	9	6	5,75	10,23	6,69
9.	Patimuan	2	1	-	4,06	2,02	-

No.	Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk		
10.	Gandrungmangu	24	11	26	21,95	10,11	23,17
11.	Bantarsari	5	4	13	6,81	5,37	17,15
12.	Kawunganten	6	6	2	7,08	7,11	2,3
13.	Kampung Laut	-	-	-	-	-	-
14.	Jeruklegi	6	14	6	7,98	18,26	7,71
15.	Kesugihan	14	20	11	10,66	15,01	8,13
16.	Adipala	22	13	10	23,58	13,83	10,39
17.	Maos	8	5	-	17,14	10,83	-
18.	Sampang	14	13	11	32,54	29,94	24,91
19.	Kroya	18	18	19	15,77	15,73	16,23
20.	Binangun	10	11	6	14,72	16,02	8,61
21.	Nusawungu	8	8	8	9,44	9,33	9,13
22.	Cilacap Selatan	21	33	15	24,84	39,31	17,83
23.	Cilacap Tengah	12	18	17	13,26	19,91	18,89
24.	Cilacap Utara	15	13	9	18,23	15,73	10,8
Cilacap		247	243	189			

Sumber: Kabupaten Cilacap Dalam Angka, 2023

Tabel 33. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Adanya 33 lembaga PKBM	✓		
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	tersedia	✓		
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	50%	✓		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	90%	✓		
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	72 perpustakaan umum		✓	

Sumber: Hasil FGD dan analisis tim penyusun, 2023

Keberadaan pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Cilacap sudah cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk keperluan belajar. Untuk ruang terbuka publik juga sudah tersedia disetiap RW di Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk aula atau balai RW saat ini masih setengah dari total jumlah seluruh RW yang sudah memilikinya. Keberadaan aula atau balai RW penting untuk diadakan sebagai sarana memfasilitasi kegiatan masyarakat di tingkat RW sekaligus juga membuka sarana partisipatif bagi warga untuk mengikuti kegiatan yang sering diadakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, dari segi ketersediaan fasilitas olahraga tercatat sudah ada sekitar 90% dari total kelurahan atau desa sudah memiliki fasilitas olahraga. Terakhir, jumlah ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah sudah ada sebanyak 72 perpustakaan. Angka ini sudah cukup baik namun optimalisasi pelayanan bagi masyarakat harus terus ditingkatkan.

3.4. Aspek Suprastruktur

Dalam menerapkan *Smart City*, perlu adanya analisis terkait aspek suprastruktur yang mencakup penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

3.4.1. Kebijakan Daerah

Kebijakan daerah merupakan salah satu komponen non-fisik dalam analisis suprastruktur untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan. Kebijakan daerah dapat dijadikan dasar dalam menjalankan *Smart City* serta menjamin keberlanjutan program pembangunannya. Kabupaten Cilacap, masih belum memiliki peraturan atau kebijakan terkait dewan *Smart City*, pelaksana *Smart City*, pedoman induk *Smart City*, serta kebijakan lainnya dalam mekanisme proses, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Tabel 34. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Ada			✓
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Ada			✓
3	Adanya masterplan <i>Smart City</i> daerah	Tidak ada			✓
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan <i>Smart City</i> Daerah	Tidak ada			✓
5	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Tidak ada			✓
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka panjang	Akan ada		✓	
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	Akan ada			✓

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

Kesiapan Kabupaten Cilacap dari segi kelembagaan dalam membangun *Smart City* dilakukan secara bertahap. Sebagai program baru, perlu adanya tahapan dalam pembuatan kebijakan terkait *Smart City* dengan segala penyesuaiannya. Sehingga, *Masterplan Smart City*, aturan daerah, visi pembangunan *Smart City* yang searah dengan pembangunan daerah belum diidentifikasi secara eksplisit. Dalam tahapan awal, pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap direalisasikan melalui bimbingan teknis untuk menyusun *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

3.4.2. Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan salah satu komponen non-fisik yang perlu dianalisis sebagai bagian dari aspek suprastruktur. Dalam melaksanakan pengembangan pada *Smart City*, kelembagaan adalah hal krusial sebagai badan yang mengurusinya. Kelembagaan dalam *Smart City* akan diarahkan pengelolaan pada pembagian perannya.

Tabel 35. Analisis Kelembagaan Daerah Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Adanya Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Tersedia	✓		
2	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Tersedia	✓		
3	Adanya SOP <i>Smart City</i> daerah	Belum ada			✓
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di setiap OPD	Tersedia	✓		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

Kabupaten Cilacap sudah memiliki Dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City*. Selain itu, Kabupaten Cilacap juga sudah memiliki tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana *Smart City* di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut lagi, Kabupaten Cilacap akan menyusun dan merumuskan terkait SOP *Smart City* untuk mengatur program beserta arah pembangunan *Smart City*.

3.4.3. Organisasi Masyarakat Daerah

Untuk menganalisis kesiapan suatu daerah dalam aspek suprastruktur, terutama dalam konteks Kabupaten Cilacap, penting juga untuk mempertimbangkan organisasi masyarakat setempat. Organisasi masyarakat ini merupakan bagian integral dari struktur sosial daerah dan keterlibatannya dapat berperan signifikan dalam mendorong implementasi *Smart City*. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan, menggalakkan partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi dalam berbagai aspek pembangunan *Smart City*.

Melalui forum dan komunitas yang ada, organisasi masyarakat daerah dapat berfungsi sebagai katalis, merangsang diskusi, berbagi ide dan solusi, serta membantu memobilisasi sumber daya. Dengan keterlibatan dan dukungan aktif dari masyarakat, inovasi dalam program *Smart City* dapat lebih mudah diwujudkan. Komunitas lokal juga dapat berperan dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan unik dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga solusi yang dikembangkan dalam kerangka *Smart City* dapat benar-benar relevan dan efektif.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi *Smart City* dan pembangunan daerah secara umum. Mereka dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui pengadvokasian kebijakan, pelaksanaan program, atau penyediaan layanan tertentu yang mendukung tujuan *Smart City*. Dengan kata lain, organisasi masyarakat daerah dapat menjadi mitra strategis dalam perjalanan

Kabupaten Cilacap menuju menjadi sebuah Smart City, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan inklusif.

Tabel 36. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Kabupaten Cilacap

NO	KOMPONEN	NILAI/KONDISI	INTERPRETASI		
			BAIK	SEDANG	BURUK
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Tersedia	✓		
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung Smart City	Tersedia			✓
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung Smart City	Inisiasi Data			✓
4	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung Smart City	Tersedia			✓
5	Jumlah forum pendukung Smart City yang memiliki sekretariat definitif	Inisiasi Data			✓
6	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah	Tersedia	✓		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

3.5. Aspek Budaya (Culture)

Secara umum, Cilacap terbagi menjadi budaya Jawa dan budaya Sunda. Budaya yang berbeda ini tentu menyebabkan pola masyarakat yang berbeda pula dan hal ini menimbulkan keunikan tersendiri yang selanjutnya terjadi pencampuran budaya dari kedua budaya tersebut. Cilacap terkenal dengan Bahasa Ngapak atau bisa disebut juga dengan Dialek Banyumasan dengan logat yang khas. Dari segi topografi wilayah juga mempengaruhi budaya dan mata pencaharian penduduknya, sehingga dari perekonomian pun, secara umum terbagi menjadi dua yakni wilayah bagian selatan berkembang sektor perikanan laut dan bagian utara-barat berkembang sektor pertanian.

3.5.1. Budaya Tak benda (Intangible)

Tradisi Sedekah Bumi memperingati bulan As'Syura

Sedekah bumi merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap terutama yang tinggal di pedesaan bertujuan untuk membagi sebagian hasil bumi kepada leluhur atau zat yang hidup berdampingan dengan manusia di dunia ini sesuai kepercayaan mereka. Dilakukan satu tahun sekali yaitu pada bulan Sura (Jawa)/Syura (Arab), sedekah bumi diawali dengan pembentukan panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat. Sebelum pelaksanaan upacara dilaksanakan kerja bakti/ gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Pada malam jelang 1 Sura/Syura diadakan tirakatan (doa bersama) oleh masyarakat yang di

pimpin oleh tetua desa. Pagi harinya dilanjutkan upacara di lokasi keramat sesuai anggapan masyarakat.

Tradisi Sedekah Laut

Menurut informasi dari Kemendikbud, Sedekah Laut Cilacap sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2016. Tradisi sedekah laut ini dihelat pada hari Jumat Kliwon bulan Syura setiap tahun. Pada mulanya, tradisi sedekah laut Cilacap berawal dari gagasan Bupati Cilacap ke III Tumenggung Tjakrawerdya III yang memerintahkan tetua di Kabupaten Cilacap, Ki Arsa Menawi untuk melarung sesaji ke laut selatan beserta nelayan lainnya pada hari Jumat Kliwon bulan Syura tahun 1875. Sedekah laut ini bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tangkapan ikan pada musim panen ikan melimpah dan para nelayan diberi keselamatan.

Tradisi ini berupa ritual upacara dengan membawa kepala kerbau yang selanjutnya dibawa dengan perahu menuju ke tengah laut. Kegiatan seremonial ini didahului dengan prosesi ziarah ke Pantai Karang Bandung yang terletak di Pulau Majethi, sebelah timur tenggara Pulau Nusakambangan. Ziarah ini dipimpin oleh ketua adat Nelayan Cilacap dan diikuti berbagai kelompok nelayan serta masyarakat. Tujuan dari prosesi ziarah ini yaitu agar nelayan mendapatkan dukungan semangat dari para leluhur, sehingga bisa mendapatkan tangkapan ikan yang maksimal. Upacara sedekah laut ini juga dilakukan dengan prosesi mengambil air suci di sekitar Pulau Majethi. Tempat tersebut merupakan tempat tumbuhnya bunga Wijayakusuma, yang dipercaya masyarakat sebagai bunga yang melambangkan keberhasilan (terkait dengan seremoni ini yaitu keberhasilan dalam menangkap ikan).

Saat ini kelompok nelayan yang menggelar sedekah laut berjumlah 8 kelompok dengan menggunakan pakaian adat tradisional Nelayan Kabupaten Cilacap. Prosesi sedekah laut setidaknya melarung 9 jolen (perahu kecil yang memuat sesaji), 8 jolen dari para nelayan dan satu jolen tunggul (utama) dari Pemkab Cilacap. Sebelum jolen di larung, jolen-jolen tersebut di arak dari pendopo Wijayakusuma sakti Cilacap menuju ke pantai Teluk Penyu Cilacap diiringi dengan kesenian tradisional. Rangkaian prosesi dilanjutkan dengan syukuran dengan menggelar kesenian Wayang Kulit semalam suntuk usai larung sesaji, pada Jumat malam oleh masing-masing kelompok nelayan cilacap.

Kesenian Ebeg/Kuda Kepang/Kuda Lumping

Ebeg adalah tarian unik khas Banyumas yang menggunakan kuda kepang sebagai alat tariannya. Tari ini menggambarkan kegagahan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Dalam pertunjukannya *ebeg* diiringi oleh gamelan yang lazim disebut *bendhe*. Hal yang paling menarik dari tarian ini adalah ketika para penarinya kerauhan atau kemasukan roh yang dikendalikan oleh para dukun *Ebeg*. Mereka akan melakukan apa saja yang diminta oleh sang Dukun. Dari makan makanan yang tidak wajar seperti beling, atau serabut kelapa atau daun daunan sampai memanjat pohon kelapa dengan cepat akan mereka lakukan. Pertunjukan magis ini akan semakin seru ketika seorang penonton "*ketempelan*" roh dan menjadi salah satu penarinya. Jadi hati-hati ketika anda menontonnya, jangan terlalu dekat kalau tidak mau *ketempelan*.

Kesenian Lengger

Sampai sekarang Tarian Lengger Banyumasan masih menjadi budaya tari yang melestari di daerah Banyumas dan sekitarnya. Kesenian ini umumnya disajikan oleh dua orang wanita atau lebih. Pada pertengahan pertunjukkan hadir seorang penari pria yang lazim disebut *badhut*, Lengger disajikan di atas panggung pada malam hari atau siang hari dan diiringi oleh perangkat musik calung. Pada akhirnya nanti para penari ini akan mengajak Anda untuk menari bersama mereka dan tradisinya adalah ketika penonton ikut menari, mereka akan memberikan uang saweran atau sumbangan.

3.5.2. Budaya Benda (*Tangible*)

Peran Warisan Budaya Benda (WBB) dalam membentuk identitas kota bisa beragam, dari mulai membentuk identitas dan karakter kota berdasar, sebagai pembelajaran sejarah nilai-nilai budaya masa lampau bagi generasi muda, dan sebagai daya tarik untuk pengembangan pariwisata daerah.

Di Kabupaten Cilacap, terdapat 22 Warisan Budaya Benda yang sebagian besar terletak di Kecamatan Dayeuluhur berjumlah 21 situs dan bangunan, dan 1 di Kecamatan Kasugihan. Sekilas dari keseluruhan, dapat dipahami bahwa ada 2 budaya besar yang mempengaruhi keberadaan WBB tersebut saat ini. Pertama, yaitu budaya barat serta segala respon terhadapnya yang muncul di kisaran masa penjajahan. Kedua, yaitu akulturasi budaya Islam ke Kabupaten Cilacap yang pada masa lampau merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas. Sedangkan secara bentuk, WBB dibedakan menjadi: dan 9 Bangunan dan 13 Situs, (kejadian, atau struktur, atau objek, atau hal lain baik virtual maupun aktual, terjadi di masa lampau, sekarang, atau direncanakan. Berikut data 22 situs/bangunan tersebut:

Tabel 37. Warisan Budaya Benda di Kabupaten Cilacap

No	Nama Situs/Bangunan	Kategori
1	Situs Ci Jambu	Situs
2	Pintu Gerbang/Regol Kabupaten	Situs
3	Sumur Gemuling	Situs
4	Makam Santri Undik	Situs
5	Makam Adipati Mangku Prala	Situs
6	Benteng Karangbolong	Bangunan
7	Benteng Klinkers (Banyu Nippa)	Bangunan
8	Rumah Sinder Kebun Karet Cilongkrang	Bangunan
9	Makam Adipati Cilacap Karangsucu	Situs
10	Lonceng Kuno Art. Const	Situs
11	Gedung Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Bangunan
12	Watu Lumpang dan Alu	Situs
13	Masjid Agung Darussalam Cilacap	Bangunan
14	Dermaga Pelabuhan I Cilacap	Bangunan
15	Makam Kiai Somalangu (Kiai Mahfudh Abdurrohman)	Situs
16	Bunker Tanjung Intan 1 (Depan Kantor Pelindo III) Cilacap	Bangunan
17	Bunker Tanjung Intan 2 (Belakang Kantor Pelindo III) Cilacap	Bangunan
18	Makam Kerkhof (Taman Bunga Kamboja) Cilacap	Situs

No	Nama Situs/Bangunan	Kategori
19	Watu Lingga Penyarang	Situs
20	Watu Lingga Pesanggrahan	Situs
21	Makam Daun Lumbung	Situs
22	Benteng Pendem	Bangunan

Sumber: Data Referensi Kemendikbud, 2022



BAB 4

ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN CILACAP

BAB 4. ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN CILACAP

4.1. Analisis Kesenjangan (Gap)

Untuk menentukan strategi pembangunan *Smart City*, perencana atau pemerintah perlu mengetahui dan mengidentifikasi *gap* (kesenjangan) yang terjadi di wilayahnya. Gap dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan selisih antara target atau kondisi ideal yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Indikator yang digunakan dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Dalam dokumen Master Plan *Smart City* Kabupaten Cilacap yang disusun pada tahun 2023, dimana saat dokumen ini disusun RPJMD Kab Cilacap sudah habis masa berlaku, maka digunakanlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab Cilacap sebagai acuan.

Tahap yang pertama dilakukan adalah (1) mengidentifikasi misi dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap yang sesuai dengan dimensi dalam *Smart City* yaitu *smart governance*, *smart living*, *smart environment*, *smart society*, *smart environment* dan *smart economy*. Tahap ke dua (2) adalah menentukan indikator keberhasilan dari sasaran yang ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku dalam hal ini adalah RPD Kabupaten Cilacap. Tahap ke tiga (3) adalah menguraikan selisih yang harus dicapai atau mencari gap dari target yang ditetapkan dengan kondisi *existing* di Kabupaten Cilacap.

4.1.1. Analisis Kesenjangan Smart Governance

Dalam *Smart Governance*, terdapat tiga sub dimensi yang harus diimplementasikan ke dalam tiga unsur, yaitu pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, dan efisiensi kebijakan. Dalam bagian ini, terdapat kesenjangan pada dimensi *Smart Governance* melalui analisis pada perkembangan terkini, kondisi ideal yang diinginkan, pemetaan kesenjangan, serta arah kebijakan dan strategi.

Tabel 38. Rangkuman Analisis Kesenjangan Smart Governance Kabupaten Cilacap

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1	Terdapat Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberi kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu dalam satu pintu sehingga mampu memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, dan terjangkau kepada masyarakat secara optimal	Masih terdapat beberapa dinas yang masih belum menyerahkan kewenangannya sehingga pelaksanaan MPP masih belum optimal	Optimalisasi DPMPSTSP untuk urusan pelayanan publik yang terpadu dalam satu pintu
2	Adanya kecenderungan masyarakat dalam mengakses pelayanan	Terwujudnya pelayanan publik melalui sistem <i>online</i> atau digitalisasi	Masih terdapat pelayanan publik yang konvensional	Optimalisasi penggunaan teknologi digital

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
	publik secara <i>online</i>	aplikasi layanan sehingga memudahkan masyarakat untuk diakses kapan dan di mana saja		
3	Adanya kecenderungan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan pelayanan publik yang cepat dan mudah		Kekurangan pegawai dengan latar belakang pendidikan IT	Optimalisasi program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan dengan berbasis IT
4	Tersedia <i>data base</i> dalam urusan kependudukan	<i>Data base</i> kependudukan yang terintegrasi dalam semua layanan publik	Belum terintegrasi secara keseluruhan	Peningkatan sistem pengelolaan penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan efektif
5.	Terdapat beberapa proses pelayanan publik yang masih bersifat konvensional	Digitaliasi dan modernisasi pelayanan publik melalui sistem informasi dan teknologi	Keterbatasan pada sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur	Pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan pada pembangunan infrastruktur
6.	Birokrasi yang masih berbelit-belit dan memerlukan waktu yang panjang	Birokrasi yang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.	Masih terdapat sistem tata kelola yang tradisional	Peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing urusan pemerintah daerah dan peningkatan kompetensi ASN
7.	Terlalu banyak aplikasi yang membingungkan bagi masyarakat	Satu aplikasi yang bisa diakses untuk semua layanan secara terintegrasi baik data maupun dinas terkait	Keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih aplikasi dari daerah maupun pusat	Integrasi sistem aplikasi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.1.2. Analisis Kesenjangan *Smart Branding*

Pada komponen *smart branding*, ada 3 sub dimensi yang dipertimbangkan yaitu, Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (tampilan) kota. Dalam bagian ini, terdapat kesenjangan pada dimensi *Smart Branding* melalui analisis pada perkembangan terkini, kondisi ideal yang diinginkan, pemetaan kesenjangan, serta arah kebijakan dan strategi.

Tabel 39. Rangkuman Analisis Kesenjangan *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Terdapat banyak destinasi dan potensi wisata, namun pengelolaannya belum optimal	Pengelolaan wisata oleh yang optimal.	Keinginan (<i>willingness to do</i>) dalam pengelolaan dan kapasitas SDM	Pengembangan kapasitas pengelolaan wisata oleh komunitas
2	Jumlah kunjungan masih minim karena lebih banyak wisatawan musiman serta wisatawan yang tidak menjadikan destinasi Cilacap sebagai tujuan utama (destinasi transit), selain itu masyarakat Cilacap lebih senang berwisata ke luar Kabupaten Cilacap	Kunjungan wisata tinggi, baik wisatawan nusantara dari luar Cilacap maupun domestic dalam kabupaten, dan secara khusus wisatawan mancanegara.	Keterbatasan kelembagaan dan SDM perancang dan pengelola pariwisata	Masterplan pariwisata mencakup arah pengembangan dan segmentasi wisata tepat
3	Telah ada berbagai event untuk skala lokal-nasional, untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif, dan pariwisata secara berkelanjutan.	Event dinyatakan berhasil meningkatkan pendapatan daerah pada sektor industri kreatif dan pariwisata, namun masih bersifat musiman (tergantung kapan event diselenggarakan)	Integrasi pemasaran sektor industri kreatif pada saat event berlangsung	Pelibatan <i>stakeholders</i> industri kreatif dan pariwisata dalam penyelenggaraan event.
4	Aksesibilitas ke destinasi wisata sulit dan fasilitas wisata banyak yang rusak	Aksesibilitas dan fasilitas wisata yang baik, sehingga wisata aman dan nyaman.	- Ketersediaan moda dan jalur transportasi - pemeliharaan fasilitas wisata kurang memadai	Pengembangan transportasi wisata dan standar fasilitas destinasi
5	Packaging pada produk-produk UMKM masih banyak yang belum menunjukkan ciri khas Kabupaten Cilacap	Produk UMKM maju dan menjadi media branding Kabupaten Cilacap	Kapasitas SDM pemasaran produk UMKM	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam pemasaran (Desain <i>packaging</i> dan <i>branding</i>) produk.
6	Memiliki budaya yang dapat ditampilkan sebagai <i>landmark</i> dan ornamen kota	<i>Landmark</i> dan ornamen kota menunjukkan ciri khas Cilacap	Tata Ruang Kota	Perbaikan tata ruang kota baik fisik maupun virtual (<i>website resmi</i>)

Sumber: Analisis Tim pembimbing dan FDG Bimtek 1, 2023

4.1.3. Analisis Kesenjangan *Smart Economy*

Kondisi ekonomi di Kabupaten Cilacap sesungguhnya menunjukkan perbaikan pada berbagai aspek. Kendati demikian, untuk mewujudkan *Smart City* pada dimensi ekonomi, sub-dimensi ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan ekosistem transaksi keuangan masih terdapat beberapa kesenjangan. Tabel berikut menunjukkan rangkuman identifikasi kesenjangan dalam dimensi *smart economy* berdasarkan hasil FGD dengan OPD.

Tabel 40. Rangkuman Analisis Kesenjangan *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

No	Kondisi <i>Existing</i> Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Kondisi kemiskinan masih tinggi dan menjadi tantangan untuk diturunkan	Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dengan memberikan program perbaikan perlindungan sosial
2.	Semua sisi kehidupan sudah memanfaatkan internet di Era 4.0/4.1	Cilacap dapat memanfaatkan kondisi ini untuk kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya penggunaan teknologi internet untuk menyejahterakan masyarakat	Optimalisasi penggunaan internet dengan mencukupi sarana dan prasaran seperti spot wifi gratis bagi masyarakat
3.	Pelayanan dan akses permodalan dan lembaga keuangan masih belum maksimal	Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan permodalan untuk membuka usaha	Belum optimalnya layanan permodalan bagi usaha masyarakat (UMKM)	Optimalisasi peran swasta dalam kerja sama permodalan bagi usaha masyarakat (UMKM)
4.	Tidak adanya pusat bisnis dan perbelanjaan di Kab Cilacap	Adanya pusat bisnis dan perbelanjaan yang nyaman, aman, mudah dan lengkap	Minimnya pasar baik modern maupun tradisional	Penyediaan dan pembangunan pusat bisnis dan perbelanjaan yang nyaman, aman, mudah dan lengkap
5.	Tidak adanya destinasi wisata unggulan yang perencanaannya terintegrasi dengan bisnis lainnya	Adanya destinasi wisata unggulan yang menyerap tenaga kerja dan menyediakan kesempatan berusaha	Minimnya pengelolaan destinasi wisata	Peningkatan dan optimalisasi destinasi wisata, pemasaran wisata, kelembagaan

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
		bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan Cilacap		wisata dan kolaborasi industri wisata.
6.	Pembayaran masih banyak yang tunai	Adanya transformasi pembayaran non-tunai	Minimnya fasilitas dan utilitas untuk pembayaran non tunai	Penyediaan fasilitas, utilitas, dan SDM untuk optimalisasi pembayaran non tunai.
7.	Rendahnya hubungan antara swasta dan pemerintah dalam pemanfaatan dana CSR	Adanya hubungan yang baik dengan <i>road map</i> penggunaan dana CSR yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan	Minimnya kolaborasi <i>pentahelix</i>	Peningkatan kerja sama <i>pentahelix</i> terutama dengan sektor swasta dalam CSR
8.	Sulitnya menyimpan hasil pangan untuk lebih tahan lama dan terdistribusi dengan baik	Adanya sistem resi gudang yang dapat digunakan untuk mendukung distribusi hasil pangan	Minimnya fasilitas pergudangan	Penyediaan fasilitas resi gudang yang dapat mendukung distribusi hasil pangan

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.1.4. Analisis Kesenjangan *Smart Living*

Pada komponen *Smart Living*, ada tiga sub dimensi yang dipertimbangkan yaitu, Harmonisasi Tata Ruang, Kesehatan, dan Transportasi.

Tabel 41. Rangkuman Analisis Kesenjangan *Smart Living* Kabupaten Cilacap

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Banyak sampah visual di jalanan Kabupaten Cilacap	Jalanan bersih dari sampah visual	Kebijakan daerah	Perbaikan dan implementasi kebijakan daerah
2.	Banyak pengamen dan tuna karya di jalanan Kabupaten Cilacap	Jalanan bersih dari pengamen dan tuna karya	Kebijakan daerah	a. Perbaikan dan implementasi kebijakan daerah b. program pengembangan SDM
3.	Transportasi publik dalam kabupaten sangat terbatas,	Terkoneksi oleh transportasi publik baik	Minimnya transportasi	Perencanaan dan pengembangan

	ada keterbatasan mobilitas penduduk di dalam kabupaten maupun keluar kabupaten apabila tidak memiliki kendaraan pribadi	di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten lain.	publik, kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.	transportasi publik.
4.	Cilacap adalah kabupaten industri. Sementara itu, Usia Angkatan kerja tinggi, namun tingkat Pendidikan masih rendah.	SDM Cilacap berkualitas tinggi yang mampu menduduki posisi baik di perusahaan maupun menghasilkan lapangan pekerjaan sendiri.	Banyak generasi muda putus sekolah lanjutan pertama dan menengah atas	Optimalisasi SKB dan pendampingan generasi muda.
5.	Perilaku menyimpang seksual mulai menjadi hal biasa yang bertentangan dengan norma agama dan budaya	Penduduk Cilacap (generasi muda) sehat, jasmani dan rohani	Generasi muda menormalkan perilaku LGBT	Pendampingan generasi muda.
6.	Perkembangan teknologi informasi sangat cepat sehingga mengancam generasi muda khususnya yang tingkat Pendidikan rendah karena kemampuan menyaring informasi.	Penduduk Cilacap cerdas dalam pemanfaatan teknologi informasi.	Masifnya arus TI yang masuk ke Cilacap	Kampanye internet sehat, dan pengembangan aktivitas minat bakat generasi muda supaya dapat lebih memanfaatkan TI dengan lebih bijak dan positif

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.1.5. Analisis Kesenjangan *Smart Society*

Dalam *Smart Society*, terdapat tiga sub dimensi yang harus diimplementasikan ke dalam tiga unsur, yaitu interaksi masyarakat yang efisien, membangun ekosistem belajar yang positif, dan mewujudkan keamanan masyarakat. Untuk melakukan strategi dalam pembangunan *Smart City*, maka perlu adanya analisis terkait kesenjangan pada dimensi *Smart Society* yang meliputi analisis pada perkembangan yang terjadi di masyarakat, harapan masyarakat dalam berkehidupan antar sesama, kemudian dilakukan pemetaan terhadap kesenjangan, terakhir mengarah pada arah kebijakan dan strategi.

Tabel 42. Rangkuman Analisis Kesenjangan *Smart Society* Kabupaten Cilacap

No	Kondisi Existing Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1	Kecenderungan masyarakat dalam berinteraksi secara maya	Masyarakat menguasai teknologi digital tanpa mengurangi nilai dalam berinteraksi secara langsung maupun dalam komunitas masyarakat sebagai bentuk produktivitas	Interaksi sosial	Optimalisasi program untuk kepemudaan serta menciptakan komunitas sebagai platform untuk peningkatan keahlian atau <i>skill</i>
2	Kurangnya tingkat literasi masyarakat terhadap penerimaan informasi	Terwujudnya ekosistem belajar atau edukasi literasi masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sedang, serta rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Menciptakan sistem pengelolaan arsip dan perpustakaan serta digitalisasi bahan bacaan pada perpustakaan
3	Kesadaran masyarakat akan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Terwujudnya keterbukaan masyarakat yang lebih tinggi dalam melakukan pelaporan	Birokrasi pelayanan yang berbelit-belit dan lama	Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keamanan masyarakat

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.1.6. Analisis Kesenjangan *Smart Environment*

Untuk mengetahui kesenjangan dalam dimensi *Smart Environment*, setidaknya ada tiga sub-dimensi yang coba di analisis kondisi *existing* dan ideal yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap diantaranya: proteksi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah serta tata kelola energi. Secara detail, kondisi yang diinginkan adalah penggunaan material limbah industri sebagai pengganti material konstruksi jalan, tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (sempadan sungai dan pantai), penggunaan *digital ecosystem* dalam pengelolaan sampah, adanya pengelolaan kebencanaan yang baik terintegrasi dan menggunakan teknologi, dan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi optimal. Tabel berikut menjelaskan analisis kesenjangan *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap.

Tabel 43. Rangkuman Analisis Kesenjangan *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

No	Kondisi <i>Existing</i> Saat ini	Kondisi ideal yang diinginkan/ditargetkan	Gap/ kesenjangan	Indikasi Arah Kebijakan dan Strategi
1.	Rendahnya penggunaan material limbah industri sebagai pengganti material konstruksi jalan	Penggunaan material limbah industri sebagai pengganti material konstruksi jalan	Rendahnya <i>reuse/ recycle</i>	Optimalisasi limbah untuk barang yang lebih produktif
2.	Rendahnya kesadaran untuk menjaga lingkungan sempadan sungai	Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (sempadan sungai dan pantai)	Rendahnya kesadaran	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sempada sungai dari sampah dan hunian liar
3.	Pengelolaan sampah belum menggunakan digital <i>ecosystem</i>	Penggunaan digital <i>ecosystem</i> dalam pengelolaan sampah	Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah	Optimalisasi penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah (<i>reuse, reduce, recycle</i>)
4.	Rendahnya pengelolaan kebencanaan	Kebencanaan dikelola dengan baik melalui pengurangan Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kabupaten Cilacap	Rendahnya pengelolaan bencana	Peningkatan pengelolaan bencana
5.	Penggunaan energi masih berbasis fosil	Penggunaan energi baru terbarukan terutama dengan <i>solar cell</i>	Ketersediaan energi	Pengembangan sumber energi baru terbarukan dengan <i>solar cell</i> , termasuk di dalamnya membangun tata kelola energi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.2. Analisis SWOT Pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap

Dalam *Master Plan Smart City* Kabupaten Cilacap digunakan pendekatan SWOT untuk mengombinasikan kondisi internal dan eksternal wilayah Cilacap dalam konteks pengembangan *Smart City*. Untuk bab Analisis SWOT akan dibahas hanya daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. Sedangkan untuk strategi atau solusi dari *cross-tab* SW/OT akan dibahas dalam sub bab 4.3. tentang TOWS.

4.2.1. SWOT Smart Governance

Untuk mewujudkan *Smart City*, perlu dilakukan analisis pada tiap-tiap dimensi *Smart City* yang disesuaikan dengan isu-isu di daerah. Dalam dimensi *Smart Governance*, terdapat banyak hal yang harus dianalisis meliputi identifikasi pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal oleh Kabupaten Cilacap serta peluang dan ancaman dari luar yang berpotensi muncul di Kabupaten Cilacap. Pemetaan SWOT tersebut kemudian akan menghasilkan strategi pembangunan dalam *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mendorong peningkatan terhadap pelayanan publik untuk masyarakat mulai dari pelayanan administrasi hingga penyediaan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan juga diharapkan dapat ditekankan pada birokrasi sehingga dapat berjalan secara efisien. Terlebih, berfokus pada peningkatan efisiensi kebijakan publik dengan mempermudah akses informasi dan mengutamakan pada aspek yang dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, adanya analisis strategi pada SWOT dimensi *Smart Governance* diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam penerapan dan pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya pemerintahan yang cukup memadai. Meskipun memiliki tidak terlalu banyak pegawai dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi, akan tetapi sudah cukup mumpuni dari segi kualitas. Sumber daya pemerintahan yang cukup menghasilkan sistem informasi yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Serta kekuatan lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sudah mengimplementasikan sistem pelayanan dengan satu pintu yang terpadu antardinas terkait. Sehingga, pengurusan pelayanan yang tertentu sudah sangat memudahkan dan tidak mengharuskan masyarakat untuk mengunjungi berbagai dinas yang berbeda. Di sisi lain, Kabupaten Cilacap masih memiliki kelemahan salah satunya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengadaan maupun pengembangan sumber daya pemerintah.

Dari sisi eksternal, terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Cilacap. Masyarakat Kabupaten Cilacap, memiliki keinginan yang tinggi terhadap kebutuhan informasi. Selain itu, Kabupaten Cilacap juga sudah terbuka kepada para investor dengan memudahkan pihak luar untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, di tengah kecanggihan teknologi informasi, banyak peluang yang dapat diambil oleh semua kalangan, seperti pegawai pemerintah yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kompetensinya secara online. Di sisi lain, Kabupaten Cilacap tidak lepas dari ancaman yang harus dihadapi. Salah satunya tuntutan dari masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah. Hal tersebut menyebabkan pegawai pemerintah harus berdinamika dan beradaptasi dengan cepat. Selain itu kerentanan sistem keamanan data pribadi yang memungkinkan diretas dalam sistem informasi. Hal lain yang menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah terdapat perubahan kebijakan setiap kali mengalami pergantian pemimpin. Ancaman ini cenderung menjadikan arah kebijakan menjadi berubah-ubah.

Tabel 44. Analisis SWOT Dimensi Smart Governance Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Adanya tenaga IT yang mencukupi - Mempunya sistem informasi yang baik - Tersedia sistem pelayanan satu pintu yang terpadu	Kurangnya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan sumber daya pemerintah
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	- Tingginya animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi - Kemudahan dalam berinvestasi - Banyak kesempatan bagi ASN untuk mengikuti pelatihan tidak berbayar secara <i>online</i>	- Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap penyediaan pelayanan yang cepat dan mudah - Terdapat perubahan kebijakan setiap pergantian pimpinan - Keamanan data pribadi dalam sistem informasi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.2.2. SWOT Smart Branding

Branding kota baiknya tercermin dalam aspek citra, *tagline* dan visi misi pengembangan kota, tata ruang kota seperti *landmark* atau *furniture* kota, produk-produk UMKM, dan pariwisata. Tentu saja, *branding* yang baik adalah yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di Cilacap, dan sesuai dengan nilai budaya setempat.

Dari segi kekuatan, Kabupaten Cilacap memiliki potensi budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang khas dan berpotensi dikemas menjadi daya tarik wisata. Selain itu, Cilacap memiliki produk UMKM yang potensial dipasarkan di dalam maupun luar kabupaten Cilacap. Untuk mendukung dua hal tersebut, event pariwisata beberapa kali digelar di Cilacap. Kekuatan lain yaitu telah ada perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang bisa mendukung pengembangan *Smart Branding*.

Meskipun begitu, berdasarkan pengamatan pemerintah daerah keinginan masyarakat Cilacap untuk membeli produk dalam daerahnya sendiri masih kecil, baik wisata maupun barang dan jasa. Hal tersebut mengakibatkan perputaran uang ke luar Cilacap menjadi tinggi. Belum lagi, data pendidikan dan presentase Angkatan kerja tahun 2023 di Cilacap yang relatif rendah mengindikasikan kualitas Sumber Daya Manusia di Cilacap masih perlu banyak ditingkatkan. Dua poin inilah yang menjadi kelemahan di Kabupaten Cilacap.

Perkembangan eksternal mempengaruhi pula potensi masa depan Kabupaten Cilacap. Pengembangan destinasi wisata sebagai contoh, apabila Kabupaten Cilacap tidak dapat mengimbangi daya Tarik kabupaten lain, maka dimungkinkan mengancam pariwisata Kabupaten Cilacap bertahan hanya di posisi destinasi transit, yang artinya tidak menjadi tujuan utama wisatawan dalam perjalanannya. Namun sebaliknya, kemampuan Kabupaten Cilacap membenahi pengelolaan pariwisata justru menimbulkan peluang pengembangan pariwisata bersama, saling mempromosikan satu dan yang lainnya. Ancaman lain dari keberadaan infrastruktur digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir yaitu penggunaannya yang tidak sesuai norma dan nilai-nilai kebudayaan Cilacap akan memberi citra negatif pada Kabupaten Cilacap, khususnya bagi pengguna internet di generasi muda, atau bahkan generasi lanjut yang rawan paparan perubahan teknologi yang pesat ini.

Untuk lebih jelasnya analisis SWOT pada dimensi Smart Branding Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45. Analisis SWOT Dimensi Smart Branding Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Keunikan topografi wilayah antara pesisir dan daratan, serta transisi suku Sunda dan Jawa yang menyebabkan hasil akulturasi budaya kuat. - Adanya daya Tarik budaya <i>tangible</i>, seperti situs dan bangunan cagar budaya - Adanya daya tarik tradisi dan warisan budaya <i>intangibile</i> yang kuat seperti kesenian, dan upacara - Telah ada perhelatan (event) wisata skala lokal-nasional - Merupakan kabupaten yang bercirikan religi, budaya Islam yang kuat. - Mulai ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi	- Pendidikan dan Kualitas SDM rendah dalam Angkatan kerja yang tinggi - Keinginan masyarakat untuk membelanjakan uang dan berwisata keluar dari Cilacap.
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	- Adanya potensi wisata yang baik dari kabupaten lain sehingga memberikan peluang promosi bersama dan tarikan wisata ke kabupaten Cilacap apabila destinasi wisata Cilacap dibenahi akses, fasilitas, dan pengelolaannya. - Dengan jaringan internet, ditambah potensi keterkaitan logistik memungkinkan peningkatan pemasaran produk melalui e-commerce ke luar kabupaten	- Pengembangan pariwisata daerah di sekitar dapat menjadi potensi baik, namun dapat menjadi ancaman memposisikan pariwisata Kabupaten Cilacap hanya sebagai area transit (<i>2nd destination</i>). - Imbas citra negatif Kabupaten Cilacap jika ada penggunaan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya terutama oleh generasi muda.

4.2.3. SWOT Smart Economy

Kabupaten Cilacap memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah keberadaan kilang minyak bumi yang telah dikelola oleh PT. Pertamina. Industri pemerintah ini telah memberikan kontribusi bagi perkembangan Kabupaten Cilacap dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, lapangan pekerjaan di PT. Pertama membutuhkan tenaga terampil dan *skill* pendidikan yang tinggi. Sehingga, kompetisi cukup tinggi untuk dapat masuk dalam industri ini. Kekuatan lain yang dimiliki Kabupaten Cilacap dalam dimensi *Smart Economy* adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, adanya

dukungan terhadap UMKM dan KIC memberikan ruang lebih baik untuk masyarakat berusaha secara kecil maupun menengah. Secara geografis, Cilacap memiliki hutan mangrove yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah budidaya tambak dan destinasi wisata.

Kendati demikian, kelemahan Kabupaten Cilacap dari sisi ekonomi terletak pada rendahnya komitmen dari perangkat daerah untuk menyerahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) sebagai koordinator. Kelemahan lain yang teridentifikasi adalah proporsi Pendapatan Asli Daerah masih rendah yaitu 21,27 persen dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan fungsi PLUT dalam pendampingan UMKM dirasa juga belum maksimal. Kelemahan lainnya adalah kontribusi dari BUMD terhadap PAD dirasa belum memadai. Hal hal diatas perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, dimana diharapkan Master Plan *Smart City* dapat menghasilkan program yang tepat pada sasaran menjawab kelemahan dan permasalahan ekonomi di Kabupaten Cilacap.

Pada kondisi eksternal, dapat diidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman. Peluang pengembangan ekonomi dalam dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap diantaranya adalah keberadaan program CSR dan TJSLP yang saat ini telah berjalan. Selain itu terdapat 12 Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia yang handal untuk masuk dalam ekosistem perekonomian Cilacap. Moda transportasi yang lengkap juga diidentifikasi sebagai peluang.

Ancaman atau *Threats* yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Cilacap adalah belum optimalnya penggunaan dana CSR oleh perusahaan yang belum selaras dengan prioritas pembangunan. Selain itu, hasil riset dan inovasi perguruan tinggi belum selaras dengan prioritas pembangunan. Teridentifikasi pula bahwa terdapat keterbatasan kewenangan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang sebagian besar berada di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, meskipun memiliki kekuatan karena adanya kawasan hutan mangrove, namun kewenangan pengelolaan kawasan mangrove berada di tingkat pemerintah provinsi dan nasional, hal ini agak menyulitkan Kabupaten Cilacap dalam mengambil manfaat.

Tabel 46. Analisis SWOT Dimensi *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Adanya MPP sebagai upaya peningkatan pelayanan untuk masyarakat - Adanya PLUT UMKM - Adanya KIC - Adanya APBD - Sumber daya alam yang tinggi (minyak bumi) - Mempunyai kawasan hutan mangrove	- Belum semua perangkat daerah memiliki komitmen untuk menyerahkan kewenangannya kepada DPMTSP selaku koordinator - Proporsi PAD masih rendah yaitu 21,27% dibanding APBD - Pelaksanaan fungsi PLUT dalam pendampingan UMKM belum maksimal - Kontribusi dari BUMD terhadap PAD belum memadai
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	- Adanya program CSR/TJSLP dari pihak swasta - Adanya 12 Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap yang membuka	- Rencana penggunaan dana CSR oleh perusahaan belum selaras dengan prioritas pembangunan. - Hasil riset dan inovasi perguruan tinggi

	peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM • Mempunyai moda transportasi yang lengkap	belum selaras dengan prioritas pembangunan. • Keterbatasan kewenangan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana transportasi sebagian besar berada di tingkat provinsi dan nasional. • Kewenangan pengelolaan kawasan mangrove berada di tingkat pemerintah provinsi dan nasional

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.2.4. SWOT *Smart Living*

Harmonisasi tata ruang, kesehatan, dan transportasi adalah fokus pembahasan pada dimensi *Smart Living*. Dari sudut pandang tata ruang, Cilacap termasuk dalam daerah yang strategis secara ekonomi, pernyataan tersebut dikuatkan dengan keberadaan kawasan industri Cilacap dan pintu jalur tol TransJawa yang terhubung langsung ke kabupaten Cilacap. Selain itu, Cilacap memiliki pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan terbesar sekaligus pintu masuk utama logistic curah kering di pantai selatan Jawa. Yang dimaksud dengan barang curah kering adalah barang yang berupa butiran padat atau berbentuk biji-bijian seperti batu bara, biji besi, palawija, tepung, dll. Cilacap juga dilewati jalur rel kereta api sehingga dapat dikatakan konektivitas transportasi ke kota lain lengkap.

Keberadaan kawasan strategis ini sebenarnya juga berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan apalagi jika tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik khususnya melalui kebijakan pemerintah. PLTU sebagai catatan, menurut berbagai sumber artikel keberadaan PLTU dapat menghasilkan tingginya zat termasuk merkuri, belerang dioksida, karbon monoksida, merkuri, selenium, dan arsenik. Zat ini menyebabkan Gangguan sistem pernapasan dan potensi kematian dini. Selain itu juga dapat merusak ekosistem baik tanah, air (sungai dan laut), serta udara.

Berdasarkan data pusat kesehatan masyarakat, Cilacap masih menghadapi tingginya permasalahan stunting dan gizi buruk pada anak-anak, penyakit menular seksual, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Di Cilacap terdapat 10 kawasan yang ditujukan sebagai Kawasan Pembangunan Industri (KPI), 3 diantaranya sudah sepenuhnya terbangun untuk kilang minyak, pabrik, pemukiman, dan terminal Bahan Bakar Minyak. 3 diantaranya sebagian terbangun untuk PLTU, pabrik, dan permukiman, sedangkan sisanya masih didominasi oleh ladang dan sawah. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 47 di bawah ini.

Tabel 47. Analisis SWOT Dimensi *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	• Letak wilayah yang strategis diantara pesisir dan dataran tinggi, memiliki Pelabuhan ikan, dan terhubung dengan jalur tol TransJawa • Tingginya penduduk usia sekolah dan “melek” teknologi • Memiliki ruang-ruang belajar informal	• Kemiskinan masih tinggi • Tingginya kasus <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk pada anak-anak • Tingginya Penyakit Menular Seksual • Tingginya penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut • Tingginya pelanggaran lalu lintas

	dan non-formal pada setiap level kecamatan	• Moda, dan fasilitas jalan kurang memadai, sehingga macet di jam sibuk dan parkir tidak teratur
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	• Masih banyak generasi muda usia SD-SMP-SMA untuk diperbaiki cara pandang terhadap Pendidikan, kesehatan, dan dikembangkan kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan hidupnya. • Dilewati jalur rel kereta dan tol Transjawa berpotensi membuka konektivitas dan alur logistik untuk perkembangan kota	• Limbah dari Keberadaan kawasan industri, dan PLTU/PLTG berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. • Keberadaan kawasan industri dengan lapangan kerja tinggi berpotensi mengancam generasi muda untuk bekerja tanpa keahlian spesifik, terserap sebagai tenaga kerja murah

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.2.5. SWOT Smart Society

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Cilacap sudah melek akan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di Kabupaten Cilacap sudah memiliki platform virtual terkait tata kelola pemerintahan. Sehingga, masyarakat yang sadar akan teknologi sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang sudah digital. Kemudian di lingkup masyarakat Kabupaten Cilacap ada komunitas belajar non formal dan informal yang cukup banyak. Hal tersebut mampu menunjang interaksi masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas individu.

Terlepas dari kekuatan yang dimiliki Kabupaten Cilacap, terdapat kelemahan yang perlu diatasi. Salah satunya adanya kecenderungan masyarakat dalam berinteraksi secara maya menjadi perhatian khusus karena dampak negatif dari teknologi informasi. Kemudian terdapat masyarakat dengan usia lanjut yang cenderung memiliki tingkat pemahaman rendah terhadap teknologi digital. Masyarakat juga memiliki tingkat literasi yang rendah dalam penerimaan informasi. Terakhir, masyarakat Cilacap masih dinilai memiliki kesadaran yang rendah terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kondisi eksternal Kabupaten Cilacap di antaranya memiliki peluang dalam perkembangan fasilitas teknologi informasi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses platform pembelajaran nasional dan global secara gratis yang disediakan oleh non-pemerintah. Untuk mengembangkan teknologi lebih jauh lagi, Kabupaten Cilacap memiliki sekolah kejuruan di bidang teknologi informasi. Sementara kondisi eksternal berupa ancaman yang memungkinkan terjadi di Kabupaten Cilacap adalah pengaruh negatif informasi dari luar yang menyebabkan menurunnya minat generasi muda pada seni tradisional. Selain itu, ancaman lainnya muncul dari daerah-daerah luar yang memiliki potensi lebih baik dari Kabupaten Cilacap sehingga menyebabkan tingkat perpindahan baik dari segi pendidikan maupun kehidupan.

Tabel 48. Analisis SWOT Dimensi Smart Society Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	• Masyarakat melek teknologi digital • Sudah ada platform virtual tata Kelola pemerintahan • Terdapat komunitas belajar non-formal dan informal yang cukup banyak (SKB)	• Kesadaran masyarakat akan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat rendah • Kecenderungan masyarakat dalam berinteraksi secara maya • Kurangnya tingkat literasi masyarakat dalam penerimaan informasi • Masih ada banyak generasi lanjut yang cenderung rendah tingkat penerimaan teknologi digital
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	• Perkembangan fasilitas TI sehingga memungkinkan masyarakat mengakses platform pembelajaran nasional dan global secara gratis yang disediakan oleh non-pemerintah • Ada banyak sekolah kejuruan di bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi	• Minat generasi muda pada seni tradisional semakin menurun karena pengaruh informasi dari luar • Kebanggaan rendah pada potensi kabupatennya sendiri yang rendah dapat mengakibatkan tingkat perpindahan ke kota lain tinggi untuk mencari Pendidikan dan penghidupan yang lebih baik menurut masyarakat.

4.2.6. SWOT Smart Environment

Kekuatan yang diidentifikasi dari kondisi lingkungan pada Dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap adalah: adanya teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang sudah dijanjikan sebagian, serta adanya kebijakan penurunan Gas Rumah Kaca dalam perencanaan. Kelemahan aspek lingkungan dalam *Smart Environment* adalah: habituasi hidup minim sampai belum optimal, partisipasi masyarakat dalam program hidup bersih belum maksimal, kurangnya sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah serta tingginya potensi bencana alam.

Secara eksternal, peluang dalam dimensi *Smart Environment* adalah terdapat banyak industri besar (swasta) di Kabupaten Cilacap yang dapat terlibat memanfaatkan energi hasil pengolahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil, adanya peningkatan ekosistem digital untuk lingkungan hidup dan kebijakan pusat tentang pengembangan Energi Baru Terbarukan yang cukup mendukung. Dalam Dimensi *Smart Environment* tantangan yang dihadapi terkait tingginya harga teknologi digital untuk pemanfaatan lingkungan. Tabel di bawah ini memberikan ringkasan analisis SWOT untuk dimensi Smart Environment Kabupaten Cilacap hasil FGD pada Bimtek 1.

Tabel 49. Analisis SWOT Dimensi *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Adanya teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang sudah dijalankan sebagian - Adanya kebijakan penurunan Gas Rumah kaca dalam perencanaan	- Habitiasi hidup minim sampai belum optimal - Partisipasi masyarakat dalam hidup bersih belum maksimal - Kurangnya sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah - Tingginya potensi bencana alam
Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
	- Terdapat banyak industri besar (swasta) di Cilacap untuk terlibat memanfaatkan energi hasil pengolahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil - Adanya peningkatan ekosistem digital untuk lingkungan hidup - Kebijakan pusat tentang pengembangan EBT cukup mendukung	Tingginya harga teknologi digital untuk pemanfaatan lingkungan.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3. Analisis TOWS Dimensi *Smart City* Kabupaten Cilacap

Analisis TOWS diterapkan dalam Master Plan *Smart City* sebagaimana SWOT. Pada analisis TOWS ini fokus pada strategi dari SWOT yang dtelah ditetapkan pada bab 4.2 sebelumnya. TOWS disusun terpisah berdasarkan dimensi masing masing.

4.3.1. TOWS *Smart Governance*

Setelah memetakan dan mengidentifikasi potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Kabupaten Cilacap, kemudian dirumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi dengan berfokus pada kekuatan dan peluang yang ada. Dalam *Smart Governance*, terdapat beberapa startegi yang dihasilkan, di antaranya sebagai berikut. 1) mengembangkan inovasi pada pelayanan publik; 2) melakukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; 3) peningkatan kualitas dan kompetensi ASN melalui pemanfaatan media online; 4) pengembangan kualitas SDM IT melalui pengembangan kompetensi; serta 6) mencari sumber pendanaan lainnya.

Tabel 50. Analisis TOWS Dimensi Smart Governance Kabupaten Cilacap

INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Adanya tenaga IT yang mencukupi - Mempunya sistem informasi yang baik - Tersedia sistem pelayanan satu pintu yang terpadu	Kurangnya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan sumber daya pemerintah
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
- Tingginya animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi - Kemudahan dalam berinvestasi - Banyak kesempatan bagi ASN untuk mengikuti pelatihan tidak berbayar secara <i>online</i>	Pengembangan inovasi pelayanan publik	- Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat - Peningkatan kompetensi ASN dengan memanfaatkan pelatihan <i>online</i>
Ancaman (<i>Threat</i>)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
- Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap penyediaan pelayanan yang cepat dan mudah - Terdapat perubahan kebijakan setiap pergantian pimpinan - Keamanan data pribadi dalam sistem informasi	Peningkatan kualitas SDM IT melalui pengembangan kompetensi	Mencari sumber pendanaan lainnya

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3.2. TOWS Smart Branding

Strategi mewujudkan Smart Branding di Cilacap dapat dimulai dari perbaikan Kebijakan Tata kota yang mempertimbangkan zona kawasan industri, dan visual wajah kota sesuai dengan *branding* kota yang dirumuskan bersama oleh jajaran pemerintah daerah dan disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya, perlu program penyusunan peta jalan pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung *branding* kota tersebut. Dalam sektor pariwisata, pengembangan destinasi prioritas diperlukan dengan mempromosikan daya Tarik kebudayaan Cilacap. Tentu saja pengembangan destinasi perlu diiringi dengan penguatan sektor pendidikan non-formal pada pengelolaan Pariwisata, dan pengembangan UMKM berwawasan global. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan Pelatihan Pariwisata non-formal bagi generasi muda untuk dapat menjadi perencana dan pengelola destinasi wisata unggulan.

Keberadaan perusahaan TI merupakan keuntungan bagi kabupaten karena dapat dirangkul pada program pemasaran wisata dan produk UMKM, khususnya melalui pemasaran digital. Untuk memaksimalkan citra Cilacap, perlu untuk menampilkan *Branding* (*tagline*, logo, gambar, dll) melalui pada produk-produk UMKM yang dipasarkan ke luar kabupaten

Potensi generasi muda di Cilacap dapat dibentuk untuk memiliki nilai-nilai dan budaya gemar belanja produk lokal dan cinta daerahnya sendiri. Serta Penguatan Pendidikan agama dan

budaya di lingkungan keluarga maupun sekolah yang berorientasi pada kemajuan peradaban secara positif dan mengikuti perkembangan jaman.

Tabel 51. Analisis TOWS Dimensi Smart Branding Kabupaten Cilacap

Internal External	Kekuatan (Strenght) - Keunikan topografi wilayah antara pesisir dan daratan, serta transisi suku Sunda dan Jawa yang menyebabkan hasil akulturasi budaya kuat. - Adanya daya Tarik budaya <i>tangible</i>, seperti situs dan bangunan cagar budaya - Adanya daya tarik tradisi dan warisan budaya <i>intangible</i> yang kuat seperti kesenian, dan upacara - Telah ada perhelatan (event) wisata skala lokal-nasional - Merupakan kabupaten yang bercirikan religi, budaya Islam yang kuat. - Mulai ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi	Kelemahan (Weaknesses) - Pendidikan dan Kualitas SDM rendah dalam Angkatan kerja yang tinggi - Keinginan masyarakat untuk membelanjakan uang dan berwisata keluar dari Cilacap.
	Peluang (Opportunities) - Adanya potensi wisata yang baik dari kabupaten lain sehingga memberikan peluang promosi bersama dan tarikan wisata ke kabupaten Cilacap apabila destinasi wisata Cilacap dibenahi akses, fasilitas, dan pengelolaannya. - Dengan jaringan internet, ditambah potensi keterkaitan logistik memungkinkan peningkatan pemasaran produk melalui e-commerce ke luar kabupaten	Strategi (S-O) - Pengembangan destinasi prioritas dengan mempromosikan kebudayaan Cilacap - Menampilkan <i>Branding</i> (<i>tagline</i>, logo, gambar, dll) melalui pada produk-produk UMKM yang dipasarkan ke luar kabupaten - Merangkul perusahaan TI pada pemasaran wisata dan produk UMKM

Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
- Pengembangan pariwisata daerah di sekitar dapat menjadi potensi baik, namun dapat menjadi ancaman memposisikan pariwisata Kabupaten Cilacap hanya sebagai area transit (2nd destination). - Imbas citra negatif Kabupaten Cilacap jika ada penggunaan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya terutama oleh generasi muda.	Penguatan Pendidikan agama dan budaya di lingkungan keluarga maupun sekolah yang berorientasi pada kemajuan peradaban secara positif dan mengikuti perkembangan jaman.	- Pelatihan Pariwisata non-formal bagi generasi muda untuk dapat menjadi perencana dan pengelola destinasi wisata unggulan - Kebijakan Tata kota yang mempertimbangkan zona kawasan industri, dan visual wajah kota sesuai <i>branding</i> kota

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3.3. TOWS Smart Economy

Analisis TOWS untuk *Smart Economy* dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Strategi yang disusun untuk menjawab kekuatan dan peluang adalah: 1) memaksimalkan pemanfaatan keberadaan 12 perguruan tinggi dan program CSR untuk peningkatan pengelolaan APBD dalam melaksanakan program prioritas pembangunan, 2) memaksimalkan keberadaan moda transportasi yang lengkap dalam meningkatkan fungsi MPP, PLUT untuk pemberdayaan UMKM dan pelayanan publik dan, 3) Memaksimalkan moda transportasi yang lengkap dalam pemanfaatan lahan KIC. Strategi yang diidentifikasi berdasarkan kelemahan dan peluang adalah dengan: meningkatkan alokasi dana CSR untuk mengalokasikan fungsi PLUT-KUMKM, meningkatkan kerja sama antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung program prioritas dan mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penyusunan riset dan inovasi program prioritas pembangunan.

Strategi untuk menjawab kekuatan dan ancaman adalah dengan meningkatkan dukungan APBD guna sinkronisasi program riset dan inovasi perguruan tinggi serta penggunaan CSR dengan prioritas pembangunan. Sedangkan strategi untuk menjawab kelemahan dan ancaman pada dimensi *smart economy* adalah: Mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk menyinergikan rencana penggunaan dana CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan PAD; Meningkatkan kerja sama antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung program prioritas dan Mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penyusunan riset dan inovasi program prioritas pembangunan.

Tabel 52. Analisis TOWS Dimensi Smart Economy Kabupaten Cilacap

Internal External	Kekuatan (Strenght) - Adanya MPP sebagai upaya peningkatan pelayanan untuk masyarakat - Adanya PLUT UMKM - Adanya KIC - Adanya APBD - Sumber daya alam yang tinggi (minyak bumi) - Mempunyai kawasan hutan mangrove	Kelemahan (Weaknesses) - Belum semua perangkat daerah memiliki komitmen untuk menyerahkan kewenangannya kepada DPMPTSP selaku koordinator - Proporsi PAD masih rendah yaitu 21,27% dibanding APBD - Pelaksanaan fungsi PLUT dalam pendampingan UMKM belum maksimal - Kontribusi dari BUMD terhadap PAD belum memadai
	Peluang (Opportunities) - Adanya program CSR/TJSLP dari pihak swasta - Adanya 12 Perguruan Tinggi di Kabupaten Cilacap yang membuka peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM - Mempunyai moda transportasi yang lengkap	Strategi (S-O) - Memaksimalkan pemanfaatan keberadaan 12 perguruan tinggi dan program CSR untuk peningkatan pengelolaan APBD dalam melaksanakan program prioritas pembangunan - Memaksimalkan keberadaan moda transportasi yang lengkap dalam meningkatkan fungsi MPP, PLUT untuk pemberdayaan UMKM dan pelayanan publik - Memaksimalkan moda transportasi yang lengkap dalam pemanfaatan lahan KIC
	Ancaman (Threats) - Rencana penggunaan dana CSR oleh perusahaan belum selaras dengan prioritas pembangunan. - Hasil riset dan inovasi perguruan tinggi belum selaras dengan prioritas pembangunan. - Keterbatasan kewenangan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana transportasi sebagian besar berada di tingkat provinsi dan nasional. - Kewenangan pengelolaan kawasan mangrove berada di tingkat pemerintah provinsi dan nasional	Strategi (S-T) Meningkatkan dukungan APBD guna sinkronisasi program riset dan inovasi perguruan tinggi serta penggunaan CSR dengan prioritas pembangunan
		Strategi (W-O) - Meningkatkan alokasi dana CSR untuk mengalokasikan fungsi PLUT-KUMKM - Meningkatkan kerja sama antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung program prioritas - Mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penyusunan riset dan inovasi program prioritas pembangunan
		Strategi (W-T) - Mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk menyinergikan rencana penggunaan dana CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan PAD - Meningkatkan kerja sama antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung program prioritas - Mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penyusunan riset dan inovasi program prioritas pembangunan

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3.4. TOWS Smart Living

Permasalahan tata ruang kota di Kabupaten Cilacap erat kaitannya dengan keberadaan kawasan industri dan fasilitas pembangkit listrik. Selain memberi dampak pada alur mobilitas manusia, dan wajah kota, hal tersebut juga secara signifikan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan tata ruang kota antara lain dengan mereview Kembali zonasi wilayah dengan pertimbangan potensi daerah, fungsi kawasan, dan dampak pembangunan kawasan khusus. Selain itu review kembali kebijakan jalur transportasi, serta pertimbangan untuk memperbaiki konektivitas dan moda infrastruktur publik yang mewadahi dan mempertimbangkan segala aktivitas perekonomian masyarakat serta sektor-sektor lain.

Secara parallel, dalam review kebijakan tata kawasan, perlu kesiapan lebih fasilitas kesehatan dalam menghadapi situasi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat saat ini. Caranya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola hidup lebih sehat, khususnya melalui sekolah-sekolah. Kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penanganan penyakit umum masyarakat Cilacap juga perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan permasalahan jumlah presentase Angkatan sekolah yang belum maksimal, artinya ada indikasi keadaan dimana usia sekolah dan produktif kerja mengalami stagnasi dalam penggalan ilmu dan keahlian. Dengan usia Angkatan kerja yang berpendidikan rendah, muncul potensi bahwa mereka hanya akan diserap sebagai tenaga kerja dengan keahlian rendah. Di sisi lain, pembangunan kota cerdas tentu saja memerlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Maka untuk memecahkan hal tersebut, perlu Peningkatan kualitas generasi muda dengan Pendidikan formal dan non-formal/informal untuk kesiapan pembangunan kota cerdas. Institusi Pendidikan perlu juga berpikir untuk mengoptimalkan pendidikan *life skill* pada kurikulum SD-SMA agar generasi muda mampu mengakses pekerjaan dengan kualifikasi lebih baik dan secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan perkapita daerah.

Tabel 53. Analisis TOWS Dimensi Smart Living Kabupaten Cilacap

Internal	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Letak wilayah yang strategis diantara pesisir dan dataran tinggi, memiliki Pelabuhan ikan, dan terhubung dengan jalur tol TransJawa - Tingginya penduduk usia sekolah dan “melek” teknologi - Memiliki ruang-ruang belajar informal dan non-formal pada setiap level kecamatan	- Kemiskinan masih tinggi - Tingginya kasus <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk pada anak-anak - Tingginya Penyakit Menular Seksual - Tingginya penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut - Tingginya pelanggaran lalu lintas - Moda, dan fasilitas jalan kurang memadai, sehingga macet di jam sibuk dan parkir tidak teratur
External		

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
- Masih banyak generasi muda usia SD-SMP-SMA untuk diperbaiki cara pandang terhadap Pendidikan, kesehatan, dan dikembangkan kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan hidupnya. - Dilewati jalur rel kereta dan tol Transjawa berpotensi membuka konektivitas dan alur logistik untuk perkembangan kota	- Review Kembali zonasi wilayah dengan pertimbangan potensi, dan dampak kawasan. - Peningkatan kualitas generasi muda dengan Pendidikan formal dan non-formal/informal untuk kesiapan pembangunan kota cerdas	- Menoptimalkan pendidikan <i>life skill</i> pada kurikulum SD-SMA agar generasi muda mampu mengakses pekerjaan dengan kualifikasi lebih baik dan secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan perkapita. - Pemahaman generasi muda melalui sekolah-sekolah tentang budaya hidup sehat dan berkendara yang aman.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
- Limbah dari Keberadaan kawasan industry, dan PLTU/PLTG berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. - Keberadaan kawasan industri dengan lapangan kerja tinggi berpotensi mengancam generasi muda untuk bekerja tanpa keahlian spesifik, terserap sebagai tenaga kerja murah	- Peningkatan kapasitas pusat kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam penanganan penyakit umum masyarakat Cilacap. - Review kembali kebijakan jalur transportasi	Perbaikan konektivitas dan moda infrastruktur publik yang mewadahi dan mempertimbangkan segala aktivitas perekonomian masyarakat serta sektor-sektor lain

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3.5. TOWS Smart Society

Dalam dimensi Smart Society secara khusus menyoroti permasalahan tingkat literasi digital pada masyarakat serta apresiasi terhadap hasil dan warisan kebudayaan. Dari analisis SWOT didapatkan beberapa strategi terkait dengan peningkatan literasi digital antara lain dengan memberi fasilitas belajar bagi generasi muda. Salah satu caranya adalah dengan penggalakan Gerakan belajar melalui platform digital dan tidak bergantung pada platform yang disediakan pemerintah/Lembaga akademik, serta melibatkan sekolah kejuruan dalam menghasilkan platform *online* maupun *hardware* dalam melayani masyarakat demi menuju kota cerdas. Selain generasi muda secara khusus, masyarakat umum juga dapat difasilitasi transfer ilmu dengan pendampingan para siswa kejuruan melalui program pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan apalagi dengan potensi Kabupaten Cilacap yang memiliki sekolah kejuruan bidang teknologi informasi cukup banyak.

Pada sektor pelestarian warisan budaya, dapat dilakukan digitalisasi arsip kebudayaan, dan penanaman nilai-nilai budaya pada generasi muda melalui media digital supaya mereka lebih tertarik belajar. Adanya gap generasi dapat diatasi dengan menggandeng dan menjembatani generasi senior untuk mentransfer ilmu dan pengetahuan budaya pada platform digital.

Tabel 54. Analisis TOWS Dimensi Smart Society Kabupaten Cilacap

Internal External	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Masyarakat melek teknologi digital - Kecenderungan masyarakat dalam berinteraksi secara maya - Sudah ada platform virtual tata Kelola pemerintahan - Terdapat komunitas belajar non-formal dan informal yang cukup banyak (SKB)	- Kesadaran masyarakat akan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat rendah. - Kurangnya tingkat literasi masyarakat dan penerimaan informasi - Masih ada banyak generasi lanjut yang cenderung rendah tingkat penerimaan teknologi digital
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
- Perkembangan fasilitas TI sehingga memungkinkan masyarakat mengakses platform pembelajaran nasional dan global secara gratis yang disediakan oleh non-pemerintah - Ada banyak sekolah kejuruan di bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi	- Penggalakan Gerakan belajar melalui platform digital dan tidak bergantung pada platform yang disediakan pemerintah/Lembaga akademik - Melibatkan sekolah kejuruan dalam menghasilkan platform <i>online</i> maupun <i>hardware</i> dalam melayani masyarakat demi menuju kota cerdas	Mengatasi rendahnya literasi digital dengan menggandeng siswa kejuruan untuk pelayanan masyarakat, dan memanfaatkan fasilitas TI yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
- Minat generasi muda pada seni tradisional semakin menurun karena pengaruh informasi dari luar - Kebanggaan rendah pada potensi kabupatennya sendiri yang rendah dapat mengakibatkan tingkat perpindahan ke kota lain tinggi untuk mencari Pendidikan dan	Digitalisasi arsip kebudayaan, dan penanaman nilai-nilai budaya pada generasi muda melalui media digital supaya mereka lebih tertarik belajar	Menggandeng dan menjembatani generasi senior untuk mentransfer ilmu dan pengetahuan budaya pada platform digital.

penghidupan yang lebih baik menurut masyarakat.		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

4.3.6. TOWS Smart Environment

Strategi lingkungan sangat diperlukan dalam pengembangan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang kondisi lingkungan yang dapat mendukung *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Dengan adanya teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang sudah dijalankan dan adanya kebijakan penurunan gas rumah kaca dalam perencanaan, strategi yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peluang yaitu terdapat banyak industri besar (swasta) di Cilacap untuk terlibat memanfaatkan energi hasil pengolahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil; adanya peningkatan ekosistem digital untuk lingkungan hidup; kebijakan pusat tentang pengembangan EBT cukup mendukung. Strategi yang dapat dilakukan adalah Peningkatan keterlibatan pihak swasta untuk memanfaatkan energi dari hasil olahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil. (S-O1). Peningkatan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Swasta untuk mengembangkan EBT (S-O2). Strategi yang memperhatikan kelemahan dan peluang adalah Meningkatkan peran swasta dalam mendigitalisasi pantauan lingkungan ditingkatkan (W-O1). Peningkatan pengembangan teknologi pada urusan lingkungan hidup (W-O2). Sedangkan strategi kekuatan dan peluang adalah: Meningkatkan kebijakan GRK menjadi agenda utama (S-T1). Untuk strategi kelemahan dan ancaman adalah Optimalisasi tata kelola sampah dikembangkan dengan 3 R.

Tabel 55. Analisis TOWS Dimensi Smart Environment Kabupaten Cilacap

INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	- Adanya teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang sudah dijalankan sebagian - Adanya kebijakan penurunan Gas Rumah kaca dalam perencanaan	- Habituasi hidup minim sampai belum optimal - Partisipasi masyarakat dalam hidup bersih belum maksimal - Kurangnya sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah - Tingginya potensi bencana alam
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
- Terdapat banyak industri besar (swasta) di Cilacap untuk terlibat memanfaatkan energi hasil pengolahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil - Adanya peningkatan ekosistem digital untuk lingkungan hidup - Kebijakan pusat tentang pengembangan EBT cukup mendukung	- Peningkatan keterlibatan pihak swasta untuk memanfaatkan energi dari hasil olahan sampah untuk mengurangi penggunaan energi fosil. (S-O1) - Peningkatan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Swasta untuk mengembangkan EBT (S-	- Meningkatkan peran swasta dalam mendigitalisasi pantauan lingkungan ditingkatkan (W-O1) - Meningkatkan Pengembangan teknologi pada urusan lingkungan hidup (W-O2)

	O2)	
Tantangan (Threat)	Strategi (S-T)	• Strategi (W-T)
• Tingginya harga teknologi digital untuk pemanfaatan lingkungan.	• Meningkatkan kebijakan GRK menjadi agenda utama (S-T1)	• Optimalisasi tata kelola sampah dikembangkan dengan 3 R (S-W1)

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023



BAB 5

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN CILACAP

BAB 5. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN CILACAP

Dalam visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap, tertuang harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk membangun kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Visi pembangunan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berkelanjutan di Kabupaten Cilacap. Perumusan visi pembangunan *Smart City* dilakukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan kondisi saat ini, isu-isu strategis yang dihadapi, arah pembangunan masa depan, dan cita-cita yang ingin diwujudkan.

5.1. Visi dan Misi *Smart City*

Perumusan visi dan misi Kabupaten Cilacap dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Salah satunya dengan menyelaraskan visi *Smart City* dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD. Namun, pada tahun 2023 Kabupaten Cilacap tidak memiliki RPJMD sehingga untuk menyesuaikan arah pembangunan *Smart City* dan daerah, merujuk pada dokumen RPD sebagai pengganti RPJMD. Di dalam dokumen RPD tidak mencakup visi dan misi kepala daerah, oleh karena itu perumusan visi *Smart City* dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang merefleksikan elemen-elemen penting. Selain itu, visi pembangunan *Smart City* juga merujuk pada visi dan misi pembangunan secara nasional. Dengan demikian, dapat menghasilkan kesinambungan dan keberlanjutan arah pembangunan.

Visi pembangunan *Smart City* juga memperhatikan harapan-harapan yang diinginkan masyarakat Kabupaten Cilacap. Sasaran dalam program *Smart City* merupakan daerah beserta dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan dalam menyusun visi *Smart City*. Lebih jauh lagi, perumusan visi *Smart City* juga mengacu pada isu-isu strategis daerah beserta dengan analisis terhadap faktor eksternal. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal di atas, maka terwujud misi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

“MENUJU KOTA CERDAS CILACAP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING MELALUI DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Melalui visi pembangunan *Smart City* tersebut, Kabupaten Cilacap diharapkan mampu mewujudkan transformasi Cilacap menjadi kota yang pintar, inovatif, dan berorientasi pada teknologi. Untuk memahami Visi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap, dijelaskan pengertian secara rinci di bawah ini.

Cilacap yang Sehat: Masyarakat Kabupaten Cilacap diharapkan memiliki tingkat kesehatan yang tinggi baik secara fisik maupun mental, terlebih kesehatan pada anak-anak. Visi ini merujuk pada isu strategis yang sedang difokuskan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu pencegahan terhadap *stunting*. Masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan bersih yang dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh sehingga mampu mendorong gaya hidup aktif. Dengan berfokus pada kesehatan, *Smart City* Kabupaten Cilacap dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, mengurangi beban penyakit, dan menciptakan komunitas yang lebih sehat dan produktif.

Cilacap Sejahtera: Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas politik dan keamanan dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah. Harapannya, kabupaten Cilacap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak. Melalui penerapan visi ini, secara holistik Kabupaten Cilacap dapat menjadi daerah yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara merata.

Cilacap Berdaya Saing: Masyarakat Kabupaten Cilacap diharapkan memiliki kemampuan yang kompetitif untuk bersaing dalam skala regional maupun global. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang kompetitif serta dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan visi dan tindakan yang tepat, Kabupaten Cilacap dapat meningkatkan daya saingnya, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dukungan Teknologi Informasi: Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Cilacap. Optimalisasi dukungan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan terintegrasi akan membawa manfaat nyata sehingga mampu mendorong Cilacap menjadi Kabupaten yang modern, berinovasi, dan terkoneksi secara *seamless*. Visi ini juga memberikan landasan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pembangunan Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang berdaya saing di era digital.

Untuk merealisasikan visi pembangunan Smart City Kabupaten Cilacap, maka diwujudkan melalui misi, di antaranya sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan pola hidup bersih dan sehat serta memiliki kualitas hidup yang optimal, produktif, dan inovatif sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki intelektual dan wawasan luas.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat ditandai dengan sosialisasi kegiatan komunitas untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, penyediaan sarana sanitasi yang memadai dan fasilitas penunjang lainnya. Melalui hidup yang sehat, masyarakat mampu memiliki kehidupan yang produktif dan inovatif ditandai dengan pengembangan dan pemberdayaan individu atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Selain itu juga dapat diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta akses terhadap pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan inovasi. Lebih jauh lagi, direalisasikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal maupun non-formal serta pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal dan budaya melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan pada aspek keberlanjutan lingkungan.

Misi kedua diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi lokal ditandai dengan kemudahan akses pada modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan teknis serta meningkatkan pengembangan produk lokal yang unik dan berkualitas tinggi melalui pelatihan desain, pemasaran, dan sertifikasi produk. Selain itu, mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya dengan mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pariwisata yang mendukung, penyelenggaraan acara budaya, dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di sisi lain, kelestarian lingkungan tetap terjaga melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik pertanian organik.

3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan terhadap pelayanan publik, manajemen birokrasi, serta kebijakan publik dengan optimalisasi teknologi informasi.

Misi ketiga direalisasikan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik secara online, mempercepat proses administrasi, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan juga perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, ditandai juga dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan untuk mengakses informasi yang mudah bagi masyarakat. Lebih jauh lagi dengan melakukan peningkatan kinerja dan efisiensi pemerintahan melalui evaluasi dan perbaikan terhadap struktur organisasi, dan proses kerja sebagai bentuk pembangunan kapasitas aparatur pemerintahan yang kompeten dan profesional.

5.2. Sasaran *Smart City* Daerah

Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan *Smart City* yang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, maka perlu adanya penentuan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan. Sasaran dalam pembangunan *Smart City* ini merupakan sebuah harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Cilacap yang terbagi berdasarkan dimensi *Smart City*.

5.2.1. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Governance*

Kabupaten Cilacap menghadapi masalah terkait penyelenggaraan *Smart Governance* berupa adanya tuntutan dari masyarakat untuk pemerintah menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang efisien dan satu pintu. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyediakan pelayanan publik memadai dan satu pintu sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terintegrasi. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Cilacap sebenarnya sudah memiliki modal berupa adanya mal pelayanan publik yang jika dikelola dengan lebih baik diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tersebut. Oleh karena itulah, tersedianya layanan publik dalam satu pintu terpadu dan terintegrasai dicanangkan sebagai sasaran dalam sub-dimensi layanan publik.

Selanjutnya, masalah terkait birokrasi juga dihadapi pemerintah Kabupaten Cilacap. Birokrasi dalam hal ini spesifik terkait dengan masalah transparansi atau keterbukaan yang dinilai

belum efektif dalam pengawasannya. Hal inilah yang menjadikan dasar sasaran dalam sub-dimensi birokrasi berupa manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan aspek keterbukaan (transparansi). Sasaran ini diformulasikan sebagai bagian dari usaha pembangunan yang berpijak pada prinsip akuntabilitas pemerintah lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan, tindakan, serta pengelolaan sumber daya publik kepada warga masyarakat. Dilakukan pula pengawasan yang langsung dijalankan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Terakhir, terkait dengan sub-dimensi perancangan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap menentukan sasaran berupa pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya. Sasaran ini, didasarkan atas pemikiran bahwa pemerataan kebijakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. Poin ini penting agar kebijakan yang dicanangkan pemerintah benar-benar dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Tabel 56. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
LAYANAN PUBLIK	Tersedianya layanan pulik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi	1. Terdapat Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 2. Kemudahan Akses Layanan Publik dan Efisiensi Waktu untuk permohonan layanan
BIROKRASI	Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)	Belum efektifnya penyelenggaran pengawasan pemerintahan
PERANCANGAN KEBIJAKAN	Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya	Pemerataan kebijakan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

5.2.2. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Branding*

Dalam dimensi *Smart Branding*, pemerintah Kabupaten Cilacap mencanangkan beberapa sasaran pada sub-dimensi pariwisata berupa tersedianya sistem pengelolaan yang baik, meningkatnya wisatawan, menjadi daerah utama wisatawan domestic hingga internasional, dan terakhir terdigitalisasinya publikasi pariwisata. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk mengelola pariwisata di Cilacap yang belum terarah dengan jelas yang membuat kecenderungan masyarakat untuk berwisata keluar Kabupaten Cilacap. Selain itu, adanya kebutuhan untuk menghadirkan tempat wisata berkualitas dan terpaut dengan teknologi digital juga menjadi dasar pemikiran dari target-target tersebut.

Selanjutnya, pada sub-dimensi daya saing bisnis, dirumuskan target oleh Kabupaten Cilacap berupa belum adanya produk lokal berkualitas yang merepresentasikan kearifan lokal yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Cilacap sehingga bernilai saing dengan produk daerah lain. Padahal semua itu penting agar Kabupaten Cilacap memiliki daya saing bisnis yang baik sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu, untuk sub-dimensi wajah (tampilan kota) Kabupaten Cilacap merumuskan target berupa penertiban pada titik-titik tertentu yang menjadi wajah kota, pembenahan wajah

destinasi wisata yang lebih tertata dan atraktif, serta yang terakhir terwujudnya wajah kota yang sesuai dengan RDTR. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan wajah kota Kabupaten Cilacap yang indah, nyaman, dan menarik di mata masyarakat.

Tabel 57. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
PARIWISATA	1. Tersedia sistem pengelolaan yang baik 2. Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian 3. Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional 4. Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata	1. Pengelolaan pariwisata yang belum terarah. 2. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk berwisata keluar daerah Kabupaten Cilacap sehingga kurangnya kontribusi perekonomian dalam sektor pariwisata 3. Kebutuhan akan tempat rekreasi yang aman, nyaman, indah, informatif, dan religius 4. Kebutuhan akan persebaran informasi digital mengenai pariwisata di Cilacap
DAYA SAING BISNIS	1. Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas 2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat 3. Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya	1. Pemberdayaan terhadap masyarakat seperti pengrajin maupun pelaku UMKM serta memberikan nilai tambah pada produk-produk lokal unggulan 2. Salah satu visi RPJP untuk menjunjung tinggi nilai luhur budaya dan norma agama dalam perilaku sehari-hari
WAJAH (TAMPILAN) KOTA	1. Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu 2. Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif. 3. Terwujudnya penataan wajah kota dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	1. Revitalisasi ruang-ruang publik dari pengamen maupun tuna karya di beberapa titik tertentu. 2. Terdapat banyak sampah visual yang mencemari wisata-wisata di Kabupaten Cilacap 3. Kebutuhan dalam membangun dan menciptakan wajah kota

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

5.2.3. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Economy*

Pada dimensi *Smart Economy* khususnya sub-dimensi ekosistem industri, pemerintah Kabupaten Cilacap mencanangkan sasaran berupa mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata yang dapat memberdayakan pelaku usaha sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC) serta

meluasnya jaringan pemasaran produk lokal dan pemberdayaan pelaku UMKM dengan pemasaran *online*. Target atau sasaran tersebut dilakukan dalam rangka memastikan masyarakat berbelanja tidak keluar Cilacap serta agar pelaku industri dan usaha kecil dapat menghasilkan produk berkualitas dan mampu memasarkannya secara *online*.

Terkait dengan sub-dimensi kesejahteraan masyarakat, dicanangkan sasaran berupa mewujudkan modal kerja sama secara *pentahelix* dan peningkatan kompetensi angkatan kerja. Sasaran ini dicanangkan dengan dasar pemikiran berupa adanya keterbatasan anggaran pemerintah dalam permodalan dan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Cilacap. Terakhir, untuk sub-dimensi ekosistem transaksi keuangan dirumuskan sasaran berupa terwujudnya sistem pembayaran non-tunai yang dikelola secara terintegrasi. Hal ini didasarkan atas fakta berupa masih rendahnya transaksi non tunai bagi para pelaku usaha dan belum terintegrasinya pengelolaannya.

Tabel 58. Sasaran Pembangunan Dimensi Smart Economy Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
EKOSISTEM INDUSTRI	1. Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata 2. Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas 3. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC) 4. Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal 5. Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran <i>online</i> (<i>marketplace</i>)	1. Masih banyak yang berbelanja keluar daerah Cilacap 2. Pelaku industri dan usaha kecil belum mampu menghasilkan produk yang kualitasnya 3. Pengelolaan KIC masih belum optimal 4. Terdapat keterbatasan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya 5. Masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa menjual produknya secara <i>online</i>
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1. Mewujudkan modal kerja sama secara <i>pentahelix</i> (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media) 2. Peningkatan kompetensi angkatan kerja	1. Terdapat keterbatasan dalam anggaran 2. Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi
EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	1. Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai 2. Pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi	1. Rendahnya transaksi non tunai terutama untuk pelaku usaha 2. Sistem yang belum terintegrasi satu sama lain

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

5.2.4. Sasaran Pembangunan Dimensi Smart Living

Pada sub-dimensi harmonisasi tata ruang, dicanangkan sasaran berupa optimalisasi ruang terbuka hijau. Sasaran ini didasarkan atas pemikiran bahwa ada urgensi bagi pemerintah Kabupaten Cilacap untuk melakukan revitalisasi tata ruang. Selanjutnya, untuk sub-dimensi kesehatan dirumuskan sasaran berupa pencegahan terhadap stunting, menurunkan tingkat penyakit menular seksual serta meningkatnya pemenuhan gizi bagi masyarakat khususnya anak-anak. Semua ini dilakukan dalam rangka mengatasi masih tingginya tingkat stunting, tingginya penyakit menular seksual pada remaja dan kasus gizi buruk akibat kemiskinan.

Selanjutnya, untuk sub-dimensi transportasi dicanangkan sasaran berupa peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum serta pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan yang memadai. Dasar pemikiran dari sasaran tersebut adalah karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib lalu lintas serta masih adanya kecenderungan masyarakat untuk parkir sembarangan khususnya saat jam-jam sibuk.

Tabel 59. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Living* Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
HARMONISASI TATA RUANG	Optimalisasi ruang terbuka hijau	Revitalisasi tata ruang
KESEHATAN	1. Pencegahan terhadap <i>stunting</i> 2. Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS) 3. Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak	1. Masih tingginya angka anak <i>stunting</i> di Kabupaten Cilacap dan sebagai salah satu fokus kepala daerah dalam menurunkan angka kemiskinan 2. Jumlah kasus PMS yang meningkat 3. Merupakan daerah miskin dan masih banyak kasus <i>stunting</i>
TRANSPORTASI	1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum 2. Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib lalu lintas dan perlengkapan jalan kurang memadai 2. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan transportasi pribadi hingga sering menimbulkan kemacetan terlebih pada jam sibuk 3. Terdapat kendaraan yang parkir di sembarang tempat

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

5.2.5. Sasaran Pembangunan Dimensi *Smart Society*

Pada sub-dimensi interaksi masyarakat terdapat dua sasaran yaitu mewujudkan interaksi sosial masyarakat yang berkelanjutan antar individu dan meningkatnya semangat gotong royong dalam pengembangan komunitas masyarakat. kedua sasaran ini didasarkan atas pemikiran bahwa masih adanya kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi hanya secara *online* dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersosialisasi satu sama lain.

Untuk sub-dimensi ekosistem pendidikan atau belajar dirumuskan sasaran berupa terwujudnya ekosistem belajar yang memadai serta meningkatkan literasi masyarakat. Sasaran-sasaran tersebut dicanangkan atas dasar pemikiran dengan adanya UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan masih rendahnya angka IPLM. Terakhir, untuk sub-dimensi keamanan masyarakat, dirumuskan sasaran berupa terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban yang mengatur masyarakat termasuk juga keterbitan lalu lintas.

Tabel 60. Sasaran Pembangunan Dimensi Smart Society Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
INTERAKSI MASYARAKAT	1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya 2. Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat	1. Kecenderungan masyarakat berinteraksi secara <i>online</i> 2. Berkurangnya kesadaran masyarakat dalam bersosialisasi
EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	1. Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan 2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat	1. UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan 2. Rendahnya indeks IPLM
KEAMANAN MASYARAKAT	1. Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas	Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012; PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Kabupaten Cilacap

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023

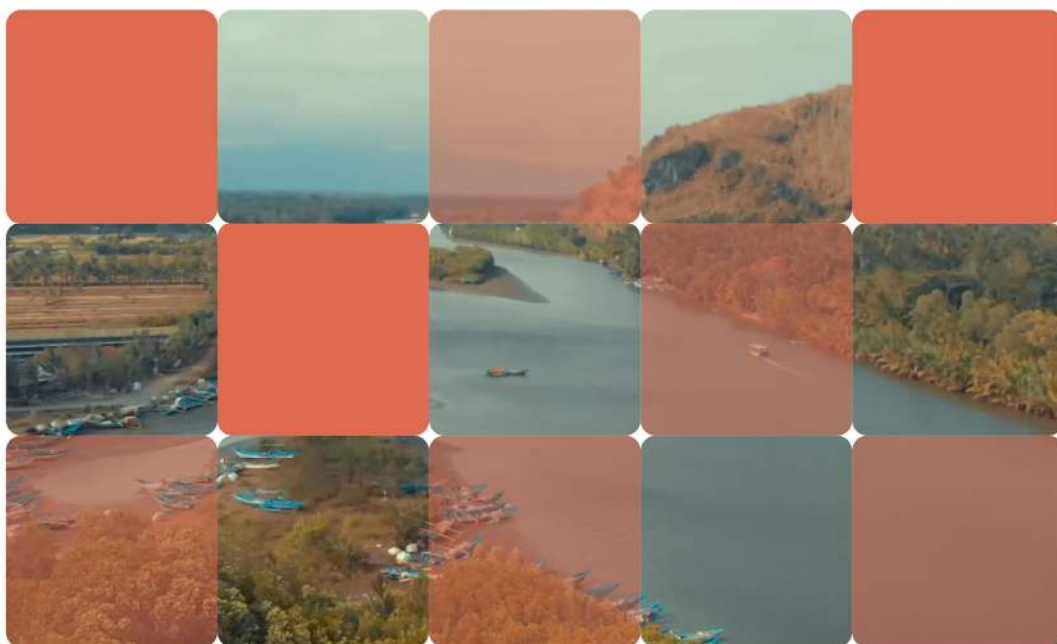
5.2.6. Sasaran Pembangunan Dimensi Smart Environment

Untuk sub-dimensi proteksi lingkungan, dirumuskan sasaran berupa terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI). Hal ini dilakukan lantaran termasuk dalam RPD dan kebijakan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sementara untuk sub-dimensi pengelolaan sampah dan limbah dicanangkan sasaran berupa terwujudnya tata kelola persampahan. Sasaran ini didasarkan atas dasar pemikiran berupa sampah yang masih belum terkelola dengan baik. Terakhir, untuk sub-dimensi tata kelola energi sasarannya adalah optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan *solar cell* dengan dasar pemikiran karena hal ini tercantum dalam RPD 2023-2026 melalui indikator kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca.

Tabel 61. Sasaran Pembangunan Dimensi Smart Environment Kabupaten Cilacap

SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
PROTEKSI LINGKUNGAN	Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI) Kabupaten Cilacap	Merujuk pada IRBI yang masuk dalam RPD dan Kebijakan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	Terwujudnya tata kelola persampahan	Pengurangan sampah masih di bawah 13% dan penanganannya masih sekitar 50% serta dimuat dalam renstra DLH dan Perbup mengenai kebijakan dan strategi sampah
TATA KELOLA ENERGI	1. Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell 2. Terwujudnya ekosistem utilitas energi terbatukan	Tercantum dalam RPD 2023-2026 melalui indikator-indikator kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan FGD Bimtek 1, 2023



BAB 6

PENUTUP

BAB 6. PENUTUP

Perkembangan kota menuntut perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan mengedepankan inovasi penggunaan teknologi untuk keberlanjutan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Master Plan *Smart City*. Prinsip dasar penyusunan master plan adalah pemahaman urusan kota dan dinamikanya adalah urusan publik, sehingga perlu pendekatan perencanaan strategis (Bryson, 2011; Bryson, J., & Edwards, H, 2017). Selain itu diperlukan identifikasi *stakeholder* yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Bryson, J., & Humphrey, H., 2004).

Penyusunan buku Analisis Strategi Master Plan *Smart City* Kabupaten Cilacap merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya membangun Kabupaten Cilacap sebagai kota pintar yang inovatif dan berkelanjutan. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Cilacap yang berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dalam proses penyusunan ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan di Cilacap, mulai dari tren yang sedang berkembang dari berbagai bidang, analisis kesiapan daerah, analisis strategi dan kesenjangan, serta penyelarasan visi misi pembangunan *Smart City* dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, buku Analisis Strategi Master Plan *Smart City* Kabupaten Cilacap akan menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi pembangunan *Smart City*. Buku ini juga akan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Cilacap untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan *Smart City*, mengadopsi inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun, buku Master Plan ini hanya merupakan awal dari perjalanan panjang dalam mewujudkan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Kesuksesan pembangunan *Smart City* tidak hanya tergantung pada dokumen ini, tetapi juga pada kolaborasi, komitmen, dan tindakan nyata dari semua pihak terkait. Diperlukan dukungan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penutup ini, mari kita sambut masa depan yang cerah bagi Kabupaten Cilacap sebagai *Smart City* yang memberdayakan masyarakat, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Dengan semangat yang tinggi dan kerja sama yang erat, kita akan mengubah visi menjadi kenyataan dan membawa Cilacap menjadi contoh yang inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2023*. Jakarta
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (2022). Indeks Daya Saing Daerah 2022. Jakarta: penerbit.brin.go.id
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to*. United Stated of America: John Wiley & Sons, Inc. .
- Bryson, J., & Edwards, H. (2017). *Strategic Planning in the Public Sector*. Oxford Research Encyclopedias, Business and Management., 1-25.. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.128>
- Bryson, J., & Humphrey, H. (2004). What to do when stakeholders matter: A guide to stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 21-25.
- Citiasia Center for Smart Nation (CCSN). (2017). *Smart Nations: Mastering Nation's Advancement from Smart Readiness to Smart City*. Jakarta: Citiasia Inc.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. (2022). Data Menara Provider. Retrieved from Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap: <https://kominfo.cilapkab.go.id/basis-data/data-menara-provider/>
- DPMPTSP Kabupaten Cilacap (2023). Statistik Potensi Tenaga Kerja SMK. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah DPR.go.id, 2023.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Daftar Cagar Budaya Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Retrieved from Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/cagarbudaya/030101/3>
- KOMINFO. (2022). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan MenujuSmart City*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Muharuddin, (2019). Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Justisi*.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2023). *RPD Kabupaten Cilacap 2023-2026*. Pemerintah Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah
- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2017). *RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah



Master Plan Smart City Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah



Buku 2 :

Masterplan Smart City Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah

2023

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab 1 Buku 2 Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap terdiri dari empat bagian yaitu: 1) latar belakang, yang akan membahas mengenai alasan dari penyusunan buku 2 Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap serta informasi, kondisi aktual, dan gambaran umum yang ada di Kabupaten Cilacap. 2) Tujuan, yang berisi tentang maksud serta tujuan dari penyusunan buku ini. 3) Landasan hukum yang akan menjabarkan tentang regulasi daerah dan nasional yang dijadikan acuan terkait pelaksanaan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. 4) Kerangka pikir, yang akan memaparkan kerangka konseptual *Smart City* yang digunakan serta menjelaskan relasi antara buku ini dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, muncul tren global dalam peningkatan konsentrasi populasi di kota-kota besar. Tingginya arus urbanisasi membuat kota-kota besar dituntut untuk dapat menjadi lebih produktif, inovatif, sekaligus juga menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi ini, menjadi dasar atas urgensi untuk mendorong pemangku kebijakan untuk mengembangkan pembangunan “kota pintar” atau *Smart City*. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Kabupaten Cilacap, dimana pemerintah setempat menyadari bahwa dalam menatap masa depan pembangunan kota yang cerah, konsep *Smart City* perlu digunakan.

Secara umum, Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dinamis yang disertai perkembangan pembangunan pada berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dari segi potensi, Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Dari segi infrastruktur fisik, Kabupaten Cilacap sudah cukup baik yaitu dengan memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayahnya secara memadai. Tidak hanya itu, Kabupaten Cilacap juga memiliki objek wisata unggulan seperti Pantai Teluk Penyu. Dari segi ekonomi, Kabupaten Cilacap memiliki berbagai aspek yang ikut berkontribusi seperti sektor industri termasuk keberadaan Kilang Minyak yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Secara keseluruhan, Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi serta pariwisata ditambah dengan lokasi yang strategis dan infrastruktur yang semakin berkembang. Dengan demikian, Kabupaten Cilacap sudah memiliki modal awal untuk menerapkan dan mengembangkan *Smart City*.

Pembahasan mengenai analisis kesiapan daerah, modal awal daerah berdasarkan dimensi *Smart City*, serta analisis strategi awal dalam rangka pengembangan *Smart City* Kabupaten Cilacap telah dibahas panjang lebar di Buku 1. Hal yang belum dibahas dalam dokumen tersebut adalah sinkronisasi antara visi, misi, dan sasaran dari *Smart City* Kabupaten Cilacap dengan dokumen induk perencanaan daerah yang ada. Hingga tulisan ini dibuat, dokumen perencanaan atau RPJDM Kabupaten Cilacap telah berakhir masa berlakunya. Oleh sebab itu, dokumen induk perencanaan daerah yang perlu dilakukan sinkronisasi dengan visi misi serta strategi

pembangunan *Smart City* akan menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 bahwa perencanaan daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan lain sebagainya ditetapkan dalam RPD sebelum tersusunnya RPJMD. Dari segi substansi, dokumen RPD sejatinya tidak terlalu berbeda dengan RPJMD. Perbedaannya hanya terletak pada ketiadaan visi dan misi kepala daerah. Meskipun demikian, visi dan misi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap dapat disusun berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan aparatur diseluruh OPD terkait yang telah dilaksanakan pada saat Bimbingan Teknis.

Dengan demikian, Buku 2 Masterplan pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap ini hadir untuk mengelaborasi lebih lanjut analisis yang telah dipaparkan sebelumnya di buku 1 khususnya terkait arah pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap yang meliputi visi, misi, dan sasaran *Smart City* daerah; indikator utama; serta strategi dan rencana aksi pembangunan *Smart City*. Harapannya, proses pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dapat berjalan terarah sesuai dengan koridornya dan benar-benar merepresentasikan semangat serta harapan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

1.2. Tujuan

Penyusunan dokumen Buku 2 Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menyajikan panduan yang lebih konkret, terukur, dan realistis dalam penerapan teknologi informasi yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta potensi, karakteristik, dan kearifan lokal pengembangan daerah. Inisiatif-inisiatif yang tercantum dalam Masterplan *Smart City* ini didasarkan pada analisis data permasalahan di daerah yang telah disederhanakan. Oleh karena itu, inisiatif-inisiatif tersebut dirancang sebagai solusi yang berpotensi besar untuk berhasil diimplementasikan secara bertahap. Tujuan akhir dari penyusunan dokumen Masterplan ini adalah:

1. Tersusunnya dokumen strategis sebagai Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap yang komprehensif dan aplikatif;
2. Tersedianya hasil analisis terhadap visi pembangunan daerah yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap serta keterkaitannya dengan dimensi *Smart City* untuk mewujudkan kesesuaian arah pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan *Smart City*;
3. Tersedianya rencana aksi yang konkret dalam rangka pembangunan *Smart City*
4. Tersusunnya peta jalan peningkatan dan implementasi *Smart City* baik jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) dari sisi infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah dengan menentukan strategi dan rencana aksi *Smart City* pada enam dimensi.

1.3. Landasan Hukum

Pelaksanaan *Smart City* merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui pertimbangan hukum dan kebijakan yang mendalam. Hal ini harus didasarkan dan didukung oleh penetapan regulasi atau kebijakan yang kuat, yang menciptakan fondasi hukum bagi semua inisiatif dan aktivitas yang terkait. Regulasi dan kebijakan yang jelas dan terintegrasi akan menetapkan standar, peran, dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat, dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat. Selain itu, regulasi yang kuat juga akan menjamin jalannya pelaksanaan *Smart City* dengan standar aturan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, regulasi dan kebijakan bukan hanya alat untuk mengatur, tetapi juga untuk menginspirasi, mengarahkan, dan mendukung transformasi menuju kota yang lebih cerdas, konektif, dan inklusif. Dalam hal ini, terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar dalam pembangunan *Smart City*, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Telematika di Indonesia;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 57/KEP/M.Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang PPID;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Jaringan Bergerak Seluler;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2022 tentang Perkotaan
16. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor B-25/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor 100.3.7.1/24/NK/03/36/2023
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
18. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 500.12/259/36/Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Cilacap
19. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 500.12/260/36/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cilacap Kota Cerdas

1.4. Kerangka Pikir

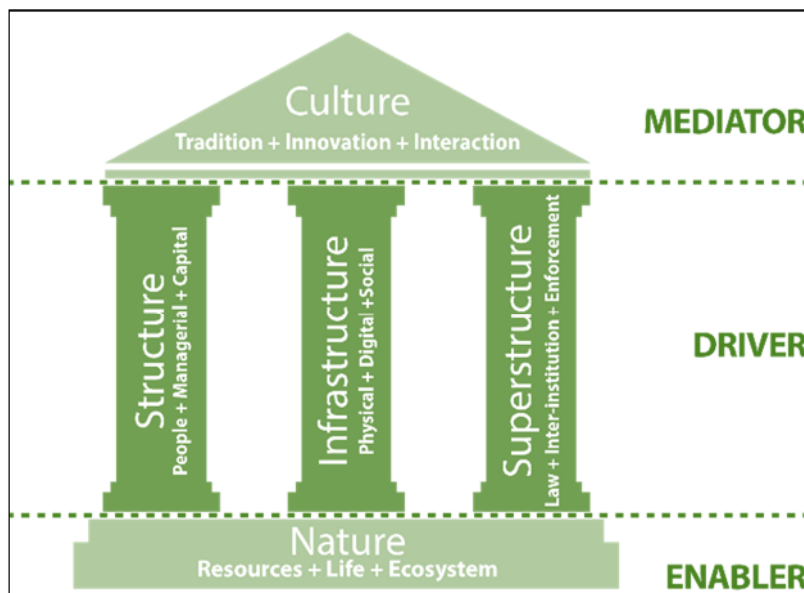
Konsep *Smart City* telah banyak digunakan oleh berbagai aktor seperti praktisi dan akademisi sebagai ujung tombak kerangka pembangunan kota yang mengintegrasikan perkembangan teknologi. Kerangka pembangunan *Smart City* digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan solusi mutakhir terhadap permasalahan dan tantangan dalam usaha pembangunan perkotaan. *Smart City* melibatkan integrasi antara infrastruktur jaringan dengan teknologi aplikasi yang didesain dalam rangka mengakselerasi efisiensi dan mengotomatisasi berbagai proses manual sebelumnya dalam menjalankan tata kelola perkotaan. Mencapai pembangunan berkelanjutan, juga menjadi salah

satu fokus dalam pengembangan *Smart City*. Hal ini karena dalam *Smart City*, ada proses pengintegrasian tiap elemen pemerintah dan masyarakat dalam bersinergi saling mengisi kekosongan yang ada. Atau dengan kata lain, terjadi proses lintas lembaga (*cross-cutting*) dalam pengadopsian *Smart City* *Invalid source specified..*

Dalam *Smart City*, kerangka kerja pemanfaatan teknologi dipadukan dengan peran sumber daya manusia sebagai individu aktif yang terlibat dalam penyelesaian isu-isu strategis dan proses kebijakan. Ini membuat konsep *Smart City* tidak semata-merta hanya mementingkan pemanfaatan teknologi belaka tetapi juga tetap menaruh perhatian akan peran masyarakat (SDM) sebagai elemen penting dalam pembangunan perkotaan. Skema semacam ini diharapkan membuat segala inovasi yang terjadi hadir secara organik akibat adanya pertautan antara peran masyarakat yang aktif dan institusi pemerintahan yang memeluk erat pengadopsian teknologi. Poin inilah yang harus diperhatikan dalam pembangunan *Smart City* dimanapun termasuk juga dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap memiliki tiga komponen utama yang menjadi pilar kesiapan daerah dalam mengadopsi *Smart City*. Ketiga komponen tersebut yaitu:

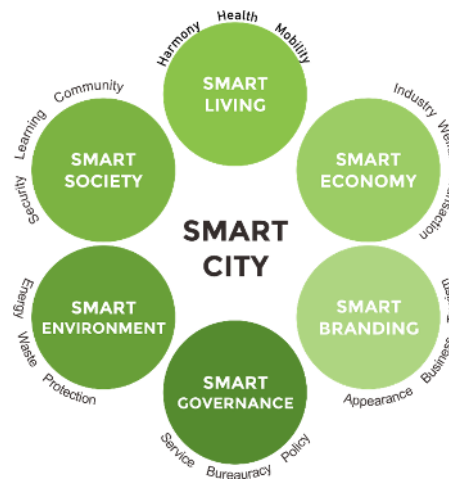
- Struktur**, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- Infrastruktur**, meliputi pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- Suprastruktur**, yaitu penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.



Gambar 14. Smart City Readiness

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021)

Selanjutnya, dalam konsep *Smart City* juga terdapat enam dimensi yang harus diperhatikan dalam membangun *Smart City*. Dimensi- dimensi *Smart City* ini mencakup aspek- aspek perubahan yang meliputi tata kelola birokrasi yang cerdas (*Smart Governance*), citra kota/daerah yang cerdas (*Smart Branding*), pertumbuhan ekonomi yang cerdas (*Smart Economy*), permukiman penduduk yang cerdas (*Smart Living*), lingkungan sosial yang cerdas (*Smart Society*), dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas (*Smart Environment*). Setiap dimensi memiliki sub- dimensi yang lebih rinci untuk menetapkan indikator keberhasilan masing-masing aspek (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).



Gambar 15. Dimensi *Smart City*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021)

Berikut ini adalah penjelasan dari tiap dimensi dan sub-dimensi yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap:

a. *Smart Governance*

Smart Governance adalah pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang cerdas bertujuan agar lembaga pemerintahan dapat mengelola kehidupan masyarakat dengan dukungan teknologi. Dengan kata lain, tujuan dari tata kelola pemerintahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dari berbagai aspek, termasuk layanan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dan jasa. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar mencapai manajemen birokrasi yang efisien, adil, bertanggung jawab, dan transparan.

Tabel 62. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Governance*

<i>Smart Governance</i>
Sasaran: Mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah yang efektif, efisien, komunikatif, akuntabel dan terus berinovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Pelayanan Publik	Pelayanan administrasi kepada masyarakat yang meliputi: status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang.
	Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
	Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.
Manajemen Birokrasi yang efisien	Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (<i>fairness</i>), bertanggung-jawab (<i>accountability</i>) dan keterbukaan (<i>transparency</i>).
Efisiensi Kebijakan Publik	Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
	Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Dengan memperhatikan ketiga sub dimensi beserta indikatornya pada dimensi *Smart Governance*, maka diharapkan upaya pelaksanaan tata kelola pintar pemerintah daerah dapat terwujud sebagaimana *spirit* dari upaya pembangunan *Smart City*. Ketiga sub dimensi tersebut harus ada dan tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan karena semuanya adalah bagian integral dalam dimensi *Smart Governance* pada *Smart City*.

b. *Smart Branding*

Smart Branding merupakan dimensi pembangunan *Smart City* yang berfokus pada upaya pemasaran daerah melalui peningkatan daya saing wilayah. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi potensi daerah mulai dari lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. *Smart Branding* menjadi dimensi penting dalam *Smart City* karena bertujuan meningkatkan nilai citra daerah dan mendorong perekonomian serta pengembangan sosial dan budaya lokal, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan *branding* daerah berbeda dengan *branding* korporasi, karena lebih menekankan pada peningkatan nilai daerah dan pembangunan keseluruhan, bukan hanya keuntungan finansial semata.

Tabel 63. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Branding*

<i>Smart Branding</i>	
Sasaran: Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.	
Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata	Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>).
	Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (<i>amenities</i>) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/ <i>bedding & breakfast</i> (B&B), restoran, dan lain-lain.
	Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (<i>hospitality</i>) termasuk kemampuan

	berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.
Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah	Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya <i>marketplace</i> daerah.
	Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya <i>Investment Lounge</i> , <i>Dashboard</i> , dan Portal Investasi Daerah.
	Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.
Membangun dan Memasarkan Citra atau Wajah Kota	Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
	Membangun batas wilayah (<i>edge</i>), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (<i>landmark</i>), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (<i>signage</i>), struktur jalan yang teratur (<i>path</i>), dan titik simpul kota (<i>node</i>) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Sub dimensi ekosistem pariwisata, ekosistem bisnis daerah, dan citra atau wajah kota semuanya harus diperhatikan indikatornya agar kota dengan *branding* atau citra yang cerdas dapat tercapai. Dalam konsep *Smart City*, sebuah kota harus memiliki *branding* atau citra yang menonjolkan keunikan atau potensinya. Hanya dengan cara ini dimensi *Smart Branding* dalam *Smart City* dapat tercapai.

c. *Smart Economy*

Smart Economy merujuk pada tata kelola perekonomian yang dimaksudkan untuk membentuk ekosistem ekonomi daerah yang *agile* ditengah gempuran kemajuan zaman yang disruptif. Dimensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mampu mendukung kegiatan perekonomian masyarakat diimbangi dengan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah. Selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Economy* berfokus pada pengelolaan industri primer, sekunder, dan tersier dalam rangka memacu daya saing industri daerah. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari turut serta dalam mentransformasi struktur ekonomi ke arah ekonomi digital.

Tabel 64. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Economy*

<i>Smart Economy</i>	
Sasaran: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi, serta meningkatkan <i>financial literacy</i> masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan <i>cashless society</i> .	
Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing	Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

Mewudukan Kesejahteraan Rakyat	Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (<i>income</i>).
	Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (<i>employment</i>).
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>empowerment</i>).
Membangun Ekosistem Keuangan Daerah	Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang <i>cashless</i> .
	Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
	Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i> .

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah kunci dari arah pengembangan atau pembangunan sebuah kota. Hal tersebut juga berlaku pada konsep *Smart City* dimana ketiga sub dimensi dari *Smart Economy* harus diperhatikan dalam upaya pengembangan *Smart City*. Ketiga sub dimensi *Smart Economy* tersebut sangat menentukan arah dari pengembangan *Smart City* karena ketiganya merupakan aspek fundamental dalam menyokong ekonomi pintar di suatu daerah.

d. *Smart Living*

Smart Living adalah pembangunan tata kelola peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mampu mewujudkan lingkungan nyaman, memberikan keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, bagi masyarakat dan publik lingkungan serta tertata dengan baik. Peningkatan kualitas hidup juga mampu mendorong kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Tabel 65. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Living*

<i>Smart Living</i>	
Sasaran: Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.	
Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (<i>residential</i>), lingkungan pusat kegiatan bisnis (<i>commercial</i>) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (<i>recreational</i>).
Sarana Prasarana Kesehatan	Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (<i>food</i>), akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (<i>healthcare</i>), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>).
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi	Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (<i>mobility</i>) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Kehidupan masyarakat dalam konsep *Smart City* menempati posisi penting untuk diperhatikan lantaran segala upaya pembangunan dalam *Smart City* akan sia-sia jika kehidupan di masyarakat itu sendiri malah tidak memberikan kenyamanan. Oleh karena itu, ketiga sub dimensi dalam dimensi *Smart Living* harus diperhatikan dan diupayakan agar cita-cita dimensi *Smart Living* dalam konsep *Smart City* dapat tercapai.

e. Smart Society

Smart Society merujuk pada tata kelola pembangunan yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dari pengembangan sebuah kota. Dalam *Smart Society*, coba dibentuk tatanan masyarakat yang humanis dan dinamis yang diharapkan dapat membentuk tatanan yang positif sekaligus produktif dengan memanfaatkan kemampuan literasi digital dari masyarakat tersebut. *Smart Society* memiliki fokus pada pembangunan masyarakat yang pintar terutama dalam melakukan interaksi sosial guna mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah serta dengan melakukan pengembangan komunitas masyarakat.

Tabel 66. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Society*

<i>Smart Society</i>	
Sasaran: Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan <i>digital literacy</i> yang tinggi.	
Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien	Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
	Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang <i>marketplace</i> dan program lainnya yang mendukung terciptanya iklim positif di antara masyarakat.
Ekosistem Belajar yang Efisien	Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas.
	Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya <i>smart school</i> , <i>smart campus</i> , <i>smart pesantren</i> , <i>smart training program</i> dan program pembelajaran lainnya.
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing (IoT)</i> .

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Dalam konsep *Smart City*, yang diusahakan menjadi pintar tidak hanya kota itu sendiri beserta pemerintah di dalamnya tetapi juga masyarakat itu sendiri agar menjalankan kehidupan yang *smart*. Pada titik inilah, ketiga sub dimensi dalam dimensi *Smart Society* menemukan urgensinya untuk diperhatikan. Ketiga sub dimensi *Smart Society* yang meliputi

interaksi masyarakat, ekosistem belajar, dan sistem keamanan masyarakat harus dikembangkan secara beriringan agar cita-cita *Smart Society* dapat terwujud.

f. Smart Environment

Smart Environment merupakan bentuk tata kelola lingkungan pintar yang berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana yang berorientasi pada lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar tercipta tata kelola lingkungan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan tetap diiringi kemajuan teknologi sebagai penyokongnya.

Tabel 67. Sub Dimensi dan Indikator Pelaksanaan *Smart Environment*

Smart Environment	
Sasaran: Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	
Sub Dimensi	Indikator Pelaksanaan
Pengembangan Program Proteksi Lngkungan	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing (IoT)</i>
	Membangun ruang terbuka hijau
	Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
	Mengendalikan polusi udara
Tata Kelola Sampah dan Limbah	Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>)
	Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>)
	Mengembangkan sistem tata kelola limba dan sampah publik (<i>public</i>)
	Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab
Tata Kelola Energi yang Bertanggung Jawab	Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan alternatif lainnya

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

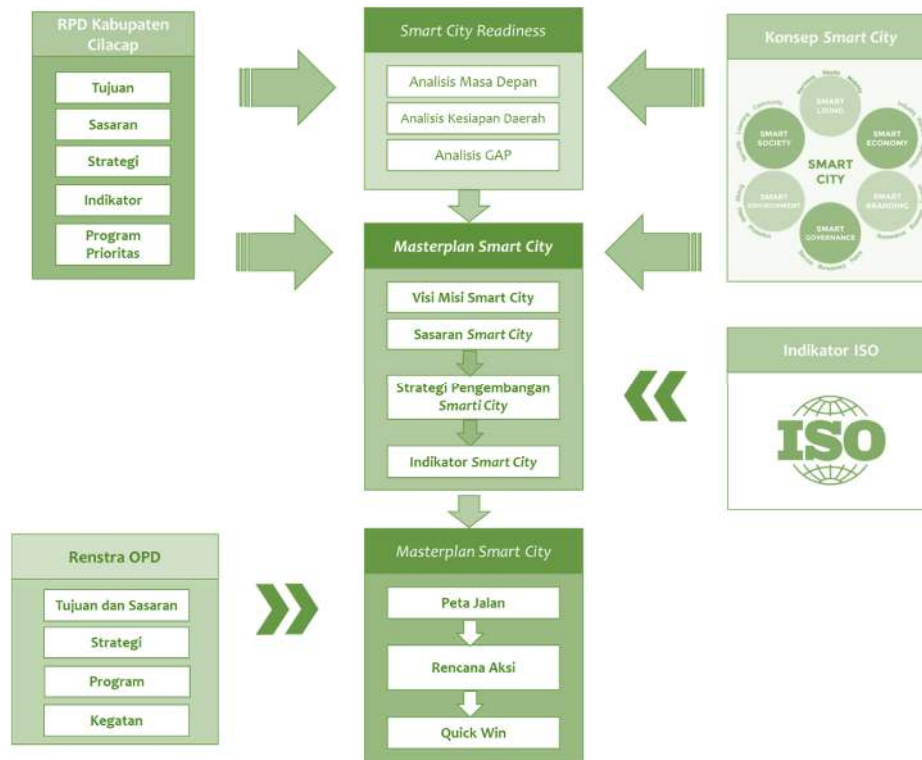
Konsep pembangunan *Smart City* juga menaruh perhatian akan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, ketiga sub dimensi dalam *Smart Environment* harus diupayakan secara bersamaan karena ketiganya merupakan aspek krusial dalam rangka tetap

memperhatikan keberlanjutan ditengah hiru-pikuk upaya pembangunan *Smart City* di kelima dimensi lainnya.

Dalam pembangunannya, *Smart City* Kabupaten Cilacap tetap perlu memperhatikan dokumen induk perencanaan daerah yang dimilikinya sekalipun sudah ada Masterplan yang memang spesifik ditujukan sebagai dokumen perencanaan *Smart City*. Justru, Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap harus menjadikan dokumen induk perencanaan daerah sebagai acuannya agar arah pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap tetap sesuai dengan koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya **Invalid source specified.** .

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dan *Smart City* mencakup beberapa aspek. Pertama, tujuan dari pembangunan *Smart City* haruslah sejalan dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga *Smart City* dapat menjadi bagian yang berkontribusi positif bagi pembangunan kabupaten secara menyeluruh. Kedua, sumber daya yang tersedia untuk pembangunan *Smart City* harus dipertimbangkan secara berimbang dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah lainnya. Pengalokasian sumber daya yang tepat akan memastikan bahwa pembangunan *Smart City* tidak mengabaikan sektor-sektor penting lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian. Ketiga, adanya keterkaitan ini akan membantu menciptakan sinergi antara berbagai proyek dan program pembangunan di daerah tersebut. Misalnya, infrastruktur yang dibangun untuk *Smart City* dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada, seperti transportasi, lingkungan, dan teknologi, untuk menciptakan keselarasan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap haruslah mencakup pandangan yang komprehensif, termasuk dokumen induk perencanaan daerah. Dengan cara ini, *Smart City* dapat berkembang secara berkesinambungan dan berdampak positif bagi kemajuan keseluruhan kabupaten, sambil tetap memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah bagan yang menerangkan keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dengan *Smart City*.



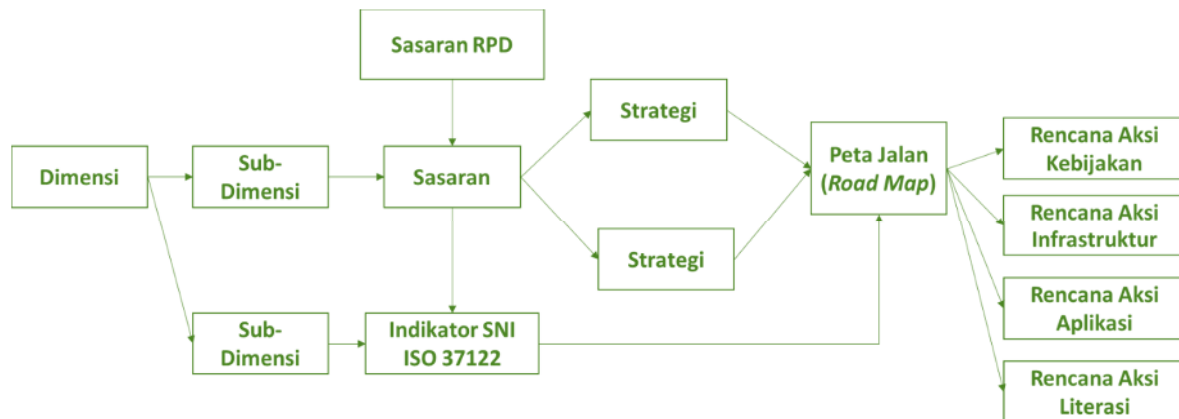
Gambar 16. Keterkaitan antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Smart City Kabupaten Cilacap

Sumber: Analisis Tim pembimbing, 2023

Dokumen RPD yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, indikator, dan program prioritas dijadikan kerangka acuan untuk menentukan *Smart City Readiness* yang mana *Smart City Readiness* tersebut mengadopsi kerangka konseptual dari *Smart City*. Sehingga dapat dijelaskan terkait kesiapan daerah dan prediksi masa depan dari daerah yang akan dibangun *Smart City*. *Smart City Readiness* inilah yang kemudian dijadikan bahan acuan untuk menyusun masterplan *Smart City* mulai dari penetapan visi misi, sasaran, strategi, dan indikator. Indikator eksternal seperti ISO juga dijadikan rujukan untuk menyusun masterplan tersebut. Selain itu, dokumen Renstra (Rencana Strategis) milik tiap OPD juga dijadikan acuan untuk penyusunan masterplan *Smart City* khususnya dalam penyusunan peta jalan, rencana aksi, dan pemilihan program yang akan dijadikan *Quick Win*.

Selanjutnya, pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap perlu menetapkan sasaran sebagai kondisi yang ingin dicapai melalui pembangunan *Smart City*. Sasaran-sasaran ini dikategorikan berdasarkan dimensi dan sub-dimensi *Smart City*. Proses penentuan sasaran *Smart City* dilakukan dengan mempertimbangkan pemetaan antara sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap. Hal ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara tujuan *Smart City* dengan tujuan pembangunan Kabupaten Cilacap yang diatur dalam RPD. Keterkaitan yang jelas ini menjadi penting agar program-program *Smart City* sejalan dengan program yang telah diidentifikasi dalam RPD.

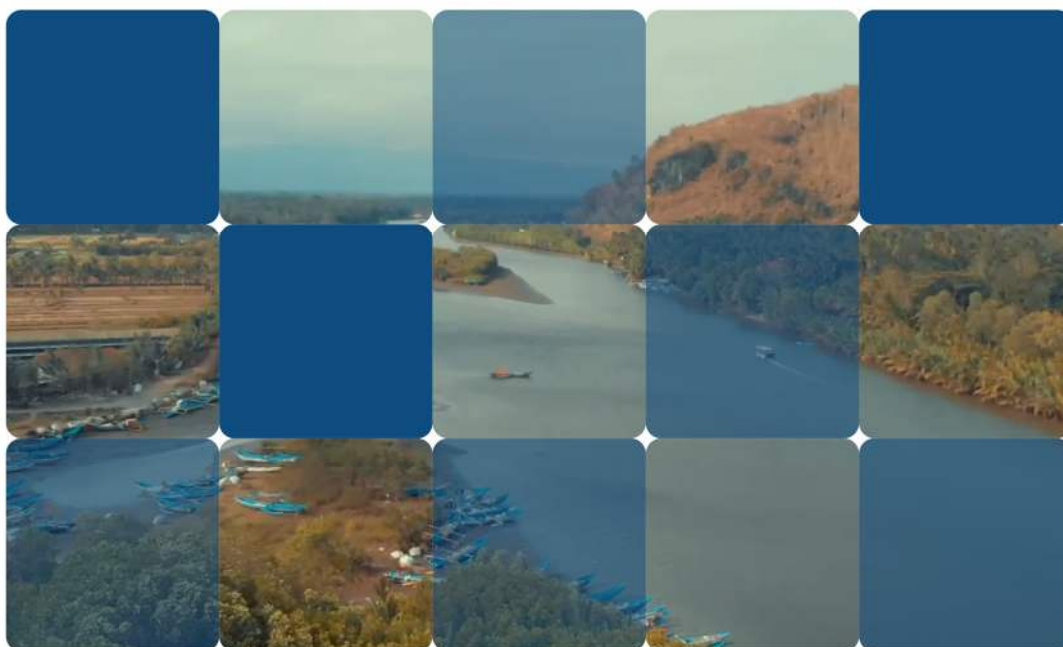
Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan tujuan-tujuan *Smart City* untuk setiap dimensinya. Tujuan-tujuan yang telah diklasifikasikan akan diselaraskan dengan standar nasional SNI dan ISO 37122 yang terkait dengan *Smart City*. Dengan demikian, sasaran-sasaran yang ditetapkan akan didukung oleh kerangka kerja yang dapat diukur dan dibandingkan secara nasional maupun internasional.



Gambar 17. Kerangka Keterkaitan Sasaran *Smart City* dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

Dalam Masterplan *Smart City*, peta jalan pembangunan telah dirancang secara rinci dan dibagi ke dalam empat rencana aksi utama yang mencakup aspek penting dalam mengubah sebuah kota menjadi lebih cerdas dan terintegrasi. Pertama, rencana aksi kebijakan, yang bertujuan untuk mengatur dan menyediakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan integrasi teknologi, serta mendorong kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kedua, rencana aksi infrastruktur, yang fokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas fisik seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, transportasi terintegrasi, dan energi terbarukan, yang akan menjadi tulang punggung dari kota pintar. Ketiga, rencana aksi aplikasi, ini menitikberatkan pada pengembangan dan implementasi aplikasi dan layanan pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan warga kota, seperti sistem manajemen lalu lintas, layanan kesehatan online, dan lainnya. Terakhir, rencana aksi literasi, yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat penuh dari inisiatif *Smart City*. Secara keseluruhan dari empat rencana aksi ini membentuk suatu strategi komprehensif yang berpotensi meredefinisi cara hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam lingkungan perkotaan modern.



BAB 2

ARAH PEMBANGUNAN
SMART CITY

BAB 2. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY

Kabupaten Cilacap memiliki semangat yang tinggi dalam meraih masa depan cerah melalui pembangunan daerah menggunakan konsep *Smart City*. Sebagaimana yang sempat disinggung pada bagian sebelumnya, penentuan arah pembangunan *Smart City* harus presisi dengan memperhatikan dokumen induk perencanaan daerah yang ada serta disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang nantinya akan turut berperan dalam eksekusi pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Sesuatu yang harus ada sebagai acuan arah pembangunan *Smart City* adalah adanya Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap, sasaran, serta indikator utama dari pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Bab 2 buku ini akan membahas hal-hal tersebut.

2.1. Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah

Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap merepresentasikan cita-cita yang hendak dicapai dalam pembangunan *Smart City*. Mengingat bahwa hingga dokumen ini dibuat belum ada RPJMD Kabupaten Cilacap yang memuat Visi dan Misi kepala daerah maka Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan diskusi bersama oleh para perwakilan OPD dan tokoh masyarakat yang telah dilaksanakan dalam serangkaian Bimbingan Teknis penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Sebagai pengganti RPJMD, telah diterbitkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Dokumen inilah yang akan dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap dengan memperhatikan saran dan usulan dari perwakilan OPD. Dengan mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 terdapat beberapa isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (*governance*): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.
3. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat
4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal
5. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup
6. Pengelolaan dan penanganan bencana yang belum optimal

Selanjutnya, berangkat dari keenam isu strategi tersebut, dokumen RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 juga mencanangkan tujuan pokok pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

2. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunkan gangguan keamanan di wilayah
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
6. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan

Dengan mempertimbangkan isu strategis dan tujuan pokok pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPD Kabupaten Cilacap, maka visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap terwujud sebagai berikut:

“MENUJU CILACAP KOTA CERDAS YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING MELALUI DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Cilacap yang sehat, merujuk pada harapan Kabupaten Cilacap untuk memiliki tingkat kesehatan yang tinggi baik dari segi kesehatan fisik maupun mental masyarakatnya.

Cilacap Sejahtera, adalah harapan Kabupaten Cilacap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas politik dan keamanan dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah. Harapannya, kabupaten Cilacap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak.

Cilacap Berdaya Saing, merujuk pada harapan Kabupaten Cilacap untuk memiliki kemampuan kompetitif dalam bersaing di skala lokal, nasional, hingga internasional. Daya saing ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang kompetitif serta dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar daerah.

Dukungan Teknologi Informasi, merupakan harapan Kabupaten Cilacap untuk mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Cilacap. Optimalisasi dukungan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Visi *Smart City* Kabupaten Cilacap tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya Misi *Smart City* yang menyertainya. Misi-misi tersebut diharapkan dapat mewujudkan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan misi pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap:

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan;

3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi teknologi informasi.

Ketiga misi *Smart City* diatas kemudian perlu untuk dilakukan sinkronisasi dengan tujuan yang telah ada dalam dokumen RPD Kabupaten Cilacap 2023-2026. Sinkronisasi tersebut dilakukan agar pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap relevan dengan dokumen induk perencanaan perencanaan daerah yang dalam hal ini masih menggunakan RPD. Sinkronisasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 68. Pemetaan Tujuan dan Sasaran RPD Terhadap *Smart City*

Misi Smart City	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
					Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
Berkaitan dengan Misi 3 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi teknologi informasi”	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	✓					
				Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	✓					
				IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	✓		✓			
			Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Merit System	✓					
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	✓					
			Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	✓					
				Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	✓					
				Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	✓					
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	✓					
			Berkaitan dengan Misi 1 “Mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan	Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah	Angka kriminalitas	Menurunnya gangguan keamanan di wilayah	Kasus konflik sosial			
Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten									✓	

Misi Smart City	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
kualitas sumber daya manusia"										
Berkaitan dengan Misi 1 "Mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia"	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah					✓	
				Rata rata Lama Sekolah					✓	
			Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup				✓	✓	
			Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender					✓	
			Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan			✓			
				Tingkat Pengangguran Terbuka			✓			
Berkaitan dengan Misi 2 "Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan"	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas dan tanpa migas) ; inflasi	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB		✓	✓			
			Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB		✓	✓			
			Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	Nilai investasi			✓			
			Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB			✓			
			Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		✓	✓			
Berkaitan dengan Misi 2 "Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan"	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan				✓		
			Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		✓		✓		
			Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam				✓		✓

Misi Smart City	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
				persentase bukan luasan)						
			Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan			✓	✓		
		Indek Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia						✓
		Vc Rasio	Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan				✓		
Berkaitan dengan Misi 2 “Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan”	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri					✓	
Berkaitan dengan Misi 2 “Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan”	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Penurunan Gas Rumah Kaca	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						✓
Berkaitan dengan Misi 2 “Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan”	Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana						✓

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Setelah dilakukan harmonisasi antara tujuan pembangunan daerah yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 dengan misi *Smart City*, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan antara sasaran *Smart City* dalam setiap dimensi dan sub-dimensinya dengan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran *Smart City* Kabupaten Cilacap telah melibatkan proses diskusi yang panjang dengan partisipasi aparatur sipil dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemetaan ini memiliki peran penting untuk secara jelas melihat hubungan antara sasaran *Smart City* dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD. Sehingga, dapat memastikan bahwa program-program *Smart City* berada dalam kesesuaian dengan program yang telah ditetapkan dalam RPD.

Tabel 69. Sasaran Pembangunan Smart City Kabupaten Cilacap dan Keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Daerah

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
(G) <i>Smart Governance</i>	G1 Layanan Publik	G1.1. Tersedianya layanan publik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi	Terdapat Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Kemudahan Akses Layanan Publik dan Efisiensi Waktu untuk permohonan layanan
	G2 Birokrasi	G2.1. Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)	Belum efektifnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan
	G3 Perancangan Kebijakan	G3.1. Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya	Pemerataan kebijakan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(B) <i>Smart Branding</i>	B1 Pariwisata	B1.1. Tersedia sistem pengelolaan yang baik	Pengelolaan pariwisata yang belum terarah.
		B1.2. Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian	Masyarakat memiliki kecenderungan untuk berwisata keluar daerah Kabupaten Cilacap sehingga kurangnya kontribusi perekonomian dalam sektor pariwisata
		B1.3. Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional	Kebutuhan akan tempat rekreasi yang aman, nyaman, indah, informatif, dan religius
		B1.4. Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata	Kebutuhan akan persebaran informasi digital mengenai pariwisata di Cilacap
	B2 Daya Saing Bisnis	B2.1. Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas	Pemberdayaan terhadap masyarakat seperti pengrajin maupun pelaku UMKM serta memberikan nilai tambah pada

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
			produk-produk lokal unggulan
		B2.2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat	Salah satu visi RPJP untuk menjunjung tinggi nilai luhur budaya dan norma agama dalam perilaku sehari-hari
		B2.3. Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya	
	B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1. Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu	Revitalisasi ruang-ruang publik dari pengamen maupun tuna karya di beberapa titik tertentu.
		B3.2. Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif.	Terdapat banyak sampah visual yang mencemari wisata-wisata di Kabupaten Cilacap
		B3.3. Terwujudnya penataan wajah kota dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	Kebutuhan dalam membangun dan menciptakan wajah kota
(Ec) Smart Economy	Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1. Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata	Masih banyak yang berbelanja keluar daerah Cilacap
		Ec1.2. Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas	Pelaku industri dan usaha kecil belum mampu menghasilkan produk yang kualitasnya
		Ec1.3. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC)	Pengelolaan KIC masih belum optimal
		Ec1.4. Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal	Terdapat keterbatasan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya
		Ec1.5. Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran online (marketplace)	Masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa menjual produknya secara online
	Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1. Mewujudkan modal kerja sama secara pentahelix (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media)	Terdapat keterbatasan dalam anggaran
		Ec2.2. Peningkatan kompetensi angkatan kerja	Angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi
	Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1. Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai	Rendahnya transaksi non tunai terutama untuk pelaku usaha
		Ec3.2. Pengelolaan sistem keuangan	Sistem yang belum terintegrasi satu sama lain

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		yang terintegrasi	
(Lv) Smart Living	Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1. Optimalisasi ruang terbuka hijau	Revitalisasi tata ruang
	Lv2 Kesehatan	Lv2.1. Pencegahan terhadap stunting	Masih tingginya angka anak stunting di Kabupaten Cilacap dan sebagai salah satu fokus kepala daerah dalam menurunkan angka kemiskinan
		Lv2.2. Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS)	Jumlah kasus PMS yang meningkat
		Lv2.3. Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak	Merupakan daerah miskin dan masih banyak kasus stunting
	Lv3 Transportasi	Lv3.1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib lalu lintas dan perlengkapan jalan kurang memadai
		Lv3.2. Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan	Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan transportasi pribadi hingga sering menimbulkan
(S) Smart Society	S1 Interaksi Masyarakat	S1.1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya	Kecenderungan masyarakat berinteraksi secara online
		S1.2. Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat	Berkurangnya kesadaran masyarakat dalam bersosialisasi
	S2 Ekosistem Belajar / Pendidikan	S2.1. Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan	UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
		S2.2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat	Rendahnya indeks IPLM
	S3 Keamanan Masyarakat	S3.1. Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat	Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012; PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Kabupaten Cilacap
		S3.2. Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas	
(En) Smart Environment	En1 Proteksi Lingkungan	En1.1. Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko	Merujuk pada IRBI yang masuk dalam RPD dan Kebijakan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		bencana (IRBI) Kab. Cilacap	Penanggulangan bencana
	En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1. Terwujudnya tata kelola persampahan	Pengurangan sampah masih di bawah 13% dan penanganannya masih sekitar 50% serta dimuat dalam renstra DLH dan Perbup mengenai kebijakan dan strategi sampah
	En3 Tata Kelola Energi	En3.1. Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell En3.2. Terwujudnya ekosistem utilitas energi terbarukan	Tercantum dalam RPD 2023-2026 melalui indikator-indikator kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

G: *Smart Governance*

Lv: *Smart Living*

B: *Smart Branding*

S: *Smart Society*

Ec: *Smart Economy*

En: *Smart Environment*

Melalui sinkronisasi antara dimensi, sub-dimensi, sasaran, dan pembahasan yang menghubungkannya dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), diharapkan pembangunan *Smart City* di Cilacap dapat berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Hal ini menjadi sangat penting karena segala upaya dalam pembangunan *Smart City* harus sejalan dengan RPD sebagai dokumen utama perencanaan yang ada. Dengan demikian, integrasi yang tepat antara visi *Smart City* dan tujuan RPD akan menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan *Smart City* di Cilacap.

2.2. Indikator-Indikator Utama *Smart City* Daerah

Indikator-indikator utama *Smart City* di Kabupaten Cilacap memberikan pandangan yang strategis dan terpadu tentang bagaimana teknologi dan inovasi diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indikator-indikator utama dalam *Smart City* merujuk pada dokumen RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 serta indikator standar nasional, yaitu indikator SNI ISO 37122, yang mencakup berbagai aspek penting untuk pembangunan kota yang cerdas.

Dengan menyatukan indikator-indikator ini dalam satu kerangka kerja yang koheren, Kabupaten Cilacap menetapkan arah pembangunan *Smart City* yang mengedepankan teknologi dan inovasi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya yang lebih luas. Indikator-indikator ini, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta sejalan dengan pembangunan daerah dan standar nasional dan internasional terkait.

2.2.1. Indikator Utama *Smart Governance*

Untuk mencapai tujuan dalam dimensi *Smart Governance* di Kabupaten Cilacap, terdapat tiga sub dimensi yang menjadi prioritas, yakni pelayanan publik, birokrasi, dan perancangan kebijakan. Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap juga diarahkan sesuai dengan indikator sasaran pembangunan daerah dan indikator *Smart City* SNI ISO 37122. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian indikator utama yang digunakan dalam *Smart Governance* Kabupaten Cilacap:

Tabel 70. Indikator Utama *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran <i>Smart City</i>	Indikator-Indikator Utama <i>Smart City</i>	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
G1 Layanan Publik	G1.1 Tersedianya layanan publik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik 4. Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
G2 Birokrasi	G2.1 Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)	1. Nilai SAKIP 2. Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3 3. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) 4. Indeks Merit System	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota 10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) 10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk
G3 Perancangan Kebijakan	G3.1 Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya	Indeks Inovasi Daerah (IID)	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Dalam rangka pengembangan *Smart Governance* di Kabupaten Cilacap, tabel indikator utama mengungkapkan penekanan yang kuat pada sembilan indikator pembangunan yang selaras dengan RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026, ditambah dengan tujuh indikator yang mengacu pada SNI ISO 37122. Sub dimensi pelayanan publik memiliki empat indikator pembangunan dan empat indikator SNI ISO 37122. Selanjutnya, sub dimensi birokrasi juga

memiliki empat indikator pembangunan dan satu indikator SNI ISO 37122. Terakhir, sub dimensi perancangan kebijakan yang strategis memiliki satu indikator pembangunan dan dua indikator SNI ISO 37122.

Melalui kombinasi indikator-indikator ini, Kabupaten Cilacap berupaya menciptakan tata kelola yang cerdas, responsif, dan inovatif, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan standar nasional maupun internasional. Sehingga, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cilacap mampu mengarah pada perubahan yang positif dengan dukungan teknologi informasi dan inovasi.

2.2.2. Indikator Utama *Smart Branding*

Terdapat tiga sub dimensi yang menjadi fokus utama dalam mencapai sasaran dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Cilacap yaitu, pariwisata, daya saing bisnis, dan wajah kota. Lebih jauh, terdapat indikator pembangunan daerah dan indikator SNI ISO 37122 sebagai rujukan dalam implementasi *Smart City*. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian indikator utama *Smart Branding*:

Tabel 71. Indikator Utama *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran <i>Smart City</i>	Indikator-Indikator Utama <i>Smart City</i>	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
B1 Pariwisata	B1.1 Tersedia sistem pengelolaan pariwisata yang baik	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan 10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
	B1.2 Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian		
	B1.3 Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional		
	B1.4 Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata		
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1 Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas	1. Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB 2. Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan
	B2.2 Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat		
	B2.3 Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya		
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1 Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan
	B3.2 Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif.		
	B3.3 Terwujudnya penataan wajah kota		

Sub-Dimensi	Sasaran Smart City	Indikator-Indikator Utama Smart City	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
	dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Tabel indikator utama *Smart Branding* Kabupaten Cilacap mencerminkan rencana yang terstruktur dan komprehensif dalam mewujudkan branding kota yang cerdas. Secara Keseluruhan, terdapat empat indikator pembangunan utama yang sesuai dengan RPD Kabupaten Cilacap, serta enam indikator tambahan yang merujuk pada SNI ISO 37122. Sub dimensi pariwisata menjadi salah satu titik fokus dengan empat sasaran *smart city*, yang mencakup satu indikator pembangunan daerah dan dua indikator SNI ISO 37122. Sementara itu, sub dimensi daya saing bisnis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memiliki tiga sasaran *smart city*, didukung oleh dua indikator pembangunan daerah dan tiga indikator SNI ISO 37122. Sub dimensi terakhir, yaitu wajah kota, menekankan pentingnya estetika dan identitas kota dengan memiliki tiga sasaran *Smart City*, yang diwakili oleh satu indikator pembangunan dan satu indikator SNI ISO 37122.

Keseluruhan strategi ini menciptakan peta jalan yang jelas untuk pembangunan branding kota yang cerdas di Kabupaten Cilacap, yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari pariwisata hingga daya saing bisnis dan estetika kota. Dengan adanya arah pembangunan pada dimensi *Smart Branding*, diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Cilacap memiliki citra positif dalam hal pariwisata, daya saing, dan tampilan kota yang unik hingga dikenal oleh seluruh Indonesia, mancanegara, maupun internasional.

2.2.3. Indikator Utama *Smart Economy*

Sasaran dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap memiliki tiga sub dimensi sebagai turunan inti yang berupa ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Selain itu, pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap juga mengacu pada dua indikator utama, yaitu indikator sasaran pembangunan daerah dan indikator SNI ISO 37122 *Smart City*. Berikut uraian tabel indikator utama *Smart Economy*:

Tabel 72. Indikator Utama *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran Smart City	Indikator-Indikator Utama Smart City	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1 Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
	Ec1.2 Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas	1. Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB 2. Pertumbuhan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang

Sub-Dimensi	Sasaran Smart City	Indikator-Indikator Utama Smart City	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
	Ec1.3 Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC)	kontribusi pertanian dalam PDRB 3. Nilai investasi 4. Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	dapat diminta secara daring 9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
	Ec1.4 Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal		
	Ec1.5 Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran online (marketplace)		
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1 Mewujudkan modal kerja sama secara pentahelix (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media)	1. Angka kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka 9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri 20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring 5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan 10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) 20.1. Persentase tahunan anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan 10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	Ec2.2 Peningkatan kompetensi angkatan kerja		
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1 Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik 5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
	Ec3.2 Pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Tabel indikator menunjukkan rencana yang terperinci dan terintegrasi yang mencakup total sembilan indikator pembangunan yang disusun berdasarkan RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026, dan ditambah lima indikator yang merujuk pada standar internasional SNI ISO 37122. Sub dimensi ekosistem industri memiliki lima sasaran *smart city* yang diwakili oleh lima indikator pembangunan dan dua indikator SNI ISO 37122, menegaskan peran industri sebagai tulang punggung ekonomi. Selanjutnya, sub dimensi kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian melalui dua sasaran *Smart City*, diukur dengan tiga indikator pembangunan daerah dan dua indikator SNI ISO 37122, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, sub dimensi ekosistem transaksi keuangan, dengan dua sasaran *smart city* yang diukur melalui satu indikator pembangunan dan satu indikator SNI ISO 37122, menggambarkan upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang efisien dan inklusif.

Secara keseluruhan, arah pembangunan *Smart Economy* mencerminkan pendekatan holistik yang menekankan pembangunan ekonomi yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif, berlandaskan pada kolaborasi antara sektor industri, kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Sehingga, dengan adanya indikator-indikator utama *Smart City* yang menjadi acuan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah hingga mengarah pada perekonomian nasional. Kemudian hal ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap menjadi lebih baik.

2.2.4. Indikator Utama *Smart Living*

Terdapat tiga sub dimensi yang dijadikan dasar utama dalam mewujudkan sasaran dimensi *Smart Living* di Kabupaten Cilacap meliputi harmonisasi tata ruang, kesehatan, dan transportasi. Dalam membangun *Smart City* di Kabupaten Cilacap juga merujuk pada indikator-indikator utama *Smart City* yang mencakup indikator sasaran pembangunan daerah dan indikator SNI 37122 *Smart City*. Berikut rincian indikator utama *Smart Living* dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 73. Indikator Utama *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran <i>Smart City</i>	Indikator-Indikator Utama <i>Smart City</i>	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
LV1 Harmonisasi Tata Ruang	LV1.1 Optimalisasi ruang terbuka hijau	1. Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan) 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau 10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan 7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan
LV2 Kesehatan	LV2.1 Pencegahan terhadap	Usia Harapan Hidup	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang

Sub-Dimensi	Sasaran Smart City	Indikator-Indikator Utama Smart City	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
	stunting		dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
	Lv2.2 Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS)		11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk
	Lv2.3 Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak		10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
Lv3 Transportasi	Lv3.1 Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum	1. Tingkat Kemantapan Jalan 2. Persentase Layanan Perhubungan	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi
	Lv3.2 Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan		19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time) 19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Dalam merealisasikan *Smart Living* di Kabupaten Cilacap, tabel indikator utama menampilkan sebuah struktur yang mencakup empat indikator pembangunan yang dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap pada periode 2023-2026, serta sembilan indikator yang sejalan dengan standar nasional SNI ISO 37122. Sub dimensi harmonisasi tata ruang menjadi salah satu fokus yang diwakili oleh satu sasaran *Smart City* yang diukur dengan dua indikator pembangunan dan dua indikator SNI ISO 37122. Di sisi lain, sub dimensi kesehatan mewakili upaya serius dalam mengoptimalkan layanan kesehatan, dituangkan dalam tiga sasaran *Smart City* dengan satu indikator pembangunan daerah dan dua indikator SNI ISO 37122. Sub dimensi transportasi, dengan dua sasaran *Smart City*, diukur melalui dua indikator pembangunan dan lima indikator SNI ISO 37122, menandai ambisi untuk membangun infrastruktur transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan tekad Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan *Smart Living* melalui perencanaan yang menyeluruh, menargetkan peningkatan dalam harmonisasi tata ruang, layanan kesehatan, dan transportasi, sejalan dengan standar global dan aspirasi daerah. Dengan adanya penyusunan arah pembangunan *Smart Living* diharapkan dapat meningkatkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Cilacap.

2.2.5. Indikator Utama *Smart Society*

Untuk merealisasikan sasaran *Smart City* pada dimensi *Smart Society* di Kabupaten Cilacap berdasarkan sub dimensi interaksi masyarakat, ekosistem pendidikan, dan keselamatan masyarakat diukur melalui indikator-indikator utama *Smart City*. Dalam hal ini, indikator-indikator

tersebut merupakan indikator pembangunan daerah dan indikator SNI ISO 37122 *Smart City*. Berikut merupakan uraian indikator utama pada dimensi *Smart Society*:

Tabel 74. Indikator Utama *Smart Society* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran <i>Smart City</i>	Indikator-Indikator Utama <i>Smart City</i>	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1 Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Persentase peningkatan status desa mandiri	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	S1.2 Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat		13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
S2 Ekosistem Belajar / Pendidikan	S2.1 Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah 3. Usia Harapan Hidup	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
	S2.2 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat		17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif 13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus 10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) 5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1 Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Kasus konflik sosial 2. Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	S3.2 Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas		15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Tabel indikator utama *Smart Society* Kabupaten Cilacap menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana strategi pembangunan masyarakat cerdas diarahkan dan diukur.

Secara total, terdapat tujuh indikator pembangunan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap periode 2023-2026, serta delapan indikator yang sesuai dengan standar SNI ISO 37122. Sub dimensi interaksi masyarakat menyoroti dua sasaran *Smart City*, dengan dua indikator pembangunan dan dua indikator SNI ISO 37122. Sementara itu, sub dimensi ekosistem pendidikan menunjukkan ambisi daerah dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas, dengan dua sasaran *Smart City*, tiga indikator pembangunan daerah, dan lima indikator SNI ISO 37122. Sub dimensi keamanan masyarakat, dengan dua sasaran *Smart City*, diukur melalui dua indikator pembangunan dan satu indikator SNI ISO 37122.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menegaskan komitmen Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan masyarakat cerdas yang inklusif, terdidik, dan aman, dengan perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi, dan pengukuran yang sesuai dengan standar global. Melalui arah pembangunan dimensi *Smart Society* diharapkan mampu mewujudkan masyarakat berkualitas tinggi dan menjunjung nilai-nilai sosial dengan semangat gotong royong.

2.2.6. Indikator Utama *Smart Environment*

Sub dimensi proteksi lingkungan, pengelolaan sampah, dan tata kelola energi merupakan dasar utama dalam mencapai sasaran dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap. Sasaran pembangunan *Smart City* juga merujuk pada indikator pembangunan daerah dan indikator SNI ISO 37122 sebagai indikator-indikator utama dalam penilaian maupun evaluasi *Smart City*. Berikut merupakan rincian indikator utama dalam dimensi *Smart Environment*:

Tabel 75. Indikator Utama *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Sub-Dimensi	Sasaran <i>Smart City</i>	Indikator-Indikator Utama <i>Smart City</i>	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1 Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI) Kab. Cilacap	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi 23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem 20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulkan yang dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton) 22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali 22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time
En2 Pengelolaan Sampah	En2.1 Terwujudnya tata kelola persampahan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota

Sub-Dimensi	Sasaran Smart City	Indikator-Indikator Utama Smart City	
		RPD (2023-2026)	SNI ISO 37122
		3. Debit air yang tersedia	20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulkan yang dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)"
En3 Tata Kelola Energi	En3.1 Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell (Implementasi di kantor Pertamina)		16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Tabel indikator utama *Smart Environment* Kabupaten Cilacap menggambarkan rencana strategis daerah dalam memajukan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terdapat empat indikator pembangunan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap untuk periode 2023-2026, dan enam indikator yang sejalan dengan standar SNI ISO 37122. Pertama, sub dimensi proteksi lingkungan memfokuskan pada satu sasaran *Smart City* dengan satu indikator pembangunan dan satu indikator SNI ISO 37122. Kedua, sub dimensi pengelolaan sampah menunjukkan satu sasaran *Smart City* dengan tiga indikator pembangunan daerah dan empat indikator SNI ISO 37122. Ketiga, sub dimensi tata kelola energi juga menargetkan satu sasaran *Smart City*, dengan indikator pembangunan yang sama dengan sub dimensi pengelolaan sampah, ditambah satu indikator SNI ISO 37122.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan lingkungan yang cerdas dan berkelanjutan, yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian alam. Strategi ini mencakup berbagai aspek penting, dari proteksi lingkungan dan pengelolaan sampah hingga tata kelola energi, semua diukur dan dievaluasi dengan menggunakan standar nasional dan internasional yang diakui, menegaskan komitmen daerah dalam menangani isu-isu lingkungan dengan cara yang komprehensif dan terpadu.



BAB 3

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

BAB 3. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Strategi pembangunan *Smart City* merupakan suatu pendekatan inovatif dalam pengelolaan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini penting mengingat banyak masalah sosial di suatu wilayah atau daerah yang perlu untuk segera diatasi dengan metode-metode yang *smart* dan mengikuti arus kemajuan teknologi yang saat ini sedang terjadi. Strategi inilah yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi dan peta jalan (*road map*) yang akan dijadikan panduan utama dari pemerintah daerah setempat dalam membangun *Smart City* di daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu adanya strategi komprehensif yang disusun berdasarkan sinkronisasi antara kondisi daerah, arah pembangunan daerah, serta aspek atau dimensi yang ada dalam konsep *Smart City*. Strategi ini harus mewadahi keseluruhan dari pilar *Smart City* beserta keenam dimensi di dalamnya. Selain itu, penyusunan strategi tersebut harus melibatkan seluruh aktor pemerintah di setiap OPD di Kabupaten Cilacap agar strategi yang dihasilkan memang berasal dari inovasi dan usulan dari pihak yang nantinya akan menjadi eksekutor dari strategi yang telah dicanangkan.

Perlu adanya perumusan strategi pembangunan yang matang dan mampu merangkum masing-masing dimensi *Smart City*, meliputi *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Setiap strategi dalam dimensi *Smart City* harus mampu saling melengkapi dan diintegrasikan dalam satu visi yang sama. Dengan merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan *Smart City*, Kabupaten Cilacap dapat bergerak maju dalam upaya transformasi menjadi Kabupaten cerdas yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.1. *Smart Governance*

Smart Governance merujuk pada pendekatan cerdas dalam mengatur pemerintahan, yang menjadi komponen utama dalam mengendalikan pola-pola kehidupan di sebuah kota. Konsep ini mengubah cara tradisional birokrasi dengan menggunakan teknologi dan inovasi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, efektif, responsif, dan adaptif. Hal ini berarti pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan akurat, dan sekaligus dapat meminimalkan biaya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Dalam rangka membangun *Smart City* di Kabupaten Cilacap, penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang mencakup tiga aspek kunci *Smart Governance*. Pertama, peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi layanan pemerintah yang dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kualitas layanan. Teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan proses dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, pengelolaan birokrasi yang lebih efisien serta berorientasi pada keadilan, bertanggung jawab, dan terbuka. Dengan demikian, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Terakhir, efisiensi kebijakan publik dengan mengutamakan pada dampak positif bagi semua kalangan masyarakat serta keterbukaan informasi kebijakan pemerintah sebagai

keputusan yang berbasis bukti. Melalui pendekatan ini, kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian, maka dirumuskan strategi-strategi yang merujuk pada sub dimensi *Smart Governance* untuk membantu dalam memastikan bahwa pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dijalankan dengan cara yang cerdas, responsif, dan berorientasi pada hasil. Lebih jauh lagi, Kabupaten Cilacap dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menjalankan pemerintahan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 76. Strategi Pembangunan *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
G1 Layanan Publik	G1.1. Tersedianya layanan pulik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi	G1.1.1. Pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain
G2 Birokrasi	G2.1. Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)	G2.1.1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
G3 Perancangan	G3.1. Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya	G3.1.1. Pengembangan road map kebijakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

G: *Smart Governance*

3.2. *Smart Branding*

Smart Branding merujuk pada inovasi dalam memasarkan suatu daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya saing. Melalui *branding*, sebuah kota dapat meningkatkan 'brand value' daerah, yang mampu mendorong aktivitas ekonomi dan membantu mengembangkan kehidupan sosial dan budaya lokal. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *branding* cerdas ini berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan utama dari *Smart City*.

Menerapkan *Smart City* di Kabupaten Cilacap memerlukan strategi pembangunan yang fokus pada tiga elemen kunci smart branding. Pertama, adalah pengembangan ekosistem pariwisata yang kuat. Melalui *branding* cerdas, Kabupaten Cilacap dapat mempromosikan daya tarik wisata yang unik dan menciptakan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun internasional. Kedua, adalah pengembangan ekosistem bisnis lokal yang tangguh. Melalui *smart branding*, Kabupaten Cilacap dapat menonjolkan keunggulan bisnis lokal dan membantu pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang. Terakhir, adalah peningkatan tampilan kota. Sebuah kota yang bersih, hijau, dan indah secara visual dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan *brand value*. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk memperbaiki dan

mempertahankan penampilan fisik kota, termasuk infrastruktur publik, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, hadir strategi-strategi yang berlandaskan pada sub dimensi *Smart Branding* yang dapat membantu Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan daya saing dan bertransformasi menjadi *Smart City* yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan. *Branding* yang cerdas dan efektif akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warganya.

Tabel 77. Strategi Pembangunan Smart Branding Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
B1 Pariwisata	B1.1. Tersedia sistem pengelolaan pariwisata yang baik	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri pariwisata
	B1.2. Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian	
	B1.3. Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional	
	B1.4. Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata	
B2 Daya Saing Daerah	B2.1. Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan
	B2.2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat	
	B2.3. Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya	
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1. Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah
	B3.2. Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif.	
	B3.3. Terwujudnya penataan wajah kota dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

B: *Smart Branding*

3.3. *Smart Economy*

Smart Economy merujuk pada pendekatan inovatif dalam mengelola perekonomian daerah, dengan tujuan utama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan adaptif. Selain itu, ekonomi cerdas juga diharapkan dapat merespon cepat terhadap tantangan di era digital yang penuh dengan disrupsi. Pendekatan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu disusun strategi yang berfokus pada tiga elemen kunci dari *Smart Economy*. Pertama, adalah ekosistem industri yang berkelanjutan dan kompetitif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui integrasi industri primer, sekunder, dan tersier. Kedua, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat

dicapai dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi merata dan menciptakan peluang pekerjaan yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, adalah ekosistem transaksi keuangan yang efisien dan aman. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi keuangan, baik dalam bentuk pembayaran, penarikan, transfer, atau jenis transaksi lainnya. Hal ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi aktivitas bisnis.

Dengan fokus pada tiga elemen ini, maka diformulasikan beberapa strategi pada masing-masing sub dimensi *Smart Economy*. Strategi ini diharapkan dapat membantu Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan di era digital, sekaligus memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh teknologi dan inovasi. Sehingga, mampu mencapai tujuan Kabupaten Cilacap menjadi *Smart City* yang mampu menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi.

Tabel 78. Strategi Pembangunan *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1. Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata	Ec1.1.1. Optimalisasi ekosistem industri yang ada untuk diversifikasi pendapatan masyarakat
	Ec1.2. Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas	
	Ec1.3. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC)	
	Ec1.4. Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal	
	Ec1.5. Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran online (<i>marketplace</i>)	
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1. Mewujudkan modal kerja sama secara pentahelix (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media)	Ec2.1.1. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasama dengan pentahelix
	Ec2.2. Peningkatan kompetensi angkatan kerja	
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1. Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai
	Ec3.2. Pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

Ec: *Smart Economy*

3.4. *Smart Living*

Smart Living merujuk pada pendekatan yang bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kualitas tinggi dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sasarannya adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Sehingga, penting adanya untuk memberikan perhatian lebih pada kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, dilakukan perumusan strategi yang mencerminkan pada tiga elemen utama *Smart Living*. Pertama, kelayakan pola hidup atau harmonisasi tata ruang. Elemen ini melibatkan perencanaan dan pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merespons kebutuhan dan gaya hidup penduduk, seperti akses ke taman dan ruang terbuka, fasilitas komunitas, dan perumahan yang layak dan terjangkau. Kedua, kelayakan kualitas kesehatan. Ini berarti memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan tindakan dalam pencegahan penyakit. Ketiga, kelayakan moda transportasi. Ini melibatkan pengembangan sistem transportasi yang efisien, aman, dan terjangkau, yang memungkinkan mobilitas yang mudah dan cepat bagi semua penduduk.

Dengan memperhatikan tiga elemen ini, maka muncul strategi-strategi dalam pembangunan *Smart Living* sebagai salah satu dimensi *Smart City*. Melalui *Smart Living*, Kabupaten Cilacap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang layak, nyaman, dan efisien.

Tabel 79. Strategi Pembangunan *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1. Optimalisasi ruang terbuka hijau	Lv1.1.1. Peninjauan kembali zonasi tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi wilayah (dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi)
Lv2 Kesehatan	Lv2.1. Pencegahan terhadap stunting	Lv2.1.1. Peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional
	Lv2.2. Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS)	
	Lv2.3. Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak	
Lv3 /Transportasi	Lv3.1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat
	Lv3.2. Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

Lv: *Smart Living*

3.5. *Smart Society*

Smart Society merupakan salah satu dimensi utama dalam pembangunan *Smart City* dengan manusia sebagai pusat dari segala kegiatan dan keputusan dalam pembangunan kota. Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai penekanan pada pengembangan sumber daya manusia agar dapat beradaptasi pada perkembangan zaman dengan baik. Keterampilan, kreativitas, dan

inovasi menjadi inti dalam pendekatan ini, merangkul teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan memfasilitasi solusi inovatif untuk tantangan yang muncul.

Dalam konteks Kabupaten Cilacap sebagai *Smart City*, terdapat tiga elemen utama yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan *Smart Society*. Elemen pertama adalah interaksi masyarakat yang efisien baik antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, maupun antar kelompok sosial. Interaksi masyarakat tersebut dapat berupa interaksi fisik atau virtual sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Elemen kedua adalah ekosistem belajar. Ini merujuk pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks digital. Elemen ketiga adalah sistem keamanan masyarakat. Dalam hal ini, berfokus pada perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, serta keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, di era digital keamanan siber menjadi hal yang penting. Maka, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa sistem dan infrastruktur digital kota aman dan dapat dipercaya, serta masyarakat memahami cara-cara untuk menjaga keamanan informasi dan privasi mereka di dunia digital.

Melalui fokus pada tiga elemen, maka dibentuk strategi pembangunan *Smart Society* sesuai dengan masing-masing sub dimensi. Strategi pembangunan *Smart Society* diharapkan mampu mendukung Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten cerdas dengan penekanan pada hubungan antar-warga yang terjalin semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Tabel 80. Strategi Pembangunan *Smart Society* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya	S1.1.1. Penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan solidaritas sosial keagamaan dengan optimalisasi teknologi digital
	S1.2. Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat	
S2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S2.1. Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan	S2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dan peningkatan pembangunan literasi masyarakat
	S2.2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat	
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1. Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat	S3.1.1. Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi
	S3.2. Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

S: *Smart Society*

3.6. Smart Environment

Smart Environment merupakan suatu pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan perkotaan yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Prinsip dasarnya menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan yang masif dengan pelestarian lingkungan, sehingga tidak menghasilkan dampak yang merusak terhadap alam. Konsep *Smart Environment* menekankan perlunya mengintegrasikan teknologi cerdas dan inovatif dalam upaya pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan lingkungan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen sumber daya alam hingga pengurangan dan penanganan sampah dan limbah.

Untuk itu, perlu adanya perancangan strategi pembangunan dengan mempertimbangkan tiga elemen utama. Pertama, proteksi lingkungan, yang melibatkan upaya pelestarian alam dan pengurangan polusi. Kedua, tata kelola sampah dan limbah yang efektif, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan sampah dan limbah secara efisien dan bertanggung jawab. Ketiga, tata kelola energi yang efisien dan berkelanjutan, yang menuntut penerapan teknologi dan praktik hemat energi, serta promosi energi terbarukan.

Dengan demikian, dirancang strategi pembangunan pada *Smart Enviroment* berdasarkan tiap-tiap sub dimensi. Sehingga, strategi tersebut diharapkan dapat membawa Kabupaten Cilacap mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pada akhirnya, Kabupaten Cilacap mampu menjadi Kabupaten dengan menerapkan model pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan.

Tabel 81. Strategi Pembangunan *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1. Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI) Kab. Cilacap	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1. Terwujudnya tata kelola persampahan	En2.1.1. Mengembangkan sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat
En3 Tata Kelola Energi	En3.1. Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell (Implementasi di kantor Pertamina)	En3.1.1. Fasilitasi kajian dan menyiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

En: *Smart Environment*



BAB 4

RENCANA AKSI
SMART CITY DAERAH

BAB 4. RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH

Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap memerlukan persiapan yang matang dan terencana. Semua dimulai dengan perumusan strategi yang jelas dan tepat sasaran, yang menggambarkan visi dan misi dari pembangunan smart city yang diharapkan. Strategi tersebut diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan dan karakteristik khusus dari Kabupaten Cilacap.

Setelah strategi berhasil dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merancang rencana aksi. Ini merupakan penjabaran rinci dari strategi yang sudah dibuat. Rencana aksi merealisasikan ide-ide besar dari strategi menjadi serangkaian tindakan spesifik, menguraikan apa yang perlu dilakukan, kapan, dan bagaimana. Setiap elemen dalam rencana aksi haruslah komprehensif, mencakup detail kegiatan, sumber daya yang diperlukan, dan timeline pelaksanaannya.

Dengan rencana aksi yang terstruktur dan rinci, Kabupaten Cilacap akan memiliki panduan kerja yang jelas dalam menjalankan inisiatif smart city. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, mitra strategis, hingga masyarakat, memahami dan berkomitmen pada tujuan yang sama. Dengan demikian, proses transformasi Kabupaten Cilacap menjadi smart city tidak hanya akan berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penyusunan rencana aksi smart city, terdapat kodifikasi yang digunakan seperti keterangan pada dimensi smart city yang berupa G untuk *Smart Governance*, B untuk *Smart Branding*, Ec untuk *Smart Economy*, Lv untuk *Smart Living*, S untuk *Smart Society*, dan En untuk *Smart Environment*.

4.1. Smart Governance

Berdasarkan strategi pengembangan yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart Governance* di Kabupaten Cilacap, ada beberapa rencana aksi yang dicanangkan berupa program atau kegiatan sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 82. Rencana Aksi *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
G1 Layanan Publik	G1.1.1. Pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Program ini sudah berjalan	2014	B1. Penyediaan ruangan khusus untuk JDIH atau Perpustakaan hukum B2. Pengadaan alat pengolah data dan akses internet B3. Pengadaan front office khusus JDIH B4. Penyediaan kios informasi elektronik JDIH	2024	C1. Pengembangan web JDIH C2. Pengembangan aplikasi android/iOS	2024	D1. Penyuluhan Hukum	2024
		Siap Bayare Online (Sistem Aplikasi Pembayaran Retribusi Online)	A1. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung peningkatan retribusi sewa bangunan Sasana Diklat Praja secara online	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Penyediaan Koneksi Internet yang lancar B5. Penguatan Keamanan Data.	2023	C1. Pembangunan aplikasi Siap Bayare Online (Sistem Aplikasi Pembayaran Retribusi Online)	2023-2024	D1. Sosialisasi dan diseminasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
G2 Birokrasi	G2.1.1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (e-Simpeg)	A1. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap terkait pemanfaatan dan keamanan data kepegawaian	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Pengoptimalan atau Upgrade e-Simpeg, C2. Pengintegrasian e-Simpeg dengan SIASN-BKN C3. Pengembangan Mobile Apps Cilacap Smart ASN (CISA).	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024-2026
		Pengembangan aplikasi Penilaian Kinerja ASN (e-Kinerja dan PKSP 360)	A1. Peraturan Bupati Cilacap terkait pemanfaatan Sistem informasi manajemen kinerja (e-Kinerja dan PKSP 360)	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Pengembangan aplikasi Penilaian Kinerja ASN berbasis Mobile dan Pembangunan aplikasi PKSP 360	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024-2026
		Pengembangan aplikasi e-Presensi	A1. Peraturan Bupati Cilacap terkait Penegakan Disiplin Pegawai melalui aplikasi	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet	2024-2026	C1. Optimalisasi atau Upgrade aplikasi ePresensi versi IOS dan Android serta menggunakan	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			e-Presensi		B5. Pengadaan Keamanan Data.		<i>face biometric</i>		melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	
		Pengembangan aplikasi e-Peta Jabatan	A1. Peraturan Bupati Cilacap terkait Pemanfaatan Sistem Informasi e-Peta jabatan	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Penyediaan Koneksi Internet lancar B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Pengoptimalan atau <i>Upgrade</i> aplikasi e-Presensi berbasis <i>Mobile</i> C2. Pengintegrasian dengan e-Anjab	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024-2026
		Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Mutasi (Si Imut)	A1. Surat Edaran Bupati Cilacap terkait Pemanfaatan Sistem Informasi e-Mutasi	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Mutasi (Si Imut);	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	
		Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta (Si Mala)	A1. Peraturan Bupati Cilacap terkait Manajemen Talenta	2024	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta (Si Mala).	2024-2026	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024-2026
		Manajemen Assessment Center	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Assessment Center A2. Penyiapan SDM Asesor dan Pembentukan	2025	B1. Penyiapan gedung untuk lab <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) B2. Pengadaan Ruang Analisis Kasus (FGD) dan ruang untuk Wawancara B3. Pengadaan Perangkat Komputer B4. Pengadaan Server B5. Pengadaan Jaringan Lokal	2024-2026	C1. Membangun dan mengembangkan aplikasi CAT dan aplikasi pendukung kegiatan <i>assesment</i> .	2024	D1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			kelembagaan (UPT Assesment Center)		B6. Penyediaan Koneksi Internet stabil.				Bupati Cilacap.	
		Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi	A1. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Pengembangan Kompetensi	2025	B1. Pengadaan Perangkat Komputer B2. Pengadaan Server B3. Pengadaan Jaringan Lokal B4. Pengadaan Koneksi Internet B5. Penguatan Keamanan Data.	2024-2026	C1. Membangun dan mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Pengembangan Kompetensi	-	A1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diseminasi informasi melalui website dan media sosial BKPPD dan Surat Edaran Bupati Cilacap.	2024-2026
		Sistem Informasi Manajemen Desa	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Desa	2024	B1. Penguatan SDM administrator/operator tingkat desa yang handal B2. Pengadaan Koneksi internet yang bagus B3. Pengadaan PC/laptop dengan spesifikasi yang tinggi	2024-2026	C1. Pengembangan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa	2024	D1. Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	A1. Permendagri No 77 tahun 2020	2023	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan PC untuk pengguna aplikasi	2024	C1. Pengembangan aplikasi SIPBLUD C2. Pengembangan aplikasi SIPBOK C3. Pengembangan aplikasi SIPersediaan	2024	D1. Sosialisasi pelatihan dan Analisa laporan	2024
G3 Perancangan	G3.1.1. Pengembangan road map kebijakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi	SISUKMA	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung penggunaan aplikasi Sisukma	-	B1. Pengadaan Kios informasi elektronik SISUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat)	2024	C1. Pengoptimalan atau <i>Updating System</i>	2024	A1. Sosialisasi penggunaan aplikasi SISUKMA	2024
		Simpok APBD (sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan APBD)	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung penggunaan aplikasi Simpok APBD	2021	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024-2026	C1. Pengembangan fitur aplikasi	2024-2026	D1. Regulasi terkait penggunaan ANJAB D2. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi	2024-2026
		E-SAKIP	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung penggunaan	2021	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024-2026	C1. Pengembangan fitur aplikasi	2024-2026	D3. Regulasi terkait penggunaan ANJAB D4. Sosialisasi Penggunaan	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			aplikasi E-SAKIP						Aplikasi	
		ANJAB	A1. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap untuk mendukung penggunaan aplikasi ANJAB	2021	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024-2026	C1. Pengembangan fitur aplikasi	2024-2026	D5.Regulasi terkait penggunaan ANJAB D6. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi	2024-2026

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Rencana aksi pada dimensi Smart Governance bertujuan untuk memberikan penjabaran terhadap pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur, perangkat lunak pendukung, dan penguatan literasi dengan berlandaskan pada inovasi-inovasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, smart governance berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain. Tujuan utama adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dengan lebih baik. Smart Governance juga menekankan pada manajemen birokrasi melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Reformasi ini mencakup optimalisasi struktur organisasi, proses kerja, dan sistem reward dan punishment, dengan harapan dapat mendorong produktivitas, kreativitas, dan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terakhir, Smart Governance berfokus pada efisiensi kebijakan dengan mengembangkan road map kebijakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi. Ini melibatkan pengintegrasian teknologi dalam pengelolaan sistem informasi untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan up-to-date.

4.2. Smart Branding

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan *Smart Branding* di Kabupaten Cilacap dengan mengikuti strategi pengembangan yang telah disusun sebelumnya, maka dirancanglah rencana aksi berupa program atau kegiatan hingga tahun tertentu sebagaimana yang ada pada tabel berikut:

Tabel 83. Rencana Aksi Smart Branding Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
B1 Pariwisata	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri pariwisata	Pembinaan dan pemberdayaan komunitas seni budaya serta lembaga adat dalam mengeksplor potensi lokal, untuk membangun identitas kultural melalui festival budaya	A1. Pengembangan kebijakan melalui MoU kerjasama dengan perguruan tinggi seni terkait kebutuhan staff ahli pembinaan	2024-2027	B1. Pengadaan Ruang kegiatan seni	2024-2027	C1. Pembuatan Media Sosial	2024-2027	D1. Pengadaan Kajian seni dan sosialisasi	2024-2027
		Pengembangan aplikasi ensiklopedia objek pemajuan kebudayaan Cilacap	A1. Kerjasama dengan pihak ke-3 untuk pemutakhiran aplikasi	2024-2027	B1. Pengadaan Perangkat komputer B2. Pengadaan Jaringan B3. Pengadaan Media perekaman data	2024-2027	C1. Pengembangan Software pembuat aplikasi	2024-2027	D1. Pelaksanaan Sosialisasi	2024-dst
		Optimalisasi media cetak, media	A1. Kerjasama dengan perusahaan	2024-2026	B1. Ruangan Media Center B2. Pengadaan	2024-2026	C1. Website C2. Media Sosial C3. Pengembangan	2024-2026	D1. Pelaksanaan Sosialisasi D2. Pelaksanaan	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		elektronik, media sosial pemkab untuk publikasi/ branding Smart City	A2. Pembentukan tim pengelola website dan admin media sosial perangkat daerah		Perangkat Komputer B3. Pengadaan Smartphone B4. Pengadaan Jaringan internet		aplikasi pendukung pembuatan konten		Bimtek D3. Pelaksanaan Rakor	
		Pengembangan Desa Wisata	A1. Penetapan desa wisata baru	2024-2026	B1. Pembangunan infrastruktur penunjang desa wisata baru	2024-2026	C1. Pengembangan Website C2. Pengembangan Sosial media desa wisata	2024-2026	D1. Pelaksanaan Sosialisasi D2. Pelaksanaan FGD	2024-2026
B2 Daya Saing Bisnis	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan	Tersedianya Kreatif Hub / Jaringan Kota Kreatif	A1. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif (pendanaan, pembangunan, dan promosi)	2024-2026	B1. Pengadaan Lahan B2. Pengadaan Ruang kerja B3. Pengadaan ruang pertemuan B4. Pengadaan ruang pameran B5. Pengadaan ruang pertunjukkan B6. Pengadaan	2024-2026	C1. Pengembangan Website	2024-2026	D1. Pelaksanaan Sosialisasi D2. Pelaksanaan FGD	2024-2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
					Jaringan internet					
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah	Pembangunan Sarpras pariwisata berbasis Digital	A1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan sarpras berbasis digital (perda retribusi, bagi hasil, dll)	2024-2026	B1. Pengadaan Jaringan internet B2. Pengadaan Jaringan komunikasi	2024-2026	C1. Pengembangan Sistem ticketing C2. Pengembangan Pembayaran, media sosial	2024-2026	D1. Pelaksanaan Sosialisasi D2. Pelaksanaan Bimtek D3. Pelaksanaan Rakor	2024-2026

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Rencana aksi untuk dimensi Smart Branding menguraikan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur, perangkat lunak pendukung, serta penguatan literasi, semuanya diarahkan berdasarkan inovasi-inovasi yang telah dipetakan. Smart Branding memiliki tujuan untuk meningkatkan citra dan identitas daerah melalui pendekatan yang terintegrasi, inovatif, dan partisipatif. Pada sub dimensi pariwisata dan budaya, Smart Branding berkontribusi melalui pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri pariwisata. Ini mencakup peningkatan promosi pariwisata yang efektif, penguatan kelembagaan pariwisata, serta kolaborasi dengan industri pariwisata. Dimensi Smart Branding juga menekankan pada peningkatan daya saing bisnis. Hal ini direalisasikan melalui pembangunan ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan. Dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang mendukung dan inklusif, diharapkan akan muncul lebih banyak inisiatif dan inovasi bisnis, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terakhir, terkait wajah atau tampilan kota, Smart Branding memfokuskan pada penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah. Penataan ini menciptakan lingkungan urban yang harmonis dan nyaman, sekaligus mengkomunikasikan identitas dan nilai-nilai lokal kepada penduduk dan pengunjung.

4.3. Smart Economy

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart Economy* yang mendukung *Smart City* di Kabupaten Cilacap, maka disusunlah rencana aksi yang merujuk pada strategi yang telah dirumuskan sebelumnya sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 84. Rencana Aksi *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1.1. Optimalisasi ekosistem industri yang ada untuk diversifikasi pendapatan masyarakat	Optimalisasi pemberdayaan OVOP	A1. Penyusunan indikator penentuan OVOP Melalui Peraturan Bupati A2. Penyusunan Tim Penetapan OVOP melalui SK Bupati A3. Penetapan OVOP melalui SK Bupati A4. Penetapan Desa OVOP melalui SK Bupati	2024-2025	B1. Pengadaan peralatan produksi sesuai kebutuhan B2. Peningkatkan Aksesibilitas distribusi produk	2025	C1. Pengembangan Website C2. Pengembangan E-commerce OVOP	2025	D1. Sosialisasi OVOP, Pelatihan pembuatan Produk yang berkualitas D2. Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM Pengelola OVOP	2025
		Sinergitas antar OPD dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	A1. Penyusunan Tim Sinergitas Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui SK Bupati	2023	Tidak ada infrastruktur fisik pendukung yang dibutuhkan dalam inovasi ini	-	C1. Penggunaan aplikasi yang sudah tersedia sesuai kebutuhan (SINERGI, GEOPORTAL, PIPD	2023	D1. Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan	2023

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
							)			
		Pengembangan Aplikasi SINERGI	A1. Perencanaan Pembangunan sebagai dasar operasional sinergi	2023	Tidak ada infrastruktur fisik pendukung yang dibutuhkan dalam inovasi ini	-	C1. Penyempurna-an aplikasi SINERGI	2024	D1. Penyelenggaraan Forum TJSLP	2024
		Pengembangan Aplikasi Geoportal	A1. Penyusunan roadmap prioritas pembangunan geoportal	2024	B1. Pengadaan Peta data sebaran objek sesuai dengan kebutuhan	2023	C1. Pembuatan aplikasi geoportal	2023	D1. Rakor koordinasi antar sektor	2023
		Pengembangan SIMPATIC (Sistem Informasi Manajemen Peluang & Potensi Investasi Cilacap	A1. SOP Pengelolaan SIMPATIC	2024	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024-2026	C1. Penyempurnaan sistem dalam SIMPATIC	2024-2026	D1. Rakor koordinasi antar sektor	2023
		Pengembangan SIAPIC (Sistem Informasi Aplikasi Potensi Investasi Kabupaten Cilacap)	A1. SOP Pengelolaan SIAPIC	2024	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024-2026	C1. Penyempurnaan sistem dalam SIAPIC	2024-2026	D1. Rakor koordinasi antar sektor	2023
Ec2 Kesejahteraan	Ec2.1.1. Pemerataan	Pengembangan Aplikasi dan	A1. Pembentukan Tim Pengelola	2024	B1. Pengadaan Server	2024	C1. Pengembangan	2024	D1. Sosialisasi Sistem PIPD ke OPD dan	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Masyarakat	pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasama dengan pentahelix	Media Sosial PIPD Cilacap (Pusat Informasi Perekonomian Daerah Kabupaten Cilacap) yang mencakup penyediaan informasi perekonomian dan keuangan di daerah	PIPD melalui SK Bupati		B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC		Sistem / Aplikasi		masyarakat Kabupaten Cilacap	
		Pengembangan PETI DESI Mandiri	A1. Penentuan desa inovasi beserta perguruan tinggi pendamping melalui SK Bupati	2023	Inovasi ini tidak membutuhkan infrastruktur pendukung	2023	C1. Pengembangan Data profil desa	2023	D1. Pendampingan desa inovasi	2023 (Setiap tahun)
		Pengembangan SIMPATIC (Sistem Informasi Manajemen Peluang & Potensi Investasi Cilacap)	A1. Pembuatan SOP Pengelolaan SIMPATIC	2024	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	2024	C1. Pengembangan Aplikasi SIMPATIC C2. Pengembangan Data potensi investasi	2023	D1. Sosialisasi ke pelaku usaha	2024
		Pengembangan SIAPIC (Sistem Informasi Aplikasi Potensi Investasi Kabupaten)	A1. Pembuatan SOP Pengelolaan SIAPIC	2024	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan	2024	C1. Pengembangan Aplikasi SIAPIC C2. Pengembangan Data potensi investasi	2023	D1. Sosialisasi ke Pelaku usaha	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Cilacap)			PC					
		Aplikasi Promosi dan Penjualan Produk Usaha Mikro (CIBLON/ Cilacap Belanja Online)	A1. Surat edaran penggunaan aplikasi CIBLON sebagai sarana pemasaran dan transaksi penjualan UMKM	2023	B1. Pengadaan <i>smartphone</i> Android B2. Pengadaan Jaringan Data internet	2023	C1. Penyempurna-an aplikasi CIBLON	2023	D1. Sosialisasi CIBLON kepada UMKM dan masyarakat Cilacap	2023
Ec3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai	Pengembangan Aplikasi dan Media Sosial PIPD Cilacap (Pusat Informasi Perekonomian Daerah Kabupaten Cilacap) yang mencakup penyediaan informasi perekonomian dan keuangan di daerah	A1. Pembentukan Tim Pengelola PIPD melalui SK Bupati A2. Pembuatan SOP Penggunaan PIPD	2024	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	-	C1. Pengembangan Sistem / Aplikasi	2024	D1. Sosialisasi Sistem PIPD ke OPD dan masyarakat Kabupaten Cilacap	2024
		Optimalisasi penggunaan QRIS dan sarana transaksi elektronik lainnya bagi UMKM yang mengikuti	A1. Pembuatan Surat Edaran Bupati tentang Penggunaan QRIS A2. Pengadaan Sarana Transaksi Elektronik	2024	Inovasi program ini tidak membutuhkan infrastruktur pendukung	-	Inovasi program ini tidak membutuhkan perangkat lunak pendukung	-	D1. Sosialisasi Kewajiban Penggunaan QRIS & sarana transaksi elektronik lainnya kepada UMKM	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		kegiatan Pekan Promosi Cilacap Expo	Lainnya						yang mengikuti pekan promosi Cilacap Expo	
		Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	A1. Penyesuaian Perda/Perbup terhadap Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Jaringan Internet B3. Pengadaan PC	-	C1. Pengembangan aplikasi SIPBLUD C2. Pengembangan aplikasi SIPBOK C3. Pengembangan aplikasi Persediaan	2024	D1. Sosialisasi pelatihan D2. Analisa laporan	2024
		Pengembangan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah	A1. Perubahan Perbup tentang pengelolaan Pajak Daerah & retribusi daerah secara online dan terintegrasi & transaksi secara non tunai A2. Penetapan SK Bupati ttg OPD pemungut pajak & retribusi A3. Pembuatan SOP pengelolaan pajak dan	2024-2025	B1. Pengadaan Server B2. Pengadaan Lisensi database	2024	C1. Pengembangan Aplikasi retribusi online C2. Pengembangan SISMIOP C3. Pengembangan SITAXDA C4. Pengembangan E-BPHTB C5. Pengembangan E-SPTPD C6. Pengembangan E-PBB C7. Pengembangan aplikasi mobile	2024-2025	D1. Sosialisasi & pengembangan SDM pengguna aplikasi D2. Pengadaan Rapat Koordinasi OPD pemungut pajak & retribusi D3. Sosialisasi kepada Wajib Pajak & Wajib Retribusi	2024, dst

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			retribusi dalam 1 aplikasi terintegrasi A4. Perluasan Perjanjian Kerjasama dengan perbankan, toko modern, e-wallet untuk kanal pembayaran secara non tunai							

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Rencana aksi pada dimensi Smart Economy di Kabupaten Cilacap mencakup penjabaran terhadap pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan infrastruktur dan perangkat lunak pendukung, serta penguatan literasi, yang berbasis pada inovasi-inovasi serta telah dirumuskan sebelumnya. Dalam menciptakan ekosistem industri yang optimal, Smart Economy berfokus optimalisasi ekosistem industri yang ada untuk diversifikasi pendapatan masyarakat. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan membuka peluang bagi inovasi dan usaha baru, memacu perkembangan industri kreatif dan teknologi, serta menumbuhkan ekonomi yang lebih tangguh dan resilien terhadap perubahan dan krisis. Kemudian, dari sisi kesejahteraan masyarakat, Smart Economy berkomitmen untuk mewujudkan Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasama dengan pentahelix., yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media. Pemerataan pendapatan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menginspirasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta menciptakan peluang untuk pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terakhir, untuk mendukung transaksi keuangan yang efisien dan inklusif, Smart Economy berfokus pada pembangunan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai. Tujuan dari

inisiatif ini adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam perekonomian.

4.4. Smart Living

Untuk mewujudkan *Smart Living* sebagai bagian dari *Smart City* di Kabupaten Cilacap, maka perlu untuk merumuskan rencana aksi berdasarkan sub dimensi dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan rincian peta jalan pada dimensi *Smart Living*:

Tabel 85. Rencana Aksi *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1.1. Peninjauan kembali zonasi tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi wilayah (dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi)	SIPOTENSI BEN (Sistem Informasi POTENSI BENCANA berbasis web)	A1. Penetapan SK Bupati Cilacap tentang SIPOTENSI BEN sebagai informasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi [pembangunan berbasis ancaman bencana, Pembentukan Forum Mitigasi Abrasi Pantai Cilacap dan	2024	B1. Penguatan dan pengembangan web system, perawatan rutin, server center yang kuat dan tangguh, personil yang kompeten	2024	C1. Pengembangan Website	2024	D1. Pembuatan Akun medsos BPBD dan multi pihak (pentahelix)	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Tsunami, Kajian penguatan dan penelitian pengembangan web site							
		Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan, Pengendalian Kepadatan Permukiman dengan Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan, Penataan serta pengembangan Kawasan Perkotaan, Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	A1. Penetapan Peraturan Bupati	2024	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, Drone, alat ukur, GPS	2024	C1. Pengadaan lisensi ArcGIs, Ms. Office, Json, dll	2024	D1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2024
		Perencanaan Penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan,	A1. Penetapan Peraturan Bupati	2024	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, Drone, alat	2024	C1. Pengadaan lisensi ArcGIs, Ms. Office, Json,	2024	D1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Penyusunan Rencana struktur ruang yang , Penegasan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			ukur, GPS		dll			
		Penyusunan Peraturan Bupati terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	A1. Penetapan Peraturan Bupati	2024	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, printer, ATK	2024	C1. Penggunaan Ms. Office, Penggunaan dan pengisian SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawas Teknis)	2024	D1. Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan	2025
		Pelibatan peran Masyarakat dalam Konsultasi Publik penyusunan RTR dilingkungan Kabupaten Cilacap	A1. Penetapan Peraturan Bupati	2024	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, printer, ATK	2024	C1. Penggunaan ArcGIs, Ms. Office, Penggunaan dan pengisian SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawas Teknis)	2024	D1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	2024
		Penyebarluasan informasi mengenai tata ruang melalui	A1. Penetapan Peraturan	2024	B1. Pengadaan Perangkat komputer,	2024	C1. Penggunaan Ms. Office, https://oss.g	2024	D1. Pelaksanaan Sosialisasi	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		sosialisasi Bidang Penataan Ruang kepada masyarakat	Bupati		Seminar Kit, dan prasarana pendukung lainnya		o.id/ , https://gista.ru.atrbpn.go.id/			
		Pengembangan konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	A1. Penerbitan Peraturan Bupati dan SOP terkait pengelolaan sistem informasi Tata Ruang	2025	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, Server	2025	C1. Pengembangan web https://tataruangonline.cilacapkab.go.id/ , penggunaan website https://gista.ru.atrbpn.go.id/	2025	D1. Sosialisasi dan launching web informasi Tata Ruang	2026
		Pengembangan Aplikasi Web Pengajuan Informasi Tata Ruang	A1. Penerbitan Peraturan Bupati, SK FPRD dan SOP terkait pengelolaan sistem informasi Tata Ruang	2025	B1. Pengadaan Perangkat komputer, internet, Server	2025	C1. Pengembangan web dan penyediaan server, Penggunaan OSS (sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)	2025	D1. Sosialisasi dan launching web informasi Tata Ruang	2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Lv2 Kesehatan	Lv2.1.1. Peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional	SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	A1. Penetapan SK KADINKES Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	2024	B1. Peningkatan / pengembangan Server Database Aplikasi	2024-dst	C1. Pengembangan Web hosting, database SQL Server	2024-dst	D1. Sosialisasi kepada masyarakat dan Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan Aplikasi BPJS dan SATU SEHAT	2024-dst
		SIMPO (Sistem Manajemen Pengelolaan Obat)	A1. Penetapan SK KADINKES Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	2024	B1. Peningkatan / pengembangan Server Database Aplikasi	2024-dst	C1. Pengembangan Web hosting, database SQL Server	2024-dst	D1. Sosialisasi cara pengoperasian Aplikasi dan Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan Aplikasi BPJS dan SATU SEHAT	2024-dst
		CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan)	A1. SK KEPALA DINAS KBPPPA Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas KBPPPA	2022	B1. Peningkatan sarana dan prasarana terpadu satu atap 1. Kepolisian	2022-dst	C1. Pengadaan Call Center melalui WA	2022-dst	D1. Menunggu Pelaksanaan SOTK Terbaru Bidang PPPA Bergabung dengan Dinas	2022-dst

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
					PPA 2. Psikolog 3. dr. SPOG				Sosial, MOU pendukung dengan pihak terkait(POLRES, RSUD, KEJAKSAAN, PENGADILAN, DINAS KBPPA, DINSOS, DINAS P&K, SATPOL PP, KEMENAG, Desa/ Kecamatan)	
Lv3 Transportasi		Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room	A1. Penerbitan SK Bupati Kawasan Tertib Lalu Lintas	2024	B1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Adaptif Traffic Light, ATCS dan perlengkapan jalan lainnya)	2025 - dst	C1. Pengadaan aplikasi pendukung ATCS	2025 - dst	D1. Sosialisasi kepada masyarakat	2025 - dst
			A2. Pelaksanaan Kerja Sama	2025	B2. Pembangunan Control	2025	C1. Pembuatan Website	2025 - dst	D1. Sosialisasi dan diskusi dengan	2025

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			dengan vendor penyedia ATCS		Room		Pemantauan Arus Lalu Lintas <i>Real time</i>		pihak vendor	
		e-Parking	A1. Pelaksanaan Kerja Sama dengan vendor penyedia aplikasi e-Parking	2025	B1. Pengadaan peralatan pendukung e-Parking	2025 - dst	C1. Pengadaan aplikasi pendukung e-Parking	2025 - dst	D1. Sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir	2025 - dst
		e-Ticketing Angkutan Umum	A1. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perhubungan	2025	B1. Pembangunan Halte dan Bus Stop	2024 - dst	C1. Pengadaan aplikasi pendukung e-Ticketing	2025 - dst	D1. Sosialisasi kepada masyarakat	2025 - dst
			A2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan vendor penyedia aplikasi e-Ticketing Angkutan Umum	2025	B1. Pengadaan peralatan pendukung e-Ticketing	2025 - dst	C1. Pengadaan aplikasi pendukung e-Ticketing	2025 - dst	D1. Pelaksanaan FGD dengan vendor	2025
		4. Smart LPJU	A1. Pelaksanaan	2024	B1. Pengadaan	2025 -	C1. Pengadaan	2025 -	D1. Sosialisasi	2025 -

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Kerja Sama dengan vendor penyedia aplikasi <i>Smart LPJU</i>		dan Pemasangan <i>Smart LPJU</i>	dst	aplikasi pendukung <i>Smart LPJU</i>	dst	kepada masyarakat	dst
		5. <i>Drive Thru</i> Pengujian Kendaraan Bermotor	B2. Pengadaan SDM dengan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	2024	B1. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Otomatis	2025 - dst	C1. Pengadaan aplikasi pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor Otomatis	2025 - dst	D1. Sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji	2025 - dst
			B3. Pelaksanaan Kerja Sama dengan vendor penyedia aplikasi	2024					D2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Penguji Kendaraan Bermotor dan Operator	2025 - dst

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Rencana aksi untuk dimensi Smart Living menguraikan pengembangan kebijakan dan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan perangkat lunak pendukung, serta penguatan literasi yang didasarkan pada serangkaian inovasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup melalui harmonisasi tata ruang, peningkatan kualitas kesehatan, serta aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik. Dalam upaya mengharmonisasikan tata ruang, Smart Living menekankan pentingnya meninjau ulang dan merancang ulang zonasi tata ruang wilayah, dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Harmonisasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan perkembangan sosio-ekonomi, memastikan bahwa penggunaan ruang mendukung pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan Smart Living berfokus untuk meningkatkan

tata kelola dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional. Peningkatan mutu layanan kesehatan merupakan upaya memajukan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu. Terakhir, dari sisi aksesibilitas dan transportasi, Smart Living bertujuan untuk memperbaiki konektivitas dan transportasi publik dengan mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mempermudah mobilitas warga, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui penyediaan sarana transportasi yang efisien dan terjangkau.

4.5. Smart Society

Untuk mewujudkan *Smart Society* sebagai bagian dari *Smart City* di Kabupaten Cilacap, maka perlu untuk merumuskan rencana aksi berdasarkan sub dimensi dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan rincian peta jalan pada dimensi *Smart Society*:

Tabel 86. Rencana Aksi *Smart Society* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1.1. Penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal (dan solidaritas sosial keagamaan) dengan optimalisasi teknologi digital	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)	A1. Penetapan Raperbup MARI PERCAYA; A2. Penetapan SK Tim MARI PERCAYA, Naskah Kerjasama dengan stakeholder pendukung; A3. Penetapan MOU dengan desa/kelurahan untuk pembentukan Puskesmas desa/kelurahan	2023	B1. Pengadaan Server, Perangkat Komputer, Jaringan Internet, B2. Pengadaan Ruang Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) – SLRT, Puskesmas Desa/Kelurahan, Aplikasi berbasis website SIKS CB	2023	C1. Pengembangan Browser C2. Pengembangan aplikasi SIKS CB	2023	D1. Launching Mari Percaya D2. Launching PUSKESOS di desa/kelurahan, Backdrop, Banner, Media Sosial Dinsos (IG, Youtube, Tiktok, Website), Surat Kabar, PUSKESOS desa/kelurahan	2023
		SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintahan Desa)	A1. Penetapan SK Tim SIDA PEDES	2022 - 2026	B1. Pengadaan Perangkat komputer	2022 - 2026	C1. Pengembangan Browser	2022 - 2026	A1. Media Sosial (Youtube dan Website)	2022 - 2026

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
S2 Ekosistem Belajar / Pendidikan	S2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, SPM bidang pendidikan dan peningkatan pembangunan literasi masyarakat	PELITA (Pelayanan Literasi Tunanetra)	A1. UUD 1945 pasal 1 ayat 1; A2. UU No.43 Tahun 2007; A3. UU No. 8 Tahun 2016; A4. PP No 27 Tahun 2019 ; A5. Penetapan SK Tim	2023	B1. Pengadaan Kendaraan B2. Pengadaan buku braile	2023	Program ini tidak membutuhkan perangkat lunak pendukung	2023	D1. Launching, promosi melalui medsos (youtube, IG); surat kabar, banner	2023
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1. Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi	MONALISA WIKEN (Monitoring Antisipasi dan Pengendalian Konflik di Wilayah Kecamatan)	A1. UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial, A2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Sebagai ilustrasi bahwa inovasi Monalisa Wiken (Monitoring Antisipasi dan Pengendalian Konflik	2024*	B1. Pengadaan Server, B2. Pengadaan Perangkat Komputer, B3. Pengadaan SDM	2024 - 2026	C1. Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Internet	2024-2026	D1. Launching Web dan Medsos	2024

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			di Wilayah Kecamatan) masih memerlukan berbagai langkah pentahapan awal, termasuk dalam mengkoordinasikan dengan Satpol PP sebagai induk organisasi Sie Trantib di Kecamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai pemegang otoritas layanan internet dan server Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kecamatan itu sendiri, SDM, Perangkat Keras dan lunak, serta Aturan pada tataran Operasionalnya. Diperlukan SK Kepala OPD, MOU, Raperbup.							

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Dalam rencana aksi dimensi Smart Society dijabarkan pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur dan perangkat lunak pendukung, serta penguatan literasi sesuai dengan kebutuhan inovasinya masing-masing. Dalam Smart Society, salah satu fokusnya adalah terkait interaksi masyarakat. hal tersebut dilakukan melalui penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal (dan solidaritas sosial keagamaan) dengan optimalisasi teknologi digital. Selanjutnya, terkait ekosistem belajar atau pendidikan, dimensi ini menekankan pada pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini melibatkan dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tata kelola pendidikan, SPM bidang pendidikan dan peningkatan pembangunan literasi masyarakat. Upaya-upaya ini dirancang

untuk menghasilkan masyarakat yang teredukasi, melek teknologi, dan memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan zaman, menciptakan fondasi kuat untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Terakhir, terkait keselamatan masyarakat yang direalisasikan melalui perwujudan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi. Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko, seperti kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial, dan kegagalan teknologi.

4.6. Smart Environment

Untuk mewujudkan *Smart Environment* sebagai bagian dari *Smart City* di Kabupaten Cilacap, maka perlu untuk merumuskan rencana aksi berdasarkan sub dimensi dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan rincian peta jalan pada dimensi *Smart Environment*:

Tabel 87. Rencana Aksi *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)	Mengembangkan ONLIMO (Online Monitoring) Pemantauan Air Sungai 1. Menambah lokasi titik stasiun onlimo 2. Pengembangan aplikasi monitoring connect dengan mobile phone 3. Sinkronisasi data pusat dan daerah	A1. Penetapan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	2021 (sudah berlaku)	B1. Pengadaan Stasiun Onlimo B2. Pengadaan Alat Onlimo B3. Pengadaan Jaringan Internet	2024	C1. Pengembangan Aplikasi monitoring yang coonect dengan handphone C2. Pengembangan Aplikasi pendukung agar data dari pusat link ke data daerah	2024	D1. Pempublikasian hasil dari online monitoring melalui sinkronisasi hasil onlimo ke website DLH	2023
		Laboratorium Lingkungan :	A1. Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan	2020 (sudah)	B1. Pengadaan Kelengkapan	2024	C1. Pengembangan Aplikasi Sistem	2024	D1. Pempublikasian melalui media	2023

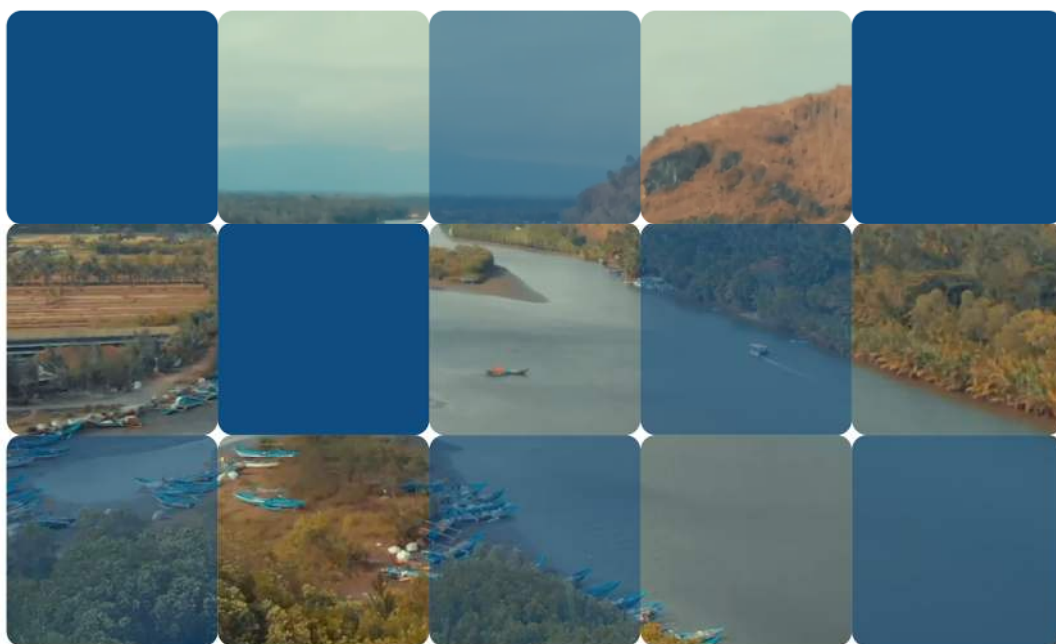
Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium lingkungan Cilacap 2. Penambahan Uji parameter tanah dan uji limbah bahan berbahaya dan beracun	Hidup No 23 Tahun 2020 tentang laboratorium lingkungan	berlaku)	peralatan laboratorium B2. Pengadaan Peralatan mobilisasi pengambilan sampel uji laboratorium		Informasi Laboratorium Lingkungan		sosial dan sosialisasi terkait laboratoirum lingkungan cilacap	
		RISDA (Ruang Informasi Sumber Daya Air) sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air	A1. Penetapan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 614/108/18 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cilacap Nomor 614/537/18/Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelolaan Sungai dan Drainase / Saluran Pembuang di Kabupaten Cilacap; A2. Pengimplementasian Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015	2018 (sudah berlaku)	B1. Pengadaan Webserver	2023	C1. Pengembangan Aplikasi RISDA (webGIS dan Android)	2023	D1. Pempublikasian melalui media sosial (website, instagram, facebook dan twitter)	2023

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi							
		SIAP MASK BRO (MengataSI Abrasi Pantai Menggunakan Anyaman Sabut Kelapa / Bronjong)	A1. Menerbitkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati, Kementerian PU, Pangdam tentang Mitigasi struktural terhadap ancaman abrasi dan tsunami, A2. Pengimplementasian Peraturan perundang-undangan dari pusat sampai dengan desa, A3. Pelaksanaan Kajian penelitian tentang abrasi pantai, kajian tentang permodelan tsunami	2024	B1. Pengembangan Industri sabut kelapa, alat berat yang bisa beroperasi di pesisir pantai sepanjang 50 km	2024	C1. Pemetaan wilayah pantai	2024	D1. Pelaksanaan Rembug desa, akun medsos desa, akun medsos BPBD, akun medsos multi pihak/pentahelix, Penyuluhan kepada pengelola wisata sepanjang pantai cilacap	2024
		ngOPi Disit di warung jamu (Pengelolaan Laporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dengan Sistem Digital)	A1. Pengimplementasian Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dan	2023	B1. Pengadaan webserver	2023	C1. Pengembangan Aplikasi ngOPi Disit di warung jamu (web dan Android)	2023	D1. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan	2023

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		untuk memuat data masa tanam, petak tersier, luas tanam, kebutuhan air, ketersediaan air dan realisasi pembagian serta pemberian airnya	A2. Pengimplementasian Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi							
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1.1. Mengembangkan sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat	TPST RDF (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Refused Derived Fuel) 1. Pilot project percontohan bagi daerah lain 2. Pengembangan sistem otomasi pengolahan RDF kedepannya	A1. Penetapan Kebijakan terkait penetapan standar harga rdf skala nasional A2. Pembentukan unit khusus pengelola TPST RDF baik dalam bentuk UPT/Perusda/BLUD	2024	B1. Pengadaan Truk Sampah B2. Pengadaan Tempat Sampah B3. Pengadaan eralatan RDF	2024	C1. Pengembangan Sistem Informasi utuh dan terintegrasi antara truk sampah dan perjalanan ke TPST RDF	2025	D1. Pelaksanaan FGD antara pihak swasta (PT.SBI) dan Pemkab Cilacap terkait pengelolaan TPST RDF	2023
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1. Fasilitasi kajian dan menyiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan	Output Pengolahan Sampah di TPST RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara	A1. Pelaksanaan berdasarkan kebijakan TPST RDF diatasnya	2024	B1. Pengadaan Peralatan pengangkutan RDF	2024	Program ini tidak memerlukan perangkat lunak khusus	-	D2. Pelaksanaan FGD antara pihak swasta (PT.SBI) dan Pemkab Cilacap terkait pengelolaan TPST RDF	2023

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Dimensi Smart Environment menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam rangka pembangunan Smart City. Dalam rencana aksinya, dijabarkan berbagai langkah strategis dalam pengembangan kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, perangkat lunak pendukung, dan literasi, semuanya didasarkan pada inovasi-inovasi yang telah terpilih. Smart Environment berfokus pada proteksi lingkungan yang dilakukan melalui optimalisasi penggunaan teknologi direncanakan untuk mendukung manajemen lingkungan yang lebih baik, meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta penanggulangan polusi. Inisiatif ini akan memastikan keberlanjutan ekosistem lokal dan menjaga keseimbangan alam, sejalan dengan upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Kemudian, pengelolaan limbah dan sampah yang diwujudkan dengan pengembangan sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Terakhir, berkaitan dengan tata kelola energi sebagai upaya untuk Fasilitasi kajian dan menyiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Memprioritaskan penggunaan energi yang ramah lingkungan akan menunjang keberlanjutan dan ketahanan energi di masa depan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.



BAB 5

PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

BAB 5. PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

Tahap selanjutnya dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap adalah melakukan perumusan peta jalan. Dalam konteks ini, peta jalan merupakan gambaran menyeluruh dan sistematis dari seluruh langkah yang harus diambil untuk mewujudkan visi *Smart City*. Detail target kinerja yang ingin dicapai dituangkan dengan jelas dalam peta jalan ini, beserta dengan rincian anggaran yang diperlukan untuk setiap program atau kegiatan.

Lebih lanjut, setiap dimensi dalam konsep *smart city* dijabarkan dengan spesifik. Hal ini meliputi serangkaian program atau kegiatan yang akan dijalankan, serta inovasi-inovasi unggulan yang menjadi ciri khas dari pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi benar-benar memberikan solusi atas tantangan dan kebutuhan lokal.

Dalam peta jalan pembangunan *smart city*, juga dilengkapi dengan keterangan penanggung jawab stakeholder yang terlibat. Implementasi peta jalan memerlukan kerjasama dan koordinasi antar dinas di pemerintahan Kabupaten Cilacap, maupun pihak lainnya yang dapat mendukung pembangunan *smart city* di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, peta jalan dilengkapi dengan detail dinas-dinas yang bertanggung jawab atas setiap program atau kegiatan, memastikan bahwa setiap elemen dalam peta jalan memiliki pemangku kepentingan yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk membaca seluruh tabel dibawah ini, silahkan perhatikan keterangan berikut:

Keterangan:

G: *Smart Governance*

Lv: *Smart Living*

B: *Smart Branding*

S: *Smart Society*

Ec: *Smart Economy*

En: *Smart Environment*

..P: Program

1.1. Smart Governance

Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap membutuhkan adanya peta jalan atau *roadmap* yang mejadi panduan langkah strategis terkait program atau kegiatan beserta inovasi yang dicanangkan dalam rangka menyongsong pembangunan *Smart City*. Perlu dirumuskan peta jalan yang mencakup peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengembangan dimensi *Smart Governance*. Berikut adalah Peta jalan *Smart City* jangka pendek hingga menengah untuk dimensi *Smart Governance* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 88. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
G1. Layanan Publik	G1.1.1. Pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain	G1.1.1.P.1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)												
		1. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumenasi														
		1.1. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata			60 Dokumen	180.469	60 dokumen	189.492	60 dokumen	198.967	60 dokumen	208.915	60 dokumen	219.360	APBD	Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		informasi hukum	laksana														
		1.2.Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			41 laporan	645.947	41 laporan	678.245	41 laporan	712.157	41 laporan	747.764	41 laporan	785.152	APB D	Seluruh unit kerja penyelenggaraan layanan publik
G2. Birokrasi	G2.1.1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	G2.1.1.P.1. Program kepegawaian daerah	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi												
		1.Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi														
		1.1. Peningkatan Kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya			100	360	100	360	100	378	100	396	100	415	APB D	Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah dan Kominfo
		G2.1.1.P.2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			dengan Persyaratan / Standar Jabatan														
		1.Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi teknis														
		1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi teknis			630 orang	675	630 orang	675	630 orang	708	630 orang	743	630 orang	780		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		G2.1.1.P.3. Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa tertinggal (Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100%)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Sistem Informasi Manajemen Desa (Desa 360)												
		1. Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa tertinggal per awal tahun														
		1.1.Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana			730	929	730	976	730	1.024	730	1.075	730	1.128	APB D	Disperma des dan Kominfo

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			desa														
		G2.1.1.P.4. Program kepegawaian daerah	Jumlah ASN mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem	Manajemen Assessment Center												
		1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi			penyelidikan non-darurat kota (hari)											
		1.1. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 dok	554	2 dok	539	2 dok	515	2 dok	566	2 dok	622	APB D
		G2.1.1.P.5. Penunjang urusan dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Optimalisasi penataan organisasi daerah												
		1.Penataan Organisasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		1.1. Peningkatan kinerja reformasi dan birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			8 dok	367.880	8 dok	386.274	8 dok	405.588	8 dok	425.867	8 dok	447.160	APB D	Seluruh OPD di Kabupate n Cilacap
		1.2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayana n publik dan tata laksana			41 lapora n	645.947	41 lapora n	678.245	41 lapora n	712.157	41 lapora n	747.764	41 lapora n	785.152	APB D	Seluruh unit pelayana n publik di Kabupate n Cilacap
		G2.1.1.P.6. Program pengelolaan barang milik daerah	Manajem en Aset														
		1. Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/bara ng milik daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	e-Simpeg; SIASN-BKN; pengembang an Mobile App Cilacap Smart ASN (CISA); e-Kinerja dan PKSP 360; aplikasi e-Presensi; aplikasi e-Peta Jabatan; Sistem Informasi Mutasi; pem bangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta.												
		1.1. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/k otah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaa n pengelola an barang milik daerah pemerint ah kabupate n/kota			240	156	240	163	240	172	240	181	240	190	APB D	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		G2.1.1.P.7. Program kepegawaian daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN														
		1.Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN														
		1.1. Pengeloaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian			4 dok	340	4 dok	395	4 dok	395	4 dok	414	4 dok	434	APB D	BKPPD/BKPSDM dan Kominfo
		G2.1.1.P.8. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang	Penguatan laporan keuangan menggunakan teknologi digital												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		1.Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti	memuat kebijakan data terbuka												DAU	BPPKAD
		1.1. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi			7 lapora n	249	7 lapora n	261	7 lapora n	275	7 lapora n	288	7 lapora n	302		
		G2.1.1.P.9. Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pendataan penduduk secara digital												
		1.Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependud														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran				
			ukan																
		1.1.Komunik asi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pemangk u keptin gan dan masyarak at yang menerim a komunika si informasi dan edukasi kepada masyarak at terkait pencatat an sipil			2500 orang	42	2.500 orang	44	2.500 orang	46,3	2.500 orang	48,6	2.500 orang	53,6			APB D	Disdukca pil
G3. Perancang an Kebijakan	G3.1.1. Pengem bangan road map kebijaka n yang berkelanj utan dengan memanf aatkan teknolog i untuk pengelol aan sistem informas	G3.1.1.P.1. Program penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen monitorin g dan evaluasi dan pengenda lian kualitas pelayana n publik dan tata laksana	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediak an layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Sisukma; e- Sakip														
		1.Penataan organisasi				5 dok	115.8 80	5 dok	121.67 4	5 dok	127.7 58	5 dok	134.1 45	5 dok	140.8 52			APB D	Sekda bagian organisas i dan Seluruh OPD
		1.1.Kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalia n kualitas pelayanan publik dan tata laksana																	

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
	i	G3.1.1.P.2. Perekonomi an dan Pembangun an	Jumlah laporan pengenda lian, evaluasi dan pelapora n program pembang unan.	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediak an layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Simpok APBD (sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan APBD)												
	1.Pelaksanaa n administrasi pembangun an																
	1.1. Pengendalia n dan evaluasi program pengemban gan	15 dok				377.2 39	15 dok	396.1 01	15 dok	415.9 06	15 dok	436.7 01	15 dok	458.5 36	APB D	Sekda bagian pembang unan dan Seluruh OPD	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Selanjutnya, untuk menunjang pembangunan *Smart City* dalam waktu berkelanjutan atau jangka panjang disusun pula peta jalan jangka panjang *Smart Governance*. Peta jalan jangka panjang disusun agar pembangunan *Smart Governance* memiliki prospek jangka panjang. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 89. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
G1. Layanan Publik	G1.1.1. Pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain	G1.1.1.P.1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)												
		1. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi														
		1.1. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			60 Dokumen	230.328	60 dokumen	241.844	60 dokumen	253.936	60 dokumen	266.632	60 dokumen	279.963	APBD	Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap
		1.2. Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			41 laporan	824.409	41 laporan	865.419	41 laporan	908.689	41 laporan	954.123	41 laporan	1.001.829	APBD	Seluruh unit kerja penyelenggaraan layanan publik

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
G2. Birokrasi	G2.1.1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	G2.1.1.P.6. Program pengelolaa n barang milik daerah	Manajem en Aset	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	e-Simpeg; SIASN-BKN; pengembang an Mobile App Cilacap Smart ASN (CISA); e-Kinerja dan PKSP 360; aplikasi e-Presensi; aplikasi e-Peta Jabatan; Sistem Informasi Mutasi; pem bangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta.												
		1. Pengelolaa n barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/bara ng milik daerah														
		1.1. Pembinaan pengelolaa n barang milik daerah pemerinta h kabupaten/kotah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaa n pengelola an barang milik daerah pemerint ah kabupate n/kota			240	200	240	210	240	220	240	231	240	242	APB D	BPPKAD
		G2.1.1.P.7. Program kepegawai an daerah	Jumlah dokumen pengelolaa n data dan informasi kepegaw aian serta dokumen pengadaa n calon ASN														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		1.Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawai an ASN	Jumlah dokumen pengelola an data dan informasi kepegaw aian serta dokumen pengadaa n calon ASN														
		1.1. Pengeloaa n sistem informasi kepegawai an	Jumlah dokumen hasil pengelola an sistem informasi kepegaw aian			4 dok	455	4 dok	477	4 dok	500	4 dok	525	4 dok	551	APB D	BKPPD/B KPSDM dan Kominfo
		G2.1.1.P.8. Program pengelolaa n keuangan daerah	Persentas e penyusun an laporan keuangan pemerint ah daerah	5-1. Persentase kontrak layanan yang menyediak an layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Penguatan laporan keuangan menggunaka n teknologi digital												
		1.Koordina si dan pelaksanaa n akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		1.1. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi			7 laporan	317	7 lapora n	332	7 lapora n	348	7 lapora n	365	7 lapora n	383	DAU	BPPKAD
		G2.1.1.P.9.P rogram Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pendataan penduduk secara digital												
		1.Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		1.1.Komuni kasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentinga n dan masyaraka t terkait pendaftara n penduduk	Jumlah pemangk u kepenting an dan masyarak at yang menerima komunika si informasi dan edukasi kepada masyarak at terkait pencatata n sipil			2500 orang	56	2.500 orang	58	2.500 orang	60	2.500 orang	63	2.500 orang	66	APB D	Disdukca pil
G3. Perancang an Kebijakan	G3.1.1. Pengem bangan road map kebijaka n yang berkelanj utan dengan memanf aatkan teknolog i untuk pengelol aan sistem informasi	G3.1.1.P.1. Program penunjang urusan pemerinta han daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen monitorin g dan evaluasi dan pengenda lian kualitas pelayana n publik dan tata laksana	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediak an layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Sisukma; e- Sakip												
		1.Penataan organisasi															
		1.1.Kegiata n monitoring evaluasi dan pengendali an kualitas pelayanan publik dan tata laksana				5 dok	147.8 94	5 dok	155.2 88	5 dok	163.0 52	5 dok	171.20 4	5 dok	179.7 64	APB D	Sekda bagian organisas i dan Seluruh OPD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran	Target	Angg aran		
		G3.1.1.P.2. Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan.	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Simpok APBD (sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan APBD)												
	1. Pelaksanaan administrasi pembangunan																
	1.1. Pengendalian dan evaluasi program pengembangan	15 dok				481.462	15 dok	505.535	15 dok	530.811	15 dok	557.351	15 dok	585.218	APB D	Sekda bagian pembangunan dan Seluruh OPD	

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan *Smart City*.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Berdasarkan dua tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance memerlukan pengembangan dan implementasi rencana yang sistematis dan terperinci, yang diwujudkan dalam bentuk peta jalan pembangunan yang komprehensif. Dalam konteks dimensi smart governance, berbagai rencana aksi dan program telah dirancang untuk dijalankan, mencakup aspek-aspek seperti pengembangan program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, penunjang urusan dan operasional pemerintahan daerah kabupaten atau kota, pengelolaan dan optimalisasi aset barang milik daerah, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDES) yang terintegrasi, dan berbagai inisiatif lainnya. Setiap program dirancang untuk memperkuat struktur, sistem, dan mekanisme tata kelola, sehingga pemerintahan dapat berfungsi secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan peta jalan yang rinci dan terstruktur,

diharapkan semua elemen dan inisiatif smart governance dapat diimplementasikan dan dikelola dengan efektif, membawa Kabupaten Cilacap menuju era pemerintahan yang lebih cerdas.

1.2. Smart Branding

Peta jalan atau *roadmap* dibutuhkan dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Peta jalan berisi program, kegiatan, indikator, dan inovasi pembangunan *Smart City* dimensi *Smart Branding*. Untuk itu disusunlah peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk peta jalan jangka pendek dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 90. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
B1. Pariwisata	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri	B1.1.1.P.1. Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Seni Budaya serta Lembaga Adat dalam mengeksplor potensi lokal, untuk membangun identitas kultural melalui festival budaya												
		1. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
	pariwisata	1.1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaata n (objek)			7 objek	410	8 objek	431	8 objek	452	8 objek	474	8 objek	497	APB D	Dinas P & K, Disporap ar, Kelompo k Seni Lokal, Sanggar, Diskomin fo, Dishub, Dinkes, Satpol PP, DLH, Polres, BPBD
		B1.1.1.P.2. Pembinaan Sejarah Lokal	Presentase sejarah lokal yang dibina														
		1. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Pengemban gan Aplikasi Ensiklopedi a Objek Pemajuan Kebudayaa n Cilacap												
		1.1. Peningkata n akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat			3 dok	36	3 dok	38	3 dok	40	3 dok	42	3 dok	44	APB D	Dinas P & K, Dlspopar , Dinas Arpus, Diskomin fo

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		B1.1.1.P.3. Program Pengelolaa n Informasi dan Pengemban gan Komunikasi Publik	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Publikasi Smart City												
		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media yang mendiseminasikan informasi publik														
		1.1. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			12 dok	2.150	12 dok	2.200	12 dok	2.300	12 dok	2.415	12 dok	2.535	APB D	Diskomin fo
		B1.1.1.P.4. Program Pembangun an Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.Pelaksana an Peningkata n Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat Dasar yang dikembangk an Kompetensi nya														
		1.1.Pengem bangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembang kan Kompetensi nya			35 orang	50	35 orang	50	35 orang	50	35 orang	52,5	35 orang	58	APB D	DISPORA PAR, DPKUKM , Bappeda , Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunika si, Komunit as Seni
		2. Pengamban gan Kapasitas Pelaku Ekraf	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang Ekraf														
		2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi diBidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			25 orang	40	25 orang	42	25 orang	44	25 orang	46	25 orang	48	APB D	DISPORA PAR, DPKUKM , Bappeda , Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunika si,

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
																Komunitas Seni	
		B1.1.1.P.5. Program Pemasaran Pariwisata	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital												
		1.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan kegiatan pemasaran pariwisata Kabupaten/ Kota Balik Dalam dan Luar Negeri														
		1.1.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	2 dok	75	2 dok	78	2 dok	82	2 dok	86	2 dok	90	APB D

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran				
B2. Daya Saing Bisnis	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan	B2.1.1.P.1. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pemanfaatan teknologi digital dalam penjualan hasil tangkapan perikanan dan optimalisasi pendataan bagi UMKM dan kelompok pengolah dan pemasar ikan											APB D	Dinas Perikanan, Diskominfo, DPKUKM		
		1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah Rekomendasi Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil Perikanan yang sudah berizin																
		1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			1 dok	50	1 dok	50	1 dok	52,5	1 dok	55	1 dok	57,7				
	B2.1.1.P.2. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan monitoring pengujian mutu															

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
			Perikanan		kualitas produk olahan hasil perikanan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan												
		2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Poklahsar yang mengikuti pembinaan dan pelatihan bidang usaha perikanan														
		2.1. Pelaksanaa n Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatk an Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 unit		400	5 unit	400	5 unit	400	5 unit	420	5 unit	441	APB D	Dinas Perikana n	

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		3.Penyediaa n dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatk an Bantuan Sarana dan prasarana														
		3.1.Peningka tan Ketersediaa n Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkata n ketersediaa n ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota			56.848 ton	225	57.855 ton	250	58.862 ton	250	58.862 ton	262	58.862 ton	267		
		B2.1.1.P.3. Program Pengemban gan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaata n dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang dikembang kan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan	Tersedianya Kreatif Hub / Jaringan Kota Kreatif												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan berinteraksi bagi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Prasarana (Zona Kre atif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	budaya kota yang telah didigitalkan													
		1.1. Pengemban gan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif			1 unit	100	1 unit	100	1 unit	105	1 unit	110	1 unit	110		
B3. Wajah (Tampil an) Kota	B3.1.1. Melakuka n penataan wajah kota yang khas dan mengang kat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah	B3.1.1.P.1. Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkata n perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhk an renovasi/per baikan	Pembangun an Sarpras pariwisata berbasis Digital; Penguatan forum komunikasi desa wisata												
		1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1.Pengada an/ Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarpras Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara			2 unit	580	2 unit	614	2 unit	645	2 unit	655	2 unit	665	APB D	DISPORA PAR, Diskomin fo,

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Dalam jangka panjang (kurang lebih 10 tahun) dibutuhkan juga peta jalan yang berisikan program atau kegiatan yang ditujukan untuk memastikan transformasi dimensi *Smart Branding* dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dapat tercapai. Berikut ini adalah tabel yang memuat peta jalan jangka panjang dimensi *Smart Branding*:

Tabel 91. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran		
B1. Pariwisata	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi	B1.1.1.P.4. Program Pembangunan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
						2029		2030		2031		2032		2033					
						Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran				
	prioritas, peningkatan an promosi, penguatan kelembaga an, dan kolaborasi industri pariwisata	Kreatif																	
		1.Pelaksanaa n Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat Dasar yang dikembang kan Kompetens inya																
		1.1.Pengemb angan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembang kan Kompetens inya			35 orang	62	35 orang	65	35 orang	68	35 orang	71	35 orang	74			APB D	DISPORA PAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunik asi, Komunita s Seni
		2. Pengamban gan Kapasitas Pelaku Ekraf	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang Ekraf																

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran		
		2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi diBidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi i di Bidang Ekonomi Kreatif			25 orang	50	25 orang	52	25 orang	54	25 orang	56	25 orang	58	APB D	DISPORA PAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Komunitas Seni
		B1.1.1.P.5. Program Pemasaran Pariwisata	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfataa n teknologi digital												
		1.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten/ Kota Balik Dalam dan Luar Negeri														
		1.1.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,					2 dok	94	2 dok	98	2 dok	102	2 dok	107	2 dok	112

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran		
		Luar Negeri	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
B2. Daya Saing Bisnis	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan	B2.1.1.P.3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang dikembangkan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Tersedianya Kreatif Hub / Jaringan Kota Kreatif												
		1.1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran	Targe t	Angga ran		
		1.1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif			1 unit	115	1 unit	120	1 unit	126	1 unit	132	1 unit	138	APB D	DISPORA PAR, DPKUKM,
B3. Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangk at nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah	B3.1.1.P.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	Pembangun an Sarpras pariwisata berbasis Digital; Penguatan forum komunikasi desa wisata												
		1. Pengelolaan Destinasi Pari wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola														
		1.1.Pengadaa n/ Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Sarpras Pengelolaa n Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara			2 unit	725	2 unit	761	2 unit	799	2 unit	838	2 unit	879	APB D	DISPORA PAR, Diskominfo,

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Berdasarkan peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang diatas, transformasi menuju realisasi smart branding di Kabupaten Cilacap memerlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi dan terstruktur, yang diawali dengan pembuatan peta jalan pembangunan yang detail dan komprehensif. Dalam dimensi smart branding, serangkaian rencana aksi dan program strategis akan dilakukan, termasuk Pengembangan Kebudayaan untuk merevitalisasi dan mempromosikan warisan budaya lokal, pembinaan sejarah kokal untuk mengedukasi dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap narasi sejarah daerahnya, program pembangunan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk mengoptimalkan potensi dan daya tarik pariwisata lokal, serta program pemasaran pariwisata yang dirancang untuk memperkuat posisi Cilacap di peta pariwisata nasional dan internasional. Selain itu, Program pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik akan membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat, sementara program pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan melindungi dan merangsang inovasi dalam industri kreatif. Setiap elemen ini, yang dijalankan berdasarkan peta jalan yang rinci, akan secara kolektif menguatkan identitas dan citra Cilacap, menonjolkan uniknya karakter dan kekayaan lokal daerah ini.

1.3. *Smart Economy*

Sebagai upaya pembangunan smart city di Kabupaten Cilacap, dibutuhkan peta jalan sebagai salah satu komponen yang menjelaskan seluruh dimensi dari smart city secara keseluruhan termasuk juga untuk dimensi *Smart Economy*. Pada bagian ini akan dijelaskan peta jalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk dimensi *Smart Economy*. Tabel di bawah ini menjelaskan peta jalan jangka pendek dan menengah untuk pembangunan pada dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap secara merinci.

Tabel 92. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
Ec1. Ekosistem Industri	Ec1.1.1. Optimalisasi ekosistem industri yang ada untuk diversifikasi pendapatan masyarakat	Ec1.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Penyediaan Sistem Informasi guna mendukung peningkatan layanan BUMD dan BLUD											APB D	Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cilacap, BUMD dan BLUD Kab. Cilacap		
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian																
		1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			25 Dokumen	293.781	25 Dokumen	308.470	25 Dokumen	323.893	25 Dokumen	340.087	25 Dokumen	357.091				
		Ec1.1.1.P.2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase sentra industri terbina	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Cilacap One Village One Product (CILOVOP)														
1.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah IKM /Pelaku Industri Terbina																		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			12 dok	1.755	12 dok	1.842	12 dok	1.934	12 dok	1.715	12 dok	1.800	APB D	Disnakerin, Bappeda, Bagian Perekonomian
		Ec1.1.1.P.3. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun perekonomian														
		1.koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinir dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sinergitas antar OPD dalam Pengembangan Ekonomi Lokal; Pengembangan Aplikasi SINERGI												
		1.1.Koordinasi pelaksanaan sinergltas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada			7 laporan	317	7 laporan	317	7 laporan	332	7 laporan	348	7 laporan	365	APB D	Bappeda, Kluster UMKM, DPKUKM, Disnakerin, Setda

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		bidang perekonomian	Bidang Perekonomian														
		2.koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinir dalam perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Aplikasi Geoportal												
		2.1.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3	37	3	37	3	38	3	40	3	42	APB D	Bappeda, OPD di lingkungan Pemkab Cilacap
		Ec1.1.1.P.4. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang Diikuti	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan	Pengembangan SIMPATIC (Sistem Informasi Manajemen Peluang & Potensi Investasi Cilacap) dan SIAPIC (Sistem												
		1.Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi PM yang diselenggarakan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	n sumber sendiri	Informasi Aplikasi Potensi Investasi Kabupaten Cilacap)	5 kegiatan	275	5 kegiatan	289	5 kegiatan	303	5 kegiatan	318	5 kegiatan	333	APB D	DPMPPTSP
		Ec1.1.1.P.5. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan & Non Perizinan yang Diterbitkan														
		1.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu Pintu												
		1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik			2.400 orang	214	2.400 orang	225	2.400 orang	235	2.400 orang	246	2.400 orang	258	APB D	DPMPPTSP, Diskominfo

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik															
		Ec1.1.1.P.6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan LKPM	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Penguatan pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal												
		1.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)														
		1.1. Koordinasi & Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			500 pelaku usaha	330	500 pelaku usaha	335	500 pelaku usaha	340	500 pelaku usaha	357	500 pelaku usaha	374	APB D	DPMPTSP, Diskominfo
Ec2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1.1. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan	Ec2.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data	Pengembangan Aplikasi dan Media Sosial PIPD Cilacap (Pusat Informasi Perekonomian Daerah												
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase penyerapan APBD														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	n pekerjaan bekerja sama dengan pemerintah	1.1.Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	terbuka	Kabupaten Cilacap) yang mencakup penyediaan informasi perekonomian dan keuangan di daerah	25 dok	878	30 dok	921	30 dok	967	30 dok	1.015	30 dok	1.065	APB D	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap, DP KUKM, DISPERTAN dan DISPABUN Kabupaten Cilacap
		Ec2.1.1.P.2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah															
		1.Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan												
		1.1.Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia				7 laporan	655	7 laporan	555	7 laporan	582	7 laporan	611	7 laporan	641	APB D	Bappeda

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		Ec2.1.1.P.3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Sistem informasi pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan												
		1.Penyusunan peta keretakan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen penanganan rawan pangan														
		1.1.Penyusunan pemutahiran dan analisi peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan			1	12,5	1	40	1	42	1	44	1	46	APB D	DISPABUN, Dispertan
		Ec2.1.1.P.4. Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase riset daerah yang ditindaklanjuti	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	Pengembangan PETI DESI Mandiri (Pendampingan dan Pelatihan Desa Inovasi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Cilacap)												
1.Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah laporan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan																

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1.Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa			10 laporan	240	10 laporan	250	10 laporan	260	10 laporan	273	10 laporan	286	APBD	Bappeda
		Ec2.1.1.P.5. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan & Non Perizinan yang Diterbitkan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem	Optimalisasi penyediaan layanan konsultasi dan pengolaan perizinan secara online												
		1.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	penyelidikan non-darurat kota (hari)													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1.Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan & Non Perizinan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan & Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi & Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			5.220 orang	51	5.220 orang	53	5.220 orang	56	5.220 orang	58	5.220 orang	60	APBD	DPMPSTP
		Ec2.1.1.P.6. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	20.1. Persentase tahunan anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Optimalisasi penyediaan infrastruktur dan seluruh penduduk kemandirian												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan wilayah daerah kabupaten kota	Jumlah pengelolaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan		n pangan												
		1.1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			2 Unit	350	2 Unit	350	2 Unit	400	2 Unit	420	2 Unit	441		
		Ec2.1.1.P.7. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi harga pangan dan neraca bahan makanan												
		1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun														
		1.1.Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi			5	1.559	5	1.645	5	1.785	5	1.874	5	1.967		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		berbasis sumberdaya lokal	pangan berbasis sumber daya lokal														
		Ec2.1.1.P.8. Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi mutu dan keamanan pangan												
		1.Pelaksanaan pengawanan keamanan pangan segar kabupaten kota	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang beregistrasi														
		1.1.Penguatan kelembangaan keamanan pangan segar kabupaten kota	kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina			1	275	1	285	1	294	1	308	1	323	APB D	DISPABUN, Dispartan
		Ec2.1.1.P.9. Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	10.2. Persentase layanan kota yang	Aplikasi Promosi dan Penjualan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
		1.Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dikembangkan usahanya	dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Produk Usaha Mikro (CIBLON/ Cilacap Belanja Online)														
		1.1.Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			457 unit	1.250	462 unit	1.342	467 unit	1.535	467 unit	1.611	467 unit	1.691			APB D	DISPABUN, Dispertan
		Ec2.1.1.P.10. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Optimalisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok/ pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah														
		1.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok / pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kota	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina																

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
		dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan																	
		1.1. Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			15%	5.117	15%	5.353	15%	5.395	15%	5.664	15%	5.947			APB D	DISPABUN, Dispartan
Ec3. Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai	Ec3.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan,	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Optimalisasi penggunaan QRIS dan sarana transaksi elektronik lainnya bagi UMKM yang mengikuti kegiatan Promosi Cilacap Expo											APB D	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap, DPKUKM, DISPERTAN dan DISPABUN Kabupaten Cilacap		
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase penyerapan APBD																
		1.1. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			25 dok	878	30 dok	921	35 dok	967	35 dok	1.015	35 dok	1.065				

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		Ec3.1.1.P.2. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengembangan Aplikasi SIPBLUD												
		1.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti														
		1.1.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi			7 laporan	249	7 laporan	261	7 laporan	275	7 laporan	288	7 laporan	302	APB D	BPPKAD
		1.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah			1 dok	112	1 dok	118	1 dok	124	1 dok	130	1 dok	136	APB D	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.3.Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/kota			215 orang	369	215 orang	388	215 orang	407	215 orang	427	215 orang	448	APB D	BPPKAD
		Ec3.1.1.P.3. Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengembangan aplikasi e-retribusi dan pajak daerah												
		1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah														
		1.1.Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumentasi hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			32 dok	578	32 dok	607	32 dok	637	32 dok	668	32 dok	701	APB D	BPPKAD/B APENDA

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Mengingat bahwa pembangunan *Smart City* adalah proyek jangka panjang, maka perlu disusun juga peta jalan jangka panjang untuk dimensi *Smart Economy*. Peta jalan jangka panjang ini ditujukan agar pembangunan *Smart City* dimensi *Smart Economy* dapat berjalan secara konsisten dan

bertahan dalam jangka panjang. Pada tabel dibawah ini dipaparkan peta jalan jangka panjang *Smart Economy* dengan rentang waktu program atau kegiatan selama 10 tahun:

Tabel 93. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Economy* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector		
						2029		2030		2031		2032		2033					
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran				
Ec2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1.1. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasama dengan pentahelix	Ec2.1.1.P.10. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Optimalisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok/ pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah											APB D	DISPABUN, Dispartan		
		1.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok / pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina																
		1.1. Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			15%	6.244	15%	6.556	15%	6.883	15%	7.227	15%	7.588				
Ec3. Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan	Ec3.1.1.P.2. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan	Pengembangan Aplikasi SIPBLUD														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
	keuanga n yang terinteg rasi dan infrastru ktur untuk memfasi litasi transaks i keuanga n secara non tunai	1.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti	n layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka													
		1.1.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi			7 lapor an	317	7 lapor an	332	7 lapor an	348	7 lapor an	365	7 lapor an	383	APB D	BPPKAD
		1.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah			1 dok	142	1 dok	149	1 dok	156	1 dok	163	1 dok	171	APB D	BPPKAD
		1.3.Pembinaaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/kota			215 orang	470	215 orang	493	215 orang	517	215 orang	542	215 orang	569	APB D	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
		Ec3.1.1.P.3. Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengemban gan aplikasi e-retribusi dan pajak daerah												
		1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah														
		1.1.Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumentasi hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			32 dok	736	32 dok	772	32 dok	810	32 dok	850	32 dok	892	APB D	BPPKAD/BA PENDA

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Gagasan pembangunan berdimensi smart economy di Kabupaten Cilacap menuntut adanya suatu peta jalan pembangunan yang mendetail dan terstruktur. Pada dimensi smart economy, ada beberapa rencana aksi dan program yang direncanakan untuk dieksekusi, meliputi program perekonomian dan pembangunan, yang fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi utama dan menciptakan lapangan kerja; program perencanaan dan pembangunan industri, yang berperan dalam merumuskan dan menerapkan strategi industri yang berkelanjutan dan berdaya saing; serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua inisiatif pembangunan berjalan selaras dan sinergis. Selain itu, penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota akan memainkan peran kunci dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara program perekonomian dan pembangunan akan mengkatalisasi pembangunan melalui pendekatan-pendekatan inovatif dan berbasis data. Peta jalan yang rinci dan mendalam diharapkan menjadi

panduan konkret dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif ini secara efektif, memastikan bahwa setiap langkah, dari perencanaan hingga implementasi, konsisten dengan visi keseluruhan untuk menciptakan ekonomi yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap, menghadirkan inovasi dan efisiensi pada setiap level ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

1.4. Smart Living

Untuk mewujudkan pembangunan smart city di Kabupaten Cilacap, diperlukan penyusunan peta jalan untuk dimensi *Smart Living* sebagai salah satu komponen dari smart city secara keseluruhan. Tabel di bawah ini menjelaskan peta jalan jangka pendek dan menengah pembangunan pada dimensi Smart Living di Kabupaten Cilacap secara merinci.

Tabel 94. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
Lv1. Harmoni sasi Tata Ruang	Lv1.1.1.. Peninjauan kembali zonasi tata ruang wilayah dengan mempertimb angkan potensi wilayah (dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi)	Lv1.1.1.P.1. Program Penyelengg aaraan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perk ada selain RTRW Kabupaten/ Kota	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Perencanaan dan Pengembang an Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan, Pengendalian Kepadatan Permukiman dengan Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan,Pe												
		1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perk ada selain RTRW Kabupaten/ Kota														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		1.1. Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaana n penataan ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota		nataan serta pengembangan Kawasan Perkotaan, Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2 Perka da RDTR	50	2 Perka da RDTR	55	2 Perka da RDTR	57,7	2 Perka da RDTR	60	2 Perka da RDTR	63	APB D	DPUPR
		1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaata n Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin rekomenda si teknis pemanfaatan ruang	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembang an konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	1	100	1	100	1	105	1	110	1	115	APB D	DPUPR, DISKOMI NFO
		Lv1.1.1.P.2. Program Penyelengg araan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujua n Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pelibatan peran Masyarakat dalam Konsultasi Publik penyusunan RTR di lingkungan Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata	Jumlah Dokumen Persetujua n Substansi, Evaluasi dan Penetapan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		Ruang Kab/Kota	RRTR Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pelaksanaa n Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujua n Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota			2 dok	220	2 dok	242	2 dok	266,2	2 dok	286,2	2 dok	306,2	APB D	DPUPR
		1.2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhk an renovasi/perbaikan 10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyebarluas an informasi mengenai tata ruang melalui sosialisasi Bidang Penataan Ruang kepada masyarakat	2 dok	55	2 dok	60	2 dok	65	2 dok	70	2 dok	75	APB D	DPUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
Lv2. Kesehat an	Lv2.1.1. Peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional	Lv2.1.1.P.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Lakon Kaprok Kampung KB (Lapak Konseling Kesehatan Reproduksi Kampung Keluarga Berencana) menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat menggemaka n kembali program KB umumnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan khususnya di desa desa di seluruh Kabupaten Cilacap.												
		1. Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah layanan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk		1	40	1	40	1	42	1	44	1	46	APB D	DINAS KB PA (Tahun 2024 Sudah tidak ada); DINSOS
		1.1. Pengendalia n Program Kependudu kan Keluarga Berencana dan Pembangun an Keluarga (KKBPK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendali an Program KKBPK														
		Lv2.1.1.P.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatk an fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat	SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
			Kewenang an Daerah Kabupaten/ Kota	diakses oleh penyedia layanan kesehatan													
		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatk an fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
		1.1. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatka n Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar														
		Lv2.1.1.P.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasia n (Apotek dan Toko Obat) yang	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan	SIMPO (Sistem Manajemen Pengelolaan Obat)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		Makanan Minuman	Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan													
		1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT														
		1.1. Penyediaan dan Pengelolaa n Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasa n Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalika n dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan			256	11	267	11	256	268	256	281	256	295		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
			Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
		Lv2.1.1.P.4. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan)												
		1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pencegahan bagi anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota			53	159	53	161	53	164	53	172	53	180	APB D	DINAS KB PA (Tahun 2024 Sudah tidak ada); DINSOS
Lv3. Transpo rtasi	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat	Lv3.1.1.P.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor												
		1. Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan uji														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		1.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			2	200	2	350	2	367	2	385	2	404	APB D	DISHUB, BPPKAD, BAPPED A, DPUPR, POLREST A CILACAP
		Lv3.1.1.P.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room, e-Parking, e-Ticketing Angkutan Umum dan Smart LPJU di Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat													
		1.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			2	250	1	50	1	50	1	52	1	54	APB D	DISHUB, BPPKAD, BAPPED A, DPUPR, POLREST A CILACAP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		2. Penyediaan Perengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Perengkap an Jalan	diakses publik 19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas													
		2.1. Penyediaan Perengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perengkap an jalan di jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia			48,82 %	775	56,15 %	950	76,20 %	1.525	76,20 %	1.601	76,20 %	1.681	APB D	DISHUB, BPPKAD, BAPPED A, DPUPR, POLREST A CILACAP

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Selain peta jalan jangka pendek dan jangka menengah, *Smart City* agar dapat terimplementasi secara menyeluruh membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk itu, dibutuhkan peta jalan jangka panjang untuk dimensi *Smart Living*. Berikut ini adalah tabel peta jalan jangka panjang untuk dimensi *Smart Living*:

Tabel 95. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
Lv3. Aksesibili tas/ Transpor tasi	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimba ngkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat	Lv3.1.1.P.2. Program Penyelengg araan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkap an Jalan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room, e- Parking, e- Ticketing Angkutan Umum dan Smart LPJU di Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik		2	56	1	58	1	60	1	63	1	66	APBD	DISHU B, BPPKA D, BAPPE DA, DPUPR, POLRE STA CILACA P
		1.1. Pengendalia n Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalia n Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota														
		2. Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Perlengkapa n Jalan	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia			76,20%	1.765	76,20%	1.853	76,20%	1.945	76,20%	2.042	76,20%	2.144	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel diatas memaparkan secara detail rencana aksi untuk dimensi Smart Living. Program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menunjang dimensi Smart Living pada tabel diatas telah dipaparkan dengan memperhatikan indikator beserta anggaran daerah yang tersedia. Diharapkan melalui peta jalan tersebut upaya konkrit dalam mengembangkan dimensi Smart Living pada pembangunan Smart City di Kabupaten Cilacap dapat terwujud. Pada akhirnya sebuah kota pintar akan sia-sia jika kehidupan yang dirasakan penghuni kota tersebut tidak memberikan kenyamanan. Dimensi Smart Living beserta rencana aksi didalamnya adalah upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

1.5. Smart Society

Untuk mewujudkan pembangunan smart city di Kabupaten Cilacap, diperlukan penyusunan peta jalan untuk dimensi Smart Society sebagai salah satu komponen dari smart city secara keseluruhan. Tabel di bawah ini menjelaskan peta jalan jangka pendek dan menengah pembangunan pada dimensi Smart Society di Kabupaten Cilacap secara merinci:

Tabel 96. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Society Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1.1. Penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal (dan solidaritas sosial keagamaan) dengan optimalisasi teknologi digital	S1.1.1.P.1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) yang dibina (Jumlah LKD yang dibina dibagi jumlah LKD se-Kabupaten Cilacap x 100%	10.2. Persenta se layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	- SIDA PEDES (Sistem Informas i Data Aparatur Pemerin tahan Desa); - LAPAK BUMDES (Sistem Informas i Marketp lace Produk BUMDES Se Jawa Tengah); - BASO (Bantua n Khusus On line); - Smart Village (Aplikasi Layanan Desa Digital Meliputi												
		1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an Desa yang dibina														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mber Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.		Layanan Administ rasi Kependu dukan, Layanan Jogo Tonggo, Layanan Kamtib mas atau Panic Button)	568 lemba ga	586	568 lemba ga	615	568 lemba ga	645	568 lemba ga	677	568 lemba ga	710	DA U	DISPER MADES; Desa/K eluraha n, Kecama tan
		1.2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			5	160	5	168	5	176	5	184	5	193	DA U	DISPER MADES; Desa/K eluraha n, Kecama tan
		1.3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2	140	2	147	2	154	2	161	2	169	DA U	DISPER MADES; Desa/K eluraha n, Kecama tan

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1	80	1	84	1	88	1	92	1	96	DA U	DISPER MADES; Desa/K eluraha n, Kecama tan
		1.5. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			4	955	4	1.00 3	4	1.05 3	4	1.105	4	1.160	DA U	DISPER MADES; Desa/K eluraha n, Kecama tan
		S1.1.1.P.2. Program pemberdayaan Sosial	Persentase TKSK, PSM, orsos, dan LKS yang dibina	10.2. Persenta se layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	MARI PERCAY A (Manaje men Informas i Pusat Kesejaht eraan Sosial Cilacap Bercaha ya)												
		1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS dan non PSKS yang terbina														
		1.1. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ko ta	13.4. Persenta se anggaran kota		35	174	32	188	32	197	32	206	32	216	DA U	Dinsos; Desa/K eluraha n, Kecama tan

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
				yang dialokasi kan untuk penyedia an program yang ditujukan untuk menjemb atani kesenjan gan digital													
S2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2.1.1. Meningkatkan literasi masyarakat dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta perbaikan sistem tata kelola pendidikan	S2.1.1.P.1. Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	13.4. Persenta se anggaran kota yang dialokasi kan untuk penyedia an	Kelas bertutur BEBER PERCIL (Belajar Bertutur Perpusta kaan Kabupat en Cilacap); - English Class; - Stand up literasi; dan - PELITA												
		1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	kan untuk penyedia an													
		1.1. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembu dayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	program yang ditujukan untuk menjemb atani kesenjan		60	100	60	100	60	105	60	110	60	115	DA U	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	gan digital 17.3. Jumlah buku perpusta kaan umum dan judul e-book per 100.000 pendudu k	(Pelayan an Literasi Tunanet ra)	1	25	1	25	1	26	1	27	1	28	DA U	Dinas Arpus
		1.3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Menda patkan Pengh argaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	17.4. Persenta se populasi kota yang merupak an penggun a perpusta kaan umum yang aktif		4	20	4	20	4	21	4	22	4	23	DA U	Dinas Arpus
		1.4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Ko ta yang Dikembangka n			3	60	3	60	3	63	3	66	3	69	DA U	Dinas Arpus
		1.5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Da erah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta yang Dipil ih dan Diduk ung	13.2. Persenta se anggaran kota yang dialokasi		2	20	2	20	2	21	2	22	2	23	DA U	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
			Kegiatannya	kan untuk penyedia an alat bantu mobilitas , perangkat, dan teknologi pendam pingan bagi warga negara dengan kebutuh an khusus													
		S2.1.1.P.2. PROGRAM PELE STARIAN KOLEK SI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem	Forum Konsulta si Akredita si Sekolah Dasar												
		1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah judul naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	penyelidikan non-darurat kota (hari)													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			2	20	2	20	2	21	2	22	2	23	DA U	Dinas Arpus
		1.2. Pengembangan, pengolahan, dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Aplikasi LAKON PDK (Layanan Kontrak Online) di Lingkungan Dinas	12	20	12	20	12	21	12	22	12	23	DA U	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		S2.1.1.P.3. Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungj awaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	17.3- Jumlah buku perpusta kaan umum dan judul e-book per 100.000 pendudu k	AISYA (Arsip Masyara kat)												
		1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna yang bisa mengakses arsip statis	17.4- Persenta se populasi kota yang merupak an penggun a													
		1.1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Ko ta	perpusta kaan umum yang aktif		4	171	5	201	5	211	5	221	5	232	DA U	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		S2.1.1.P.4. Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	17.3. Jumlah buku perpusta kaan umum dan judul e-book per 100.000 pendudu k	PENCIL (Perpust akaan Elektroni k Cilacap)												
		1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan sesuai SNP														
		1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembang an untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			1.400	165	1.500	175	1.500	175	1.500	183	1.500	192	DA U	Dinas Arpus
		1.2. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Per pustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta			3	75	3	96	3	99	3	103	3	108	DA U	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1. Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi	S3.1.1.P.1.Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Pembentukan relawan kebakaran												
		1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Laporan aktifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran														
		1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Setiap Tahunnya.			125 Orang	25	125 Orang	25	125 Orang	26	125 Orang	27	125 Orang	28	AP BD	Satpol PP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya, Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya.	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanya an yang dilakuka n melalui sistem penyelidi kan non- darurat kota (hari)	Sosialisa si dan edukasi masyara kat dalam pencega han dan penangg ulangan kebakar an (Damkar)	70 Orang	14	70 Orang	14	70 Orang	14	70 Orang	15	70 Orang	16	AP BD	Satpol PP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Rela wan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Keluraha n yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar, Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Keluraha n yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar.	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanya an yang dilakuka n melalui sistem penyelidi kan non- darurat kota (hari) 15.1. Persenta se area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Comman d Center	2 Orang , 4 POS, 365 Hari	146	2 Orang , 4 POS, 365 Hari	153	2 Orang , 4 POS, 365 Hari	160	2 Orang , 4 POS, 365 Hari	168	2 Orang , 4 POS, 365 Hari	176	AP BD	Satpol PP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		S3.1.1.P.2.Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem	Satkataru (Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu) SIAP												
		1. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	penyelidikan non-darurat kota (hari)													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n	Targe t	Ang gara n		
		1.1. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Keluraha n yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirka n Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya			3 Pos	49, 9	3 Pos	49, 9	3 Pos	52	3 Pos	55	3 Pos	57	AP BD	Satpol PP

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Pembangunan *Smart City* tidak dapat berjalan dalam sekejap mata. Selain dirumuskan peta jalan jangka pendek dan menengah, dibutuhkan pula peta jalan jangka panjang dalam rangka memastikan pembangunan *Smart City* khususnya dimensi *Smart Society* dapat berkelanjutan. Berikut ini adalah tabel peta jalan jangka panjang dimensi *Smart Society*:

Tabel 97. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Society* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
S3 Kemana n Masyara kat	S3.1.1. Mewujud kan sistem keamana n dan keselama tan untuk melindun gi masyarak at dari kecelaka an, kriminalit as, bencana, konflik sosial dan kegagala n teknologi	S3.1.1.P.2.Pence gahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaana n Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamana n, dan Pengawasan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Satkataru (Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu) SIAP												
		1. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelengga raan Ketenteram an, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		1.1. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjuta n dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya			3 Pos	60	3 Pos	63	3 Pos	66	3 Pos	69	3 Pos	72	APB D	Satpol PP

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Peta jalan pada tabel di atas untuk dimensi Smart Society adalah langkah komprehensif serta rinci yang dapat dijadikan dasar pembangunan Smart Society Kabupaten Cilacap. Seluruh program dan kegiatan dalam rencana aksi diatas meliputi pemaparan detail terkait aspek pendidikan dan

interaksi masyarakat. dengan rencana aksi yang disusun secara detail diharapkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap dapat tepat sasaran dalam mewujudkan dimensi Smart Society. Kota yang pintar tidak akan terwujud tanpa adanya masyarakat yang pintar.

1.6. Smart Environment

Untuk mewujudkan pembangunan *smart city* di Kabupaten Cilacap, diperlukan penyusunan peta jalan untuk dimensi *Smart Environment* sebagai salah satu komponen dari *smart city* secara keseluruhan. Tabel di bawah ini menjelaskan peta jalan jangka pendek dan menengah pembangunan pada dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap secara merinci:

Tabel 98. Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1. Optimalisasi pengguna an teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)	En1.1.1.P.1. Pengelolaan sumber daya air	Persentas e jaringan irigasi yang berfungsi baik	23.2. Jumlah stasiun pemantaua n kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. RISDA (Ruang Informasi Sumber Daya Air) sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air 2. ngOPi Disit di warung jamu (Pengelolaa												
		1. Pengembanga n dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten/ kota	Tersusun dan terlaksana nya paket pekerjaan pengemba ngan dan pengelola an sistem irigasi pada tahun	23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
		1.1. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi irigasi dan rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkunga n hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun		n Laporan Operasi dan Pemelihara an Irigasi Dengan Sistem Digital) untuk memuat data masa tanam, petak tersier, luas tanam, kebutuhan air, ketersediaa n air dan realisasi pembagian serta pemberian airnya	2	315	5	1.000	5	1.050	5	1.102	5	1.157	DAU	Dinas PSDA
		En1.1.1.P.2. Penanggulang an Bencana	Jumlah warga negara yang memperol eh layanan informasi bencana Jumlah warga negara yang memperol eh layanan pencegah an dan kesiapsiag	20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulka n yang dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengompos an per kapita (dalam ton)	SIAP MASK BRO (MengataSi Abrasi Pantai Menggunak an Anyaman Sabut Kelapa / Bronjong)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
			aan terhadap bencana														
		Jumlah warga negara yang memperol eh layanan penyelam atan dan evakuasi bencana															
		1. Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Persentas e cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruk si														
1.1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penangan an Pasca Bencana Kabupate n/Kota Melalui Pengkajian Kebutuha n Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	2	2.688	2	2.822	2	2.963	2	3.111	2	3.266	APB D	BPBD; TNI; Pemde s sepanj ang pantai Cilacap				

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
			Rehabilita si dan Rekonstru ksi Pasca Bencana (R3P)														
		En1.1.1.P.3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukur an indeks kualitas air	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali 22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	"Laboratori um Lingkungan " 1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Laboratoriu m lingkungan Cilacap 2. Penambaha n Uji parameter tanah dan uji limbah bahan berbahaya dan beracun"												
	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusun nya dokumen pencegah an pencemar an dan kerusakan Lingkunga n Hidup															
	1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengambil an contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkunga n dan	1.900 dok			1.050	2.000 dok	1.070	2.100 dok	1.093	2.100 dok	1.147	2.100 dok	1.204	APB D	Dinas Lingku ngan Hidup; Lemba ga Akredit asi KAN	

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
			dokumen mutu yang dilaksanak an														
		En1.1.1.P.4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukur an indeks kualitas air	23.2. Jumlah stasiun pemantaua n kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	"Mengemb angkan ONLIMO (Online Monitoring) Pemantaua n Air Sungai 1. Menambah lokasi titik stasiun onlimo 2.Pengemb angan aplikasi monitoring connect dengan mobile phone 3.Memasuk an ke monitoring sistem integrasi dengan air quality monitoring "												
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusun ya dokumen pencegah an pencemar an dan kerusakan Lingkunga n Hidup														
		1.1. Koordinasi,Sin kronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkunga n hidup dilaksanak an terhadap media tanah, air , udara, dan laut	23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	1	1.432	1	1.443	1	1.453	1	1.525	1	1.601	APB D	Dinas Lingku ngan Hidup; BBWS Serayu Opak; Dinas PSDA Kab.Cil acap	
En2 Pengelolaan	En2.1.1. Mengemba	En2.1.1.P.1. Pengelolaan	Persentas e	16.2. Persentase	"TPST RDF (Tempat												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
Sampah dan Limbah	ngkan sistem tata kelola persampah an dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat	Persampahan	penguran gan sampah	populasi kota yang memiliki	Pengolahan Sampah Terpadu Refused Derived Fuel) 1.Replikasi di lokasi lain 2.Pengemb angan sistem otomasi pengolahan RDF kedepanny a 3.Skala Mikro (Rumah Tangga) yang mampu mengolah sampah menjadi barang setengah jadi (ukuran dan kadar air menurun) sebelum masuk ke pengolahan RDF”												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulk an, diangkut dan diolah	pengumpul an sampah dari pintu ke pintu dengan pemantaua n individu terhadap													
		1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Ko ta	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulk an, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/ SPA Kab/Kota	jumlah sampah rumah tangga 16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota 20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulka n yang dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengompos an per kapita (dalam		580 ton	7.263	590 ton	7.500	590 ton	7.875	590 ton	8.268	590 ton	8.681	APB D	DLH Cilacap ; PT.Solu si bangu n Indone sia

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
				ton)"													
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1. Mengemban gkan sistem tata kelola persampah an dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swastamen yiapkan infrastrukt ur untuk memanfaat kan energi baru terbarukan	En3.1.1.P.1. Pengelolaan Persampahan	Persentas e penguran gan sampah	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilk an energi	Output Pengolahan Sampah di TPST RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulk an, diangkut dan diolah														
		1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Ko	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulk an, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/ SPA Kab/Kota			580 ton	7.263	590 ton	7.500	600 ton	7.863	600 ton	8.256	600 ton	8.668	APB D	DLH Cilacap ; PT.Solu si bangu n Indone sia

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dan a	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran	Targe t	Angg aran		
		ta															

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Peta jalan jangka panjang (kisaran 10 tahun) dibutuhkan dalam rangka pembangunan *Smart City* yang dapat berkelanjutan mengingat transformasi menjadi sebuah *Smart City* tidak dapat berlangsung secara singkat. Berikut ini adalah tabel peta jalan jangka panjang dimensi *Smart Environment*:

Tabel 99. Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Environment* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)	En1.1.1.P.4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukura n indeks kualitas air	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	"Mengemb angkan ONLIMO (Online Monitoring) Pemantaua n Air Sungai 1. Menambah lokasi titik stasiun onlomo 2.Pengemba ngan aplikasi monitoring connect												
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusunn ya dokumen pencegaha n pencemara n dan kerusakan Lingkunga n Hidup	23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air													

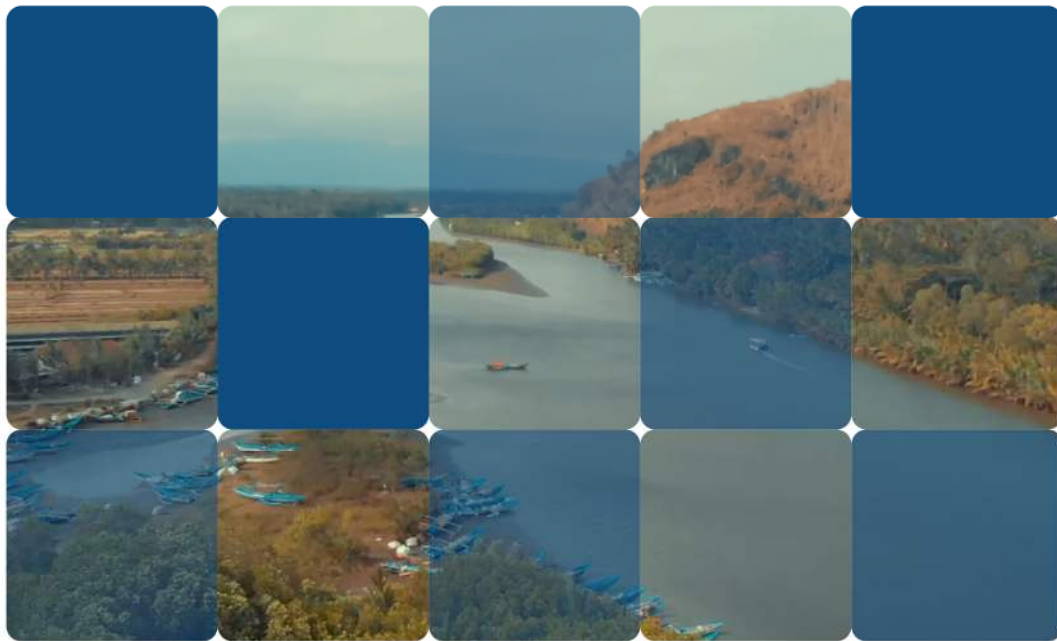
Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		1.1. Koordinasi,Sin kronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanak an terhadap media tanah, air , udara, dan laut	cerdas sistem	dengan mobile phone 3.Memasuk an ke monitoring sistem integrasi dengan air quality monitoring"	1	1.685	1	1.769	1	1.853	1	1.945	1	2.042	APB D	Dinas Lingku ngan Hidup; BBWS Serayu Opak; Dinas PSDA Kab.Cil acap
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1. Mengemban gkan sistem tata kelola persampaha n dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swastameny iapkan infrastruktur untuk memanfaatk an energi baru terbarukan	En3.1.1.P.1. Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurang an sampah	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilka n energi	Output Pengolahan Sampah di TPST RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpul an, diangkut dan diolah														
		1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpul an, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/ SPA Kab/Kota			580 ton	9.101	590 ton	9.556	600 ton	10.033	600 ton	10.534	600 ton	11.060	APB D	DLH Cilacap; PT.Solu si bangun Indone sia

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran		
		a															

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Untuk mewujudkan visi pembangunan dimensi Smart Environment, perlu adanya penyusunan rincian peta jalan pembangunan. Peta jalan pada tabel di atas memaparkan beberapa rencana aksi dan program yang akan dijalankan seperti pengelolaan persampahan, penanggulangan bencana, dan pengawasan perizinan lingkungan. Melalui peta jalan yang detail diharapkan akan menjadi panduan dalam pengimplementasian dari setiap program, mengukur dampaknya, serta menyesuaikan intervensi untuk memastikan pencapaian tujuan Smart Environment di Kabupaten Cilacap.



BAB 6

PENUTUP



BAB 6. PENUTUP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, Kabupaten Cilacap berupaya untuk selalu beradaptasi secara inovatif, dan inklusif melalui implementasi konsep *smart city*. Buku 2 Masterplan Smart City Kabupaten Cilacap ini telah menguraikan visi, misi, dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan Cilacap sebagai kota pintar yang berkelanjutan.

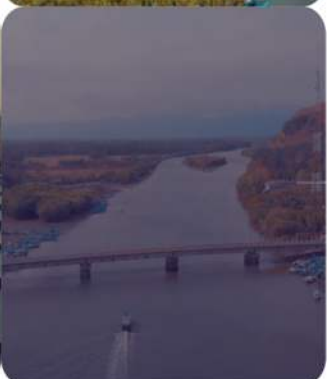
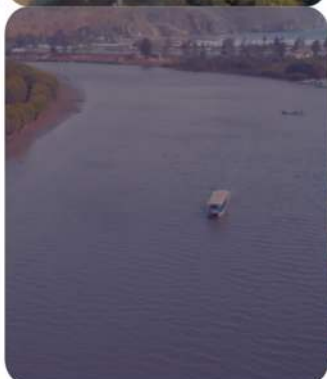
Dalam pendahuluan, telah dijelaskan latar belakang, urgensi, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap dalam menerapkan konsep *smart city*. Dengan jelas, arah pembangunan *smart city* menunjukkan komitmen daerah dalam menghadapi tantangan masa depan, sementara strategi pembangunan menguraikan cara-cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana aksi memberikan gambaran nyata langkah apa saja yang perlu diambil, dan peta jalan memastikan bahwa setiap langkah tersebut dilaksanakan dengan terstruktur dan terencana.

Pembangunan *smart city* membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Diharapkan, dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik serta komitmen yang kuat, Kabupaten Cilacap bukan hanya akan menjadi kota yang cerdas dalam pemanfaatan teknologi, namun juga menjadi kota yang mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Masterplan Smart City Kabupaten Cilacap ini menjadi panduan yang berharga dalam menjadikan Kabupaten Cilacap lebih cerdas, berkelanjutan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- David, F. R., & David, F. R. (2016). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, Global Edition. Pearson Education.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2023). *RKP Kabupaten Cilacap 2023*. Pemerintah Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah
- Smart City Maturity. 2019. SNI ISO 37122: 2019.

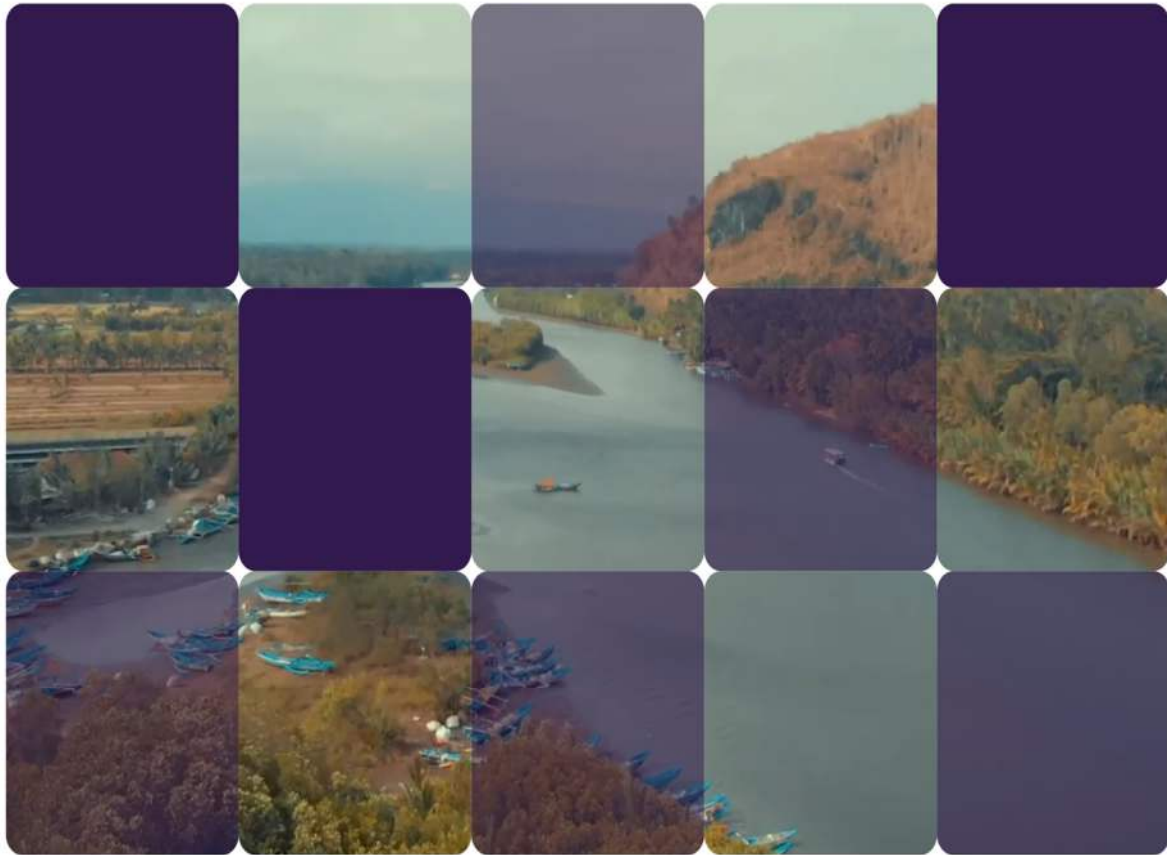


Buku 3 :

Executive Summary Masterplan Smart City Daerah

Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah

2023



BAB 1

LATAR BELAKANG

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, ada tren global di mana populasi semakin bermigrasi ke kota-kota besar, mendorong konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah perkotaan. Urbanisasi yang pesat memerlukan kota-kota besar untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong pemangku kebijakan untuk mengembangkan konsep "kota pintar" atau *Smart City*. Hal yang serupa terjadi di Kabupaten Cilacap, di mana pemerintah lokal menyadari perlunya menerapkan konsep *Smart City* untuk mempersiapkan masa depan pembangunan kota yang cerdas.

Secara umum, Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang dinamis dengan perkembangan pembangunan di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Infrastruktur fisik di Kabupaten Cilacap juga cukup baik, dengan jaringan jalan yang memadai menghubungkan wilayah-wilayahnya. Selain itu, terdapat objek wisata unggulan seperti Pantai Teluk Penyu dan Pulau Nusa Kambangan. Secara ekonomi, sektor industri memainkan peran dominan dalam kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap, terutama dengan adanya Kilang Minyak Balongan, salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Secara keseluruhan, Kabupaten Cilacap memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata dengan lokasi strategis dan infrastruktur yang terus berkembang, memberikan modal awal untuk menerapkan dan mengembangkan *Smart City*.

Dalam diskusi sebelumnya, telah dibahas analisis kesiapan daerah, modal awal daerah berdasarkan dimensi *Smart City*, dan analisis strategi awal untuk pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Namun, masih ada aspek yang perlu disinkronkan, yaitu visi, misi, dan sasaran *Smart City* Kabupaten Cilacap dengan dokumen induk perencanaan daerah yang ada. Saat ini, Kabupaten Cilacap tidak memiliki RPJMD, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 akan digunakan sebagai panduan. RPD mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan komponen lain yang relevan dengan perencanaan daerah. Meskipun tidak memiliki visi dan misi kepala daerah seperti pada RPJMD, visi dan misi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap dapat disusun berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan dari berbagai OPD yang telah dilaksanakan selama Bimbingan Teknis.

Dokumen masterplan yang telah disusun merupakan hasil kerja sama lintas sektoral yang dilakukan selama masa penyusunan dengan melakukan bimbingan teknis sebanyak empat kali yang diikuti oleh seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui kerja sama tersebut, tercipta inovasi komprehensif yang mendukung akselerasi percepatan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Inovasi ini dapat dijadikan dokumen turunan dari dokumen perencanaan daerah yang sudah ada sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Cilacap. Penyusunan dokumen masterplan pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap menghasilkan empat buah dokumen luaran yang dapat dijadikan acuan yaitu: (1) Buku Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Cilacap, (2) Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap, (3) Buku *Executive Summary*, dan (4) Buku *Quick Win*.

Buku ini merupakan luaran ketiga atau disebut dengan *Executive Summary*. Buku ini ditujukan bagi kepala daerah, dan pejabat daerah yang menjabat. Buku *executive summary* merupakan gambaran umum, singkat, dan sederhana terkait pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap agar dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung kesuksesan program Cilacap *Smart City*. Detail inovasi dan kegiatan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap telah disajikan pada dokumen Buku II Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap yang merupakan rangkaian dokumen akhir dari penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Cilacap.

1.2. Kerangka Pikir

Konsep *Smart City* telah menjadi pilar utama dalam rencana pembangunan perkotaan yang menggabungkan kemajuan teknologi, dan telah diadopsi secara luas oleh berbagai

pihak mulai dari praktisi dan akademisi. Kerangka kerja *Smart City* digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan perkotaan. *Smart City* mengintegrasikan infrastruktur jaringan dengan aplikasi teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengotomatisasi proses-proses manual yang sebelumnya terlibat dalam manajemen perkotaan. Fokus pengembangan *Smart City* juga mencakup pencapaian pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan integrasi antara elemen-elemen pemerintah dan partisipasi masyarakat, mengisi kekosongan yang ada melalui kolaborasi lintas lembaga.

Dalam konsep *Smart City*, teknologi digunakan dengan mempertimbangkan peran penting sumber daya manusia sebagai individu yang terlibat secara aktif dalam mengatasi isu-isu strategis dan proses kebijakan. Dengan demikian, *Smart City* tidak hanya memprioritaskan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengakui signifikansi peran masyarakat (SDM) sebagai bagian integral dalam proses pembangunan perkotaan. Pendekatan ini diharapkan akan mendorong inovasi yang timbul secara alami melalui interaksi yang erat antara partisipasi masyarakat dan penerapan teknologi oleh lembaga pemerintahan. Hal ini merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan *Smart City*, termasuk dalam konteks pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

Tiga komponen utama yang menjadi pilar dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap yaitu **(a) struktur** yang meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), penyiapan sumber anggaran, dan sumber daya tata kelola; **(b) infrastruktur** yang meliputi infrastruktur pendukung *Smart City* baik berbentuk fisik, digital, maupun infrastruktur sosial; **(c) suprastruktur** yang meliputi penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pembangunan *Smart City*. Selain ketiga komponen tersebut, dalam konsep *Smart City* juga terdapat enam dimensi yang harus diperhatikan yang mencakup aspek-aspek perubahan yang meliputi tata kelola birokrasi yang cerdas (*Smart Governance*), citra kota/daerah yang cerdas (*Smart Branding*), pertumbuhan ekonomi yang cerdas (*Smart Economy*), permukiman penduduk yang cerdas (*Smart Living*), lingkungan sosial yang cerdas (*Smart Society*), dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas (*Smart Environment*). Setiap dimensi tersebut juga memiliki sub-dimensi yang lebih rinci dalam menjelaskan faktor atau variabel apa yang penting untuk diperhatikan sesuai dengan tujuan atau *spirit* dari dimensi yang bersangkutan.

Tabel 100. Dimensi, Sasaran, dan Sub-Dimensi *Smart City*

Dimensi <i>Smart City</i>	Sasaran	Sub-Dimensi <i>Smart City</i>
<i>Smart Governance</i>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah yang efektif, efisien, komunikatif, akuntabel dan terus berinovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.	Pelayanan Publik
		Manajemen Birokrasi
		Efisiensi Kebijakan Publik
<i>Smart Branding</i>	Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.	Ekosistem Pariwisata
		Ekosistem Bisnis Daerah
		Citra atau Wajah Kota
<i>Smart Economy</i>	Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan <i>financial literacy</i> masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan <i>cashless society</i> .	Ekosistem Industri
		Kesejahteraan Rakyat
		Ekosistem Keuangan Daerah
<i>Smart Living</i>	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.	Harmonisasi Tata Ruang
		Sarana Prasarana Kesehatan
		Ketersediaan Transportasi Publik
<i>Smart Society</i>	Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan <i>digital literacy</i> yang tinggi.	Interaksi Masyarakat yang Efisien
		Ekosistem Belajar yang Efisien
		Sistem Keamanan Masyarakat
<i>Smart Environment</i>	Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Pengembangan Proteksi Lingkungan
		Tata Kelola Sampah dan Limbah
		Tata Kelola Energi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022

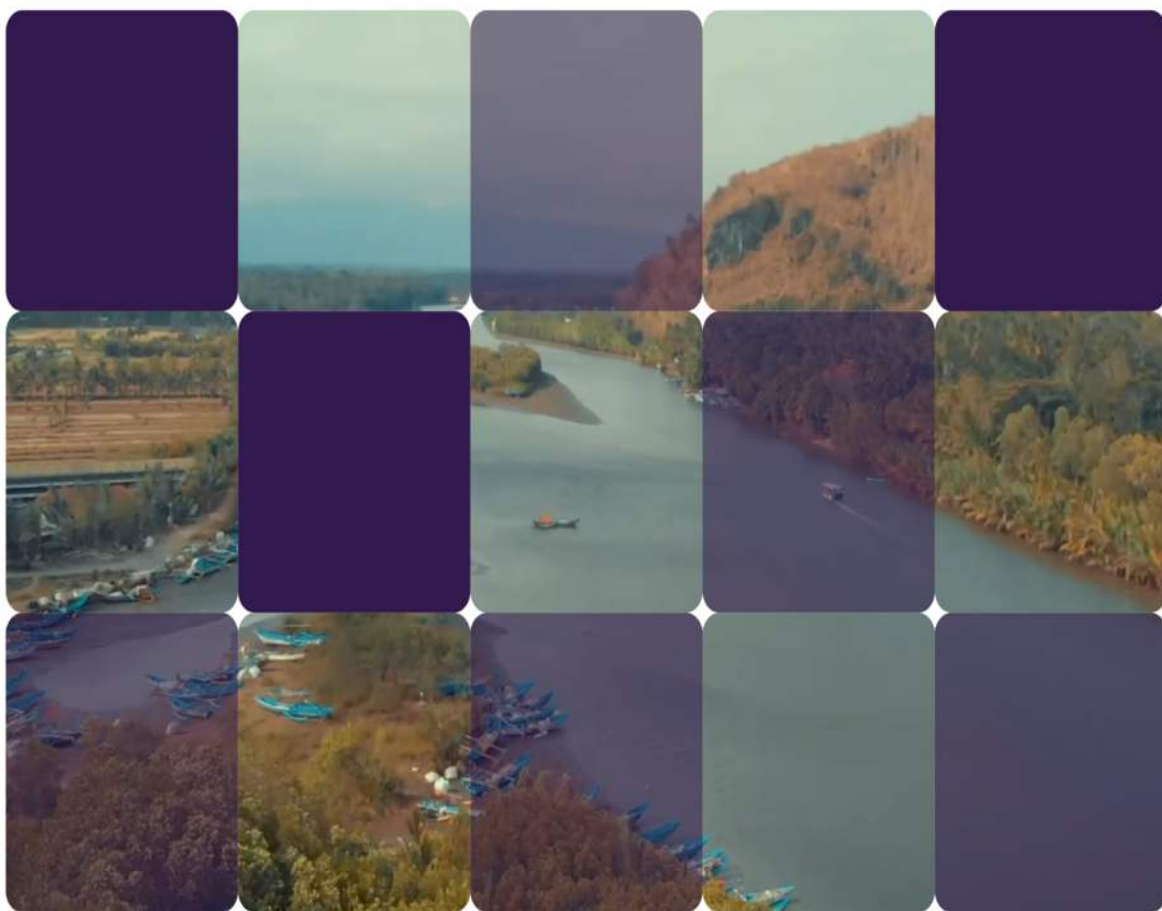
Dalam proses pembangunannya, *Smart City* Kabupaten Cilacap harus tetap mempertimbangkan pedoman dari dokumen perencanaan daerah yang dimilikinya, bahkan jika sudah ada Masterplan khusus sebagai panduan perencanaan *Smart City*. Sebaliknya, Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap seharusnya mengacu pada dokumen perencanaan daerah sebagai landasan untuk memastikan bahwa arah pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap selaras dengan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dan konsep *Smart City* mencakup beberapa aspek. Pertama, tujuan dari pembangunan *Smart City* harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh, sehingga *Smart City* dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kabupaten secara keseluruhan. Kedua, alokasi sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan *Smart City* harus dipertimbangkan dengan seimbang, memperhitungkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah lainnya. Pemilihan alokasi sumber daya yang tepat akan memastikan bahwa pembangunan *Smart City* tidak mengabaikan sektor-sektor penting lainnya yang juga memerlukan perhatian. Ketiga, keterkaitan ini akan membantu menciptakan sinergi antara proyek-proyek dan program-program pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai contoh, infrastruktur yang dikembangkan untuk *Smart City* harus dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang sudah ada, seperti transportasi, lingkungan, dan teknologi, untuk menciptakan keselarasan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap haruslah mencakup perspektif yang menyeluruh, termasuk mempertimbangkan dokumen perencanaan daerah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa *Smart City* dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan keseluruhan kabupaten, sambil tetap memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terdapat informasi tentang tujuan, sasaran, strategi, indikator, dan program prioritas yang membentuk landasan untuk menilai kesiapan *Smart City*. Kesiapan *Smart City* ini mengadaptasi kerangka konseptual dari *Smart City*, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan daerah dan proyeksi masa depan untuk kemungkinan pengembangan *Smart City*. Kesiapan *Smart City* ini menjadi pedoman untuk menyusun masterplan *Smart City*, dimulai dari penetapan visi misi, sasaran, strategi, dan indikator. Referensi tambahan seperti indikator eksternal seperti ISO juga dijadikan sebagai acuan dalam merancang masterplan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dijadikan sebagai panduan untuk menyusun masterplan *Smart City*, terutama terkait dengan penyusunan peta jalan, rencana aksi, dan pemilihan program prioritas yang akan menjadi "Quick Win".

Selanjutnya, dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap, perlu ditetapkan sasaran sebagai target yang ingin dicapai melalui pembangunan *Smart City*. Sasaran ini dikelompokkan berdasarkan dimensi dan sub-dimensi *Smart City*. Proses penetapan sasaran *Smart City* dilakukan dengan mempertimbangkan pemetaan antara sasaran yang telah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan untuk mencari hubungan antara tujuan *Smart City* dengan tujuan pembangunan dalam RPD. Hubungan yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa program-program *Smart City* sejalan dengan program yang telah diidentifikasi dalam RPD.

Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan tujuan-tujuan *Smart City* untuk setiap dimensi yang ada. Tujuan-tujuan yang sudah dikategorikan akan diselaraskan dengan standar nasional seperti SNI dan ISO 37122 yang terkait dengan *Smart City*. Dengan demikian, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan akan didukung oleh kerangka kerja yang dapat diukur dan dibandingkan secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, dirumuskan peta jalan (*road map*) yang dalam konteks ini merupakan gambaran menyeluruh dan sistematis dari seluruh langkah yang harus diambil untuk mewujudkan visi *Smart City*. Detail target kinerja yang ingin dicapai dituangkan dengan jelas dalam peta jalan ini, beserta dengan rincian anggaran yang diperlukan untuk setiap program atau kegiatan.



BAB 2

VISI SMART CITY

BAB II. VISI DAN MISI SMART CITY KABUPATEN CILACAP

Sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah diluncurkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam pembentukan Visi dan Misi untuk *Smart City* Kabupaten Cilacap, dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026, terdapat beberapa isu strategis yang diungkapkan, antara lain:

7. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (*governance*): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel.
8. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.
9. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat
10. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal
11. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup
12. Pengelolaan dan penanganan bencana yang belum optimal

Selanjutnya, berangkat dari keenam isu strategi tersebut, dokumen RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 juga mencanangkan tujuan pokok pembangunan yang meliputi:

9. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
10. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunkannya gangguan keamanan di wilayah
11. Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat
12. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal
13. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
14. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan
15. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
16. Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan

Sementara itu, visi dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap mencerminkan aspirasi yang ingin dicapai dalam pengembangan konsep *Smart City*. Mengingat belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap yang memuat Visi dan Misi dari kepala daerah, Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap dirumuskan berdasarkan dialog yang melibatkan para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat. Dialog ini diadakan dalam rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Lalu, dengan mempertimbangkan dialog tersebut serta memperhatikan dokumen perencanaan lain yang relevan maka visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap terwujud sebagai berikut:

“MENUJU CILACAP KOTA CERDAS YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING MELALUI DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Cilacap yang sehat, merujuk pada harapan Kabupaten Cilacap untuk memiliki tingkat kesehatan yang tinggi baik dari segi kesehatan fisik maupun mental masyarakatnya.

Cilacap Sejahtera, adalah harapan Kabupaten Cilacap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas politik dan keamanan dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah. Harapannya, kabupaten Cilacap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan inklusif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak.

Cilacap Berdaya Saing, merujuk pada harapan Kabupaten Cilacap untuk memiliki kemampuan kompetitif dalam bersaing di skala lokal, nasional, hingga internasional. Daya saing ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang kompetitif serta dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar daerah.

Dukungan Teknologi Informasi, merupakan harapan Kabupaten Cilacap untuk mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Cilacap. Optimalisasi dukungan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Visi *Smart City* Kabupaten Cilacap diatas tidak akan dapat terwujud tanpa adanya Misi *Smart City* yang menjadi pendukungnya. Misi-misi tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong dan menjadi arah tujuan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Misi tersebut adalah:

4. Mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalani gaya hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi di tingkat komunitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang menjaga kebersihan diri, memastikan sarana sanitasi yang memadai, dan fasilitas penunjang lainnya. Gaya hidup sehat diharapkan dapat membawa produktivitas dan inovasi, dengan mengembangkan dan memberdayakan individu serta pelaku UMKM. Strategi ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses pembiayaan untuk mendorong pengembangan potensi dan inovasi masyarakat. Penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non-formal juga diwujudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

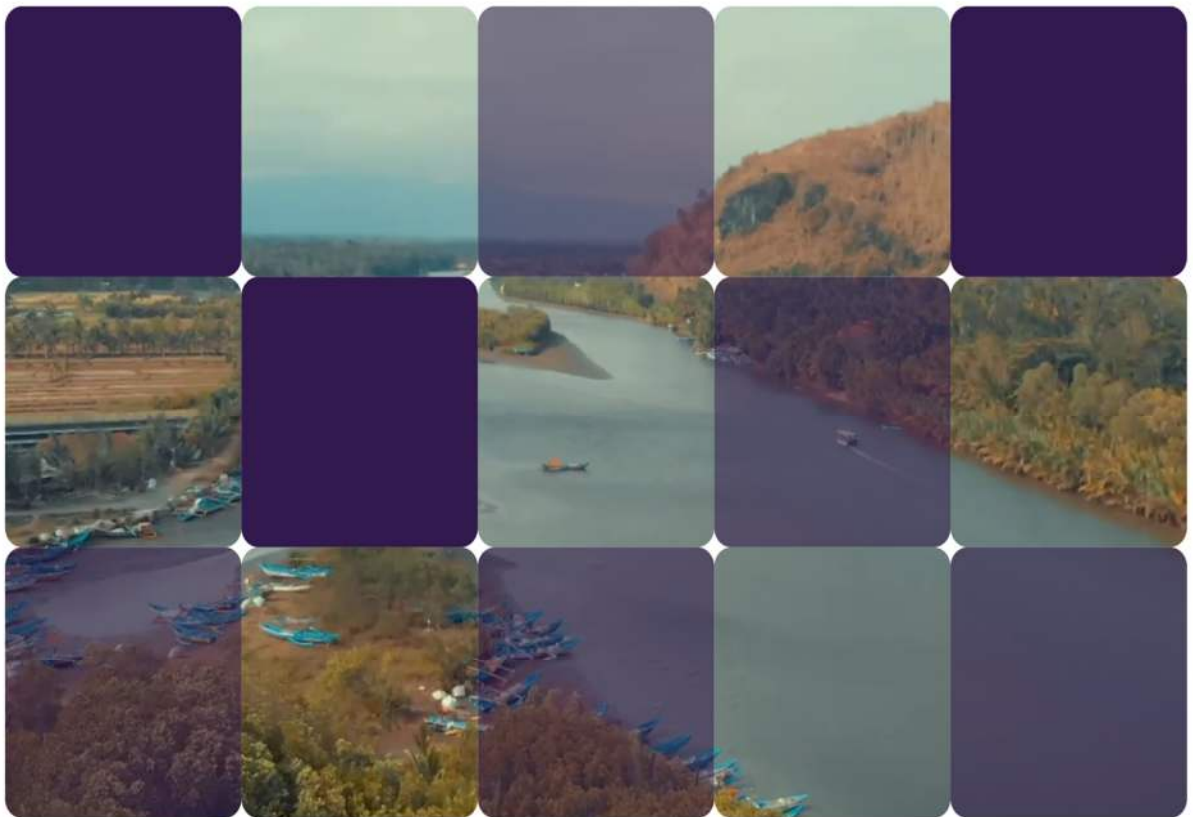
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan

Misi kedua adalah mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memudahkan akses modal usaha, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan dukungan teknis. Selain itu, tujuan ini mencakup peningkatan kualitas produk lokal yang unik melalui pelatihan desain, pemasaran, dan sertifikasi produk. Pariwisata berbasis budaya juga menjadi fokus, dengan mempertahankan, merawat, dan mengembangkan warisan budaya daerah. Upaya ini melibatkan peningkatan infrastruktur pariwisata, penyelenggaraan acara budaya, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kelestarian lingkungan juga dijaga melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan menerapkan pertanian organik.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi teknologi informasi

Misi ketiga bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah menyediakan layanan publik secara online, mempercepat administrasi, dan mempermudah akses masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk melatih dan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan untuk memudahkan akses informasi masyarakat. Selain itu, peningkatan kinerja dan efisiensi pemerintahan dilakukan melalui evaluasi dan perbaikan struktur organisasi serta proses kerja, untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemerintahan yang kompeten dan profesional.



BAB 3

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

meningkatkan efisiensi dan pengelolaan birokrasi dengan fokus pada keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, memungkinkan pemerintah bekerja secara lebih efisien dan efektif. Terakhir, memprioritaskan efisiensi kebijakan publik dengan mengutamakan dampak positif bagi masyarakat dan memastikan transparansi informasi kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan strategi ini, diharapkan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dapat berjalan secara cerdas, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kabupaten Cilacap dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menerapkan pemerintahan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 101 Strategi Pembangunan *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
G1 Layanan Publik	G1.1. Tersedianya layanan pulik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi	G1.1.1. Pengembangan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain
G2 Manajemen Birokrasi	G2.1. Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)	G2.1.1. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
G3 Efektivitas Kebijakan	G3.1. Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya	G3.1.1. Pengembangan road map kebijakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

G: *Smart Governance*

Dari tabel sasaran dan strategi diatas, diharapkan pembangunan *Smart Governance* di Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan lancar. Ketiga strategi dari masing-masing sub-dimensi *Smart Governance* diatas harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan *stakeholders* terkait karena ketiganya adalah buah pemikiran dan diskusi selama bimbingan teknis serta merepresentasikan tujuan dan strategi yang ada pada dokumen perencanaan daerah lainnya.

3.2. Strategi *Smart Branding*

Smart branding, menjadi inovasi dalam pemasaran suatu daerah, bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Melalui *branding* yang efektif, sebuah kota dapat meningkatkan '*brand value*' daerahnya, dengan demikian merangsang aktivitas ekonomi dan memajukan perkembangan sosial dan budaya lokal. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *Smart Branding* secara langsung berkontribusi pada tujuan utama dari sebuah *Smart City*. Menerapkan pendekatan *Smart City* di Kabupaten Cilacap memerlukan strategi pembangunan yang difokuskan pada tiga elemen kunci dari *Smart Branding*. Pertama, adalah penciptaan ekosistem pariwisata yang kuat: *Smart Branding* memungkinkan Kabupaten Cilacap untuk mempromosikan daya tarik wisata yang unik dan menciptakan pengalaman menarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Kedua, adalah pengembangan ekosistem bisnis lokal yang tangguh: smart branding dapat menekankan keunggulan bisnis lokal, mendukung pertumbuhan dan kemajuan mereka. Terakhir, adalah peningkatan penampilan kota: sebuah kota yang bersih, hijau, dan menarik secara visual dapat secara signifikan meningkatkan '*brand value*'. Oleh karena itu, strategi untuk memperbaiki dan memelihara penampilan fisik kota, termasuk infrastruktur publik, fasilitas, dan ruang terbuka hijau, sangatlah penting.

Tabel 102 Strategi Pembangunan *Smart Branding* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
B1 Pariwisata/ Budaya	B1.1. Tersedia sistem pengelolaan pariwisata yang baik	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri pariwisata
	B1.2. Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian	
	B1.3. Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional	
	B1.4. Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata	

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
B2 Daya Saing Daerah	B2.1. Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan
	B2.2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat	
	B2.3. Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya	
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1. Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah
	B3.2. Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif.	
	B3.3. Terwujudnya penataan wajah kota dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

B: *Smart Branding*

Strategi-strategi berdasarkan sub-dimensi *Smart Branding* yang dapat mendukung Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan daya saing serta bertransformasi menjadi *Smart City* yang berkelanjutan dan mengarah ke masa depan. *Branding* yang pintar dan berhasil akan memacu pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas setempat, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Oleh sebab itu, strategi-strategi diatas haruslah menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan terkait.

3.3. Strategi Smart Economy

Smart Economy mengacu pada metode inovatif dalam mengelola perekonomian suatu daerah, dengan fokus utama pada menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan adaptif, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang sering kali disruptif. Pendekatan ini menjadi krusial untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu diformulasikan strategi tiga pilar *Smart Economy*. Pertama, adalah menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui integrasi industri primer, sekunder, dan tersier. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan pertumbuhan ekonomi merata dan terciptanya peluang kerja yang memadai untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Ketiga, membangun ekosistem transaksi keuangan yang efisien dan aman dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan transaksi keuangan, seperti pembayaran, penarikan, transfer, dan jenis transaksi keuangan lainnya. Inisiatif ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi aktivitas bisnis yang produktif.

Tabel 103 Strategi Pembangunan Smart Economy Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1. Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata	Ec1.1.1. Optimalisasi ekosistem industri yang ada untuk diversifikasi pendapatan masyarakat
	Ec1.2. Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas	
	Ec1.3. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC)	
	Ec1.4. Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal	
	Ec1.5. Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran online (marketplace)	
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1. Mewujudkan modal kerja sama secara pentahelix (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media)	Ec2.1.1. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan

	Ec2.2. Peningkatan kompetensi angkatan kerja	bekerjasama dengan pentahelix
Ec3 Transaksi Keuangan	Ec3.1. Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai
	Ec3.2. Pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

Ec: *Smart Economy*

Dengan fokus terhadap strategi pada masing-masing sub dimensi *Smart Economy*. Strategi ini diharapkan dapat membantu Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan di era digital, sekaligus memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh teknologi dan inovasi. Sehingga, mampu mencapai tujuan Kabupaten Cilacap menjadi *Smart City* yang mampu menyejahterkan masyarakat melalui peningkatan ekonomi. Strategi – strategi tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Cilacap.

3.4. Strategi *Smart Living*

Smart Living mencerminkan pendekatan yang bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kualitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan fokus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, efisien, dan berdaya. Ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan menuju terwujudnya konsep *Smart City* di Kabupaten Cilacap, diperlukan strategi yang mencakup tiga aspek utama dari *Smart Living*. Pertama, perlu ditekankan kelayakan pola hidup atau harmonisasi tata ruang, yang melibatkan perencanaan infrastruktur dan ruang publik yang responsif terhadap kebutuhan dan gaya hidup penduduk, termasuk akses ke taman, fasilitas komunitas, dan perumahan yang terjangkau. Kedua, kelayakan kualitas kesehatan harus diperhatikan dengan memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas, baik itu layanan preventif maupun kuratif, sambil mendorong gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Ketiga, penting untuk memastikan kelayakan moda transportasi dengan mengembangkan sistem transportasi yang efisien, aman, dan terjangkau, sehingga memfasilitasi mobilitas yang mudah dan cepat bagi seluruh penduduk.

Tabel 104 Strategi Pembangunan *Smart Living* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1. Optimalisasi ruang terbuka hijau	Lv1.1.1. Peninjauan kembali zonasi tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi wilayah (dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi)
Lv2 Kualitas Kesehatan	Lv2.1. Pencegahan terhadap stunting	Lv2.1.1. Peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional
	Lv2.2. Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS)	
	Lv2.3. Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak	
Lv3 Aksesibilitas/Transportasi	Lv3.1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat
	Lv3.2. Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

Lv: *Smart Living*

Dengan memperhatikan strategi-strategi diatas pembangunan *Smart Living* sebagai salah satu dimensi *Smart City*. Melalui *Smart Living*, Kabupaten Cilacap dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang layak, nyaman, dan efisien. Namun, semua itu hanya dapat terwujud apabila terjalin sinergitas antara pemerintah selaku pemangku kepentingan dan masyarakat.

3.5. Strategi Smart Society

Smart Society adalah dimensi kunci dalam pembangunan *Smart City* yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam setiap aspek pembangunan kota. Konsep masyarakat cerdas menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman, dengan keterampilan, kreativitas, dan inovasi sebagai unsur inti. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang muncul. Dalam upaya mewujudkan visi *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu diperhatikan tiga elemen kunci dalam merumuskan strategi Smart Society. Pertama, adalah efisiensi dalam interaksi masyarakat, termasuk interaksi individu, antar kelompok sosial, dan partisipasi publik dalam pembangunan kota. Kedua, adalah menciptakan ekosistem belajar yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat melalui penggunaan teknologi dalam pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, adalah sistem keamanan masyarakat yang melibatkan perlindungan jiwa, harta benda, serta antisipasi risiko bencana, termasuk keamanan siber di era digital. Upaya menjaga keamanan dan privasi informasi dalam lingkungan digital juga menjadi fokus penting dalam pembangunan *Smart Society*.

Tabel 105 Strategi Pembangunan Smart Society Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya	S1.1.1. Penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarat untuk menguatkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan solidaritas sosial keagamaan dengan optimalisasi teknologi digital
	S1.2. Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat	
S2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S2.1. Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan	S2.1.1 Meningkatkan literasi masyarakat dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta perbaikan sistem tata kelola pendidikan
	S2.2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat	
S3 Keselamatan Masyarakat	S3.1. Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat	S3.1.1. Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi
	S3.2. Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas	

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

S: Smart Society

Melalui fokus pada tiga elemen, maka dibentuk strategi pembangunan Smart Society sesuai dengan masing-masing sub dimensi. Strategi pembangunan Smart Society diharapkan mampu mendukung Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten cerdas dengan penekanan pada hubungan antar-warga yang terjalin semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

3.6. Strategi Smart Environment

Smart Environment mewakili pendekatan holistik dalam mengelola lingkungan perkotaan, dengan fokus utama pada penciptaan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Prinsip intinya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan yang besar dengan pelestarian lingkungan, untuk mencegah dampak merusak terhadap alam. Konsep *Smart Environment* menegaskan pentingnya mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan lingkungan. Ini mencakup manajemen sumber daya alam dan pengelolaan sampah serta limbah. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan perancangan strategi pembangunan yang mempertimbangkan tiga aspek kunci. Pertama,

perlindungan lingkungan dengan upaya pelestarian alam dan pengurangan polusi. Kedua, pengelolaan sampah dan limbah yang efektif melalui pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan yang efisien dan bertanggung jawab. Ketiga, tata kelola energi yang efisien dan berkelanjutan, mendorong penggunaan teknologi hemat energi dan promosi energi terbarukan.

Tabel 106 Strategi Pembangunan Smart Environment Kabupaten Cilacap

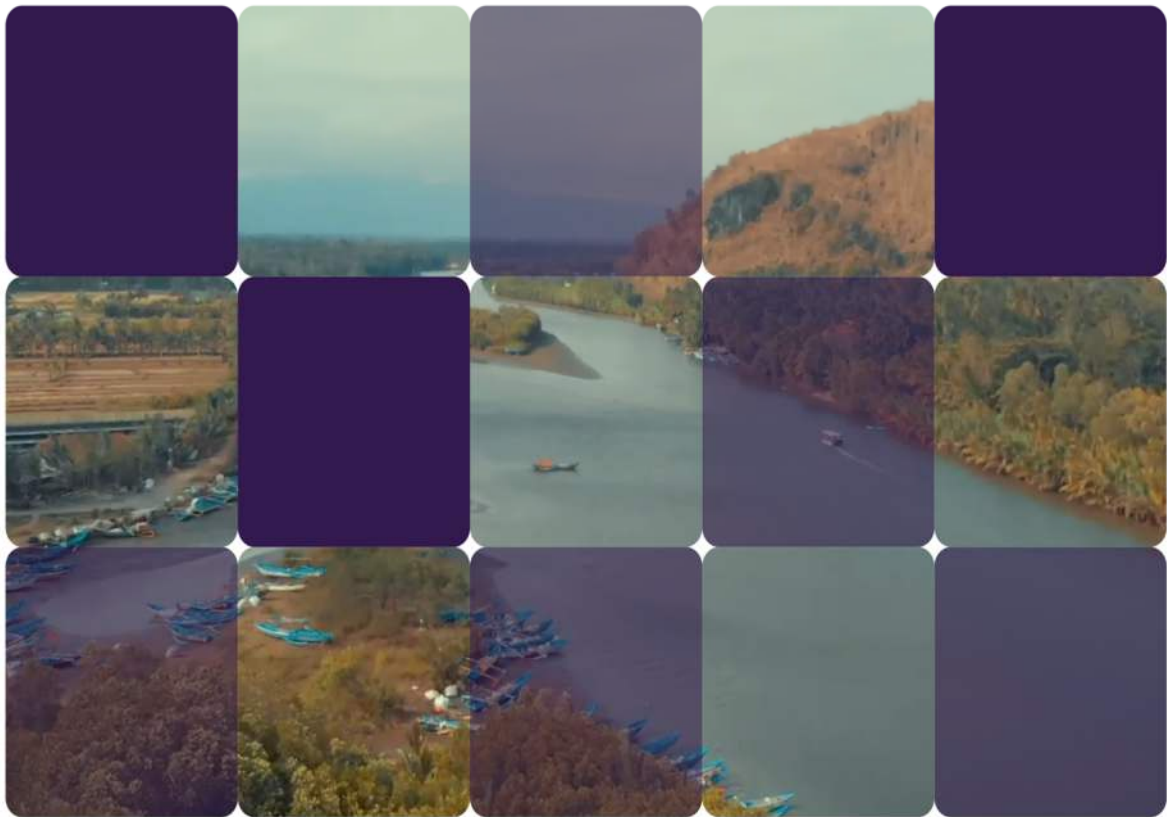
Sub Dimensi	Sasaran	Strategi
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1. Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI) Kab. Cilacap	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1. Terwujudnya tata kelola persampahan	En2.1.1. Mengembangkan sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat
En3 Tata Kelola Energi	En3.1. Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell (Implementasi di kantor Pertamina)	En3.1.1. Fasilitasi kajian dan menyiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan

Sumber: Analisis Tim Pembimbing, 2023

Keterangan:

En: *Smart Environment*

Strategi pembangunan pada *Smart Enviroment* tersebut diharapkan dapat membawa Kabupaten Cilacap mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pada akhirnya, Kabupaten Cilacap mampu menjadi Kabupaten dengan menerapkan model pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan. Ini harus menjadi perhatian bersama antara masyarakat dengan pemangku kepentingan atau pemerintah Kabupaten Cilacap.



BAB 4

PETA JALAN
SMART CITY DAERAH

Peta jalan *Smart City* Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan enam dimensi *Smart City*. Masing-masing dimensi akan direalisasikan melalui susunan program jangka panjang dengan tiang pendukung jangka menengah, dan dilaksanakan secara operasional oleh program jangka pendek. Untuk memahami peta jalan *Smart City* Kabupaten Cilacap pada setiap dimensinya, terlebih dahulu perhatikan pengkodean berikut ini:

Keterangan:

G: <i>Smart Governance</i>	Lv: <i>Smart Living</i>
B: <i>Smart Branding</i>	S: <i>Smart Society</i>
Ec: <i>Smart Economy</i>	En: <i>Smart Environment</i>
..P: Program	

4.1. Smart Governance

Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap memerlukan sebuah panduan strategis yang dikenal sebagai peta jalan atau roadmap. Dokumen ini akan menjadi pedoman untuk langkah-langkah strategis terkait program-program, kegiatan, dan inovasi yang direncanakan dalam persiapan menuju mewujudkan konsep *Smart City*. Detail peta jalan untuk dimensi *Smart Governance* dapat diakses pada tabel berikut:

Tabel 107 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Governance* Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
G1. Layanan Publik	G1.1.1. Pengemban gan inovasi pelayanan publik dengan memanfaat kan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain	G1.1.1.P.1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokument asi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)												
		1. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumenta si														
		1.1. Pendokumentas ian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			60 Dokumen	180.46 9	60 dokumen	189.492	60 dokumen	198.967	60 dokumen	208.915	60 dokumen	219.360	APBD	Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap
		1.2.Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			41 laporan	645.94 7	41 laporan	678.24 5	41 laporan	712.157	41 laporan	747.764	41 laporan	785.152	APBD	Seluruh unit kerja penyelengga ran layanan publik
G2. Birokrasi	G2.1.1. Peningkata n kualitas	G2.1.1.P.1. Program kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti	10.2. Persentase layanan kota	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
	reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintah an yang baik dan inovatif	daerah	fasilitasi peningkatan kompetensi	yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Kompetensi											APBD	Badan Kepegawaia n pendidikan dan pelatihan daerah dan Kominfo
		1.Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi														
		1.1. Peningkatan Kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya			100	360	100	360	100	378	100	396	100	415		
		G2.1.1.P.2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan / Standar Jabatan														
		1.Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembang an kompetensi teknis														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.1. Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembang an kompetensi teknis			630 orang	675	630 orang	675	630 orang	708	630 orang	743	630 orang	780	APBD	BKPPD/BKPS DM
		G2.1.1.P.3. Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa tertinggal (Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per- awal tahun n) dikali 100%)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Sistem Informasi Manajemen Desa (Desa 360)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1. Penyelenggaraa n Penataan Desa	Jumlah desa tertinggal per awal tahun													APBD	Dispermade s dan Kominfo
		1.1.Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa			730	929	730	976	730	1.024	730	1.075	730	1.128		
		G2.1.1.P.4. Program kepegawaian daerah	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Manajemen Assessment Center											APBD	BKPPD/BKPS DM dan Kominfo
		1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi														
		1.1. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			2 dok	554	2 dok	539	2 dok	515	2 dok	566	2 dok	622		
		G2.1.1.P.5. Penu njang urusan dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Optimalisasi penataan organisasi daerah											APBD	Seluruh OPD di Kabupaten
		1.Penataan Organisasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi														
		1.1. Peningkatan kinerja reformasi dan	Jumlah dokumen peningkatan			8 dok	367.88 0	8 dok	386.27 4	8 dok	405.58 8	8 dok	425.86 7	8 dok	447.160		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		birokrasi	kinerja dan reformasi birokrasi													Cilacap	
		1.2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			41 laporan	645.947	41 laporan	678.245	41 laporan	712.157	41 laporan	747.764	41 laporan	785.152	APBD	Seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Cilacap
		G2.1.1.P.6. Program pengelolaan barang milik daerah	Manajemen Aset	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	e-Simpeg; SIASN-BKN; pengembangan Mobile App Cilacap Smart ASN (CISA); e-Kinerja dan PKSP 360; aplikasi e-Presensi; aplikasi e-Peta Jabatan; Sistem Informasi Mutasi; pembang unan Sistem Informasi Manajemen Talenta.												
		1. Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah														
		1.1. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota h	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota			240	156	240	163	240	172	240	181	240	190	APBD	BPPKAD
		G2.1.1.P.7. Program kepegawaian daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaia n serta dokumen pengadaan calon ASN														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN														
		1.1. Pengeloaaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian			4 dok	340	4 dok	395	4 dok	395	4 dok	414	4 dok	434	APBD	BKPPD/BKPS DM dan Kominfo
		G2.1.1.P.8. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Penguatan laporan keuangan menggunakan teknologi digital												
		1.Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti														
		1.1. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolida si			7 laporan	249	7 laporan	261	7 laporan	275	7 laporan	288	7 laporan	302	DAU	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		G2.1.1.P.9.Progra m Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaata n data kependuduk an	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pendataan penduduk secara digital												
		1.Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependuduk an														
		1.1.Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencatatan sipil			2500 orang	42	2.500 orang	44	2.500 orang	46,3	2.500 orang	48,6	2.500 orang	53,6	APBD	Disdukcapil
G3. Perancangan Kebijakan	G3.1.1. Pengemban gan road map kebijakan yang berkelanjut an dengan	G3.1.1.P.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengendalia n kualitas pelayanan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Sisukma; e-Sakip												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
	memanfaat kan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi	1.Penataan organisasi	publik dan tata laksana														
		1.1.Kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				5 dok	115.880	5 dok	121.674	5 dok	127.758	5 dok	134.145	5 dok	140.852	APBD	Sekda bagian organisasi dan Seluruh OPD
		G3.1.1.P.2. Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan pengendalia n, evaluasi dan pelaporan program pembanguna n.	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Simpok APBD (sistem informasi manajemen pengendalian operasional kegiatan APBD)												
		1.Pelaksanaan administrasi pembangunan															
		1.1. Pengendalian dan evaluasi program pengembangan				15 dok	377.239	15 dok	396.101	15 dok	415.906	15 dok	436.701	15 dok	458.53 6	APBD	Sekda bagian pembangun an dan Seluruh OPD

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 108 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
G1. Layanan Publik	G1.1.1. Pengemban gan inovasi pelayanan publik dengan memanfaat kan sistem teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak lain	G1.1.1.P.1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokument asi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)												
		1. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumenta si														
		1.1. Pendokument asian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			60 Dokumen	230.328	60 dokumen	241.844	60 dokumen	253.936	60 dokumen	266.632	60 dokumen	279.963	APBD	Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap
		1.2.Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana			41 laporan	824.40 9	41 laporan	865.419	41 laporan	908.68 9	41 laporan	954.123	41 laporan	1.001.82 9	APBD	Seluruh unit kerja penyelengga ran layanan publik
G2. Birokrasi	G2.1.1. Peningkata n kualitas reformasi birokrasi dalam tata	G2.1.1.P.6. Program pengelolaan barang milik daerah	Manajemen Aset	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat	e-Simpeg; SIASN- BKN; pengembangan Mobile App Cilacap Smart ASN (CISA); e-												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
	kelola pemerintah an yang baik dan inovatif	1. Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah	kebijakan data terbuka	Kinerja dan PKSP 360; aplikasi e- Presensi; aplikasi e-Peta Jabatan; Sistem Informasi Mutasi; pembang unan Sistem Informasi Manajemen Talenta.											APBD	BPPKAD
		1.1. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kot ah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/k ota			240	200	240	210	240	220	240	231	240	242		
		G2.1.1.P.7. Program kepegawaian daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN														
		1.Pengadaan, Pemberhentia n dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN														
		1.1. Pengeloaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi			4 dok	455	4 dok	477	4 dok	500	4 dok	525	4 dok	551		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
			kepegawaian														
		G2.1.1.P.8. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Penguatan laporan keuangan menggunakan teknologi digital												
		1.Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti														
		1.1. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidas i			7 laporan	317	7 laporan	332	7 laporan	348	7 laporan	365	7 laporan	383	DAU	BPPKAD
		G2.1.1.P.9.Prog ram Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependuduk an	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pendataan penduduk secara digital												
		1.Penyelenggar aan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		Terkait Pendaftaran Penduduk	pemanfaatan data kependuduk an													APBD	Disdukcapil
		1.1.Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencatatan sipil			2500 orang	56	2.500 orang	58	2.500 orang	60	2.500 orang	63	2.500 orang	66		
G3. Perancangan Kebijakan	G3.1.1. Pengemban gan road map kebijakan yang berkelanjut an dengan memanfaat kan teknologi untuk pengelolaan sistem informasi	G3.1.1.P.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dan pengendalia n kualitas pelayanan publik dan tata laksana	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Sisukma; e-Sakip											APBD	Sekda bagian organisasi dan Seluruh OPD
		1.Penataan organisasi															
		1.1.Kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana															
				G3.1.1.P.2. Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan pengendalia n, evaluasi	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan	Simpok APBD (sistem informasi manajemen pengendalian										

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Pelaksanaan administrasi pembangunan	dan pelaporan program pembanguna n.	layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	operasional kegiatan APBD)												
		1.1. Pengendalian dan evaluasi program pengembanga n				15 dok	481.462	15 dok	505.535	15 dok	530.811	15 dok	557.351	15 dok	585.218	APBD	Sekda bagian pembangun an dan Seluruh OPD

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Membangun tata kelola pemerintahan yang cerdas, atau *Smart Governance*, mengharuskan perencanaan yang terperinci dan terstruktur, yang direalisasikan melalui peta jalan pembangunan yang komprehensif. Dalam konteks dimensi smart governance, berbagai program dan rencana aksi telah disusun untuk dilaksanakan, termasuk pengembangan program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan urusan dan operasional pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota, pengelolaan dan peningkatan optimalisasi aset daerah, integrasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDES), serta sejumlah inisiatif lainnya. Setiap program ini diformulasikan untuk memperkuat struktur, sistem, dan mekanisme tata kelola, memastikan agar pemerintahan dapat beroperasi dengan efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan peta jalan yang rinci dan terstruktur ini, diharapkan seluruh elemen dan inisiatif *Smart Governance* dapat diimplementasikan dan dikelola secara efektif, membawa Kabupaten Cilacap menuju era pemerintahan yang lebih cerdas.

4.2. Smart Branding

Seperti halnya pada dimensi *Smart Governance*, pada dimensi *Smart Branding* juga dibutuhkan peta jalan yang berisi program, kegiatan, indikator, dan inovasi pembangunan. Detail mengenai peta jalan atau *roadm map* pada dimensi Smart Branding dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 109 Peta Jalan Jangka Pnedek dan Menengah Smart Branding Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
B1. Pariwisata	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas, peningkatan promosi, penguatan kelembagaan , dan kolaborasi industri pariwisata	B1.1.1.P.1. Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Seni Budaya serta Lembaga Adat dalam mengeksplor potensi lokal, untuk membangun identitas kultural melalui festival budaya												
		1. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan														
		1.1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan (objek)			7 objek	410	8 objek	431	8 objek	452	8 objek	474	8 objek	497	APBD	Dinas P & K, Disporapar, Kelompok Seni Lokal, Sanggar, Diskominfo, Dishub, Dinkes, Satpol PP, DLH, Polres, BPBD
		B1.1.1.P.2. Pembinaan Sejarah Lokal	Presentase sejarah lokal yang dibina	17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Pengembangan Aplikasi Ensiklopedia Objek Pemajuan Kebudayaan Cilacap												
		1. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal														
		1.1. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat			3 dok	36	3 dok	38	3 dok	40	3 dok	42	3 dok	44	APBD	Dinas P & K, Dlspopar, Dinas Arpus, Diskominfo
		B1.1.1.P.3. Program Pengelolaan	Presentase masyarakat yang menjadi	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan	Publikasi Smart City												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik	sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk													
		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media yang mendiseminasikan informasi publik														
		1.1. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			12 dok	2.150	12 dok	2.200	12 dok	2.300	12 dok	2.415	12 dok	2.535	APBD	Diskominfo
		B1.1.1.P.4. Program Pembangunan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan												
		1.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1.Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			35 orang	50	35 orang	50	35 orang	50	35 orang	52,5	35 orang	58	APBD	DISPORAPAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Komunitas Seni
		2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang Ekraf														
		2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi diBidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			25 orang	40	25 orang	42	25 orang	44	25 orang	46	25 orang	48	APBD	DISPORAPAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Komunitas Seni
		B1.1.1.P.5. Program Pemasaran Pariwisata	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital												
		1.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten/ Kota Balik Dalam dan Luar Negeri														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
		1.1.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2 dok	75	2 dok	78	2 dok	82	2 dok	86	2 dok	90	APBD	DISPORAPA R, Dinas Kominfo, Bappeda, PHRI, HPI,
B2. Daya Saing Bisnis	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan	B2.1.1.P.1. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pemanfaatan teknologi digital dalam penjualan hasil tangkapan perikanan dan optimalisasi pendataan bagi UMKM dan kelompok pengolah dan pemasar ikan												
		1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah Rekomendasi Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil Perikanan yang sudah berizin														
		1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			1 dok	50	1 dok	50	1 dok	52,5	1 dok	55	1 dok	57,7	APBD	Dinas Perikanan, Diskominfo, DPKUKM,
		B2.1.1.P.2. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan monitoring pengujian mutu												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Poklahsar yang mengikuti pembinaan dan pelatihan bidang usaha perikanan		kualitas produk olahan hasil perikanan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan												
		2.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			5 unit	400	5 unit	400	5 unit	400	5 unit	420	5 unit	441	APBD	Dinas Perikanan
		3.Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatkan Bantuan Sarana dan prasarana														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		3.1.Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota			56.848 ton	225	57.855 ton	250	58.862 ton	250	58.862 ton	262	58.862 ton	267	APBD	Dinas Perikanan
		B2.1.1.P.3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang dikembangkan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Tersedianya Kreatif Hub / Jaringan Kota Kreatif												
		1.1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan berinteraksi bagi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Prasarana (Zona Kre atif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif			1 unit	100	1 unit	100	1 unit	105	1 unit	110	1 unit	110	APBD	DISPORAPAR, DPKUKM,

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
B3. Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah	B3.1.1.P.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	Pembangunan Sarpras pariwisata berbasis Digital; Penguatan forum komunikasi desa wisata												
		1. Pengelolaan Destinasi Pari wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola														
		1.1.Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara			2 unit	580	2 unit	614	2 unit	645	2 unit	655	2 unit	665	APBD	DISPORAPA R, Diskominfo,

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 110 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
B1. Pariwisata	B1.1.1. Pengembangan pariwisata yang berfokus pada destinasi prioritas,	B1.1.1.P.4. Program Pembangunan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penguatan pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	peningkatan promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi industri pariwisata	1.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya														
		1.1.Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			35 orang	62	35 orang	65	35 orang	68	35 orang	71	35 orang	74	APBD	DISPORAPAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Komunitas Seni
		2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang Ekraf														
		2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi diBidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			25 orang	50	25 orang	52	25 orang	54	25 orang	56	25 orang	58	APBD	DISPORAPAR, DPKUKM, Bappeda, Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, Komunitas Seni

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
		B1.1.1.P.5. Program Pemasaran Pariwisata	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital											APBD	DISPORAPA R, Dinas Kominfo, Bappeda, PHRI, HPI,
		1.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan kegiatan pemasaran pariwisata Kabupaten/ Kota Balik Dalam dan Luar Negeri														
		1.1.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2 dok	94	2 dok	98	2 dok	102	2 dok	107	2 dok	112		
B2. Daya Saing Bisnis	B2.1.1. Membangun ekosistem investasi yang kondusif untuk UMKM, industri kreatif, dan hilirisasi produk lokal unggulan	B2.1.1.P.3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang dikembangkan	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Tersedianya Kreatif Hub / Jaringan Kota Kreatif												
		1.1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan	Tersedianya Prasarana (Zona Kre atif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berek spresi,														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
						2029		2030		2031		2032		2033					
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
		berinteraksi bagi Kabupaten/ Kota	Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																
		1.1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif			1 unit	115	1 unit	120	1 unit	126	1 unit	132	1 unit	138			APBD	DISPORAPAR, DPKUKM,
B3. Wajah (Tampilan) Kota	B3.1.1. Melakukan penataan wajah kota yang khas dan mengangkat nilai budaya Cilacap yang taat terhadap tata ruang wilayah	B3.1.1.P.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	Pembangunan Sarpras pariwisata berbasis Digital; Penguatan forum komunikasi desa wisata														
		1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola																
		1.1.Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara			2 unit	725	2 unit	761	2 unit	799	2 unit	838	2 unit	879			APBD	DISPORAPAR, Diskominfo,

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Proses menuju implementasi *Smart Branding* di Kabupaten Cilacap membutuhkan pendekatan terstruktur dan terpadu, yang dimulai dengan penyusunan peta jalan pembangunan yang terperinci dan komprehensif. Dalam aspek *Smart Branding*, akan dijalankan rangkaian rencana aksi dan program strategis yang mencakup revitalisasi dan peningkatan apresiasi terhadap warisan budaya lokal melalui Pengembangan Kebudayaan, pendidikan sejarah lokal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah daerah kepada masyarakat, pengoptimalan potensi pariwisata lokal dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui program pembangunan sumber daya Pariwisata dan Ekraf, serta strategi pemasaran pariwisata yang bertujuan memperkuat posisi Cilacap dalam industri pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Program pengelolaan informasi dan peningkatan komunikasi publik akan membantu dalam penyebaran informasi dan mempromosikan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Sementara, program pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan melindungi dan mendorong inovasi dalam industri kreatif. Semua elemen ini, yang akan dijalankan sesuai dengan peta jalan yang terperinci, akan secara bersama-sama memperkuat identitas dan citra Kabupaten Cilacap, menonjolkan karakter unik dan kekayaan lokal dari daerah ini.

4.3. Smart Economy

Dalam upaya membangun *Smart City* di Kabupaten Cilacap, peta jalan menjadi komponen penting yang merinci seluruh aspek dari konsep *Smart City*, termasuk dimensi *Smart Economy*. Tabel di bawah ini memberikan gambaran terperinci mengenai peta jalan pembangunan dalam konteks dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap.

Tabel 111 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
Ec1. Ekosistem Industri	Ec1.1.1. Optimalisa si ekosistem industri yang ada untuk diversifika si pendapat an	Ec1.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Penyediaan Sistem Informasi guna mendukung peningkatan layanan BUMD dan BLUD												
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
	masyaraka t	1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			25 Dokumen	293.781	25 Dokumen	308.470	25 Dokumen	323.893	25 Dokumen	340.087	25 Dokumen	357.091	APBD	Bag.Perekono mian dan SDA Setda Kab. Cilacap, BUMD dan BLUD Kab. Cilacap
		Ec1.1.1.P.2.Progra m Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase sentra industri terbina	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Cilacap One Village One Product (CILOVOP)												
		1.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah IKM /Pelaku Industri Terbina														
		1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			12 dok	1.755	12 dok	1.842	12 dok	1.934	12 dok	1.715	12 dok	1.800	APBD	Disnakerin, Bappeda, Bagian Perekonomian
		Ec1.1.1.P.3. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun perekonomian	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sinergitas antar OPD dalam Pengembangan Ekonomi Lokal; Pengembangan Aplikasi SINERGI												
1.koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinir dalam perencanaan bidang																

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
			perekonomian dan sumber daya alam													APBD	Bappeda, Kluster UMKM, DPKUKM, Disnakerin, Setda
		1.1.Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian			7 laporan	317	7 laporan	317	7 laporan	332	7 laporan	348	7 laporan	365		
		2.koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dikoordinir dalam perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Aplikasi Geoportal												
		2.1.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3	37	3	37	3	38	3	40	3	42		
		Ec1.1.1.P.4. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang Diikuti														
		1.Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi PM yang diselenggarakan	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Pengembangana SIMPATIC (Sistem Informasi Manajemen Peluang & Potensi Investasi Cilacap) dan SIAPIC (Sistem												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Informasi Aplikasi Potensi Investasi Kabupaten Cilacap)	5 kegiatan	275	5 kegiatan	289	5 kegiatan	303	5 kegiatan	318	5 kegiatan	333	APBD	DPMPTSP
		Ec1.1.1.P.5. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan & Non Perizinan yang Diterbitkan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu Pintu												
		1.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan														
		1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik			2.400 orang	214	2.400 orang	225	2.400 orang	235	2.400 orang	246	2.400 orang	258	APBD	DPMPTSP, Diskominfo
		Ec1.1.1.P.6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan LKPM	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi	Penguatan pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri													
		1.1. Koordinasi & Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			500 pelaku usaha	330	500 pelaku usaha	335	500 pelaku usaha	340	500 pelaku usaha	357	500 pelaku usaha	374	APBD	DPMPTSP, Diskominfo
Ec2. Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1.1. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasama dengan pentahelix	Ec2.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengembangan Aplikasi dan Media Sosial PIPD Cilacap (Pusat Informasi Perekonomian Daerah Kabupaten Cilacap) yang mencakup penyediaan informasi perekonomian dan keuangan di daerah												
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase penyerapan APBD														
		1.1.Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			25 dok	878	30 dok	921	30 dok	967	30 dok	1.015	30 dok	1.065	APBD	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap, DPKU KM, DISPERTAN dan DISPABUN Kabupaten Cilacap
			Ec2.1.1.P.2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi	Penguatan Koordinasi Penanggungulang an Kemiskinan											

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pembangunan Manusia	sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri													
		1.1.Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia				7 laporan	655	7 laporan	555	7 laporan	582	7 laporan	611	7 laporan	641	APBD	Bappeda
		Ec2.1.1.P.3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Sistem informasi pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan												
		1.Penyusunan peta keretakan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen penanganan rawan pangan														
		1.1.Penyusunan pemutahiran dan analisi peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan			1	12,5	1	40	1	42	1	44	1	46	APBD	DISPABUN, Dispertan
		Ec2.1.1.P.4. Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase riset daerah yang ditindaklanjuti	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	Pengembang an PETI DESI Mandiri (Pendampingan dan Pelatihan Desa Inovasi bekerja sama dengan												
		1.Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan	Jumlah laporan fasilitasi penelitian dan pengembangan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		pemerintahan dan pengkajian peraturan	bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Cilacap)												
		1.1.Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa			10 laporan	240	10 laporan	250	10 laporan	260	10 laporan	273	10 laporan	286	APBD	Bappeda
		Ec2.1.1.P.5. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan & Non Perizinan yang Diterbitkan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Optimalisasi penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan perizinan secara online												
		1.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.1.Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan & Non PerizinanPenyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan & Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi & Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			5.220 orang	51	5.220 orang	53	5.220 orang	56	5.220 orang	58	5.220 orang	60	APBD	DPMPTSP
		Ec2.1.1.P.6. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan	20.1. Persentase tahunan anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Optimalisasi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan												
		1.Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan wilayah daerah kabupaten kota	Jumlah pengelolaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			2 Unit	350	2 Unit	350	2 Unit	400	2 Unit	420	2 Unit	441	APBD	DISPABUN, Dispertan
		Ec2.1.1.P.7. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi harga pangan dan neraca bahan makanan												
		1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun														
		1.1.Pemberdayaa n masyarakat dalam penganekaragam an konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragam an konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal			5	1.559	5	1.645	5	1.785	5	1.874	5	1.967	APBD	DISPABUN, Dispertan
		Ec2.1.1.P.8. Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi mutu dan keamanan pangan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Pelaksanaan pengawanan keamanan pangan segar kabupaten kota	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang beregistrasi														
		1.1.Penguatan kelembangaan keamanan pangan segar kabupaten kota	kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina			1	275	1	285	1	294	1	308	1	323	APBD	DISPABUN, Dispartan
		Ec2.1.1.P.9. Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi Promosi dan Penjualan Produk Usaha Mikro (CIBLON/ Cilacap Belanja Online)												
		1.Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dikembangkan usahanya														
		1.1.Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			457 unit	1.250	462 unit	1.342	467 unit	1.535	467 unit	1.611	467 unit	1.691	APBD	DISPABUN, Dispartan
		Ec2.1.1.P.10. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok	Optimalisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok/ pangan lainnya sesuai												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		1.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok / pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina	makanan daring	dengan kebutuhan daerah												
		1.1. Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			15%	5.117	15%	5.353	15%	5.395	15%	5.664	15%	5.947	APBD	DISPABUN, Dispartan
Ec3. Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai	Ec3.1.1.P.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan koordinasi bidang perekonomian sesuai kebutuhan,	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Optimalisasi penggunaan QRIS dan sarana transaksi elektronik lainnya bagi UMKM yang mengikuti kegiatan Pekan Promosi Cilacap Expo												
		1.Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Persentase penyerapan APBD														
		1.1. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			25 dok	878	30 dok	921	35 dok	967	35 dok	1.015	35 dok	1.065	APBD	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap, DPKUKM, DISPERTAN dan DISPABUN Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector		
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an				
		Ec3.1.1.P.2. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengembanga n Aplikasi SIPBLUD											APBD	BPPKAD		
		1.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti																
		1.1.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi			7 laporan	249	7 laporan	261	7 laporan	275	7 laporan	288	7 laporan	302				
		1.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah			1 dok	112	1 dok	118	1 dok	124	1 dok	130	1 dok	136				
	1.3.Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjaw aban pemerintah Kabupaten/kota																	

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		Ec3.1.1.P.3. Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengembanga n aplikasi e- retribusi dan pajak daerah												
		1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah														
		1.1.Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumentasi hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			32 dok	578	32 dok	607	32 dok	637	32 dok	668	32 dok	701	APBD	BPPKAD/BAPE NDA

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 112 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
Ec2. Kesejahtera an Masyarakat	Ec2.1.1. Pemerataa n pendapata n masyarka t melalui membuka lapangan pekerjaan bekerjasa ma dengan pentahelix	Ec2.1.1.P.10. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Produksi komoditas perkebunan (bidang perkebunan)	20.3. Persentase luas lahan kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	Optimalisasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok/ pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah												
		1.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok / pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
		kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan															
		1.1. Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			15%	6.244	15%	6.556	15%	6.883	15%	7.227	15%	7.588	APBD	DISPABUN, Dispertan
Ec3. Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3.1.1. Membangun sistem pengelolaa n keuangan yang terintegrasi dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non tunai	Ec3.1.1.P.2. Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengembangan Aplikasi SIPBLUD												
		1.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti														
		1.1.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi			7 laporan	317	7 laporan	332	7 laporan	348	7 laporan	365	7 laporan	383	APBD	BPPKAD
		1.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah			1 dok	142	1 dok	149	1 dok	156	1 dok	163	1 dok	171	APBD	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n	Target	Anggara n		
		1.3.Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/kota			215 orang	470	215 orang	493	215 orang	517	215 orang	542	215 orang	569	APBD	BPPKAD
		Ec3.1.1.P.3. Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengembangan aplikasi e-retribusi dan pajak daerah												
		1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah														
		1.1.Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumentasi hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			32 dok	736	32 dok	772	32 dok	810	32 dok	850	32 dok	892	APBD	BPPKAD/BAPEN DA

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Ide pembangunan berdimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap memerlukan sebuah rencana yang terperinci dan terstruktur. Dalam konteks dimensi *Smart Economy*, terdapat beragam program dan rencana aksi yang direncanakan untuk dilaksanakan, termasuk program untuk mengembangkan sektor ekonomi utama dan menciptakan lapangan kerja; program untuk perencanaan dan pengembangan industri yang berfokus pada strategi industri yang berdaya saing dan berkelanjutan; serta program untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memastikan sinergi antara semua inisiatif pembangunan. Lebih lanjut, upaya promosi penanaman modal, yang merupakan tanggung jawab daerah kabupaten/kota, akan memainkan peran penting dalam menarik investasi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara program perekonomian dan pembangunan akan memacu perkembangan melalui pendekatan inovatif dan berbasis data. Dengan adanya peta jalan yang rinci dan komprehensif, diharapkan akan menjadi panduan konkret dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif ini secara efektif. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan, dari

perencanaan hingga implementasi, sesuai dengan visi menyeluruh untuk menciptakan ekonomi yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap. Visi ini bertujuan untuk menghadirkan inovasi dan efisiensi di semua tingkatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

4.4. Smart Living

Upaya pengembangan dimensi *Smart Living* di Kabupaten Cilacap memerlukan peta jalan yang menggambarkan langkah konkrit yang memuat program, kegiatan, inovasi, indikator, hingga anggaran yang akan dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan *Smart Living*. Secara detail, semua itu tertara pada tabel dibawah ini:

Tabel 113 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
						2024		2025		2026		2027		2028				
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
Lv1. Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1.1.. Peninjauan kembali zonasi tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi wilayah (dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi)	Lv1.1.1.P.1. Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan, Pengendalian Kepadatan Permukiman dengan Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan, Penataan serta pengembangan Kawasan Perkotaan, Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan											APBD	DPUPR	
		1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota															
		1.1. Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		2 Perkada RDTR	50	2 Perkada RDTR	55	2 Perkada RDTR	57,7	2 Perkada RDTR	60	2 Perkada RDTR	63				
		1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin rekomendasi teknis pemanfaatan ruang		10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	1	100	1	100	1	105	1	110	1	115	APBD	DPUPR, DISKOMINFO

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		Lv1.1.1.P.2. Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pelibatan peran Masyarakat dalam Konsultasi Publik penyusunan RTR di lingkungan Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			2 dok	220	2 dok	242	2 dok	266,2	2 dok	286,2	2 dok	306,2	APBD	DPUPR
		1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota														
		1.2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan 10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyebarluasan informasi mengenai tata ruang melalui sosialisasi Bidang Penataan Ruang kepada masyarakat	2 dok	55	2 dok	60	2 dok	65	2 dok	70	2 dok	75	APBD	DPUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Lv2. Kesehatan	Lv2.1.1. Peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional	Lv2.1.1.P.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Lakon Kaprok Kampung KB (Lapak Konseling Kesehatan Reproduksi Kampung Keluarga Berencana) menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat menggemakan kembali program KB umumnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan khususnya di desa desa di seluruh Kabupaten Cilacap.												
		1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Bangsa Kencana														
		1.1. Pengendalian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	1	40	1	40	1	42	1	44	1	46	APBD	DINAS KB PA (Tahun 2024 Sudah tidak ada); DINSOS	
		Lv2.1.1.P.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			3	150	3	157,5	3	165	3	173	3	181	APBD	Dinkes, RSUD, Puskesmas
		Lv2.1.1.P.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SIMPO (Sistem Manajemen Pengelolaan Obat)												
		1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		(UMOT)															
		1.1. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			256	11	267	11	256	268	256	281	256	295	APBD	Dinkes, RSUD, Puskesmas
		Lv2.1.1.P.4. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem	CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan)												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah peserta pencegahan bagi anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten	penyelidikan non-darurat kota (hari)													
		1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a			53	159	53	161	53	164	53	172	53	180		
Lv3. Transportasi	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat	Lv3.1.1.P.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor												
		1. Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan uji														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
		1.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			2	200	2	350	2	367	2	385	2	404	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP
		Lv3.1.1.P.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room, e-Parking, e-Ticketing Angkutan Umum dan Smart LPJU di Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			2	250	1	50	1	50	1	52	1	54	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP
		2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Perlengkapan Jalan														
		2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia			48,82%	775	56,15%	950	76,20%	1.525	76,20%	1.601	76,20%	1.681	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 114 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Lv3. Aksesibilitas / Transportasi	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat	Lv3.1.1.P.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)	Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room, e-Parking, e-Ticketing Angkutan Umum dan Smart LPJU di Kabupaten Cilacap												
		1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			2	56	1	58	1	60	1	63	1	66	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP
		2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Perlengkapan Jalan														
		2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia			76,20 %	1.765	76,20 %	1.853	76,20 %	1.945	76,20 %	2.042	76,20 %	2.144	APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel diatas merupakan uraian rinci yang menjelaskan peta jalan terkait dimensi *Smart Living*. Rencana ini mencakup program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung dimensi *Smart Living* dalam konteks pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, dengan mempertimbangkan indikator dan alokasi anggaran daerah yang telah tersedia. Diimplementasikan melalui peta jalan ini, diharapkan tindakan konkret akan mendorong perkembangan dimensi *Smart Living* untuk masyarakat di kota tersebut. Mengingat akhirnya, suatu kota pintar tidak akan memiliki dampak yang signifikan jika kehidupan penghuninya tidak memberikan tingkat kenyamanan yang memadai. Oleh karena itu, rencana aksi untuk dimensi Smart Living dan elemen-elemennya merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan ini.

4.5. Smart Society

Untuk mencapai pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu disusun rencana strategis untuk dimensi *Smart Society* sebagai bagian integral dari konsep kota cerdas secara menyeluruh. Tabel di bawah ini memberikan gambaran rinci tentang peta jalan untuk membangun dimensi *Smart Society* di Kabupaten Cilacap.

Tabel 115 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Dimensi Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1.1. Penguatan peran pemuda, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menguatkan nilai- nilai kebudayaan lokal (dan solidaritas sosial keagamaan) dengan optimalisasi teknologi digital	s1.1.1.P.1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina (Jumlah LKD yang dibina dibagi jumlah LKD se- Kabupaten Cilacap x 100%	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	- SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintahan Desa); - LAPAK BUMDES (Sistem Informasi Marketplace Produk BUMDES Se Jawa Tengah); - BASO (Bantuan Khusus On line); - Smart Village (Aplikasi Layanan Desa Digital Meliputi Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Jogo Tonggo, Layanan Kamtibmas atau Panic Button)												
		1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.			568 lembag a	586	568 lembag a	615	568 lembag a	645	568 lembag a	677	568 lembag a	710	DAU	DISPERM ADES; Desa/Kelu rahan, Kecamata n
		1.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			5	160	5	168	5	176	5	184	5	193	DAU	DISPERM ADES; Desa/Kelu rahan, Kecamata n
		1.3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2	140	2	147	2	154	2	161	2	169	DAU	DISPERM ADES; Desa/Kelu rahan, Kecamata n
		1.4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1	80	1	84	1	88	1	92	1	96	DAU	DISPERM ADES; Desa/Kelu rahan, Kecamata n
		1.5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam			4	955	4	1.003	4	1.053	4	1.105	4	1.160	DAU	DISPERM ADES; Desa/Kelu rahan,

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													Kecamata n	
		S1.1.1.P.2. Program pemberdayaan Sosial	Persentase TKSK, PSM, orsos, dan LKS yang dibina	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)												
		1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS dan non PSKS yang terbina	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital													
		1.1. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota			35	174	32	188	32	197	32	206	32	216	DAU	Dinsos; Desa/Kelu rahan, Kecamata n
S2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S2.1.1. Meningkatkan literasi masyarakat dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta perbaikan sistem tata kelola pendidikan	S2.1.1.P.1. Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Kelas bertutur BEBER PERCIL (Belajar Bertutur Perpustakaan Kabupaten Cilacap); - English Class; - Stand up literasi; dan - PELITA (Pelayanan Literasi Tunanetra)												
		1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	17.3. Jumlah buku perpustakaan													

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif 13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus		60	100	60	100	60	105	60	110	60	115	DAU	Dinas Arpus
		1.2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1	25	1	25	1	26	1	27	1	28	DAU	Dinas Arpus
		1.3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			4	20	4	20	4	21	4	22	4	23	DAU	Dinas Arpus
		1.4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			3	60	3	60	3	63	3	66	3	69	DAU	Dinas Arpus
		1.5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya			2	20	2	20	2	21	2	22	2	23	DAU	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		S2.1.1.P.2. PROGRAM PELEST ARIAN KOLEKSI N ASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang di lestarikan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Forum Konsultasi Akreditasi Sekolah Dasar												
		1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah judul naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan														
		1.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			2	20	2	20	2	21	2	22	2	23	DAU	Dinas Arpus
		1.2. Pengembangan, pengolahan, dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Aplikasi LAKON PDK (Layanan Kontrak Online) di Lingkungan Dinas	12	20	12	20	12	21	12	22	12	23	DAU	Dinas Arpus

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		S2.1.1.P.3. Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	AISYA (Arsip Masyarakat)												
		1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna yang bisa mengakses arsip statis	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif													
		1.1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			4	171	5	201	5	211	5	221	5	232	DAU	Dinas Arpus
		S2.1.1.P.4. Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	PENCIL (Perpustakaan Elektronik Cilacap)												
		1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan sesuai SNP														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			1.400	165	1.500	175	1.500	175	1.500	183	1.500	192	DAU	Dinas Arpus
		1.2. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpus takaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3	75	3	96	3	99	3	103	3	108	DAU	Dinas Arpus
S3 Keamanan Masyarakat	S3.1.1. Mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan, kriminalitas, bencana, konflik sosial dan kegagalan teknologi	S3.1.1.P.1.Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Pembentukan relawan kebakaran												
		1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Laporan aktifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya.			125 Orang	25	125 Orang	25	125 Orang	26	125 Orang	27	125 Orang	28	APB D	Satpol PP
		1.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya, Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya.	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Damkar)	70 Orang	14	70 Orang	14	70 Orang	14	70 Orang	15	70 Orang	16	APB D	Satpol PP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
		1.3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawa n Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar, Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar.	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) 15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Command Center	2 Orang, 4 POS, 365 Hari	146	2 Orang, 4 POS, 365 Hari	153	2 Orang, 4 POS, 365 Hari	160	2 Orang, 4 POS, 365 Hari	168	2 Orang, 4 POS, 365 Hari	176	APB D	Satpol PP
		S3.1.1.P.2.Pencegah an Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non- darurat kota (hari)	Satkataru (Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu) SIAP												
		1. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sum ber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran	Target	Angga ran		
			Kabupaten/Kota														
		1.1. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya			3 Pos	49,9	3 Pos	49,9	3 Pos	52	3 Pos	55	3 Pos	57		

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 116 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Lv3. Aksesibilitas / Transportasi	Lv3.1.1. Perbaikan konektivitas dan transportasi publik yang mempertimbangkan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat	Lv3.1.1.P.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	19.1. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time) 19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Area Traffic Control System (ATCS) dan Control Room, e-Parking, e-Ticketing Angkutan Umum dan Smart LPJU di Kabupaten Cilacap											APBD	DISHUB, BPPKAD, BAPPEDA, DPUPR, POLRESTA CILACAP
		1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota														
		1.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			2	56	1	58	1	60	1	63	1	66		
		2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio Perlengkapan Jalan														
		2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia			76,20 %	1.765	76,20 %	1.853	76,20 %	1.945	76,20 %	2.042	76,20 %	2.144		

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Peta jalan yang tercantum dalam tabel di atas untuk dimensi *Smart Society* adalah suatu langkah komprehensif dan rinci yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun *Smart Society* di Kabupaten Cilacap. Semua program dan kegiatan dalam rencana aksi tersebut secara terperinci merinci aspek pendidikan dan interaksi masyarakat. Dengan penyusunan rencana aksi yang cermat seperti ini, diharapkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Cilacap akan lebih tepat sasaran dalam upaya mencapai dimensi *Smart Society* yang diinginkan. Kita harus mengingat bahwa terwujudnya sebuah kota cerdas tidak mungkin tercapai tanpa keberadaan masyarakat yang cerdas.

4.6. Smart Environment

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu adanya peta jalan untuk dimensi *Smart Environment* sebagai salah satu komponen dari *Smart City*. Tabel berikut memaparkan peta jalan pada dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap dalam rangka mewujudkan kota cerdas yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan

Tabel 117 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Dimensi Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)	En1.1.1.P.1. Pengelolaan sumber daya air	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real- time) per 100.000 populasi	1. RISDA (Ruang Informasi Sumber Daya Air) sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air 2. ngOPi Disit di warung jamu (Pengelolaan Laporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dengan Sistem Digital) untuk memuat data masa tanam, petak tersier, luas tanam, kebutuhan air, ketersediaan air dan realisasi pembagian serta pemberian airnya												
		1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten/ kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan pengembang an dan pengelolaan sistem irigasi pada tahun														
		1.1. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi irigasi dan rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	2	315	5	1.000	5	1.050	5	1.102	5	1.157	DAU	Dinas PSDA	
				En1.1.1.P.2. Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulkan yang dikirim ke	SIAP MASK BRO (MengataSI Abrasi Pantai Menggunakan Anyaman Sabut										

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)	Kelapa / Bronjong)												
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana														
		1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi														
			1.1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	2.688	2	2.822	2	2.963	2	3.111	2		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
			Pasca Bencana (R3P)														
		En1.1.1.P.3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukuran indeks kualitas air	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali 22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	"Laboratorium Lingkungan" 1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium lingkungan Cilacap 2. Penambahan Uji parameter tanah dan uji limbah bahan berbahaya dan beracun"												
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusunnya dokumen pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup														
		1.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan			1.900 dok	1.050	2.000 dok	1.070	2.100 dok	1.093	2.100 dok	1.147	2.100 dok	1.204	APBD	Dinas Lingkung an Hidup; Lembaga Akreditas i KAN

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		En1.1.1.P.4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukuran indeks kualitas air	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real- time) per 100.000 populasi	"Mengembang kan ONLIMO (Online Monitoring) Pemantauan Air Sungai 1. Menambah lokasi titik stasiun onlimo 2.Pengembang an aplikasi monitoring connect dengan mobile phone 3.Memasukan ke monitoring sistem integrasi dengan air quality monitoring"												
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusunnya dokumen pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup														
		1.1. Koordinasi,Sinkroni sasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air , udara, dan laut			23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	1	1.432	1	1.443	1	1.453	1	1.525	1	1.601	APBD
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1.1. Mengembangk an sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swasta	En2.1.1.P.1. Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu	“TPST RDF (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Refused Derived Fuel) 1.Replikasi di lokasi lain												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut dan diolah														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
	dan masyarakat	1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota 20.2. Total sampah tahunan kota yang dikumpulkan yang dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)"	2.Pengembang an sistem otomasi pengolahan RDF kedepannya 3.Skala Mikro (Rumah Tangga) yang mampu mengolah sampah menjadi barang setengah jadi (ukuran dan kadar air menurun) sebelum masuk ke pengolahan RDF”	580 ton	7.263	590 ton	7.500	590 ton	7.875	590 ton	8.268	590 ton	8.681	APBD	DLH Cilacap; PT.Solusi bangun Indonesia
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1. Mengembangk an sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak swastamenyiap kan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan	En3.1.1.P.1. Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Output Pengolahan Sampah di TPST RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut dan diolah														
		1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota			580 ton	7.263	590 ton	7.500	600 ton	7.863	600 ton	8.256	600 ton	8.668	APBD	DLH Cilacap; PT.Solusi bangun Indonesia

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an	Target	Anggar an		
		Kabupaten/Kota															

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Tabel 118 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment Kabupaten Cilacap

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1.1. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk manajemen lingkungan (ruang terbuka hijau, sempadan sungai dan pantai, serta polusi)	En1.1.1.P.4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukuran indeks kualitas air	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	"Mengembangkan ONLIMO (Online Monitoring) Pemantauan Air Sungai 1. Menambah lokasi titik stasiun onlimo 2. Pengembangan aplikasi monitoring connect dengan mobile phone 3. Memasukan ke monitoring sistem integrasi dengan air quality monitoring"												
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Tersusunnya dokumen pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup														
		1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut			23.3. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	1	1.685	1	1.769	1	1.853	1	1.945	1	2.042	APBD
En3 Tata Kelola Energi	En3.1.1. Mengembangkan sistem tata kelola persampahan dan limbah melalui kerja sama dengan pihak	En3.1.1.P.1. Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Output Pengolahan Sampah di TPST RDF sebagai pengganti bahan bakar batu bara												
		1. Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut dan diolah														

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi Smart City	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	swastamenyiapkan infrastruktur untuk memanfaatkan energi baru terbarukan	1.1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota			580 ton	9.101	590 ton	9.556	600 ton	10.033	600 ton	10.534	600 ton	11.060	APBD	DLH Cilacap; PT.Solusi bangun Indonesia

*Anggaran pemerintah daerah yang dituliskan pada seluruh tabel hanya melekat pada sub-kegiatan. Anggaran pada program dan kegiatan tidak dituliskan karena tidak semua sub-kegiatan pada program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan daerah relevan dengan pokok bahasan pada buku ini yaitu pembangunan Smart City.

Sumber: Analisis Tim Pembimbing dan Hasil Bimtek 2, 2023

Untuk mencapai visi pembangunan dalam dimensi *Smart Environment*, diperlukan penyusunan peta jalan yang rinci untuk panduan implementasi. Tabel di atas menguraikan rencana aksi dan program seperti manajemen sampah, mitigasi bencana, dan pengawasan perizinan lingkungan. Rencana aksi ini harus dijalankan sesuai dengan panduan yang telah diatur, sehingga dapat mengukur dampaknya dengan tepat dan menyesuaikan intervensi yang diperlukan guna memastikan pencapaian tujuan *Smart Environment* di Kabupaten Cilacap.

BAB V. PENUTUP

Buku *Executive Summary* ini menjelaskan secara singkat mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan Cilacap *Smart City*. Visi dan misi smart city Kabupaten Cilacap, yang diadaptasi dari visi dan misi pembangunan daerah sesuai RPD Kabupaten Cilacap 2023-2026, menjadi dasar dalam perencanaan masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Buku *Executive Summary* ini menguraikan arah pengembangan *Smart City* untuk menerapkan inovasi cerdas pada enam dimensi *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Penjelasan mengenai rincian inovasi, termasuk program-program yang mencakup inovasi tersebut, durasi pelaksanaan, serta keterlibatan OPD dan instansi lain dalam pelaksanaannya, dapat ditemukan dalam peta jalan yang disajikan di bagian akhir dokumen ini.

Dokumen ketiga dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap ini diharapkan akan menjadi pedoman umum untuk membangun *Smart City* di Kabupaten Cilacap, terutama bagi pemimpin daerah yang sedang menjabat. Melalui dokumen ini, diharapkan pejabat daerah dapat memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan pembangunan *Smart City*, sehingga Cilacap *Smart City* dapat tercapai secara kolektif untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan sinergitas yang baik antara masyarakat dengan pemangku kekuasaan, maka upaya pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dapat terwujud.

Dalam penutup ini, mari kita sambut masa depan yang cerah bagi Kabupaten Cilacap sebagai *Smart City* yang memberdayakan masyarakat, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Dengan semangat yang tinggi dan kerja sama yang erat, kita akan mengubah visi menjadi kenyataan dan membawa Cilacap menjadi contoh yang inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap. (2023). RKP Kabupaten Cilacap 2023. Pemerintah Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah
- Smart City Maturity. 2019. SNI ISO 37122: 2019



Buku 3 :

Quick Wins Smart City Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah

2023



BAB 1

VISI DAN PRIORITAS RPJMD

BAB 1. VISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN CILACAP

Sebagai sebuah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Cilacap tentu memiliki visi, misi, dan prioritas pembangunan agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta terarah. Pemahaman mengenai visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah pada Kabupaten Cilacap penting untuk dilakukan dalam proses pengembangan *Smart City*, agar terjadi harmoni antara upaya transformasi Cilacap menuju *Smart City* dengan dasar-dasar arah pembangunan daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menangani hal tersebut, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap dengan merujuk pada dokumen perencanaan daerah lainnya yaitu RPJMD dan RPD.

1.3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cilacap

Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap adalah proyek besar jangka panjang yang membutuhkan keseriusan dalam melakukannya. Perlu dicatat bahwa proyek *Smart City* ini bukanlah program yang dapat hadir begitu saja melainkan perlu untuk tetap memperhatikan arah pembangunan daerah sebelum Kabupaten Cilacap diputuskan untuk berkomitmen dalam pembangunan *Smart City*. Selain itu, beberapa aspek, arah, dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan sebelumnya pasti memiliki irisan atau bahkan mendukung tiap dimensi yang ada pada konsep *Smart City*. Inilah yang menjadi basis rasionalitas bahwa segenap upaya pembangunan *Smart City* harus sejalan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

RPJMD menjadi dokumen penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan *masterplan Smart City*. Hal ini dikarenakan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 terdapat visi misi pembangunan yang mana visi misi ini harus dijadikan landasan dalam penyusunan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Cilacap. Keselarasan dokumen antara *masterplan Smart City* dengan dokumen RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan tujuan yang ada di dalamnya. Meskipun upaya pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap baru dicanangkan setelah RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 selesai, namun dokumen RPJMD tersebut tetap menggambarkan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Cilacap yang nantinya akan dibangun menjadi *Smart City*.

Visi Kabupaten Cilacap yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022 sebenarnya juga merujuk pada Visi RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 yaitu **“Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”**. Visi ini menggambarkan keinginan dan amanat masyarakat selama 20 tahun kedepan untuk mewujudkan Kabupaten Cilacap yang menjunjung tinggi nilai budaya dan mengedepankan kesejahteraan masyarakatnya. Visi RPJPD ini kemudian dijadikan bahan bersama visi bupati dan wakil bupati terpilih untuk mencanangkan visi misi RPJMD tahun 2017-2022. Visi RPJMD tersebut yaitu:

“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”

“Bangga Mbangun Desa”

Visi diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui pembangunan merata di seluruh kecamatan. Visi ini juga berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan desa yang berfokus pada empat aspek penting, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta lingkungan sosial dan budaya.

Sejahtera, merujuk pada upaya Kabupaten Cilacap selama lima tahun sejak RPJMD ini berlaku untuk mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Kesejahteraan ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan nilai IPM, IPG, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Merata, mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan semua wilayah secara berkeadilan. Pembangunan yang merata dapat dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk dan semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah sampai ke pelosok desa dan kecamatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Bangga Mbangun Desa, merupakan strategi pembangunan dalam rangka mencapai janji bupati dan wakil bupati terpilih yaitu “Ayo Kerja Mbangun Desa Menuju Cilacap Sejahtera”. Pengertian ayo kerja adalah suatu ajakan dan upaya yang sungguh sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran dan aset dari semua komponen pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan pembangunan secara utuh (kafah) dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Ayo Kerja Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi dasar dan landasan dalam mewujudkan “Cilacap to be Singapore of Java”.

Kemudian, supaya visi dapat terwujud dalam konteks perencanaan dibutuhkan misi sebagai rujukan yang memuat serangkaian arah strategi dan kebijakan yang konkret. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dirumuskan pula lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga

Misi ini menggambarkan hasrat Kabupaten Cilacap untuk mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Pada misi ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap menaruh perhatian terhadap optimalisasi kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan nilai profesionalitas dan prinsip *good governance* dan *clean government*. Melalui hal ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Cilacap lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan lebih responsif dengan kebutuhan masyarakatnya.

3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Misi ini adalah kelanjutan dari misi sebelumnya dimana setelah mewujudkan pemerintahan yang baik, Kabupaten Cilacap berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup, dan segala aspek kehidupan lainnya.

4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional

Terkait dengan sektor ekonomi, Kabupaten Cilacap hendak mengembangkan perekonomian yang berbasis pada potensi lokal dan ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kelima misi diatas menjadi penyokong dari visi dalam RJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dan menjadi pijakan dalam menyusun visi dan misi *Smart City* Kabupaten Cilacap nantinya. Ini merupakan upaya untuk melakukan sinkronisasi antara upaya pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Perlu dicatat, mengingat bahwa RPJMD tersebut sudah selesai masa berlakunya ketika pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap dicanangkan, maka dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.

1.4. Pemetaan Misi dan Sasaran Terhadap Dimensi *Smart City*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2023 penerapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode 2023-2026 telah diinisiasi oleh Kabupaten Cilacap sebagai substitusi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah berakhir periode berlakunya pada tahun 2022. Melalui visi dan misi RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dan disesuaikan dengan dokumen terbaru yaitu RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026, maka misi dan sasaran pembangunan dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam membantun *Smart City* Kabupaten Cilacap. Misi yang termuat dalam RPJMD memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Setiap tujuan tersebut juga memiliki indikator tujuan. Tidak hanya memiliki tujuan, misi juga memiliki sasaran beserta indikator sasaran. Semua itu kemudian dapat dilakukan sinkronisasi dengan dimensi-dimensi yang ada pada konsep *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Pemetaan misi, tujuan, dan sasaran Daerah Kabupaten Cilacap terhadap dimensi *Smart City* krusial untuk dilakukan sebagai landasan untuk pembahasan *quick wins* yang menjadi fokus utama dalam buku ini. Untuk itu, berikut merupakan pemetaan misi dan sasaran RPD yang diklasifikasikan berdasarkan enam dimensi *Smart City*.

Tabel 119 Pemetaan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dengan Dimensi *Smart City*

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Berkaitan dengan Misi 2 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government”	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	√					
					Maturitas SPI terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	√					
					IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	√		√			
				Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	√					
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	√					
				Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√					
					Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	√					
					Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	√					
				Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	√					
2	Berkaitan dengan Misi 3 “Mewujudkan	Meningkatkan stabilitas	Angka kriminalitas	Menurunnya gangguan keamanan di wilayah	Kasus konflik sosial					√	

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
	demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”	keamanan ketentraman wilayah			Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten					√	
3	Berkaitan dengan Misi 4 “Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional”; dan Misi 1 “Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga”	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah					√	
					Rata rata Lama Sekolah					√	
				Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup				√	√	
				Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender					√	
				Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan			√			
					Tingkat Pengangguran Terbuka			√			
4	Berkaitan dengan Misi 4 “Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional”	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas dan tanpa migas) ; inflasi	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB		√	√			
				Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB		√	√			
				Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	Nilai investasi			√			
				Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB			√			

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
				Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		√	√			
5	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan				√		
				Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		√		√		
				Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)				√		√
				Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan			√	√		
			Indek Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia						√
			Vc Rasio	Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan				√		
6	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri					√	
7	Berkaitan dengan Misi 5 “Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Penurunan Gas Rumah Kaca	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						√

No	Misi*	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
	pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”										
8	Berkaitan dengan Misi 3 “Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”	Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana						√

*Dokumen sudah tidak berlaku dan digantikan dengan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembimbing, 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berasal dari dokumen RPJMD dan RPD Kabupaten Cilacap menjadi menjadi acuan perencanaan dan implementasi program pendukung *Smart City*. Tabel diatas menjelaskan sinkronisasi antara misi RPJMD, tujuan, sasaran, beserta indikatornya terhadap dimensi dalam *Smart City*. Keseluruhan dari semua itu harus sesuai sehingga pembangunan *Smart City* di Kabupaten cilacap bisa koheren. Setiap aksi dan kebijakan yang diambil dalam *Smart City* merefleksikan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, memastikan bahwa teknologi dan inovasi yang diaplikasikan tetap berakar pada kebutuhan dan aspirasi lokal masyarakat



BAB 2

VISI DAN SASARAN SMART CITY

BAB 2. VISI DAN SASARAN SMART CITY KABUPATEN CILACAP

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, visi, misi dan sasaran dalam upaya pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap harus berpijak pada dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dengan pembacaan cermat terhadap dokumen tersebut, serta diskusi dan pembahasan dengan aktor pemerintah terkait maka visi, misi, dan sasaran *Smart City* Kabupaten Cilacap dapat dirumuskan. Untuk itu, pada bab dua ini akan berfokus pada visi dan misi *Smart City* beserta sasaran jangka pendek dari tiap dimensi *Smart City*.

2.3. Visi Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap

Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mengembangkan sebuah kota cerdas. Seiring dengan tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap yang mencantumkan visi dan misi kepala daerah, Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan hasil diskusi bersama oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat yang telah terjadi selama proses penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Cilacap. Selain itu, sebagai pengganti RPJMD, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi pedoman utama dalam merumuskan Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Cilacap, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari perwakilan OPD. Dalam konteks RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026, beberapa isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut:

13. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan (*governance*): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel.
14. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.
15. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat
16. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal
17. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup
18. Pengelolaan dan penanganan bencana yang belum optimal

Selanjutnya, berangkat dari keenam isu strategi tersebut, dokumen RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 juga mencanangkan tujuan pokok pembangunan yang meliputi:

17. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
18. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunkan gangguan keamanan di wilayah
19. Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat
20. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal
21. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
22. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan
23. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
24. Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan

Dengan mempertimbangkan isu strategis dan tujuan pokok pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPD Kabupaten Cilacap, maka visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap terwujud sebagai berikut:

**“MENUJU CILACAP KOTA CERDAS YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING MELALUI
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI”**

Cilacap yang sehat, merupakan harapan Kabupaten Cilacap untuk mempunyai tingkat kesehatan yang tinggi baik dari segi kesehatan fisik maupun mental masyarakatnya.

Cilacap Sejahtera, adalah harapan Kabupaten Cilacap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak.

Cilacap Berdaya Saing, merujuk pada harapan Kabupaten Cilacap untuk memiliki kemampuan kompetitif dalam bersaing di skala lokal, nasional, hingga internasional. Daya saing ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang kompetitif serta dapat meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar daerah.

Dukungan Teknologi Informasi, merupakan harapan Kabupaten Cilacap untuk mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Cilacap. Optimalisasi dukungan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, Visi *Smart City* Kabupaten Cilacap hanya dapat diwujudkan dengan adanya Misi *Smart City* yang mendukungnya. Berikut merupakan misi pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap:

7. Mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
8. Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi daerah dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan;
9. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi teknologi informasi.

Ketiga misi diatas menjadi pilar atas visi utama yang dicanangkan dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Misi pertama, mencerminkan tujuan Kabupaten Cilacap untuk mencetak SDM yang tidak hanya produktif dan inovatif tapi juga sehat. Misi kedua, menggambarkan semangat Kabupaten Cilacap untuk menciptakan iklim ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah sembari tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terakhir, misi tiga merepresentasikan hasrat Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi mutakhir. Ketiga misi ini saling terkait satu sama lain menjadi satu kesatuan yang harus dicapai bila ingin mewujudkan visi *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Setelah memaparkan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Cilacap, pada bagian selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci sasaran jangka pendek pada setiap dimensi *Smart City*. Hal ini penting untuk menjembatani rasionalitas dari *quick wins* yang akan menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

2.4. Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Dalam upaya pembangunan dimensi *Smart Governance* pada *Smart City* Kabupaten Cilacap, perlu adanya sasaran jangka pendek yang harus diraih. Untuk itu, sasaran jangka pendek dimensi *Smart Governance* disusun dengan memperhatikan tiga sub dimensi yang dimiliki oleh *Smart Governance*. Untuk lebih jelasnya terkait sasaran pada ketiga sub dimensi *Smart Governance* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 120 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Sub Dimensi	Sasaran
G1 Layanan Publik	G1.1. Tersedianya layanan pulik dalam satu pintu yang terpadu dan terintegrasi
G2 Manajemen Birokrasi	G2.1. Manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi)
G3 Efektivitas Kebijakan	G3.1. Pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Pada sub dimensi layanan publik sasaran jangka pendek yang hendak dicapai adalah tersedianya layanan publik dalam satu pintu yang terpadu sekaligus terintegrasi. Sasaran ini adalah upaya serius dari pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan publik. Melalui layanan publik satu pintu, masyarakat tidak perlu lagi kebingungan untuk mengakses layanan publik lantaran seluruh layanan sudah tersedia dalam satu pintu yang sama. Tentu saja ini adalah sebuah gebrakan besar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal layanan publik.

Kedua, untuk sub dimensi manajemen birokrasi sasaran jangka pendeknya adalah mewujudkan manajemen birokrasi yang efisien dengan menekankan pada aspek keterbukaan (transparansi). Ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memutus rantai birokrasi yang selama ini mengekang jalannya pemerintah agar proses birokrasi dapat lebih efisien. Efisiensi birokrasi ini tidak hanya menekankan pada aspek kecepatan tetapi juga memperhatikan aspek transparansi. Upaya transparansi ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat bahwa birokrasi berjalan dengan baik tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme.

Terakhir, untuk sub dimensi efektivitas kebijakan sasarnya adalah pengambilan kebijakan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan pihak sebagai pertimbangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan publik adalah hasil upaya pemerintah untuk mengakomodasi setiap kepentingan dari kelompok agar menghasilkan utilitas terbaik bagi publik keseluruhan. Sehingga, sasaran pada sub dimensi ini adalah sasaran yang tepat agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat memuaskan banyak pihak sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

2.5. Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Sasaran jangka pendek untuk dimensi *Smart Branding* perlu untuk disusun lantaran dimensi ini berkaitan langsung terkait bagaimana Kabupaten Cilacap dapat dikenal dan memiliki ciri khas dibandingkan kabupaten lainnya. Untuk itu, pada tabel dibawah ini akan diuraikan secara detail sasaran pada setiap sub dimensi *Smart Branding*.

Tabel 121 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Sub Dimensi	Sasaran
B1 Pariwisata/ Budaya	B1.1. Tersedia sistem pengelolaan pariwisata yang baik
	B1.2. Meningkatnya pengunjung wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian
	B1.3. Menjadi daerah tujuan wisata bagi turis domestik, regional, maupun internasional
	B1.4. Tersedia publikasi maupun digitalisasi terkait pariwisata
B2 Daya Saing Daerah	B2.1. Memiliki produk lokal yang baik dan berkualitas
	B2.2. Meningkatnya ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif) yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat
	B2.3. Memiliki ciri khas dalam seni maupun budaya
B3 Wajah (Tampilan) Kota	B3.1. Terwujudnya pengelolaan maupun penertiban pada titik-titik wajah kota tertentu
	B3.2. Pembaharuan wajah Destinasi Wisata yang lebih tertata dan atraktif.
	B3.3. Terwujudnya penataan wajah kota dengan mengikuti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Pada sub dimensi pertama yaitu pariwisata atau budaya ada tiga sasaran jangka pendek yang hendak dicapai. Ketiga sasaran ini memiliki benang merah yang sama yaitu untuk menciptakan kondisi pariwisata di Kabupaten Cilacap yang mampu menjadi potensi perekonomian dengan menarik turis dan melalui pengelolaan yang baik. Meskipun memang Kabupaten Cilacap bisa dibilang bukanlah daerah yang bergantung pada sektor pariwisata, namun ketiga sasaran ini tetap penting dalam rangka *branding* Kabupaten Cilacap agar dikenal oleh semua orang sebagai daerah dengan wisata yang menarik.

Kedua, sasaran jangka pendek untuk sub dimensi daya saing daerah memiliki tiga sasaran. Ketiga sasaran ini secara umum menggambarkan target Kabupaten Cilacap untuk memanfaatkan potensi daerahnya khususnya di bidang ekonomi kreatif menjadi penopang perekonomian sekaligus menjadi *branding* dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Cilacap itu sendiri. Hal ini penting, mengingat pada era modern ini aktivitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh aktivitas eksploitasi sumber daya fisik saja tetapi juga dapat memanfaatkan kreativitas dan akal budi manusia melalui apa yang disebut dengan ekonomi kreatif.

Ketiga, untuk sub dimensi wajah (tampilan) kota memiliki tiga sasaran jangka pendek. Ketiga sasaran tersebut ditujukan untuk mewujudkan wajah kota Cilacap yang ikonik namun tetap mengikuti aturan RDTR. Ini penting, karena yang ditonjolkan tidak hanya aspek estetika saja tetapi juga aspek pengalaman yang dirasakan pengunjung serta aspek perencanaan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2.6. Sasaran Jangka Pendek Smart Economy

Pada dimensi *Smart Economy*, ditetapkan sasaran jangka pendek sesuai dengan sub dimensi yang ada. Sasaran jangka pendek ini dirumuskan dalam rangka memastikan upaya pembangunan perekonomian daerah berada di jalur yang sesuai dengan semangat pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Berikut adalah tabel yang memaparkan sasaran tersebut.

Tabel 122 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Sub Dimensi	Sasaran

Sub Dimensi	Sasaran
Ec1 Ekosistem Industri	Ec1.1. Mewujudkan ekosistem bisnis kuliner maupun pariwisata
	Ec1.2. Mewujudkan pemberdayaan pelaku industri dan usaha kecil sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas
	Ec1.3. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Cilacap (KIC)
	Ec1.4. Memperluas jejaring pemasaran produk-produk lokal
	Ec1.5. Mewujudkan pemberdayaan pelaku UMKM melalui jaringan pemasaran <i>online (marketplace)</i>
Ec2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec2.1. Mewujudkan modal kerja sama secara pentahelix (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media)
	Ec2.2. Peningkatan kompetensi angkatan kerja
Ec3 Transaksi Keuangan	Ec3.1. Terwujudnya sistem pembayaran non-tunai
	Ec3.2. Pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Sasaran jangka pendek untuk sub dimensi ekosistem industri merepresentasikan sektor industri di Kabupaten Cilacap yang selama ini memang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sasaran-sasaran pada sub dimensi ini semuanya mengarah ke satu hal yang sama yaitu peningkatan produktivitas dan kualitas sektor industri di Kabupaten Cilacap yang mana sektor ini memang mampu menciptakan lapangan kerja besar dan layak serta menyumbang pendapatan daerah melalui pajaknya yang besar.

Sasaran berikutnya pada sub dimensi kesejahteraan masyarakat memiliki dua sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas para aktor dalam pentahelix serta peningkatan kompetensi angkatan kerja. Sasaran tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai sentral dari setiap pembangunan ekonomi yang dijalankan.

Terakhir, pada sub dimensi transaksi keuangan kedua sasaran yang dicanangkan merupakan satu kesatuan dalam rangka menciptakan iklim pengelolaan sistem keuangan dan sistem pembayaran non tunai mengikuti arah perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa *cashless society* saat ini telah menjadi *trend* perkembangan ekonomi mutakhir karena beragam manfaat yang dibawakannya. Untuk itu, sebagaimana yang ada pada *Smart Economy* untuk menciptakan iklim ekonomi yang sejalan dengan kemajuan zaman maka sasaran pada sub dimensi ini sudahlah tepat.

2.7. Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Pada dimensi *Smart Living* sebagaimana pada dimensi lainnya perlu ditetapkan sasaran-sasaran guna memastikan arah pengembangan *Smart Living* di Kabupaten Cilacap ada pada koridor yang sesuai. Untuk itu, pada tabel dibawah ini akan diuraikan terkait sasaran pada setiap dimensi dalam *Smart Living*.

Tabel 123 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Sub Dimensi	Sasaran
Lv1 Harmonisasi Tata Ruang	Lv1.1. Optimalisasi ruang terbuka hijau
Lv2 Kualitas Kesehatan	Lv2.1. Pencegahan terhadap stunting
	Lv2.2. Menurunkan tingkat Penyakit Menular Seksual (PMS)

Sub Dimensi	Sasaran
	Lv2.3. Meningkatnya pemenuhan gizi terhadap masyarakat khususnya anak-anak
Lv3 Aksesibilitas/Transportasi	Lv3.1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap transportasi umum
	Lv3.2. Terwujudnya pengelolaan sistem parkir dan pengguna jalan

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Sasaran jangka pendek untuk sub dimensi harmonisasi tata ruang adalah optimalisasi ruang terbuka hijau. Sasaran ini jelas menggambarkan keseriusan Kabupaten Cilacap dalam melakukan harmonisasi tata ruang tidak semata tentang estetika namun juga memperhatikan aspek kelestarian alam. Ini penting dalam mewujudkan tata kota yang memberikan kenyamanan warganya melalui kehadiran ruang terbuka hijau sebagai sumber oksigen ditengah kota.

Sasaran kedua pada sub dimensi kualitas kesehatan memiliki tiga sasaran. Ketiga sasaran ini memiliki satu tujuan yang sama untuk menciptakan kualitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat mulai dari ketika mereka masih balita, anak-anak, hingga dewasa. Bagaimanapun kenyamanan sebuah kota sangat ditentukan dari seberapa kota tersebut dapat memberikan kesehatan yang layak bagi warganya.

Sasaran terakhir pada sub dimensi aksesibilitas atau transportasi memiliki dua sasaran jangka pendek yang menggambarkan upaya Kabupaten Cilacap untuk menghadirkan jaringan transportasi umum yang memadai untuk warganya dan iklim tata kota yang ramah bagi pejalan kaki. Hal ini penting karena transportasi publik yang memadai dan kondisi kota yang ramah pejalan kaki sangat menentukan tingkat kenyamanan warga kota dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka.

2.8. Sasaran Jangka Pendek Smart Society

Kota yang cerdas membutuhkan masyarakat yang cerdas pula. Untuk itu, pada dimensi *Smart Society* perlu dirumuskan sasaran jangka pendek guna mewujudkan kondisi kota yang memfasilitasi masyarakat untuk menjadi warga yang cerdas. Berikut ini adalah sasaran jangka pendek dari setiap dimensi *Smart Society* yang dihadirkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 124 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

Sub Dimensi	Sasaran
S1 Interaksi Masyarakat	S1.1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat secara berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya
	S1.2. Meningkatkan semangat gotong royong dan mengembangkan komunitas masyarakat
S2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S2.1. Mewujudkan ekosistem belajar terutama dalam Pendidikan
	S2.2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat
S3 Keselamatan Masyarakat	S3.1. Mewujudkan sistem yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat
	S3.2. Terwujudnya ketertiban dan pelanggaran lalu lintas

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Pada sub dimensi interaksi masyarakat, ada dua sasaran jangka pendek yang dirumuskan. Kedua sasaran tersebut sama-sama mengarah pada terwujudnya interaksi antar masyarakat yang sehat, gotong royong, dan partisipatif. Sasaran ini penting agar masyarakat di Kabupaten Cilacap memiliki tingkat kohesi sosial yang kuat.

Selanjutnya, pada sub dimensi ekosistem belajar atau pendidikan, sasaran jangka pendek yang dicanangkan ada dua dan secara garis besar ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan iklim literasi dan ekosistem pembelajaran bagi warga Cilacap. Kedua sasaran pada sub dimensi ini penting sebagai ujung tombak agar masyarakat Cilacap dapat mengenyam pendidikan dengan baik sehingga dapat menjadi SDM yang unggul.

Terakhir, untuk sub dimensi keselamatan masyarakat sasaran yang dicanangkan ditujukan untuk memastikan kehidupan masyarakat di Kabupaten Cilacap dapat aman, tenteram dan tertib. Melalui situasi daerah yang kondusif, masyarakat dapat lebih leluasa dalam berinteraksi dan berfokus pada pengembangan diri masing-masing. Dengan sasaran ini juga, kehidupan masyarakat dapat lebih teratur dan tentu saja berdampak positif terhadap pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

2.9. Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Smart City tidak hanya berfokus pada pengembangan tata kota yang memanfaatkan teknologi tetapi juga menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Isu lingkungan pada masa modern ini memang mendapatkan banyak perhatian mengingat maraknya praktik kerusakan lingkungan dalam pembangunan. Untuk itu, pada tabel dibawah ini akan diterangkan terkait sasaran jangka pendek pada dimensi *Smart Environment*.

Tabel 125 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Sub Dimensi	Sasaran
En1 Proteksi Lingkungan	En1.1. Terwujudnya pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan indeks risiko bencana (IRBI) Kab. Cilacap
En2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En2.1. Terwujudnya tata kelola persampahan
En3 Tata Kelola Energi	En3.1. Optimalisasi penggunaan energi terbarukan dengan solar cell (Implementasi di kantor Pertamina)

Sumber: Hasil Bimtek 2, 2023

Pada sub dimensi proteksi lingkungan, sasaran jangka pendek yang ditetapkan adalah tentang pengelolaan kebencanaan melalui pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi. Sasaran ini penting dilakukan agar *Smart City* Kabupaten Cilacap dapat lebih siap dengan risiko bencana yang mengintai. Selanjutnya, untuk sub dimensi pengelolaan sampah dan limbah sasaran yang ditetapkan adalah mewujudkan tata kelola persampahan. Mengingat bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti menghasilkan sampah, maka sasaran ini sangat penting agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya untuk sub dimensi tata kelola energi sasaran berupa optimalisasi penggunaan energi terbarukan adalah bentuk usaha dari Kabupaten Cilacap untuk melakukan transformasi energi ke arah energi terbarukan. Transformasi energi terbarukan krusial untuk dilakukan dalam perkembangan sebuah *Smart City* sebagai bentuk komitmen untuk menjaga bumi.



BAB 3

PROFIL QUICK WINS
SMART CITY

BAB 3. PROFIL QUICK WINS SMART CITY

Pada dasarnya implementasi dari *Smart City* membutuhkan waktu yang relatif panjang. Meski demikian, ada cara yang dapat dilakukan untuk dapat dengan waktu yang relatif lebih cepat merasakan buah inovasi dari pengimplementasian *Smart City*. Hal tersebut adalah dengan memilih kebijakan atau inovasi untuk dijadikan sebagai *quick wins*. Quickwins merujuk pada penerapan inovatif dalam konsep *Smart City* yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, serta memberikan dampak yang cepat kepada masyarakat. Inti dari quickwin adalah kecepatan dalam implementasi dan pengaruh yang dihasilkannya. Dari sudut pandang psikologis, kegiatan yang dapat dijalankan dengan cepat mampu memberikan impresi tentang kemudahan, sementara cepatnya hasil yang diraih dapat berguna untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap manfaat dari konsep *Smart City*.

Pada penyusunan *masterplan* pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap, *quick wins* dipilih dari program atau inovasi kebijakan yang termasuk dalam kategori program jangka pendek. Hal ini dilakukan karena aspek kecepatan akselerasi dampak yang dihasilkan dari program atau inovasi kebijakan tersebut adalah yang terpenting. Selain itu, pemilihan program yang dijadikan *quick wins* juga mempertimbangkan aspek ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kelembagaan, dan lainnya. Dengan begitu, program yang dipilih sebagai *quick wins* cenderung adalah program atau kebijakan yang sudah atau sedang dijalankan, atau setidaknya sudah terjamin pelaksanaannya (sudah dianggarkan). Tentu saja, *quick wins* tersebut dipilih dengan tetap mempertimbangkan relevansinya dengan konsep *Smart City* serta mewakili dari setiap dimensi *Smart City* yang ada. Kabupaten Cilacap menetapkan pada tiap dimensi satu buah program yang dijadikan sebagai *quick wins*. Profil untuk tiap *quick wins* dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.6. Quick Wins Smart Governance

Berdasarkan rencana aksi dan peta jalan yang telah dibahas pada buku sebelumnya, dimensi *Smart Governance* memilih satu dari sekian banyak program atau inovasi untuk dijadikan *quick wins*. Pemilihan program yang dijadikan *quick wins* mempertimbangkan urgensi dan kesiapan daerah baik dari aspek sumber daya dan kelembagaannya. Berikut adalah program yang dijadikan *quick wins* pada dimensi *Smart Governance*:

Tabel 126 Profil *quick wins* dimensi *Smart Governance*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA (DESA 360)
2. Penjelasan singkat	Pembangunan Sistem Informasi Desa 360 yang terintegrasi dengan berbagai layanan dan sektor publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era modern. Pembuatan program ini didasarkan atas latar belakang untuk meningkatkan akses terhadap data dan informasi desa, efisiensi layanan publik desa, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, dan terakhir untuk pemberdayaan masyarakat. Desa 360 merupakan program/sistem aplikasi yang berisi tentang :

Aspek	Penjelasan
	- kios pelayanan desa, lapak UMKM desa, - arsip dokumen, galeri kegiatan, - pengaduan, ruang aspirasi, status IDM, - produk hukum, pelayanan publik dan profil desa.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	a. kode status : tahap perencanaan b. presentase selesai : 0 persen c. penjelasan : inovasi baru yang akan dilaksanakan untuk tahun depan sehingga presentasinya masih nol persen
4. Manfaat dari inovasi	- Memberikan informasi seluruh layanan publik yang ada di desa - Memberikan ruang promosi untuk UMKM desa - Memberikan informasi untuk calon investor - Memudahkan pemerintah daerah untuk memonitor/mengontrol seluruh kegiatan desa
5. Keunikan / kreativitas	Inovasi baru untuk pelayanan masyarakat desa yang langsung digunakan oleh seluruh masyarakat desa,
6. Kemitraan	- Masyarakat desa Berperan sebagai pelaku UMKM yang akan dikembangkan usahanya dalam program ini. Progres kemitraan 25% - DPMPTSP Berperan sebagai pihak yang akan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital). Progres kemitraan 25% - Dinas kominfo Akan berperan dalam pembuatan aplikasi yang terintegrasi pada berbagai aplikasi. Progres kemitraan 50% - Dispermades Sebagai pihak yang mendorong penggunaan aplikasi yang dilaksanakan Pemdes, BASO, Prokesdel, Epdeskel. Progres kemitraan 50% - DPKUKM Berperan dalam pengintegrasian program Desa 360 dengan program CIBLON (Cilacap Belanja Online). Progres kemitraan 25% - Dinkes Berperan dalam pengintegrasian dengan program penanganan Stunting yaitu program URATNADI. Progres kemitraan 25% - Dinsos Berperan dalam pengintegrasian dengan program Mari Percaya, SIKB dan GEMBUS. Progres kemitraan 25% - Disdukcapil Berperan dalam pengintegrasian dengan program Loker Desa (pelayanan Adminduk yang ada di Aplikasi Dolan Teluk Penyus). Progres kemitraan 25% - Dinas Arpus Berperan dalam pengintegrasian dengan program SRIKANDI. Progres kemitraan 25%
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Berpotensi untuk dikembangkan dan digunakan untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Cilacap
8. Strategi Menjaga	Uji coba untuk 1 desa per-kecamatan untuk menjadi percontohan

Aspek	Penjelasan
Keberlangsungan	dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihanannya • Uji coba di tahun pertama 50 Desa • pengawalan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan • Menetapkan kebijakan dan payung hukum
9. Sumber daya yang digunakan	• SDM administrator/operator tingkat desa yang handal serta koordinasi antar unit • koneksi internet yang bagus • PC/laptop dengan spek yang tinggi
10. Analisa Risiko	Kurangnya kemampuan dan kreativitas SDM pengelola website sehingga berdampak pada operasional program

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Profil *quick wins* untuk dimensi *Smart Governance* diatas diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang mengawali pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Governance* di Kabupaten Cilacap. Program Desa 360 yang menyasar ke tata kelola pemerintahan di level desa dengan mengandalkan kemajuan teknologi adalah upaya serius Kabupaten Cilacap untuk mentransformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih *agile* dan responsive dengan memanfaatkan teknologi.

3.7. Quick Wins Smart Branding

Ada banyak program atau kegiatan yang dimiliki Kabupaten Cilacap yang dapat dilakukan guna mendukung pembangunan dimensi *Smart Branding*. Namun, hanya ada satu program yang dipilih sebagai *quick wins* yang diharapkan dapat mengawali pengembangan *Smart City* dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Cilacap. Profil dari program *quick wins* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 127 Profil *quick wins* dimensi *Smart Branding*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	FESTIVAL SENI BUDAYA CILACAP
2. Penjelasan singkat	Merupakan event Festival Seni Budaya kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap (melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan Bidang kebudayaan) dengan ISI Surakarta dan Komunitas Seni Cilacap. Tujuan Kegiatan ini adalah Pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Seni Budaya serta Lembaga Adat dalam mengeksplor potensi lokal, untuk membangun identitas kultural melalui festival budaya. Bentuk kegiatan berupa Seni Pertunjukan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	a. Perencanaan b. 15% c. Saat ini Inovasi sedang dalam proses penganggaran untuk pekerjaan tahun 2024.
4. Manfaat dari inovasi	Menjadi Media Promosi Seni dan Budaya Daerah. Menguatkan Nilai Tradisi Daerah. Pemberdayaan Komunitas Seni dan Budaya.
5. Keunikan / kreativitas	Menampilkan, mempromosikan, serta melestarikan identitas seni budaya daerah dalam bentuk pertunjukan seni.

Aspek	Penjelasan
6. Kemitraan	- Komunitas/pegiat Seni Cilacap Berperan menjadi penampil, serta menjadi bagian dari pengelola "konten" pada Festival Seni Budaya Cilacap, saat ini Progresnya belum dilakukan komunikasi awal terkait kegiatan tersebut sehingga persentasenya masih 0%. - Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Berperan dalam membantu konsep kegiatan Festival Seni Budaya Cilacap serta terbuka kemungkinan untuk menjadi penampil pada kegiatan tersebut. Saat ini Sudah dilaksanakan MoU dibidang Seni Antara ISI Surakarta dan PEMKAB Cilacap, MoU ini sebagai penajakan bagi kegiatan Festival sehingga progresnya sudah 50%. - Diskominfo Berperan sebagai media partner guna menyebarluaskan informasi mengenai festival seni budaya Cilacap. saat ini Progresnya belum dilakukan komunikasi awal terkait kegiatan tersebut sehingga persentasenya masih 0%.
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Dikembangkan menjadi event promosi seni dan budaya tahunan.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Penguatan Sumberdaya baik berupa pendanaan maupun manusia. Penguatan Sumberdaya Pendanaan melalui regulasi atau kebijakan (jika diperlukan), Penguatan Sumberdaya Manusia melalui program pelatihan seni bekerjasama dengan Ahli (ISI Surakarta).
9. Sumber daya yang digunakan	Perencanaan: Ahli bidang Kesenian baik dari Komunitas Seni maupun OPD, Pendanaan melalui APBD. Impelentasi/Eksekusi: Ahli bidang Kesenian baik dari Komunitas Seni maupun OPD, Pendanaan melalui APBD. Publikasi melalui OPD Terkait dan swasta
10. Analisa Risiko	Pendanaan kegiatan Bidang Kebudayaan cenderung belum menjadi prioritas sehingga dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan kegiatan.

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Inovasi program Festival Seni Budaya Kabupaten Cilacap terpilih sebagai *quick wins* untuk dimensi *Smart Branding*. Program tersebut dipilih karena diharapkan mampu menjadi ajang event promosi seni yang mendorong daya saing budaya dan wisata yang dimiliki Kabupaten Cilacap. Melalui program ini, Kabupaten Cilacap diharapkan dapat melakukan *branding* melalui adanya penamipan identitas seni budaya daerah dalam bentuk pertunjukan budaya.

3.8. Quick Wins Smart Economy

Sektor ekonomi memegang peran krusial dalam setiap upaya pembangunan sebuah kota termasuk juga dalam konteks pembangunan *Smart City*. Oleh sebab itu, ketetapan dalam memilik inovasi program untuk dijadikan sebagai *quick wins* pada dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap penting untuk dilakukan. Berikut ini adalah detail profil *quick wins* pada dimensi *Smart Economy*:

Tabel 128 Profil *quick wins* dimensi *Smart Economy*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	CiIOVOP (CILACAP ONE VILLAGE ONE PRODUCT)
2. Penjelasan singkat	Program CiIOVOP ini merupakan inovasi yang diharapkan bisa untuk menangani masalah potensi produk unggulan OVOP (<i>One Village One Product</i>) belum terpusat dan masih menyebar di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas : • Mengidentifikasi potensi produk unggulan daerah di semua desa di Kabupaten Cilacap • Penentuan indikator untuk menentukan desa yang mejadikan sentra produk unggulan daerah
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	a. Kode Status: Dalam siklus manajemen inovasi Program CiIOVOP masih perlu evaluasi dan pengembangan lebih lanjut pada regulasi dan penetapan desa sebagai sentra produk unggulan daerah. Implementasi Inovasi sedang berlangsung. Saat ini CiIOVOP sedang berlangsung sampai tahap penetapan produk b. Persentase Penyelesaian (25%) Progres Tahap penetapan produk unggulan OVOP telah diterbitkan melalui SK Bupati Cilacap Nomor 900/470/32 Tahun 2021 tentang penetapan produk unggulan daerah perdesaan di sentra industri kecil dan menengah melalui pendekatan one village one product di Kabupaten Cilacap. Tahapan : 1. Penyusunan Indikator penentuan OVOP 2. Penyusunan Tim Penetapan OVOP 3. Penetapan OVOP melalui SK Bupati 4. Penetapan Desa OVOP melalui SK Bupati c. Rencana / Langkah kongkrit yang dapat dilakukan dalam 1 tahun kedepan (2024) : 1. Membuat indikator / kriteria dalam pemilihan desa OVOP 2. Assesmet/ survey untuk mengecek lokasi suatu desa apakah dapat dijadikan sebagai desa OVOP 3. Membuat regulasi / SK Desa yang akan ditetapkan sebagai desa OVOP untuk 8 produk OVOP
4. Manfaat dari inovasi	Menciptakan iklim investasi guna memajukan usaha yang mengedepankan produk ciri khas daerah, memiliki daya ungkit ekonomi yang tinggi, melibatkan tenaga kerja yang banyak dan berbasiskan sumber daya lokal, pelaku CiIOVOP mendapatkan kemudahan akses pembiayaan melalui CSR
5. Keunikan / kreativitas	Mengangkat ikon/ ciri khas produk dari masing masing desa, produk produk OVOP ini nantinya akan terpubikasi dan dipasarkan di e-commerce Cilacap (CIBLON)
6. Kemitraan	• BUMDes

Aspek	Penjelasan
	Bekerjasama dengan BUMDes sebagai mitra penggerak dalam pemasaran dan pembiayaan. BUMDes sebagai mitra dalam pengembangan OVOP dapat mengambil peran sebagai agen pemasaran dan penyedia dana bagi produk yang dihasilkan sehingga produksi dapat berkelanjutan. Progres kemitraan 50% • Perguruan tinggi Berperan membantu dalam menentukan indikator penetapan OVOP. Sebagai akademisi, SDM Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberi masukan terkait indikator penentuan OVOP serta mengambil peran dalam pembinaan dan pengembangan OVOP serta transfer pengetahuan. Progres kemitraan 25% • Hotel, Distributor, Toko Modern dan fasilitas publik lainnya yang berkaitan dengan aksesibilitas/ kemudahan akses pemasaran di Sektor pariwisata, Dengan fasilitasi dari perangkat daerah, diharapkan produk yang dihasilkan OVOP mampu memperluas jangkauan pasarnya, menembus berbagai obyek wisata dan pusat perbelanjaan. Progres kemitraan 25%
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	CiLOVOP yang tadinya baru sampai penetapan produk unggulan daerah, dikembangkan sampai dengan penetapan satu desa memiliki satu produk unggulan daerah
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	• Monitoring dan Evaluasi CiLOVOP Oleh Tim Penetapan OVOP secara berkala agar tetap update dengan mengikuti pangsa pasar • Peningkatan kompetensi SDM pengelola OVOP untuk meningkatkan kualitas produk • Penetapan standarisasi produk OVOP
9. Sumber daya yang digunakan	Peralatan produksi, Peralatan distribusi, tenaga ahli pemasaran, media digital, APBD Kabupaten, CSR, APBDes
10. Analisa Risiko	• Keterbatasan Anggaran, • Keberlangsungan Sumber daya alam (bahan baku), Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak melanjutkan usaha, • munculnya pesaing produk sejenis dari luar daerah, • Kesulitan dalam akses distribusi dan pemasaran

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Program inovasi CiLOVOP merupakan upaya serius Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan *Smart Economy*. Melalui program tersebut, desa-desa di Kabupaten Cilacap dapat terfasilitas untuk mengembangkan produknya agar bernilai ekonomis dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah langkah awal yang baik guna menyongsong dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Cilacap.

3.9. Quick Wins Smart Living

Kenyamanan suatu kota sebagai tempat tinggal adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pembangunan sebuah kota. Oleh sebab itu, *quick wins* dimensi *Smart Living* haruslah berdampak positif terhadap kemudahan hidup masyarakat yang tinggal di

kota tersebut. Memperhatikan hal tersebut, berikut adalah detail program yang dipilih sebagai *quick wins* di Kabupaten Cilacap untuk dimensi *Smart Living*;

Tabel 129 Profil *quick wins* dimensi *Smart Living*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	DRIVE THRU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2. Penjelasan singkat	<i>Drive Thru</i> PKB adalah program pengujian kendaraan bermotor dimana pengemudi (pengguna jasa) tetap berada di dalam kendaraannya dalam proses pengujian dan hasilnya dapat langsung diserahkan setelah keluar dari gedung pemeriksaan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	a. Kode status <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor merupakan pengembangan dari Inovasi <i>Smart Kir</i> Pengujian kendaraan bermotor dimana dalam aplikasi <i>Smart kir</i> masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran secara on line, pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah berbasis E-Payment. Inovasi ini saat ini dalam tahapan study banding ke kabupaten / kota yang sudah menerapkan <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor seperti Kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Kota Surakarta. Harapannya ditahun 2024 <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor di kabupaten Cilacap sudah bisa dilaksanakan. b. Persentase Selesai (50%) Karena Inovasi ini merupakan pengembangan dari Inovasi <i>Smart kir</i> maka sebagian komponen pendukung <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor sudah ada dan berfungsi dengan baik. Dalam tahapan <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor dari komponen pendukung yang saat ini sudah ada tinggal menambahkan : 1. Loker Pendaftaran <i>Drive Thru</i> PKB 2. Jalur <i>Drive Thru</i> PKB 3. Loker Penyerahan Produk Layanan (Kartu Uji & Sertifikat uji) c. Rencana / Langkah kongkrit yang dapat dilakukan dalam 1 tahun kedepan (2024) : 1. Membuat SOP <i>Drive Thru</i> Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Pemenuhan Komponen Pendukung <i>Drive Thru</i> PKB berupa Loker dan jalur <i>Drive Thru</i> PKB. 3. Penyediaan SDM 4. Pembuatan SK Penetapan Inovasi <i>Drive Thru</i> PKB. 5. Uji coba <i>Drive Thru</i> PKB dan penerapan <i>Drive Thru</i> PKB
4. Manfaat dari inovasi	a. Bagi Masyarakat Pengguna Layanan • Percepatan pelayanan (memotong waktu antrean) • Keterbukaan pelayanan, menghindari praktik percaloan. b. Bagi Penyelenggara Pelayanan (Dinas Perhubungan) • Optimalisasi lahan parkir (mengurangi penumpukan kendaraan di parkiran) • Peningkatan Kinerja Layanan
5. Keunikan / kreativitas	• Mengadopsi restoran siap saji yang melaksanakan proses <i>drive thru</i>

Aspek	Penjelasan
	Pengemudi tidak perlu turun dari kendaraan saat melaksanakan uji kendaraan.
6. Kemitraan	a. Kementerian Perhubungan Merupakan penjamin mutu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melakukan Akreditasi terhadap Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Melakukan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor untuk menjamin keakurasian dari hasil uji yang dikeluarkan. Progres kemitraan 25% b. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Merupakan organisasi profesi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap SDM Penguji Kendaraan bermotor serta meningkatkan kompetensi SDM Penguji Kendaraan bermotor. Progres kemitraan 25% c. ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat) Ikut mensosialisasikan inovasi yang akan diberlakukan kepada anggotanya yang merupakan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor. Progres kemitraan 25%
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	a. Dengan adanya undang - undang no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana menghapuskan retribusi Pengujian kendaraan bermotor maka penerapan <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor akan sangat mungkin dapat di implementasikan di tahun 2024. b. Inovasi ini dapat diaplikasikan oleh daerah lain sehingga kedepan daerah yang belum menerapkan <i>Drive Thru</i> Pengujian kendaraan bermotor akan ikut menerapkannya di daerahnya.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	a. Menyusun regulasi <i>Drive Thru</i> PKB b. Penyediaan anggaran infrastruktur untuk menunjang <i>Drive Thru</i> PKB c. Berkomitmen mengirimkan SDM untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor setiap tahun. d. Dapat diaplikasikan oleh daerah lain
9. Sumber daya yang digunakan	a. Anggaran pendukung <i>drive thru</i> b. Kebutuhan tenaga IT c. Kebutuhan tenaga penguji kendaraan bermotor
10. Analisa Risiko	a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan informasi penerapan <i>drive thru</i> PKB b. Adanya risiko kecepatan internet yang kurang stabil atau server down c. Pertumbuhan kendaraan bermotor wajib uji yang semakin meningkat menyebabkan permohonan pelayanan <i>drive thru</i> meningkat.

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Program *Drive Thru* PKB pada dimensi *Smart Living* diatas diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi warga Kabupaten Cilacap pada aspek transportasi. Kemudahan adalah poin penting yang diangkat pada program ini. Melalui kemudahan warga dalam mendapatkan perizinan kendaraan bermotor maka hal ini sesuai dengan esensi *Smart Living* yang memang ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat disebut *Smart City*.

3.10. Quick Wins Smart Society

Sebuah kota cerdas harus didukung dengan adanya masyarakat yang cerdas pula. Inilah yang menjadi dasar dari *Smart Society*. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dipilih satu program atau inovasi yang akan menjadi *quick wins* dimensi *Smart Society*. Berikut adalah profil program *quick wins* untuk dimensi *Smart Society*:

Tabel 130 Profil *quick wins* dimensi *Smart Society*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	MARI PERCAYA (MANAJEMEN INFORMASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL CILACAP BERCAHAYA)
2. Penjelasan singkat	MARI PERCAYA merupakan suatu inovasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap melalui Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, ditemukan permasalahan yang perlu diintervensi yaitu belum adanya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial sehingga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap belum cepat, tepat, mudah, dan murah. Sehingga dibentuklah PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial) SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Cilacap Bercahaya, Puskesmas tingkat desa dan SIKS-CB (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya) yang dikemas dalam MARI PERCAYA untuk mendekatkan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan ke tingkat desa.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	b. Kode Status Tahap pengembangan / Sedang berlangsung c. Persentase Selesai 50% d. Penjelasan Dibuatnya Perbup No. 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Puskesmas SLRT Cilacap Bercahaya dan Puskesmas desa/kelurahan. Dibentuknya PUSKESOS SLRT Cilacap Bercahaya tingkat Kabupaten, Puskesmas di 17 desa, Launching dan Penggunaan Aplikasi SIKS-CB. Akan dikembangkan untuk pembentukan Puskesmas tingkat desa di seluruh desa se-Kabupaten Cilacap
4. Manfaat dari inovasi	- Tersedianya layanan terintegrasi yang memudahkan masyarakat menerima layanan - Tersedianya layanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah - Masyarakat dapat mendapatkan rujukan program atau jenis bantuan yang sesuai dan bisa mengentaskan dan membantu persoalannya - Memastikan bahwa negara hadir dalam mengatasi permasalahan masyarakat menuju Cilacap sejahtera adil dan merata
5. Keunikan / kreativitas	Memberikan pelayanan mudah, murah, cepat dan tepat
6. Kemitraan	Kementerian Sosial (Sentra Satria di Batur Raden) : Memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Cilacap bagi yang memenuhi kriteria pelayanan; Melakukan koordinasi terkait permasalahan sosial yang ada di

Aspek	Penjelasan
	wilayah Kabupaten Cilacap; Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan PPKS sesuai dengan hasil asesmen terintegrasi; Membangun sinergitas dalam meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PPKS; Memberikan pelayanan rujukan bagi PPKS dalam memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan keberfungsian sosial PPKS. Progres kemitraan 100 % • Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (PPSLU Dewanata) : landasan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Psikotik di Kabupaten Cilacap. Tujuan : mempermudah pelayanan rehabilitasi sosial bagi Eks Psikotik di Kabupaten Cilacap; memperjelas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Eks Psikotik di Kabupaten Cilacap yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi, meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan Eks Psikotik; meningkatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan yang diperlukan oleh Eks Psikotik; dan membangun sinergitas dalam meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Eks Psikotik dan mencegah kekambuhan. Progres kemitraan 100 % • RSUD Banyumas : Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan pemulasaran, serta ketentuan pelayanan kesehatan bagi PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar) di Kabupaten Cilacap; Progres kemitraan 100 % • RSUD Cilacap: Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan pemulasaran, serta ketentuan pelayanan kesehatan bagi PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar) di Kabupaten Cilacap; Progres kemitraan 100 % • RSUD Majenang : Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan pemulasaran, serta ketentuan pelayanan kesehatan bagi PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar) di Kabupaten Cilacap; Progres kemitraan 100 % • RS Siaga Medika Banyumas : Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan pemulasaran, serta ketentuan pelayanan kesehatan bagi PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar) di Kabupaten Cilacap; Progres kemitraan 100 % • BPJS Kesehatan Kabupaten Cilacap: upaya fasilitasi atas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi penduduk PBI di Kabupaten Cilacap. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk

Aspek	Penjelasan
	memadukan hak, kewajiban, kewenangan, dan peran Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan dalam upaya fasilitasi dan koordinasi atas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi penduduk PBI di Kabupaten Cilacap. Progres kemitraan 100 % • BPS Kabupaten Cilacap : Melakukan koordinasi terkait dengan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Cilacap; Membangun sinergitas dalam rangka meningkatkan kualitas data PPKS dan PSKS sehingga tidak akan terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan statistik serta hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Cilacap. Progres kemitraan 100 % • PMI Kabupaten Cilacap : Pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial korban bencana alam dan/atau sosial, meliputi: saling berkoordinasi secara efektif dalam penanganan bencana saat tanggap darurat; saling memberikan akses informasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Cilacap; dan pelayanan psikososial. Progres kemitraan 100% • BAZNAS Kabupaten Cilacap : Melaksanakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk mengembalikan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meliputi penyediaan bantuan sesuai dengan hasil asesmen PPKS dan asistensi sosial untuk PPKS. Melaksanakan fasilitasi reunifikasi keluarga PPKS meliputi pemberian bantuan akomodasi untuk PPKS dan pemberian bantuan sosial kepada keluarga orang terlantar. Melaksanakan peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi. Progres kemitraan 100 % • Yayasan Tambihul Ghofilin: landasan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap. Adapun tujuannya adalah mempermudah pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap; memperjelas hak dan kewajiban Dinas Sosial Kab. Cilacap dan Yayasan Tambihul Ghofilin dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap pada lembaga rehabilitasi tersebut. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan Eks Psikotik dan ODGJ; Meningkatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan yang diperlukan bagi para Pemerlu; dan membangun sinergitas PARA PIHAK dalam meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu dan mencegah kekambuhan bagi Eks Psikotik; Progres kemitraan 100 % • Yayasan Ar-Ridwan Kalisabuk : landasan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap. Adapun tujuannya adalah mempermudah pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap; memperjelas hak dan kewajiban Dinas Sosial Kab. Cilacap dan Yayasan Ar-Ridwan dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi

Aspek	Penjelasan
	sosial bagi Pemerlu di Kabupaten Cilacap pada lembaga rehabilitasi tersebut. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan Eks Psikotik dan ODGJ; Meningkatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan yang diperlukan bagi para Pemerlu; dan membangun sinergitas PARA PIHAK dalam meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu dan mencegah kekambuhan bagi Eks Psikotik; Progres kemitraan 100 %
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	• Pembentukan PUSKESOS Desa se-kabupaten Cilacap • Pengembangan aplikasi SIKSCB (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya) • Perjanjian Kerjasama dengan stakeholder • Peningkatan Kapasitas SDM Puskesmas-SLRT CB dan Puskesmas CB
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	• Pemeliharaan Aplikasi • Penyediaan Infrastruktur & SDM Tingkat Desa • Optimalisasi sosialisasi menggunakan media sosial (Gembus) Gerakan Mblusukan Sosial • optimalisasi Puskesmas CB sebagai miniatur SLRT
9. Sumber daya yang digunakan	• Pendanaan / Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, Swasta, dan sumber anggaran lain yang sah • SARPRAS & SDM Tingkat Desa
10. Analisa Risiko	• Infrastruktur TI belum memadai • SARPRAS & SDM di desa yang terbatas

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Program MARI PERCAYA yang dipilih sebagai *quick wins* untuk dimensi *Smart Society* dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan umum sesuai kebutuhan mereka. Program ini sangat penting dilakukan mengingat kecepatan dan kemudahan Masyarakat dalam mengakses pelayanan umum dapat menstimulus Masyarakat itu sendiri untuk menjadi proaktif terhadap jalannya pemerintahan sehingga dapat menjadi Masyarakat yang cerdas.

3.11. Quick Wins Smart Environment

Pembangunan *Smart City* harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Untuk itulah, pemilihan program atau inovasi yang dipilih sebagai *quick wins* dimensi *Smart Environment* diperlukan. Program *quick wins* inilah yang diharapkan dapat menjadi program unggulan jangka pendek yang mengawali langkah baik Kabupaten Cilacap untuk lebih lanjut mengembangkan *Smart Environment*. Berikut adalah profil program *quick wins* dimensi *Smart Environment*:

Tabel 131 Profil *quick wins* dimensi *Smart Environment*

Aspek	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	RDF (REFUSED DERRIVED FUEL) CILACAP

Aspek	Penjelasan
2. Penjelasan singkat	RDF (<i>Refused Derived Fuel</i>) merupakan teknologi yang mampu mengolah sampah dari berbagai jenis (organik dan anorganik) untuk menghasilkan energi alternatif pengganti batu bara bagi Industri, karena memiliki kandungan energi setara dengan Batu Bara dalam kategori <i>Low Rank Coal</i> (Batu Bara kelas menengah/rendah). Program RDF dilatarbelakangi oleh komitmen Kabupaten Cilacap untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Harapannya dengan program RDF ini, menjadi langkah awal dari Kabupaten Cilacap untuk melakukan transisi energi dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Dengan begitu, ada dua masalah sekaligus yang ditangani dalam program ini yaitu masalah sampah dan masalah transisi energi.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	- Kode Status: Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung - Presentase Selesai: 100 % - Penjelasan: Saat ini RDF Cilacap sudah berjalan dan sudah dimanfaatkan seperti tujuan semula dan diperlukan pengembangan untuk menangani peningkatan timbunan sampah kedepannya
4. Manfaat dari inovasi	- Masyarakat : Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat ditangani dengan baik - Pemerintah : Pemenuhan target penanganan sampah dan kontribusi terhadap pengurangan emisi - Swasta : Dapat memanfaatkan energi terbarukan untuk pengurangan emisi
5. Keunikan / kreativitas	RDF Cilacap menggunakan Teknologi biodrying dalam metode pengolahan yang dapat mengurangi kadar air dari berbagai jenis sampah (900 ton sampah sehari yg dihasilkan di Cilacap Kota)
6. Kemitraan	- PT Solusi Bangun Indonesia, Beperan sebagai pihak yang membeli bahan bakar hasil RDF untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi industri pengganti batu bara. Saat ini progress kemitraan sudah 100% dimana seluruh output dari RDF telah diserap oleh PT Solusi Bangun Indonesia. - Kelompok pemulung (penerima manfaat) Beperan sebagai pihak yang melakukan sortir sampah sebelum sampah tersebut diolah mesin menjadi bahan bakar. Saat ini progress kemitraan dengan kelompok pemulung sudah 100%.
7.Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	- Replikasi di lokasi lain - Skala Mikro (Rumah Tangga) yang mampu mengolah sampah menjadi barang setengah jadi (ukuran dan kadar air menurun) sebelum masuk ke pengolahan RDF
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	- Habituaasi masyarakat untuk memilah sampah - Pembentukan kelembagaan mandiri sebagai unit pengelola RDF - Dukungan kebijakan terkait standar penggunaan RDF sebagai pengganti batu bara, penetapan nilai kalori batu bara secara real, insentif perusahaan yang memanfaatkan energi terbarukan dari sumber sampah dan Penetapan harga RDF dalam skala nasional

Aspek	Penjelasan
9. Sumber daya yang digunakan	• Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan Swasta • SDM berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia untuk tenaga expert • Sarana pengangkutan sampah diharapkan dilengkapi dengan fasilitas pemilahan
10. Analisa Risiko	• Perilaku masyarakat yang sulit berubah dalam mengelola sampah • Peralatan RDF menggunakan teknologi tinggi sehingga perlu adanya penambahan/modifikasi dengan komponen dalam negeri • Tingkat korosifitas sarpras RDF yang disebabkan kandungan asam (lindi) dari sampah sangat tinggi • Timbulan sampah berupa Limbah B3 dan sampah bukan jenis rumah tangga tidak dapat secara optimal diolah di RDF, maka perlu ada tata kelola tersendiri

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Program RDF Kabupaten Cilacap adalah program unggulan yang sangat bermanfaat dalam rangka meminimalisir penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar. Pemanfaatan RDF adalah langkah awal Kabupaten Cilacap dalam rangka melakukan transformasi di sektor energi menjadi lebih ramah lingkungan. Ini adalah aspek penting yang harus dilakukan ketika sebuah kota hendak bertransformasi menjadi *Smart City*.



BAB 4

MANAJEMEN RISIKO
QUICK WINS

BAB 4. MANAJEMEN RISIKO QUICK WINS

Dalam upaya pembangunan *Smart City* di Kabupaten Cilacap, perlu untuk mengelola risiko yang mungkin muncul selama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, pembuatan kajian manajemen risiko penting untuk dilakukan. Penyusunan kajian manajemen risiko ini penting karena dapat menentukan kesuksesan pelaksanaan dari berbagai program inovasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Analisis ini melibatkan beberapa tahapan seperti identifikasi risiko, yang mencakup pengenalan terhadap potensi ancaman yang dapat menghambat atau merugikan pelaksanaan program-program tersebut, baik dari segi finansial, operasional, maupun dampak sosialnya. Selanjutnya, dilakukan analisis risiko, yaitu penilaian terhadap probabilitas dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan prioritas penanganan. Berikutnya, adalah penanganan risiko melalui penghindaran, pengurangan, pengalihan, atau penerimaan risiko. Terakhir, adalah menetapkan langkah mitigasi risiko sebagai bentuk upaya preventif dan proaktif dalam meminimalisir dampak negatif dari risiko yang mungkin muncul. Keempat tahapan manajemen risiko ini harus dijalankan secara sistematis dan terintegrasi supaya program yang terpilih sebagai *quick wins* pada setiap dimensi *Smart City* di Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan lancar sehingga dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam manajemen risiko ada tahapan pengidentifikasian dan penilaian tingkatan risiko. Penilaian risiko adalah suatu proses terstruktur yang disusun secara sistematis untuk menguraikan dampak risiko terhadap pencapaian dan kinerja suatu program, dengan mempertimbangkan dua elemen utama. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi tingkat probabilitas munculnya risiko. Apabila risiko memiliki probabilitas 1-2 kejadian, maka tingkat probabilitas masuk kategori rendah. Apabila risiko memiliki probabilitas 3-4 kejadian maka dikategorikan sedang. Sedangkan jika risiko memiliki probabilitas lebih dari 5 maka dianggap memiliki probabilitas tinggi.

Tabel 132 Skor Tingkat Kemungkinan Risiko

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode
3	Besar	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

Selanjutnya, adalah menentukan tingkat dampak dari risiko yang mungkin muncul. Apabila dampak risiko yang timbul tidak terlalu signifikan, maka diklasifikasikan sebagai dampak kecil. Jika dampak tersebut memerlukan tindakan lebih lanjut atau berdampak signifikan, maka dikategorikan sebagai dampak sedang. Sementara jika dampaknya sangat serius, maka termasuk dalam dampak yang besar.

Tabel 133 Skor Tingkat Dampak Risiko

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Kecil	Dampak secara finansial atau non-finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	Sedang	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut
3	Besar	Dampak secara finansial atau non-finansial sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

Setelah melakukan skoring tingkat kemungkinan dan tingkat dampak risiko, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat matriks penilaian risiko berdasarkan perhitungan kuantitatif dari dua variabel sebelumnya. Oleh karena itu, analisis risiko melibatkan lebih dari sekadar mengenali dan mengukur risiko. Proses ini juga memerlukan penggabungan informasi, penafsiran data, serta pengambilan keputusan strategis guna mengontrol, mencegah, atau mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi dalam upaya mencapai tujuan program dan proyek pembangunan *Smart City* Kabupaten Cilacap secara umum.

Tabel 134 Matriks Penilaian Risiko

		Tingkat Kemungkinan		
		1	2	3
Tingkat Dampak	1	Rendah	Rendah	Rendah
	2	Rendah	Sedang	Sedang
	3	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

Dengan memperhatikan beberapa aspek diatas, pada bagian selanjutnya akan dipaparkan secara detail analisis manajemen risiko pada setiap dimensi *Smart City* di Kabupaten Cilacap.

4.4. Quick Wins Smart Governance

Program *quick wins* dimensi *Smart Governance* Kabupaten Cilacap adalah program Desa 360. Program ini terpilih sebagai *quick wins* lantaran ditujukan untuk memudahkan pelayanan publik terhadap masyarakat desa yang selama ini dinilai kurang baik. Melalui program ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih leluasa dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan publik di level desa sehingga mereka dapat memanfaatkan segala bentuk pelayanan secara optimal. Dalam rangka mengimplementasikan program tersebut, tahapan analisis manajemen risiko harus dilakukan agar program yang dicanangkan dapat berjalan lancar dan berdampak sesuai tujuan. Tahapan manajemen risiko dimulai dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko terkait kemungkinan dan dampak, serta merumuskan upaya penanganan dan mitigasi dari risiko yang telah teridentifikasi. Detail mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 135 Manajemen Risiko *Quick wins Smart Governance* Sistem Informasi Manajemen Desa

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Bencana alam	Kehilangan data	Lokasi desa rawan bencana	Terciptanya masyarakat yang memiliki resiliensi terhadap bencana	1	3	3 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Cilacap/	1x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, SDM ahli terkait	Penyediaan Back up server untuk Disaster Recovery	SOP Penanganan bencana
				Proses bisnis terhambat						Dinas Kominfo		Anggaran Daerah, Sarana prasarana penunjang mitigasi bencana		
				Keraguan investor untuk menanamkan modal						BPBD		Anggaran Daerah		
2	Structure	SDM / Masyarakat Desa	Masih Rendahnya literasi digital	kurang optimalnya pemanfaatan	Latar belakang pendidikan	Terciptanya masyarakat yang melek	2	3	6 (sedang)	Pemerintah Kabupaten	1x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, SDM	Pelatihan untuk peningkatan	Penyediaan Anggaran

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			pada masyarakat desa	sistem		digital				Cilacap/		sesuai dengan OPD terkait	kompetensi	
		SDM Pemerintahan (Birokrasi)	Masih Rendahnya kompetensi pengelola Sistem Informasi	proses bisnis menjadi terhambat	Kurangnya pelatihan teknis	Terciptanya sistem birokrasi yang lebih efisien				Dinas Pendidikan		Anggaran Daerah, SDM ahli yang mampu memberikan training pengelolaan sistem informasi		
		Keuangan Daerah	Masih belum tersedia anggaran	Tidak terlaksana implementasi inovasi	Refocusing Anggaran	Adanya anggaran yang tepat sasaran dan efektif				BKPPD		Anggaran Daerah		
3	Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Masih belum tersedianya server dan pc/laptop untuk penerapan sistem	proses bisnis menjadi terhambat	Penyediaan TIK belum menjadi prioritas pada beberapa desa	Tersedianya infrastruktur fisik memadai	2	3	6 (Sedang)	Pemerintah Kabupaten Cilacap/	1x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, laptop, server, dan sistem penunjang	Penyediaan Infrastruktur pendukung untuk implementasi inovasi	Penyediaan Infrastruktur
		Infrastruktur Digital	Masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet	proses bisnis menjadi terhambat		Tersedianya infrastruktur digital memadai				Dinas Kominfo		Anggaran Daerah, router wifi untuk jaringan internet		
		Teknologi	Kemungkinan sistem diretas	keamanan data dan	proteksi sistem	Terciptanya sistem						Anggaran Daerah,		

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	transaksi Rendah	kurang memadai dan update	keamanan yang lebih baik						SDM tenaga ahli keamanan siber		
4	Suprastructure	Hukum	Belum ada peraturan daerah terkait program	proses tidak optimal, belum ada legalitas program	komitmen pimpinan daerah	Adanya peraturan daerah yang memadai	1	2	2 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Cilacap	1x dalam 1 tahun	Perbup	Tidak memindahkan jabatan SDM teknis yang bertugas mengelola sistem informasi	Peraturan Bupati
		Politik	Visi dan misi kepala desa berbeda satu dengan yang lainnya	kurangnya komitmen sejumlah kepala desa untuk mendukung program	komitmen dan skala prioritas program kepala desa	Terciptanya visi misi kepala daerah yang tersinkronisasi						Perbup		
		Kelembagaan	Perubahan SOTK, mutasi atau perpindahan jabatan SDM teknis yang mengelola sistem	Penyesuaian SDM baru	Kebijakan organisasi pemerintahan terkait pengembangan karir	Adanya sistem kelembagaan yang lebih baik						Perbup		
5	Culture	Sosial	Masih terbiasa dengan transaksi dan pelayanan publik konvensional	Kurang mengoptimalkan fitur aplikasi	Proses transformasi mindset digital yang lambat di level desa	Terciptanya transaksi pelayanan publik digital yang menjadi budaya masyarakat	2	3	6 (Sedang)	Pemerintah Kabupaten Cilacap	1x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, sistem aplikasi, server	Merubah mindset masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan	Penyediaan Anggaran
			Kekhawatiran	Misinterpretasi		Terciptanya				Dispermad	1 tahun	Anggaran		

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			akan bahaya dalam internet/teknologi informasi	i dan mispersepsi dalam penggunaan aplikasi		masyarakat yang melek digital				es		Daerah, SDM ahli		
			Masih belum memahami etika digital dan rentan penipuan hoaks	Phising dan cybercrime lainnya						Dinas Kominfo	2x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, SDM sesuai OPD berwenang		
		Ekonomi	Perbedaan pendapatan menimbulkan kesenjangan ekonomi	Kerugian ekonomi dan tidak balik modal	Barang tidak terjual atau kurang laku di pasaran	Sejumlah masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan	2	3	6 (Sedang)	Pemerintah Kabupaten Cilacap	1x dalam 1 tahun	Anggaran Daerah, SDM sesuai OPD berwenang,		

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Berdasarkan tabel manajemen risiko untuk program *quick wins* Desa 360 diatas, dapat diamati bagaimana pengidentifikasian risiko dimulai dengan melihat kategorisasi sumber risiko seperti *nature*, *structure*, *infrastructure* dll. Dari pengidentifikasian risiko tersebut, kemudian dilakukan penilaian dari nilai kemungkinan dan dampak yang dihitung untuk menjadi nilai risiko. Berdasarkan identifikasi tersebut, dirumuskan penanganan risiko terkait siapa penanggungjawab dalam pengelolaan risiko tersebut, berapa estimasi waktu atau frekuensi *treatment* yang diberikan untuk menangani risiko, serta yang terakhir adalah merumuskan langkah mitigasi risikonya. Semua itu dilakukan agar program Desa 360 sebagai *quick wins* dimensi *Smart Governance* Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan lancar.

4.5. Quick Wins Smart Branding

Program *quick wins* dari dimensi *Smart Branding* Kabupaten Cilacap adalah program Festival Seni dan Budaya. Program ini ditujukan dalam rangka melestarikan budaya lokal khas Cilacap serta melakukan *branding* untuk Kabupaten Cilacap agar berdaya saing dengan daerah lain. Mengingat bahwa program tersebut berbentuk sebuah event, maka penting adanya analisis manajemen risiko agar acara atau event tersebut dapat berjalan dengan lancar. Detail mengenai tahapan analisis manajemen risiko untuk program Festival Seni dan Budaya *quick wins* dimensi *Smart Branding* dapat dilihat pada tabel berikut yang memaparkan mengenai identifikasi risiko, penilaian risiko, serta langkah apa yang dapat dilakukan untuk menangani jika risiko terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memitigasi (preventif) agar risiko tersebut dapat diminimalisir.

Tabel 136 Manajemen Risiko *Quick wins Smart Branding* Festival Seni Budaya Cilacap

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Kebakaran	Luka	Bahaya bagi para pengunjung kegiatan festival	Terciptanya resiliensi terhadap masyarakat	1	1	1 (Rendah)	Sat pol PP	Setiap ada kebakaran	Anggara n Daerah	Menyediakan mobil pemadam kebakaran	-
			Curah Hujan	Bajir manakala hujan deras	Hujan lebat mengganggu pelaksanaan festival		1	1	1 (Rendah)	Dinas P dan K serta Dinas terkait	1X setahun	Anggara n Daerah	Bekerja sama dengan BMKG untuk memastikan perkiraan cuaca	-
			Sampah	Penyebab penyakit, menyebabk an bau yang tidak sedap	Pembuanga n sampah sembaranga n oleh pengunjung	Sampah guna menjadi bahan baku RDF	2	1	2 (Rendah)	DLH	1x dalam setahun	Anggara n daerah	Menyediakan alat alat dan petugas kebersihan selama pelaksanaan kegiatan	-

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			Sanitasi	kebersihan lingkungan, penyebaran virus penyakit, bakteri	Lingkungan jalan alun-alun tidak higienis	Terciptanya sanitasi yang lebih bersih	1	1	1 (Rendah)	BPBD	1x dalam setahun	Anggara n daerah	Menyediakan toilet portabel	-
			Infeksi Virus, jamur, parasit, bakteri	Flu, Batuk	Lingkungan alun-alun dan jalan yang dilewati tidak higienis	Terciptanya resiliensi masyarakat	1	2	2 (Rendah)	Dinas Kesehatan	1x dalam setahun	Anggara n daerah	Adanya pengecekan kesehatan sebelum melaksanakan festival budaya	-
2	Structure	Keuangan Daerah	Pembiayaan daerah	Terhambatn ya pelaksanaan kegiatan	Rasionalisasi anggaran	adanya prioritas anggaran pada kegiatan seni dan budaya sesuai visi misi pemkab cilacap	2	3	6 (Sed ang)	TAPD Kab. Cilacap	1x dalam setahun	Anggara n daerah	Menjadikan kegiatan Festival menjadi indikator kinerja pada Dinas P dan K	-
		SDM	sedikitnya pendaftar peserta kegiatan festival	Kurang maksimalny a kegiatan festival	Tidak menarik sehingga tidak banyak yang nonton	Meningkatn ya antusias masyarakat	3	3	9 (Tinggi)	Dinas P dan K dan Diisporapa r	1x dalam setahun	Anggara n daerah	penyelenggar aan pelatihan kesenian dan budaya bagi pelaku seni di kabupaten cilacap	-
3	Infrastructure	Teknologi	Listrik	Tidak dapat akses Listrik	Listrik Mati, human eror	Terciptanya sistem	1	1	1 (Rendah)	PLN	1x dalam	Anggara n Daerah	Koordinasi dengan PLN	SOP

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
						kelistrikan yang lebih memadai			dah)		setahun		terkait penyediaan energi listrik saat kegiatan	
		Infrastruktur Fisik	Kemacetan, pengalihan arus lalu lintas	Kemacetan, pengalihan arus lalu lintas	Kecelakaan lalu lintas	optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas	2	3	6 (Sed ang)	Polisi, Sat Pol PP, dishub	1x dalam satu tahun	Anggara n daerah	adanya rekayasa lalu lintas selama penyelenggaraan Festival Budaya	-
		Infrastruktur Digital	pemanfaatan media sosial dan web site untuk publikasi kegiatan festival	Pelaksanaan kegiatan akan viral dan dihadiri masyarakat	Tidak terpublikasin ya kegiatan festival dengan optimal	Terciptanya infrastruktur digital yang memadai	2	2	4 (Sed ang)	Dinas Kominfo	1x dalam satu tahun	Anggara n daerah	Kordinasi dengan Kominfo terkait publikas kegiatan melalui media sosial, website dan radio LPPL Bercahaya Fm	-
4	Suprastructure	Keramaian	Melonjaknya pengunjung/mele bihi kapasitas	Kriminalitas tinggi	Adanya kesempatan bagi pelaku tindak kejahatan selama kegiatan berlangsung	meningkatn ya keramaian di kabupaten cilacap	2	3	6 (Sed ang)	Polisi, Sat Pol PP,	1x dalam satu tahun	Anggara n daerah	Ijin Keramaian	-
5	Culture	Seni dan Budaya	belum mengoptimalkan budaya lokal	tidak maksimal pengangkat	adanya kemiripan kesenian	meningkatn ya budaya lokal	1	1	1 Ren dah)	Dinas P dan K dan Disporapa	1x dalam satu	Anggara n daerah	adanya bimtek untuk menggali	-

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
				an budaya lokal (khusus cilacap)	disetiap daerah	(khusus cilacap)				r	tahun		budaya lokal cilacap	

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pengidentifikasian dimulai dengan memperhatikan sumber atau penyebab risiko yang mungkin muncul dalam program Festival Seni Budaya Kabupaten Cilacap. Faktor *superstructure* berupa risiko kriminalitas, dan faktor *nature* berupa besarnya sampah yang mungkin timbul adalah contoh risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya, upaya perencanaan scenario penanganan risiko seperti dengan memberlakukan izin keramaian, penyelenggaraan pelatihan kesenian, serta memastikan tersedianya alat-alat kebersihan adalah beberapa contoh upaya penanganan risiko yang dilakukan. Langkah-langkah preventif memitigasi risiko juga dirumuskan pada tabel manajemen risiko diatas. Dengan kajian manajemen risiko yang matang, diharapkan event Festival Seni Budaya Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan lancar.

4.6. Quick Wins Smart Economy

Pada dimensi *Smart Economy* Kabupaten Cilacap, program CILOVOP (*Cilacap One Village One Product*) terpilih sebagai program yang akan dijadikan *quick wins*. Program CILOVOP ini adalah bentuk keseriusan Kabupaten Cilacap dalam mengusahakan peningkatan kualitas ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan melalui produktivitas desa. Dengan program ini, diharapkan setiap desa di Kabupaten Cilacap dapat memiliki produk unggulan yang bernilai ekonomis dan dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Namun, program ini hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila risiko yang mungkin muncul dapat diatasi melalui upaya manajemen risiko yang baik. Untuk itu, pada tabel berikut ini akan dipaparkan mengenai aspek-aspek manajemen risiko untuk program CILOVOP.

Tabel 137 Manajemen Risiko Quick wins Smart Economy CILOVOP

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggug Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuha n Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkunga n	Keberlangsungan ketersediaan bahan baku	Mengganggu proses produksi	belum optimalnya pemanfaatan lahan kosong	Optimalnya penggunaan lahan kosong	1	3	3 (Rendah)	Dinas lingkungan Hidup , Dinas Pertanian, BPBD	2024	Anggaran Daerah	-	sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan kosong
			Limbah Industri	pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap makhluk hidup	belum terkelola dengan baik limbah industri yang dihasilkan	Terciptanya sistem sanitas limbah yang lebih baik	2	1	2 (Rendah)		2024		pemanfaatan teknologi pengolahan limbah	-
			Musim yang tidak menentu	produktivitas menurun	ketergantungan terhadap cuaca	Meningkatnya produktivitas yang tidak tergantung cuaca	1	2	2 (Rendah)		2024		Penyediaan peralatan pendukung usaha (contoh : oven)	-
			Bencana Alam (banjir, gempa bumi)	rantai produksi terhenti	Kondisi geografis kabupaten cilacap rawan bencana	Terciptanya resiliensi masyarakat	1	3	3 (Rendah)		2024		-	Sosialisasi terkait pemilihan lokasi usaha
2	Structure	SDM	Tidak adanya regenerasi pelaku usaha	tidak ada keberlangsungan usaha (sentra industri)	kurangnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk melanjutkan usaha	Terciptanya jiwa wirausaha masyarakat	1	3	3 (Rendah)	Disnakerin	2024	SDM, Anggaran Daerah	-	Sosialisasi Kewirausahaan
			Kurangnya	menurunnya	kurangnya	Meningkat	2	1	2		2024	SDM,	-	Pemberian

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportuni ty (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risik o	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			keterampilan pelaku usaha	daya saing produk, kualitas produk menurun, variasi produk yang dihasilkan terbatas	pengetahuan , inovasi, dan pemanfaatan produk	nya daya saing dan keterampilan pengusaha			(Rendah)			Anggaran Daerah		pelatihan/ bimtek kepada pelaku usaha
3	Infrastructure	Infrastruktur Fisik	Kesulitan dalam akses distribusi	Mengganggu proses distribusi produk	Lokasi usaha, transportasi	Terciptanya akses distribusi yang memadai	1	1	1 (Rendah)	DPUPR, Disnakerin	2024	Penyediaan Anggaran Daerah	Peningkatan infrastruktur dan penyediaan jasa transportasi yang lebih banyak	-
		Teknologi	keterbatasan pemanfaatan alat produksi	Tidak tercapainya kapasitas produksi , kualitas produk tidak konsisten	Minimnya modal, kurangnya pengetahuan , skill dalam pemanfaatan -alat produksi	Optimalnya pemanfaatan akses produksi	2	2	4 (Sedang)		2024	Penyediaan Anggaran Daerah	Pemberian akses modal, pemberian peralatan produksi	Pelatihan penggunaan peralatan produksi
			kurangnya pemanfaatan teknologi informasi	minimnya akses masyarakat dalam mengenal produk CiiOVOP	minimnya pengetahuan dan peralatan komunikasi dan penunjangnya dari pelaku	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	2	2	4 (Sedang)		2024	Penyediaan Anggaran Daerah)	-	Pemberian pelatihan digital

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
					Usaha									
4	Suprastructure	Kelembagaan	Minimnya dukungan dari OPD dan Lembaga Desa	Program CiOVOP tidak berjalan dengan maksimal, tidak peningkatan secara signifikan	kebijakan skala prioritas, anggaran	Sinergitas antar OPD yang lebih baik	1	2	2 (Rendah)	Dinas teknis terkait program CiOVOP, (Disnakeri n,Bappeda)	2024	Anggaran, Koordinasi, sinergitas antar OPD terkait	-	Peningkatan sinergitas antar OPD dan kelembagaan terkait
		Hukum	Tidak adanya payung hukum untuk pelaksanaan program CiOVOP	Tidak adanya jaminan keberlangsungan program CiOVOP dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat	Kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat dan stakeholder	Terbentuknya payung hukum yang memadai	1	3	3 (Rendah)		2024		-	penyusunan produk hukum lebih lanjut untuk menjamin program CiOVOP
I	Culture	Sosial	sulitnya mengubah mindset masyarakat untuk mendukung program CiOVOP	Keberlangsungan Program CiOVOP terganggu	kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat / turun temurun, pola pikir yang masih konvensional	Terciptanya mindset masyarakat yang lebih maju dan mendukung CiOVOP	1	2	2 (Rendah)		2024	Penyediaan Anggaran	-	Sosialisasi mengenai manfaat program CiOVOP
		Ekonomi	minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap	mengurangi volume penjualan, minat pembeli	kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat,	Meningkatnya transaksi elektronik	2	1	2 (Rendah)		2024	Penyediaan Anggaran	menjalin kemitraan dengan pihak	Pemberian pelatihan dan sosialisasi

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			pemanfaatan transaksi elektronik	turun	tidak mau mengikuti perkembangan zaman	bagi pelaku usaha							marketplace lokal maupun nasional	terkait manfaat digital payment
			minimnya minat investor pada program CILOVOP	keterbatasan akses permodalan	Tidak adanya payung hukum, kurangnya promosi ke luar daerah	Meningkatnya iklim investasi untuk program CILOVOP	1	1	1 (Rendah)	Disnakerin, DPMPPTSP, Pemerintah Kabupaten Cilacap	2024	Penyediaan Anggaran	-	melakukan promosi program CILOVOP melalui forum bisnis, pameran nasional maupun internasional, peningkatan kualitas produk yang berdaya saing

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023-

Tabel analisis manajemen risiko untuk program *quick wins* CILOVOP diatas memaparkan upaya pengidentifikasian risiko apa saja yang mungkin muncul dalam implementasi pengembangan program CILOVOP. Risiko dari faktor teknologi seperti keterbatasan alat dan keterbatasan pemanfaatan teknologi menjadi risiko dengan nilai terbesar. Selain mengidentifikasi risiko, juga dilakukan langkah strategis untuk penanganan risiko seperti siapa yang bertanggung jawab, estimasi waktu atau frekuensi, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Terakhir, upaya mitigasi risiko melalui instrumen struktural berupa kebijakan atau aturan pendukung dan instrumen non-struktural seperti sosialisasi dan pelatihan juga dirumuskan pada tabel diatas untuk kelengkapan analisis manajemen risiko untuk program CILOVOP.

4.7. Quick Wins Smart Living

Pada dimensi *Smart Living* Kabupaten Cilacap, program *Drive Thru* Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terpilih menjadi program *quick wins*. Program ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat yang hendak melakukan pengujian kendaraan bermotor agar bisa lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudahan pelayanan ini sejalan dengan esensi *Smart Living* yang berfokus pada kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Untuk itu, dibutuhkan adanya kajian analisis manajemen risiko untuk program *Drive Thru* PKB agar program ini dapat terealisasi dengan baik. Pada tabel dibawah ini akan dipaparkan dengan jelas analisis manajemen risiko untuk program *Drive Thru* PKB.

Tabel 138 Manajemen Risiko *Quick wins Smart Living Drive Thru* PKB

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Kebisingan dan Polusi Udara	Penyakit Pernapasan	Emisi gas buang dari kendaraan bermotor	Penekanan polusi udara	3	3	9 (Tinggi)	Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait	2 x setahun	SDM yang terdampak dan anggaran APBD	Petugas Menggunakan APD	Prosedur keselamatan kerja
				Gangguan Pendengaran	Suara mesin dan klakson kendaraan	Mengetahui kinerja mesin dan konsumsi bahan bakar	3	2	6 (Sedang)				Penyediaan Multivitamin	-
2	Structure	SDM	Terganggunya kesehatan	Penyakit stroke, jantung, paru-paru, keracunan CO ₂ (hipoksia)	Polusi udara	Meningkatnya sarana kesehatan untuk masyarakat	3	3	9 (Tinggi)	Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan dan Instansi	2 x setahun	SDM yang terdampak dan anggaran APBD	Anggaran Cek kesehatan rutin	-

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			Kecelakaan Kerja	Cacat tubuh dan kematian	Kelalaian dalam bekerja	Terciptanya SOP yang memadai	1	1	1 (Rendah)	terkait			Pembuatan SOP	-
3	Infrastruktur	Ketersediaan	Jaringan Internet down	pelayanan tertunda	putusnya kabel jaringan internet	Terciptanya jaringan internet yang lebih baik	1	3	3 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait	2 x setahun	SDM yang terdampak dan anggaran APBD	Penyediaan wifi portabel	Koordinasi dengan Diskominfo
			Kerusakan peralatan uji	pelayanan tertunda	Bencana alam, human error dan kurangnya perawatan	Terciptanya SOP yang memadai	1	3	3 (Rendah)				Maintenance dan kalibrasi rutin peralatan uji	SOP dan pelatihan singkat menanggapi keadaan darurat
			Kerusakan Aplikasi SIMPKB	pelayanan tertunda	Human error, server down	Sistem aplikasi yang lebih baik	1	2	2 (Rendah)				Maintenance rutin dan update aplikasi	-
		Keamanan	Jaringan terganggu karena gangguan dari eksternal	Aplikasi tidak dapat diakses	Serangan hacker	Terciptanya sistem keamanan digital yang lebih baik	1	2	2 (Rendah)				Memperkuat keamanan siber	-

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
4	Suprastructure	Hukum	Pelayanan belum berjalan secara maksimal	Kesulitan di proses pembayaran	Perda belum tentu selesai tahun depan	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1	1	1 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait	2 x setahun	SDM yang terdampak dan anggaran APBD	Percepatan pembuatan Perda Retribusi	Peraturan Bupati
5	Culture	Sosial	Masyarakat belum terbiasa dengan program Drive Thru PKB	Program drive thru tidak berjalan lancar	Masyarakat kurang paham	Masyarakat dapat terbiasa dengan program drive thru	1	1	1 (Rendah)	Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait	2 x setahun	SDM yang terdampak dan anggaran APBD	Sosialisasi sistem drive thru kepada masyarakat	SOP alur Sistem drive thru PKB
			masyarakat kurang paham teknologi online	Program drive thru tidak berjalan lancar	Masyarakat kurang paham	Masyarakat dapat memahami program drive thru	1	1	1 (Rendah)				Sosialisasi pendaftaran online drive thru PKB	-

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Hasil analisis manajemen risiko pada table diatas menjelaskan mengenai tahapan manajemen risiko yang dilakukan untuk mengkaji program *quick wins Drive Thru PKB*. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, ditemukan bahwa risiko polusi memiliki nilai paling tinggi. Selain dilakukan identifikasi risiko, juga dilakukan perumusan langkah penanganan risiko untuk menanggulangi dampak risiko yang telah teridentifikasi serta juga merumuskan Langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Analisis manajemen risiko untuk program *Drive Thru PKB* ini penting mengingat program ini berkaitan erat dengan mesin dan transportasi yang memiliki risiko tinggi. Namun, apabila dapat dikelola dengan baik, maka program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan hidup Masyarakat Kabupaten Cilacap.

4.8. Quick Wins Smart Society

Program MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya) terpilih sebagai program *quick wins* untuk dimensi *Smart Society*. Program MARI PERCAYA terpilih sebagai upaya untuk mewujudkan *Smart Society* melalui pelayanan kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, dilakukan pengintegrasian pelayanan kepada masyarakat terkait berbagai program dan layanan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam bentuk aplikasi. Untuk itu, diperlukan adanya analisis manajemen risiko yang memadai agar program dengan tujuan besar ini dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai analisis manajemen risiko untuk program MARI PERCAYA.

Tabel 139 Manajemen Risiko *Quick wins Smart Society* MARI PERCAYA

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risiko	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	TIDAK ADA RISIKO KATEGORI NATURE												
2	Structure	SDM	Kualitas dan kuantitas SDM di desa terbatas	Pelayanan terhambat	Belum ada Bimtek tentang Aplikasi SIKS CB, Belum semua desa/kelurahan tersedia SDM secara khusus yang mendukung Puskesmas SLRT	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas SDM di Desa	2	2	4 (Sedan g)	Kades	Novemb er 2023	Anggara n Daeraj	Pelaksanaan bimtek; pembuatan modul dan video tutorial aplikasi SIKS CB	Perbup Nomor 21 tahun 2023 tentang Pembentuka n Puskesmas SLRT Cilacap Bercahaya ke desa/kelurah an
		Keuangan	Belum teranggarkan di setiap desa/kelurahan	Terbatasnya infrastruktur yang mendukung Puskesmas	Puskesmas SLRT kurang terlembaga	Adanya anggaran yang memadai	3	1	3 (Renda h)	Pemerinta h dan Dinas / Desa terkait	2024	Anggara n	Pembentuka n kelembagaan Puskesmas SLRT	Perbup Nomor 21 tahun 2023 tentang Pembentuka n Puskesmas -

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunit y (Risiko Positif)	Nilai Kemungkin an	Nilai Dampa k	Nilai Risiko	Penanggu ng Jawab	Target Waktu / Frekuen si	Kebutuh an Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
														SLRT Cilacap Bercahaya
3	Infrastructur e	Infrastrukt ur Fisik	Belum ada pelayanan khusus untuk SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Pelayanan terhambat	Belum tersedia anggaran di desa/kelurah an	Optimalnya pelayanan terpadu melalui infrastruktu r yang memadai	3	1	3 (Renda h)	Ka Dinsos dan Kades/ Lurah	2024	Anggara n	Pembentuka n pelayanan khusus SLRT	Perbup Nomor 21 tahun 2023 tentang Pembentuka n Puskesmas SLRT Cilacap Bercahaya
		Infrastrukt ur Digital	Jaringan internet yang belum merata di semua desa (5% masih blank spot)	Pelayanan terhambat	Penyediaan layanan internet dari kominfo baru mencapai tingkat kecamatan, kondisi geografis beberapa desa yang sulit akses sinyal internet	Terciptanya jaringan internet yang lebih baik	1	3	3 (Renda h)	Pemerinta h Daerah, swasta	2030	Anggara n	Jaringan internet menggunakan provider swasta sebelum ada infrastruktur dari Kominfo	Sudah megirimkan surat kepada BAKTI KOMINFO untuk pembanguna n 2 BTS, dari DISKOMINF O CILACAP
		Teknologi	Aplikasi SIKS CB yang belum maksimal/sta bil dan masih butuh pengembang	Aplikasi tidak bisa digunakan secara maksimal	Aplikasi masih tahap beta, cloud storage yang disediakan kominfo masih sedikit	Optimalisasi kinerja aplikasi	2	2	4 (Sedan g)	Ka Dinsos dan Ka Kominfo	2024	Anggara n Daerah	Pengembang an aplikasi SIKS CB menjadi versi final	-

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
			an											
4	Suprastructure	Hukum	Sosialisasi Perbup Nomor 21 tahun 2023 tentang Pembentukan Puskesmas SLRT Cilacap Bercahaya ke desa/kelurahan yang belum maksimal	Pemerintah Desa/kelurahan serta masyarakat belum memahami manfaat Program Puskesmas SLRT secara keseluruhan	Belum teragendakan sosialisasi Perbub di di semua desa/kelurahan	Terbentuknya produk hukum yang dipahami masyarakat	1	1	1 (Rendah)	Ka Dinsos	November 2023	Anggaran Daerah	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-
5	Culture	Sosial	Masyarakat belum melek IT	Aplikasi SIKS CB belum digunakan	Belum teragendakan sosialisasi Perbub di di semua desa/kelurahan	Masyarakat lebih melek digital	2	3	6 (Sedang)	Dinas Kominfo	3x dalam setahun	Anggaran daerah	-	Pelaksanaan sosialisasi

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Berdasarkan tabel analisis manajemen risiko untuk program MARI PERCAYA sebagai *quick wins* dimensi *Smart Society* diatas dapat diketahui bahwa risiko dengan nilai terbesar adalah rendahnya kualitas dan kuantitas SDM serta belum optimalnya aplikasi yang tersedia. Setelah melakukan identifikasi risiko, pada tabel diatas juga dilakukan pengkajian terkait langkah penanganan risiko yang sebelumnya telah teridentifikasi. Perumusan langkah penanganan ini penting agar risiko-risiko yang muncul dapat ditangani sehingga dampak yang ditimbulkan dapat terminimalisir. Selain itu, juga dilakukan perumusan langkah mitigasi risiko agar meminimalisir terjadinya risiko sehingga belum sempat memberikan dampak negatif. Apabila

manajemen risiko ini dilakukan dengan baik, harapannya realisasi program MARI PERCAYA dapat terlaksana dan berdampak signifikan terhadap masyarakat.

4.9. Quick Wins Smart Environment

Pada dimensi *Smart Environment*, program RDF (*Refused Derived Fuel*) Kabupaten Cilacap terpilih sebagai program *quick wins*. Program RDF adalah program unggulan Kabupaten Cilacap dalam rangka mengelola sampah sekaligus upaya untuk transformasi energi terbarukan. Melalui RDF, limbah sampah rumah tangga dapat diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang dapat dimanfaatkan oleh industri. Dengan ini, sampah dapat bernilai ekonomis dan sekaligus juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Inilah yang membuat program RDF sangat relevan untuk menjadi *quick wins* pada dimensi *Smart Environment*. Agar program ini dapat berjalan optimal tanpa banyak hambatan, maka dilakukan analisis manajemen risiko. Pada tabel dibawah ini dipaparkan analisis manajemen risiko pada program RDF yang menjadi *quick wins*.

Tabel 140 Manajemen Risiko Quick wins Smart Environment Refused Derived Fuel (RDF)

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (nilai kemungkinan x nilai dampak)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	Nature	Lingkungan	Penolakan Masyarakat	Jalur distribusi dan operasional RDF tidak berjalan optimal	Persepsi Bau dari Timbulan Sampah	Masyarakat dapat menerima RDF	1	1	1 (Rendah)	Dinas Lingkungan Hidup	2023-2025	Anggaran yang cukup dari APBD	1. Membuat akses transportasi menuju TPST RDF yang tidak melewati kawasan pemukiman 2. Memperbanyak tanaman yang mampu meminimalisir bau dari timbulan	1. Tata kelola penanganan sampah dengan mengupayakan pengangkutan sampah tidak lebih dari tiga hari ditingkat distribusi dan ditingkat

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (nilai kemungkinan x nilai dampak)	Penanggungan Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
													sampah 3. Memperbanyak armada bak penngangkut sampah menggunakan penutup	peghasil sampah (Rumah Tangga) dan dilegalkan dalam bentuk regulasi 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait optimalisasi masyarakat sekitar lokasi untuk mendapat nilai ekonomi dari sampah yang masuk ke RDF
2	Structure	SDM	Transfer knowladge dari offtaker/PT. SBI berjalan lambat	Operasional RDF terhambat	karena kekurangan SDM pengelola RDF	Terciptanya transfer knowledge yang memadai	2	2	4 (Sedang)	Dinas Lingkungan Hidup dan Offtaker	2023-2028	Peningkatan kualitas SDM pengelola RDF	1. Perekrutan Tenaga Kerja yang spesifik menangani RDF 2. Takeover Tenaga PT SBI sebagai operator	1.Perbaikan MoU untuk lebih mengoptimalkan proses transfer knowladge

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (nilai kemungkinan x nilai dampak)	Penanggungan Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
													RDF	
3	Infrastruktur	Sarpras	Komponen unit pengolahan RDF semua berasal dari komponen import	Terhambatnya pemeliharaan komponen peralatan RDF	Ketergantungan terhadap komponen peralatan import	Sarana prasana yang lebih optimal dan memadai	1	1	1 (rendah)	Dinas Lingkungan Hidup	2023-2028	Anggaran yang cukup dari multi pihak	Adopsi teknologi peralatan import menggunakan komponen lokal/dalam negeri	Pemilahan sampah yang masuk dalam pengolahan RDF dimulai dari sumbernya
4	Suprastruktur	Kelembagaan	Nilai Jual RDF belum dapat digunakan untuk operasional RDF secara mandiri	Ketergantungan terhadap APBD	Belum adanya Kelembagaan mandiri yang mengelola RDF	Operasional RDF dapat berjalan secara mandiri	1	1	1 (rendah)	Dinas Lingkungan Hidup	2023-2028	Anggaran dari APBD dan Perekrutan SDM	Kelembagaan Mandiri	Regulasi terkait pembentukan lembaga mandiri pengelola RDF
5	Culture	Sosial	Sampah tidak terpilah	Meningkatnya volume timbunan sampah	Perilaku masyarakat yang sulit berubah dalam mengelola sampah	Masyarakat dapat lebih aktif dalam memilah sampah	2	2	2 (rendah)	Dinas Lingkungan Hidup	2023-2025	Anggaran yang cukup dari multi pihak	Optimalisasi pengelolaan bank sampah	Regulasi larangan membuang sampah

Sumber: Hasil Bimtek 3, 2023

Tabel analisis manajemen risiko diatas menjelaskan beberapa tahapan manajemen risiko mulai dari tahapan identifikasi risiko. Risiko berupa lambatnya *transfer knowledge* SDM pengelola RDF teridentifikasi sebagai risiko dengan nilai paling tinggi. Selanjutnya, juga dilakukan perumusan langkah penanganan risiko untuk menanggulangi dampak ketika risiko yang teridentifikasi benar terjadi. Ini penting dilakukan mengingat program RDF memanfaatkan teknologi dan alat berat yang banyak mengundang risiko. Selain itu, juga dilakukan perumusan langkah strategis untuk melakukan mitigasi risiko agar risiko yang teridentifikasi tidak terjadi. Analisis manajemen risiko ini sangat krusial dalam kesuksesan program RDF sebagai *quick wins*

dimensi	<i>Smart</i>	<i>Environment</i>	Kabupaten	Cilacap.



BAB 5

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Buku keempat *quick wins* ini menjelaskan secara ringkas tentang program inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Cilacap yang disiapkan dalam rangka menyongsong *Smart City*. Inovasi-inovasi ini terpilih dari berbagai program dan kegiatan jangka pendek, yang memiliki ciri mudah dan cepat diimplementasikan, serta dapat menghasilkan dampak yang signifikan terutama bagi masyarakat. Tiap dimensi *Smart City* mengusulkan setidaknya satu *quick wins* yang harapannya dapat segera direalisasikan sesuai dengan perencanaannya.

Melalui buku ini, diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan pemahaman umum tentang program-program jangka pendek yang dimiliki Kabupaten Cilacap untuk menyongsong *Smart City*. Harapannya, buku ini menjadi pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam bersinergi bersama *stakeholders* lainnya dalam mewujudkan cita-citra transformasi *Smart City* Kabupaten Cilacap.

Sebagai Penutup, kita sambut masa depan gemilang bagi Kabupaten Cilacap sebagai *Smart City* sesuai dengan visi dan misinya untuk memberdayakan masyarakat, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Dengan semangat yang tinggi dan kerja sama yang erat, kita akan mengubah visi menjadi kenyataan dan membawa Cilacap menjadi contoh yang inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO